SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

BAB II
RKPD TAHUN 2027

Pasal 2

(1) RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 3

RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
b. penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027; dan

c. penyusunan rancangan KUA dan PPAS dengan DPRD.

Pasal 4

RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi Daerah;
c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g. penutup.

Pasal 5

Ketentuan mengenai RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Juli 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

KURNIADI MAULATO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SRI SETYOKO
NIP. 19741107 200604 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PROVINAI JAWA TENGAH

2026

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2027 diarahkan pada upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dengan menekankan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu, penyusunan RKPD juga dengan memperhatikan pelaksanaan pembangunan kabupaten dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan/kewilayahan dalam perencanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2026 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran RPD. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD).
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 disusun menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu, penyusunan RKPD juga dengan memperhatikan pelaksanaan pembangunan kabupaten dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan/kewilayahan dalam perencanaan.

RKPD Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan dokumen RKPD tahun berjalan (tahun 2026), isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah,

amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada tahun 2027, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun 2026, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2027 diselaraskan dengan berbagai kebijakan nasional diantaranya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's) dan tindak lanjut Proyek Strategis Nasional di Karanganyar.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025. RKPD Tahun 2027 mendukung pula upaya pencapaian Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan–undangan.

Adapun prinsip penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan dilakukan melalui keterpaduan pendekatan diantaranya melalui pendekatan politik, teknokratik, participatory, *comprehensiveness*, serta proses *buttom up* dan *top down planning*. Proses *top down planning* merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan nasional dan usulan kebutuhan dana kepada Kementrian/Lembaga maupun dari Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Sedangkan proses *buttom up planning* berarti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi keleluasaan untuk merancang kegiatan-kegiatan pembangunan demi tercapainya sasaran pembangunan kepada Pemerintah Pusat.

2. Prioritas dan sinergitas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdistribusikan dengan mempertimbangkan prioritas dan menciptakan sinergitas antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2027 juga merupakan proses penyatuan persepsi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten tentang prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Mempertimbangkan kondisi eksternal. Tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan kondisi eksternal yang memberikan pengaruh cukup kuat terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah seperti kondisi politik, hukum, ekonomi, serta budaya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170));
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181).

1.3 Hubungan antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan RKPD. RPJPD menjelaskan visi, misi, arah dan sasaran

pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun, dijabarkan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen RPJMD. RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan tahunan dalam bentuk dokumen RKPD. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

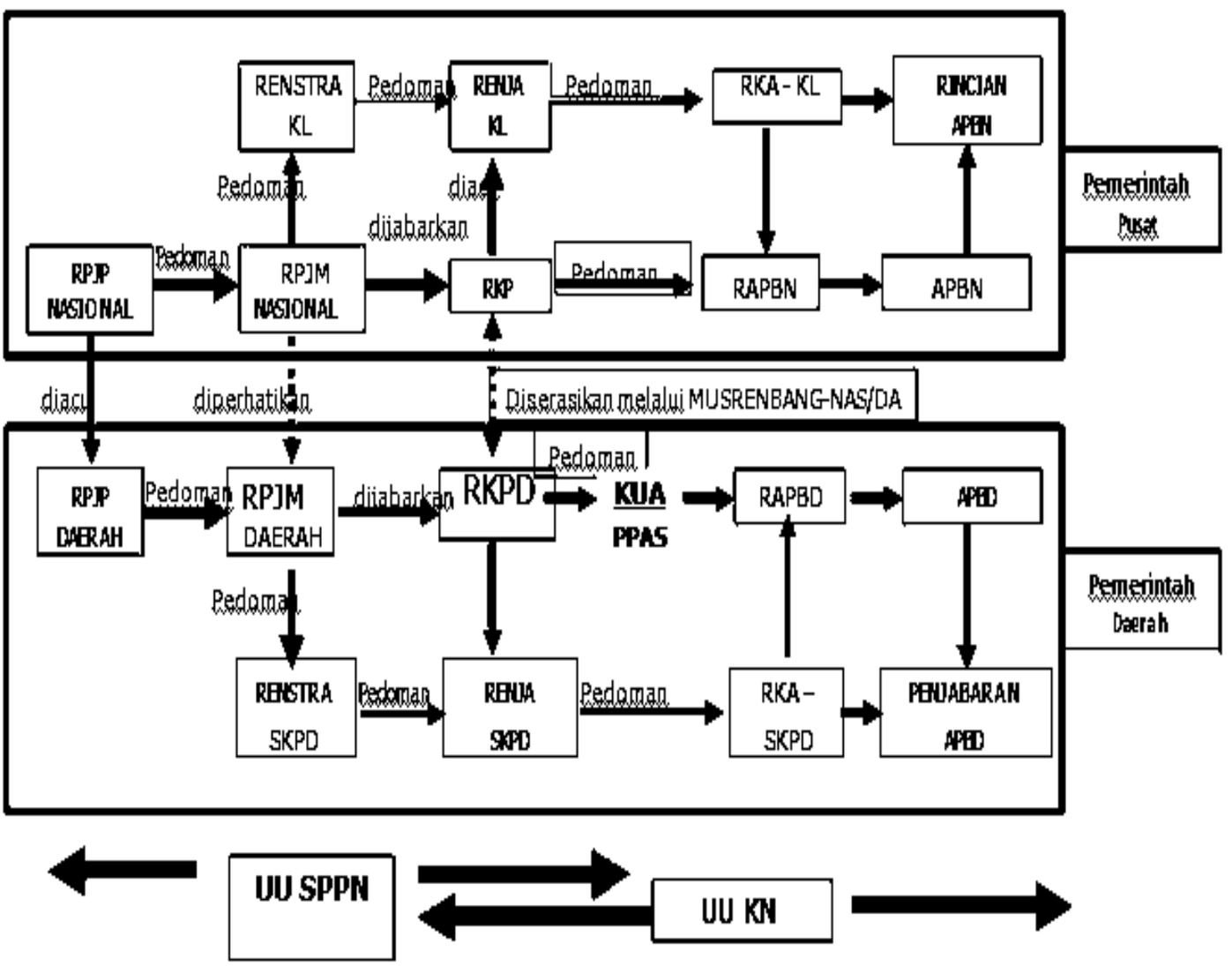

Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 1.1.
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 sebagai rencana tahunan, mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, arahan kebijakan nasional dalam RKP Tahun 2027, dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 serta beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat multi sektoral antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar, RTRW Provinsi Jawa Tengah, Prinsip SDGs *(Sustainable Development Goals/ SDGs)* Tahun 2016-2030, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS). Indikator SPM di 6 urusan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal akan

dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagaimana dalam peraturan menteri dimasing masing urusan. Sehingga RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional Tahun 2027 dan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan secara nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2027.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Karanganyar;
2. Tersedianya dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2027;
3. Tersedianya pedoman dan bahan sinkronisasi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2027; dan
4. Tersedianya bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2027.

1.5 Sistematika RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 disusun berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelakan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, yang meliputi :

- Latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RKPD Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD.
- Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
- Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027.
- Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam RKPD Tahun 2027.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum daerah yang meliputi :

- Evaluasi capaian kinerja daerah berupa IKU dan IKD tahun 2025 (capaian tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029)

- Evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan cukup dimuat dalam laporan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
- Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025.
- Rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, evaluasi hasil RKPD Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
- Telaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah.
- Inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Penyajian data didasarkan pada e-walidata SIPD dan sumber data lainnya.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran keuangan daerah yang meliputi :

- Arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di daerah.
- Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025.
- Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan proyeksi dalam RPJMD Tahun 2025-2029, kinerja keuangan tahun 2023-2025, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis (proyeksi keuangan tidak harus sama dengan RPJMD Tahun 2025-2029).
- Pendanaan non-APBD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan :

- Tujuan dan sasaran RKPD (wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029).
- Penentuan target tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 (target IKU/IKD dapat melebihi/berkurang dari target RPJMD Tahun 2025-2029).
- Tema dan fokus pembangunan yang didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun 2027.
- Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
- Prioritas Pembangunan Daerah mempertimbangkan ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran (IKU/IKD), tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.
- Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.
- Program prioritas RKPD Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan evaluasi efektivitas program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga sudah diselaraskan dengan RKP Tahun 2027, tema RKPD 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan :

- Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
- Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM, dan tematik lainnya sesuai konteks daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi :

- Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
- Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu 76.778,64 Ha atau 2,34% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.280.069 Ha) dan 0,04% dari total luas Indonesia (190.500.000 Ha). Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa, 932 Dusun, 66 Dukuh, 1.961 Rukun Warga (RW) dan 6.490 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tawangmangu merupakan terbesar yang mencapai luas sebesar 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu merupakan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha. Pembagian wilayah administratif dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Pembagian Wilayah Adminsitrasi dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan	Desa	Dusun	Dukuh	RW	RT
1.	Jatipuro	3.436,50	0	10	64	0	115	302
2.	Jatiyoso	6.716,49	0	9	59	0	120	285
3.	Jumapolo	5.567,02	0	12	86	0	114	314
4.	Jumantono	5.355,44	0	11	58	0	113	321
5.	Matesih	2.626,63	0	9	61	0	125	327
6.	Tawangmangu	7.003,16	3	7	30	11	101	347
7.	Ngargoyoso	6.533,94	0	9	47	0	108	296
8.	Karangpandan	3.411,08	0	11	59	0	122	292
9.	Karanganyar	4.302,64	12	0	0	55	162	569
10.	Tasikmadu	2.759,73	0	10	58	0	89	459
11.	Jaten	2.554,81	0	8	46	0	114	587
12.	Colomadu	1.564,17	0	11	50	0	119	519
13.	Gondangrejo	5.679,95	0	13	73	0	121	515
14.	Kebakkramat	3.645,63	0	10	60	0	124	396
15.	Mojogedang	5.330,90	0	13	84	0	159	467
16.	Kerjo	4.682,27	0	10	63	0	92	282
17.	Jenawi	5.608,28	0	9	34	0	63	212
Total		76.778,64	15	162	932	66	1.961	6.490

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi, Prov. Jawa Timur
- Sebelah Selatan: Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta

Batas wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

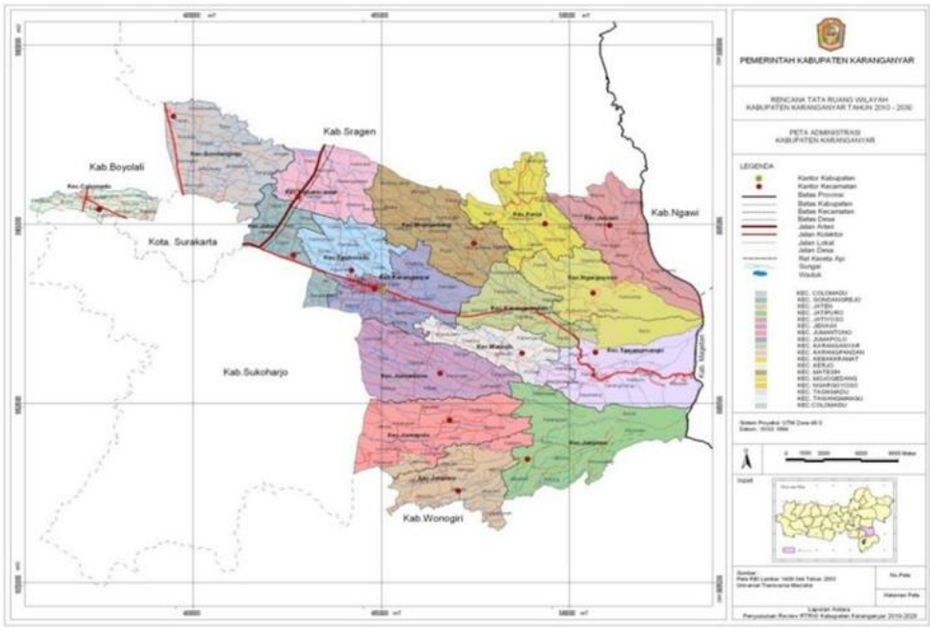

Sumber: RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar

Rata–rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat Celcius.

Wilayah terendah berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 2000 mdpl.

Tabel 2.2.
Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
1	Jatipuro	500	1.200	770
2	Jatiyoso	800	1.550	950
3	Jumapolo	340	580	470
4	Jumantono	300	600	450
5	Matesih	380	750	450
6	Tawangmangu	800	2.000	1.200
7	Ngargoyoso	750	1.000	880
8	Karangpandan	450	650	500
9	Karanganyar	240	480	320
10	Tasikmadu	120	240	140
11	Jaten	90	105	98
12	Colomadu	130	150	140
13	Gondangrejo	140	170	150
14	Kebakkramat	80	187	95
15	Mojogedang	380	500	403
16	Kerjo	380	520	450
17	Jenawi	410	1.500	750
Kab. Karanganyar		80	2.000	511

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Gambaran topografi wilayah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam peta topografi berikut ini:

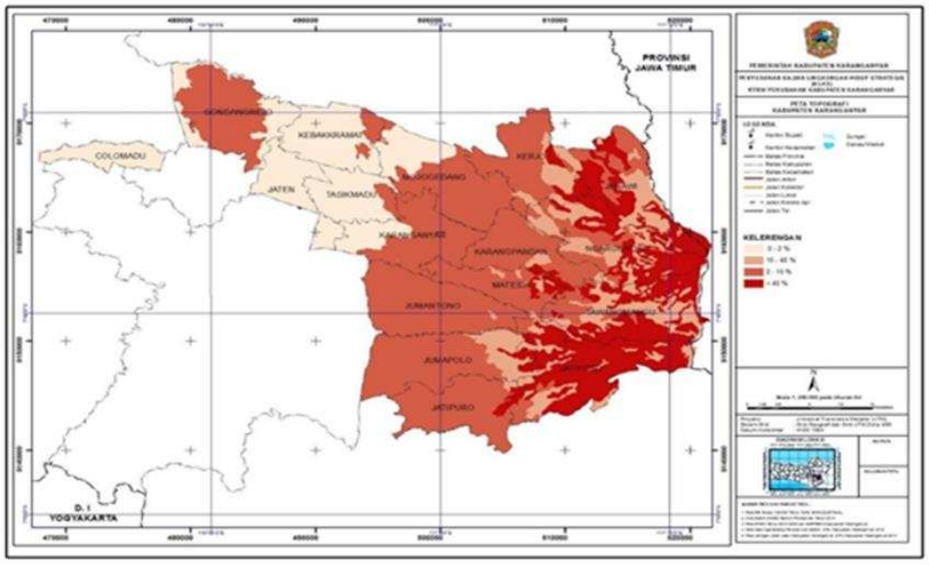

Sumber: RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Perubahan), 2019

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu, dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar. Sementara itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Keduwang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Saat ini air, baik air permukaan maupun bawah tanah, semakin membutuhkan perhatian, karena jangka panjang dapat menimbulkan perselisihan antar komponen masyarakat. Kebutuhan untuk air bersih (PDAM), kebutuhan untuk irigasi dan kebutuhan usaha pribadi (privatisasi air/mata air).

Tabel 2.3.
Sub Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo
di Wilayah Kabupaten Karanganyar

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (M^3/detik)	Melintasi Sungai /Kali
1	Sub. DAS Keduwang Hulu	257	22,3	Kumpul, Jirak, Siwaluh, Jubleg, Jlamprang, Babon
2	Sub. DAS Jlantah – Walikan	11.564	3.332	Jlantah, Walikan, Platar, Gatel, Ngeplak, Rapuh, Latah, Lados, Padas, Bagor, Puro
3	Sub. DAS Samin	20.412	5.881	Samin, Ranjing, Plawon, Klenteng, Cebong, Sapi, Sapari, Salam, Gembong, Kotong, Sumbre, Bayas, Sugihan, Sumurup, Pandaan, Kowon, Dumpul, Buret, Timin, Wungkal, Pringgodani, Dem, Duren, Tlogomardido
4	Sub. DAS Pepe	7.254	623	Pepe, Cemoro, Jurang/Winong, Glodok
5	Sub. DAS Mungkung	31.129	2.571	Karang, Tuban
6	Sub. DAS Kenatan	7.408	895	Kenatan, Sragen, Garudo, Sawur

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2026

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya

adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Kondisi peta curah hujan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam Gambar 2.3.

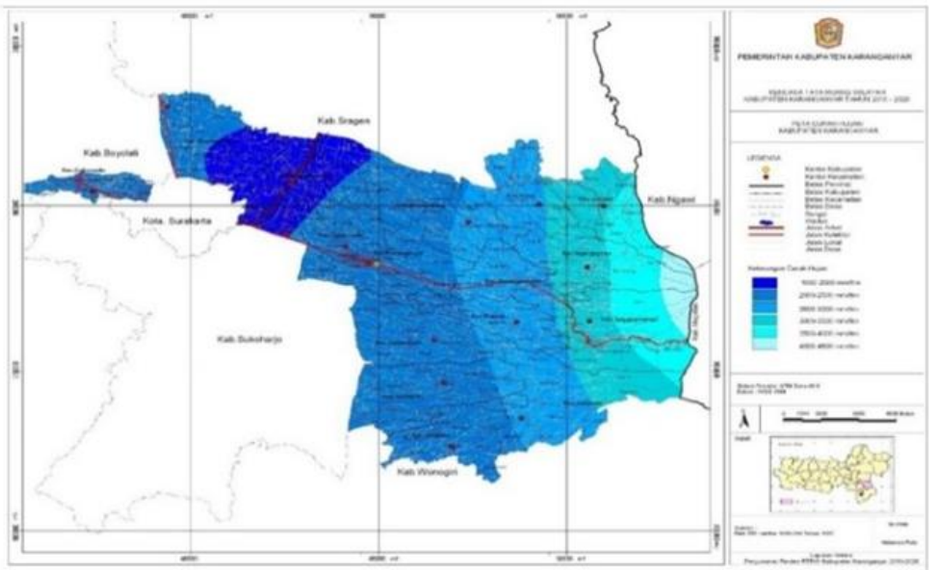

Sumber: RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Gambar 2.3.
Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar

Dalam Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang dikembangkan oleh KLHK menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES.

Pemetaan tersebut untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.4.
Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim

Kategori	Desa	Persen (%)
Tidak Rentan	43	24
Agak Rentan	10	6
Cukup Rentan	124	70

Sumber: Perhitungan dari SIDIK, KLHK 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kategori cukup rentan lebih besar (70%) dibandingkan dengan kategori rawan bencana iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

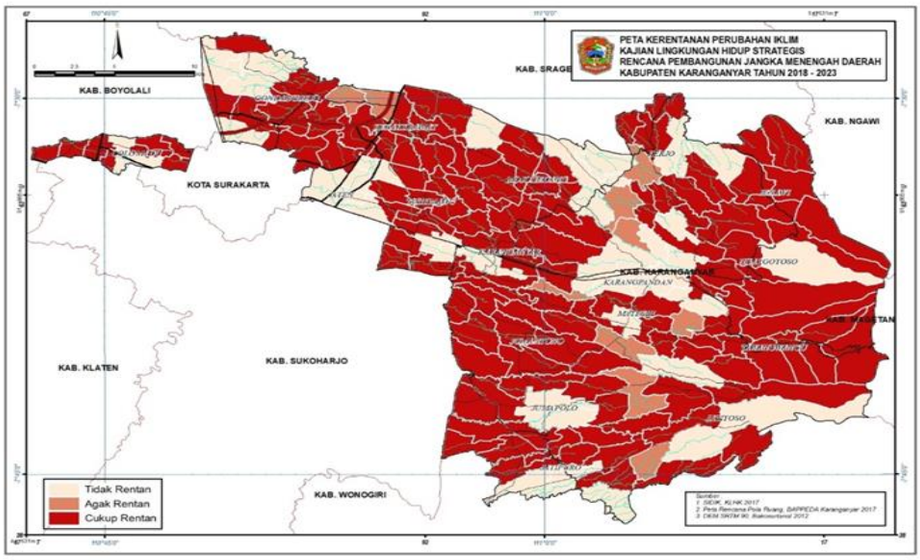

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, 2025

Gambar 2.4.
Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar

Gambaran perkembangan kondisi lingkungan hidup dapat diketahui dari hasil pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.5.
Perkembangan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,04	63,22	65,93	70,12	70,69
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	72,36	80,71	84,37	91,21	75,35
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,67	55,71	53,68	50,00	75,01
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	63,33	43,79	52,85	65,68	54,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026

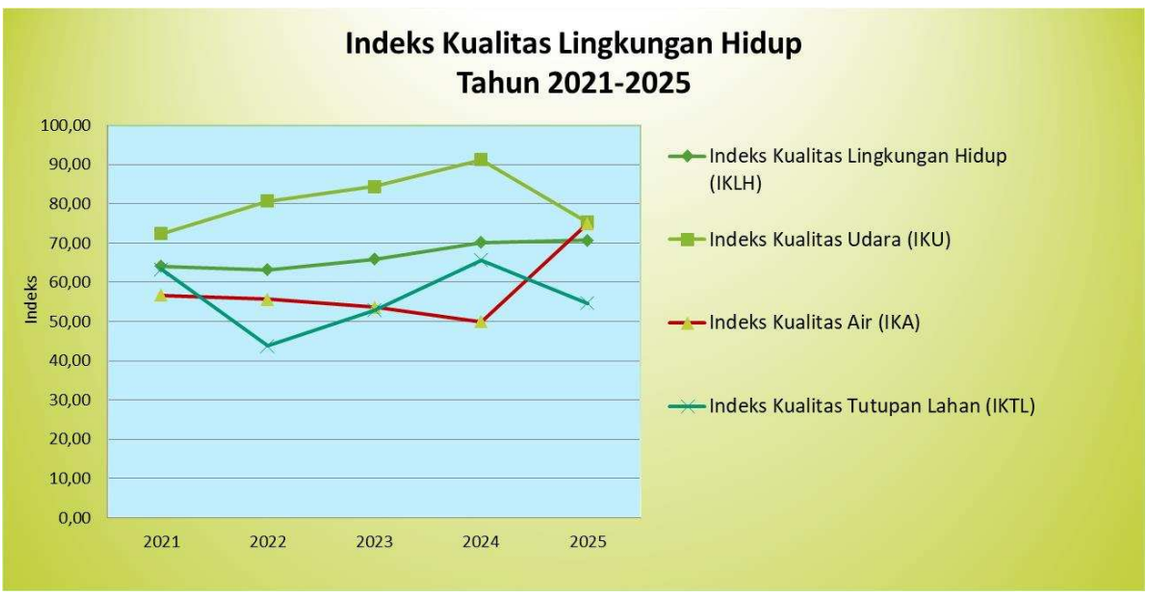

Gambar 2.5.
Perkembangan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025

Nilai IKTL Kabupaten pada tahun 2025 sebesar 54,66, sedangkan kondisi yang diharapkan sama dengan atau bahkan dapat melampaui nilai IKTL tahun 2024 yang sebesar 65,68, sehingga masih terdapat gap sebesar 11,02 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas

tutupan lahan belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan pembangunan wilayah dan aktivitas ekonomi.

Penurunan capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2025 dibandingkan capaian tahun 2024, diasumsikan sebagai dampak penerapan klasifikasi dan koefisien tutupan lahan pada perhitungan baru IKL (yang awalnya berdasar PermenLH No.27/2021 menjadi berdasar PermenLH No.14/2025) dan juga dikarenakan mulai berkurangnya tutupan vegetasi dan area yang representative untuk ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat sekitar TAHURA untuk pelestarian lingkungan.

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi belum optimalnya capaian IKTL antara lain:

1. Masih berlangsungnya alih fungsi lahan pertanian dan lahan bervegetasi menjadi kawasan permukiman, perdagangan, industri, dan infrastruktur.
2. Terbatasnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan vegetasi pada kawasan perkotaan.
3. Masih terdapat lahan kritis yang memerlukan rehabilitasi.
4. Belum optimalnya perlindungan kawasan resapan air, sempadan sungai, dan kawasan lindung.
5. Pengendalian pemanfaatan ruang yang masih perlu diperkuat agar selaras dengan RTRW dan daya dukung lingkungan.

Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka kualitas lingkungan akan terus mengalami penurunan yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, kekeringan, penurunan keanekaragaman hayati, serta menurunnya kemampuan wilayah dalam menyerap emisi karbon.

Dalam rangka meningkatkan capaian IKTL pada tahun 2027, akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon, penghijauan, dan restorasi kawasan yang mengalami degradasi.
2. Menambah luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik RTH publik maupun RTH privat, sesuai amanat penataan ruang.
3. Mengendalikan alih fungsi lahan melalui penerapan RTRW, RDTR, dan persyaratan Persetujuan Lingkungan dalam setiap kegiatan usaha maupun nonusaha.
4. Melindungi kawasan lindung dan kawasan resapan air, termasuk sempadan sungai, mata air, dan kawasan dengan fungsi ekologis penting.
5. Mendorong rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penguatan konservasi tanah serta air melalui kolaborasi lintas sektor.
6. Mengintegrasikan prinsip pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.
7. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat melalui program penghijauan, CSR lingkungan, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta gerakan penanaman pohon.
8. Memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap Persetujuan Lingkungan, sehingga pembangunan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Melalui pelaksanaan strategi tersebut, diharapkan pada tahun 2027 terjadi:

1. peningkatan luas tutupan vegetasi dan ruang terbuka hijau;
2. berkurangnya laju alih fungsi lahan yang tidak terkendali;

3. meningkatnya kualitas kawasan lindung dan daerah resapan air;
4. meningkatnya kemampuan ekosistem dalam menyerap karbon dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi; serta
5. peningkatan nilai IKTL secara bertahap menuju target daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan terwujudnya pembangunan Kabupaten yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi tutupan vegetasi dan kemampuan lahan dalam menjalankan fungsi ekologis. Nilai IKTL dipengaruhi oleh luas dan kualitas tutupan lahan berupa kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH), lahan pertanian yang masih produktif, sempadan sungai yang bervegetasi, kawasan resapan air, serta keberhasilan rehabilitasi lahan kritis. Sebaliknya, alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, berkurangnya vegetasi, serta pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menjadi faktor utama yang menurunkan nilai IKTL.

Oleh karena itu, peningkatan IKTL tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, tetapi merupakan hasil sinergi berbagai sektor pembangunan, antara lain:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melalui rehabilitasi lahan, penghijauan, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengawasan terhadap pemanfaatan lingkungan.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), melalui pengendalian pemanfaatan ruang, penyediaan RTH publik, pembangunan infrastruktur hijau, dan perlindungan kawasan resapan air.
3. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), pengembangan agroforestri, serta konservasi tanah dan air.
4. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai pengelola kawasan hutan negara melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta peningkatan tutupan vegetasi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), melalui pengendalian perizinan berusaha agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta ketentuan tata ruang.
6. Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat melalui gerakan penghijauan, rehabilitasi lahan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP), dan pelestarian kawasan lindung

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 adalah 76.778,64 Ha, terdiri tanah pertanian 19.945,67 Ha dan tanah non pertanian seluas 56.832,97 Ha, dengan rincian luas per kecamatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6.
Luas Lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tanah Pertanian (Ha)	Tanah Non Pertanian (Ha)
1.	Jatipuro	3.436,50	1.152,57	2.283,93
2.	Jatiyoso	6.716,49	730,97	5.985,52

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tanah Pertanian (Ha)	Tanah Non Pertanian (Ha)
3.	Jumapolo	5.567,02	1.733,19	3.833,83
4.	Jumantono	5.355,44	390,71	4.964,73
5.	Matesih	2.626,63	758,89	1.867,74
6.	Tawngmangu	7.003,16	53,93	6.949,23
7.	Ngargoyoso	6.533,94	347,36	6.186,58
8.	Karangpandan	3.411,08	1.076,99	2.334,09
9.	Karanganyar	4.302,64	1.635,70	2.666,94
10.	Tasikmadu	2.759,73	1.355,04	1.404,69
11.	Jaten	2.554,81	1.034,46	1.520,35
12.	Colomadu	1.564,17	337,93	1.226,24
13.	Gondangrejo	5.679,95	537,27	5.142,68
14.	Kebakramat	3.645,63	1.922,64	1.722,99
15.	Mojogedang	5.330,90	1.904,45	3.426,45
16.	Kerjo	4.682,27	1.060,40	3.621,87
17.	Jenawi	5.608,28	136,04	5.472,24
	Total	**76.778,64**	**19.945,67**	**56.832,97**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Kabupaten Karanganyar secara realita masih memiliki lahan terbuka yang cukup luas. Sebagian lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena kondisi daya dukung natural terhadap bencana. Kondisi daya dukung fungsi ekosistem penyediaan maupun pengaturan tergolong baik, terutama dalam penyediaan air, pemeliharaan kualitas udara dan biodiversitas. Hanya daya dukung terhadap perlindungan dan pencegahan bencana yang dianggap terbatas. Mayoritas lahan di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh agrikultur dan hutan. Perubahan lahan sawah menjadi non sawah banyak terjadi karena aglomerasi terutama di Kecamatan Colomadu, Jaten dan Gondangrejo. Kawasan tersebut merupakan wilayah peri urban (WPU) yang menjadi wilayah penyangga sekaligus perluasan kawasan urban Kota Surakarta. Alih fungsi juga terjadi di Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso dan Karangpandan didorong penyediaan lahan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar merespon tantangan pada tataguna lahan melalui perilisan regulasi, konservasi fungsi ekosistem melalui pendekatan partisipatif dan pelaksanaan analisis dasar terhadap daya dukung. Pelaksanaan analisis dasar terhadap daya dukung telah termuat dalam KLHS RPJMD yang kemudian menjadi dasar penyusunan RPJMD Karanganyar 2025-2029 serta penyempurnaan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dalam Peraturan Daerah (Perda) No 19 Tahun 2019. Regulasi tersebut mengatur kawasan konservasi terutama untuk melindungi kawasan bawahannya (resapan air dan hutan lindung) serta kawasan lindung geologi untuk mitigasi bencana longsor dan cagar geologi. Upaya konservasi dilakukan bekerjasama dengan instansi serta masyarakat melalui penghijauan kawasan dan pemeliharaan mata air. Kerjasama penghijauan dan reboisasi dengan CDK X Surakarta bersama masyarakat pada tahun 2023 mampu menanam hingga 22.750 batang pohon, dan pada tahun 2024 mencapai 50.984 batang pohon, serta tahun 2025 mencapai 37.080 batang pohon.

Pemanasan global merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dari kegiatan manusia. Sektor penyumbang emisi GRK berdasarkan pembagian kluster *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) adalah:

1. Penggunaan energi
   Pengadaan dan penggunaan energi, terkait dengan kegiatan produksi energi maupun penggunaan atau konsumsinya dalam aktivitas sehari hari. Emisi yang dihasilkan sektor ini pada tahun 2025 mencapai 946.861,43 tonCO2eq (memperhitungkan emisi bangkitan listrik); 861986,42 tonCO2eq (tanpa bangkitan listrik). Emisi GRK kluster pengadaan dan penggunaan energi mengalami peningkatan 42,48% dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Proses industri dan penggunaan produk dalam industri (IPPU)
   Proses industri dan penggunaan produk, terkait dengan emisi dari suatu proses industri atau entropinya serta emisi akibat penggunaan produk produk tertentu dalam proses produksi, seperti penggunaan pelumas, wax, lilin dsb. Emisi yang dihasilkan sektor ini pada tahun 2025 mencapai 227,98 tonCO2eq.
3. Pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan (AFOLU)
   Kategori emisi terkait dengan emisi akibat aktivitas pertanian dan ikutannya (perkebunan, peternakan, pemupukan), emisi kehutanan (kebakaran lahan dan pengambilan kayu) serta emisi akibat fungsi lahan. Emisi yang dihasilkan sektor ini pada tahun 2025 mencapai 1.161.003,03 tonCO2eq. Emisi GRK AFOLU mengalami penurunan 37% dibandingkan hasil inventarisasi tahun sebelumnya.
4. Pengelolaan limbah
   Emisi yang dihasilkan oleh pembuangan limbah (industri, rumah tangga maupun sampah padat) dan model pengelolaannya. Emisi yang dihasilkan sektor ini pada tahun 2025 mencapai 258748,01 tonCO2eq. Nilai GRK pengelolaan limbah mengalami kenaikan 3,4% terhadap tahun sebelumnya.

Pengendalian emisi gas rumah kaca dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut:

1. Sektor Energi
   Antara lain melalui kegiatan kampanye hemat energi pada masyarakat, sektor perdagangan, jasa dan perkantoran, khususnya dalam pemakaian energi listrik. Pemerintah Daerah berkomitmen meningkatkan efisiensi energi yang saat ini telah diinisiasi melalui kebijakan pemanfaatan lampu hemat energi dan pembatasan operasional gedung melalui *Work From Home* (WFH) berkala. Penerapan manajemen energi yang komprehensif serta pendataan (inventarisasi) potensi energi terbarukan daerah ke depan akan diperkuat melalui sinergi program antar-perangkat daerah terkait.
2. Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan
   Antara lain melalui kegiatan
   - Pemanfaatan kotoran atau limbah ternak menjadi lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis sebagai biogas atau pupuk agar mampu memberikan nilai positif tambahan sebelum teremisikan ke atmosfer
   - Upaya penambahan ruang terbuka hijau dan peningkatan jumlah vegetasi yang efektif dalam menyerap karbon
3. Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)
   Kontribusi program kampung iklim (proklim) dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Bupati Karanganyar telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 660.1/9504.9 tanggal

16 Desember 2019 tentang Himbauan Pembentukan Kampung Iklim di wilayah Kelurahan/Desa di seluruh Kabupaten Karanganyar. Sejak tahun 2019 hingga 2025 terdapat 42 kampung iklim yang telah terdaftar pada Sistem Registri Nasional (SRN-PPI), dengan komposisi 13 Proklim pada tahun 2019, 14 Proklim pada tahun 2020, 2 Proklim pada tahun 2021, 3 Proklim pada tahun 2022, 3 Proklim pada tahun 2023, 3 Proklim pada tahun 2024, dan 4 Proklim pada tahun 2025.

Upaya penurunan emisi GRK melalui pengembangan EBT skala lokal akan diintegrasikan melalui penguatan Program Kampung Iklim (Proklim) oleh DLH, seperti pemanfaatan limbah ternak (biogas/pupuk organik). Mengingat substansi teknis dan kewenangan formal EBT berada di bawah Dinas ESDM Provinsi, maka perencanaan pemanfaatan PLTS atap pada bangunan fasilitas publik/pemerintah akan disusun melalui mekanisme koordinasi lintas sektor serta memerlukan kajian kelayakan/teknis lebih lanjut.

4. Melaksanakan sosialisasi dengan stakeholder terkait gas Rumah Kaca (GRK).
5. Pelaksanaan Pengurangan Sampah masuk TPA
   Pengurangan dapat dilakukan melalui langkah mendasar pemilahan pada hulu. Pemilahan dapat berlanjut dengan penyaluran dan pemrosesan sampah daur ulang. Untuk sampah organik juga diperlukan pelatihan pengolahan sisa makanan.
6. Pembangunan instalasi pemanfaatan metana di TPA Sukosari
   TPA Sukosari memiliki potensi metana besar dari kondisi open dumping. Metana tersebut dapat ditangkap dan dimanfaatkan sebagai substitusi energi domestik maupun keperluan internal dalam pengelola TPA.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Karanganyar dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 masuk ke dalam Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten, yang meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 tersebut, arahan pengembangan WP Subosukawonosraten meliputi:

1. menyelaraskan pengembangan Kota Surakarta dan kabupaten di sekitarnya;
2. mendorong koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam hal:
   a. pengembangan sektor ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
   b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
   c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, pengelolaan limbah;
   d. penyediaan ruang terbuka hijau Kota Surakarta dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
   e. pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
   f. penanganan bencana.

3. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
4. menerpadukan pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur;
5. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
6. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

Dengan mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, arah pemanfaatan ruang wilayah secara terperinci mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, terdiri dari program utama penataan ruang yang meliputi:

1. Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten:
   1) Perwujudan pusat kegiatan:
      - Percepatan pertumbuhan kota-kota utama (pusat-pusat pertumbuhan) di Karangpandan dan Jumapolo;
      - Mendorong perkembangan kota-kota sentra kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat;
      - Mendorong perkembangan kota-kota sentra produksi pertanian di Kebakkramat, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumantono dan Jumapolo; dan
      - Mendorong perkembangan kota-kota pariwisata di Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Karangpandan dan Matesih
   2) Perwujudan sistem prasarana:
      - Transportasi;
      - Listrik;
      - Telekomunikasi;
      - Sumber Daya Air; dan
      - Lingkungan.
2. Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten meliputi perwujudan:
   1) Kawasan lindung
      - Pelestarian, pemulihan dan pengkayaan kawasan lindung;
      - Pembangunan Arboretum di Kecamatan Tawangmangu;
      - Pembangunan Hutan Kota di sekitar Waduk Lalung dan Delingan.
   2) Kawasan budidaya
      - Kawasan hutan produksi;
      - Kawasan peruntukan pertanian;
      - Kawasan peruntukan perikanan;
      - Kawasan peruntukan pertambangan;
      - Kawasan peruntukan industri;
      - Kawasan peruntukan pariwisata;
      - Kawasan peruntukan permukiman; dan
      - Kawasan peruntukan lainnya.
3. Perwujudan kawasan strategis kabupaten

Arah penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten Karanganyar adalah:

1) KSK bidang pertumbuhan ekonomi meliputi:
   a. Kawasan yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi meliputi:
      - Kawasan Perkotaan Jaten yang meliputi Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat dan Kecamatan Gondangrejo;
   b. Kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah meliputi:
      - Kawasan Strategis Agropolitan Sukuh, Cetho, Tawangmangu, Karangpandan dan Matesih (Suthomadansih);
      - Kawasan Strategis Agropolitan di Mojogedang; dan
      - Kawasan Strategis Agropolitan di Jumapolo.
2) KSK bidang sosial dan budaya meliputi
      - Kawasan Makam Raja Jawa di Matesih

Berdasarkan Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032, maka pengembangan wilayah Karanganyar memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung.

1. Kawasan Budidaya
   1) Terdiri atas kawasan peruntukan : hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan budidaya lainnya. Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi:
      - Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar dan Matesih
      - Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di seluruh Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jenawi, Jumantono, Jumapolo, Ngargoyoso dan Tawangmangu
      - Kawasan peruntukan pertanian terdapat di seluruh kecamatan.
      - Kawasan Pertanian Pertanian Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas ± 23.618 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan
      - Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan kecuali Colomadu, dengan komoditas sayur, buah, tanaman biofarmaka dan tanaman hias, Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili
   2) Kawasan peternakan meliputi:
      - Peternakan unggas terletak di Kecamatan : Gondangrejo, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Jatiyoso, Jatipuro, Kerjo, Kebakkramat, Karanganyar; dan Jenawi
      - Peternakan sapi terletak di Kecamatan : Karanganyar, Jatipuro, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Ngargoyoso, Karang pandan, Jenawi, Jatiyoso, Kebakkramat, Matesih; dan Gondangrejo
      - Peternakan domba/kambing terletak di Kecamatan : Jumantono, Jumapolo, Mojogedang, Ngargoyoso, Karang pandan, Jenawi, Jatiyoso, Kebakkramat; dan Gondangrejo
      - Peternakan babi terletak di Kecamatan Jumantono, Jaten, Gondangrejo; dan Kebakkramat
   3) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas:
      - Perikanan tangkap sungai, bendungan/danau/embung, seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten

- Budidaya perikanan di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi

4) Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi kawasan : pertambangan mineral dan pertambangan panas bumi
5) Kawasan peruntukan industri meliputi:
   - Industri besar di Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, dan Tasikmadu
   - Industri menengah di Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, Tasikmadu, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, dan Jatipuro, dan
   - Industri kecil dan mikro di setiap kecamatan
6) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan/binaan manusia
7) Kawasan peruntukan permukiman, tersebar di seluruh kecamatan, meliputi pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan
8) Kawasan peruntukan budidaya lainnya yaitu kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan bumi perkemahan, dan kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum

2. Kawasan Peruntukan Lindung

   Rencana pengembangan kawasan peruntukan lindung, meliputi:

   1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kawasan hutan lindung meliputi Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Matesih dan Kecamatan Jatipuro. Kawasan resapan air meliputi Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Mojogedang;
   2) Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar danau atau waduk, RTH Perkotaan dan Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal;
   3) Kawasan Konservasi yang dimaksud yaitu berupa Kawasan pelestarian alam, meliputi Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
   4) Kawasan rawan bencana alam termasuk di dalamnya kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir dan kawsan bencana putting beliung;
   5) Kawasan lindung geologi meliputi Kawasan cagar alam geologi dan sepadan mata air;
   6) Kawasan cagar budaya yang dimaksud meliputi Pabrik Gula Colomadu di Kecamatan Colomadu dan Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo.

Rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor. Mengingat akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi dan perubahan

penggunaan lahan di daerah, sehingga perlu mengatur rencana detail tata ruang kawasan perkotaan di Kabupaten Karanganyar sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2024 adalah regulasi utama yang mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Karanganyar Tahun 2024–2044. Di dalam Peraturan Bupati tersebut mengatur wilayah perencanaan (WP), yang secara administratif meliputi:

1. Kecamatan Karanganyar, meliputi:
    a. Kelurahan Bolong
    b. Kelurahan Bejen
    c. Kelurahan Cangakan
    d. Kelurahan Jungke
    e. Kelurahan Lalung
    f. Kelurahan Popongan
    g. Kelurahan Tegalgede
    h. Kelurahan Delingan
    i. Kelurahan Gayamdompo
    j. Kelurahan Gedong
    k. Kelurahan Jantiharjo
    l. Kelurahan Karanganyar
2. Kecamatan Jaten, meliputi:
    a. Desa Brujul
    b. Desa Jaten
    c. Desa Dagen
    d. Desa Jati
    e. Desa Jetis
    f. Desa Suruhkalang
    g. Desa Ngringo
    h. Desa Sroyo
3. Kecamatan Tasikmadu
    a. Desa Buran
    b. Desa Karangmojo
    c. Desa Papahan
    d. Desa Ngijo

Salah satu upaya pemenuhan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) dalam hal ini Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, untuk dapat memberikan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR, melalui surat Bupati diusulkan 3 RDTR yaitu Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso dan Gondangrejo. Menyikapi hal itu, Pemerintah Pusat menyetujui pemberian Bantuan Teknis (Bantek) RDTR di tiga kecamatan tersebut, yang penyusunannya akan dilaksanakan oleh rekanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, setelah penyepakatan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 87% selesai.

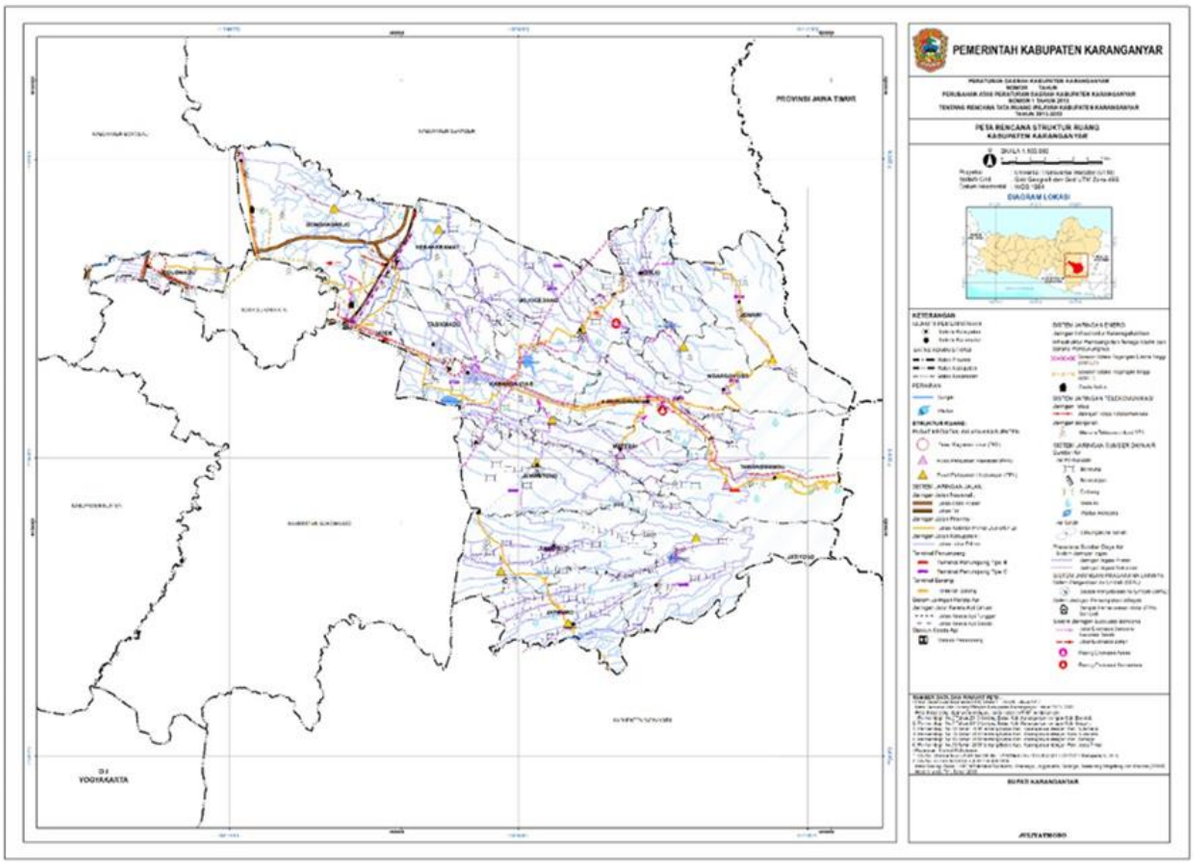

Sumber: Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.6.
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karanganyar

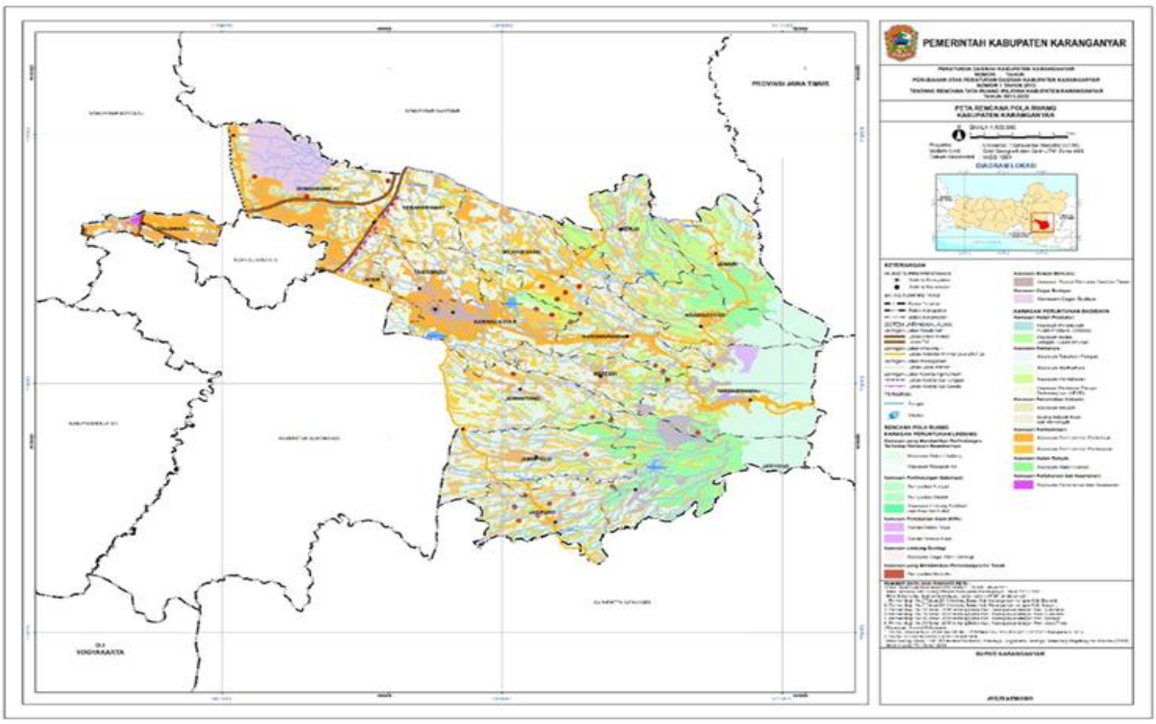

Sumber: Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019

Gambar 2.7.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Karanganyar

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sebanyak 968.484 jiwa, sedangkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagaimana tabel berikut:·

Tabel 2.7.

Jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2025

No.	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jatipuro	34.225	34.747	35.291	35.649	35.752
2.	Jatiyoso	39.659	39.906	40.171	40.213	40.428
3.	Jumapolo	42.499	43.114	43.755	44.159	44.322
4.	Jumantono	49.565	50.191	50.289	51.223	51.481
5.	Matesih	44.745	45.095	45.197	45.584	45.766
6.	Tawangmangu	47.283	47.480	47.591	48.005	48.347
7.	Ngargoyoso	37.023	37.397	37.472	37.975	38.155
8.	Karangpandan	43.833	44.162	44.265	44.616	44.913
9.	Karanganyar	85.661	86.217	86.402	86.925	87.386
10.	Tasikmadu	67.542	68.276	66.434	69.436	69.795
11.	Jaten	84.483	84.579	84.761	86.372	87.371
12.	Colomadu	75.656	75.857	75.542	76.624	77.551
13.	Gondangrejo	88.250	89.248	89.443	90.846	91.778
14.	Kebakramat	64.740	64.941	65.071	65.539	66.071
15.	Mojogedang	70.285	71.075	71.238	72.336	72.708
16.	Kerjo	37.940	38.218	38.300	38.596	38.748
17.	Jenawi	27.499	27.611	27.668	27.811	27.912
	Total	**940.888**	**948.114**	**955.116**	**961.909**	**968.484**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di tahun 2025 yaitu Kecamatan Gondangrejo dengan jumlah penduduk sebanyak 91.778 jiwa, sementara Kecamatan Jenawi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu sebesar 27.912 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Karanganyar sebesar 1.261,00 jiwa/km^2. Kecamatan dengan penduduk terpadat yaitu Kecamatan Colomadu yaitu sebesar 4.899 jiwa/km^2, sementara kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Jenawi sebesar 496 jiwa/km^2.

Tabel 2.8.

Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2025

No.	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jatipuro	995	1.012	1.027	1.027	1.040
2.	Jatiyoso	590	595	598	599	602
3.	Jumapolo	763	776	786	793	796
4.	Jumantono	925	939	950	957	961
5.	Matesih	1.702	1.720	1.731	1.735	1.742
6.	Tawangmangu	675	680	681	685	690
7.	Ngargoyoso	566	573	578	581	584
8.	Karangpandan	1.284	1.298	1.305	1.308	1.317
9.	Karanganyar	1.989	2.008	2.017	2.020	2.031
10.	Tasikmadu	2.407	2.407	2.502	2.516	2.529
11.	Jaten	3.304	3.317	3.315	3.381	3.420
12.	Colomadu	4.818	4.830	4.822	4.899	4.959
13.	Gondangrejo	1.552	1.575	1.590	1.599	1.616
14.	Kebakkramat	1.774	1.785	1.787	1.798	1.812
15.	Mojogedang	1.317	1.336	1.349	1.357	1.364
16.	Kerjo	810	818	823	824	828
17.	Jenawi	490	493	495	496	498
Kabupaten Karanganyar		**1.223**	**1.234**	**1.244**	**1.253**	**1.261**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Pertumbuhan penduduk tahun 2021-2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.9.

Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2025

No.	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jatipuro	2,14%	1,79%	1,49%	1,01%	0,29%
2.	Jatiyoso	0,96%	0,91%	0,59%	0,10%	0,53%
3.	Jumapolo	2,05%	1,73%	1,41%	0,92%	0,37%
4.	Jumantono	1,82%	1,55%	1,23%	0,74%	0,50%
5.	Matesih	1,20%	1,08%	0,75%	0,26%	0,40%
6.	Tawangmangu	0,71%	0,72%	0,39%	0,65%	0,71%
7.	Ngargoyoso	1,49%	1,30%	0,98%	0,49%	0,47%
8.	Karangpandan	1,16%	1,06%	0,72%	0,23%	0,67%
9.	Karanganyar	1,01%	0,95%	0,62%	0,13%	0,53%
10.	Tasikmadu	-0,004%	0,01%	1,05%	0,57%	0,52%
11.	Jaten	0,30%	0,41%	0,08%	1,96%	1,16%
12.	Colomadu	0,08%	0,25%	0,23%	1,61%	1,21%
13.	Gondangrejo	1,66%	1,43%	1,10%	0,61%	1,03%
14.	Kebakramat	0,55%	0,60%	0,28%	0,57%	0,81%
15.	Mojogedang	1,66%	1,43%	1,09%	0,60%	0,51%
16.	Kerjo	1,12%	1,03%	0,70%	0,22%	0,39%
17.	Jenawi	0,68%	0,70%	0,38%	0,27%	0,36%
Kabupaten Karanganyar		**0,98%**	**0,94%**	**0,74%**	**0,71%**	**0,68%**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Pada tahun 2025 pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar sebesar 0,68%, dengan laju tercepat berasal dari Kecamatan Colomadu yaitu sebesar 1,21% dan laju pertumbuhan penduduk terendah ada di Kecamatan Jatipuro sebesar 0,29%. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar sejumlah 968.484 jiwa yang terdiri dari laki-laki 482.474 jiwa dan perempuan 486.010 jiwa. Gambaran *sex ratio* berdasarkan kelompok umur dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.10.

Penduduk Kabupaten Karanganyar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0-4	32.790	31.500	64.290	104,10%
5-9	36.199	34.639	70.838	104,50%
10-14	34.702	33.507	68.209	103,57%
15-19	35.985	33.941	69.926	106,02%
20-24	35.744	33.804	69.548	105,74%
25-29	34.326	33.186	67.512	103,44%
30-34	34.033	34.025	68.058	100,02%
35-39	34.001	34.439	68.440	98,73%
40-44	36.300	36.964	73.264	98,20%
45-49	35.528	35.558	71.086	99,92%
50-54	32.385	32.656	65.041	99,17%
55-59	29.452	30.486	59.938	96,61%
60-64	23.609	26.134	49.743	90,34%
65-69	19.765	21.036	40.801	93,96%
70-74	13.568	15.328	28.896	88,52%
75+	14.087	18.807	32.894	74,90%
JUMLAH	**482.474**	**486.010**	**968.484**	**99,27%**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Berdasarkan tabel di atas terlihat *sex ratio* penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 menggambarkan jumlah penduduk perempuan hampir seimbang dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, dimana pada tahun 2025 *sex ratio* sebesar 99,27% (pembulatan 99%). Kondisi penduduk Kabupaten Karanganyar di tahun 2025 digambarkan dalam piramida penduduk sebagai berikut.

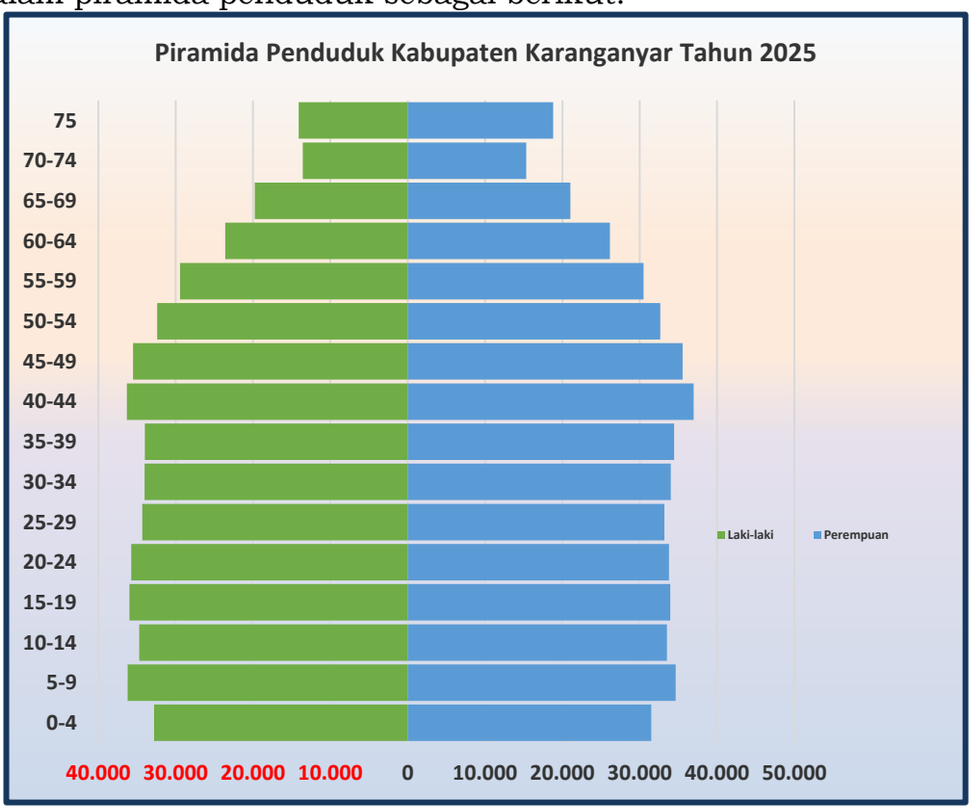

Gambar 2.8.
Piramida Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pada rentang Tahun 2021-2025 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi tumbuh positif dari 3,59% di Tahun 2021 menjadi 5,86% di Tahun 2022. Pertumbuhan Ekonomi selanjutnya mengalami penurunan sebesar 0,36 poin di tahun 2023, yaitu menjadi 5,50%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebesar 5,56% dan naik 0,19 poin di Tahun 2025, yaitu menjadi 5,75%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2021-2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Karanganyar	3,59	5,86	5,50	5,56	5,75
Provinsi Jawa Tengah	3,32	5,31	4,98	4,93	5,37
Nasional	3,69	5,31	5,05	5,10	5,11

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

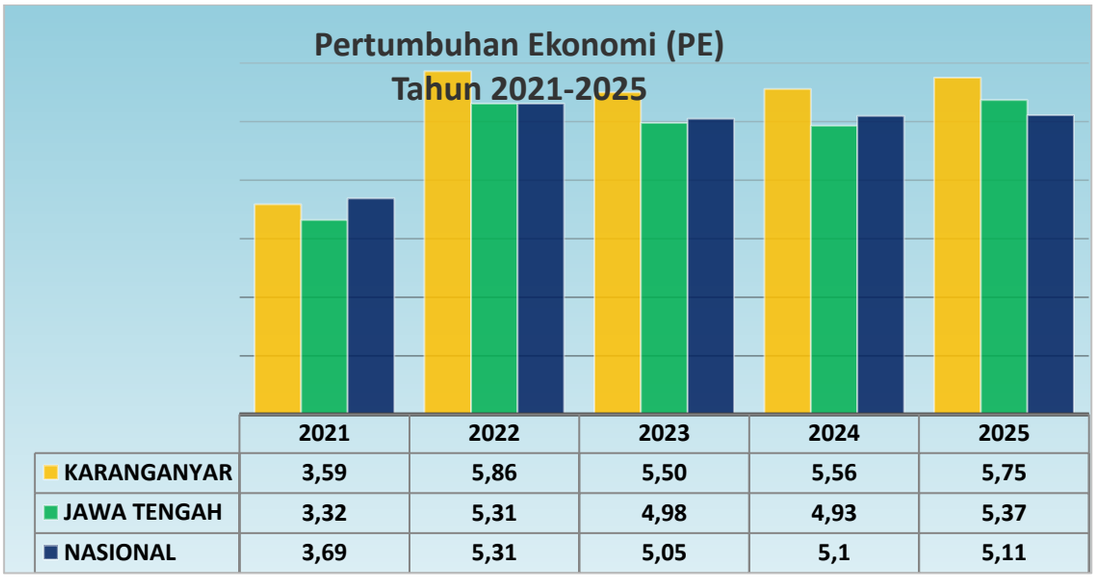

	2021	2022	2023	2024	2025
KARANGANYAR	3,59	5,86	5,50	5,56	5,75
JAWA TENGAH	3,32	5,31	4,98	4,93	5,37
NASIONAL	3,69	5,31	5,05	5,1	5,11

Gambar 2.9.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.12.
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2021-2025

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Boyolali	4,63	6,33	5,60	4,69	4,82
2	Klaten	3,82	5,90	5,68	5,17	4,62
3	Sukoharjo	3,82	5,61	5,05	4,99	5,48
4	Wonogiri	3,35	5,63	4,99	4,97	5,67
5	**Karanganyar**	**3,59**	**5,86**	**5,50**	**5,56**	**5,75**
6	Sragen	3,75	5,76	5,21	5,43	5,70
7	Surakarta	4,01	6,25	5,55	5,62	5,63
8	Jawa Tengah	3,32	5,31	4,98	4,93	5,37
9	Nasional	3,69	5,31	5,05	5,10	5,11

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dengan nilai 5,75% tertinggi di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.

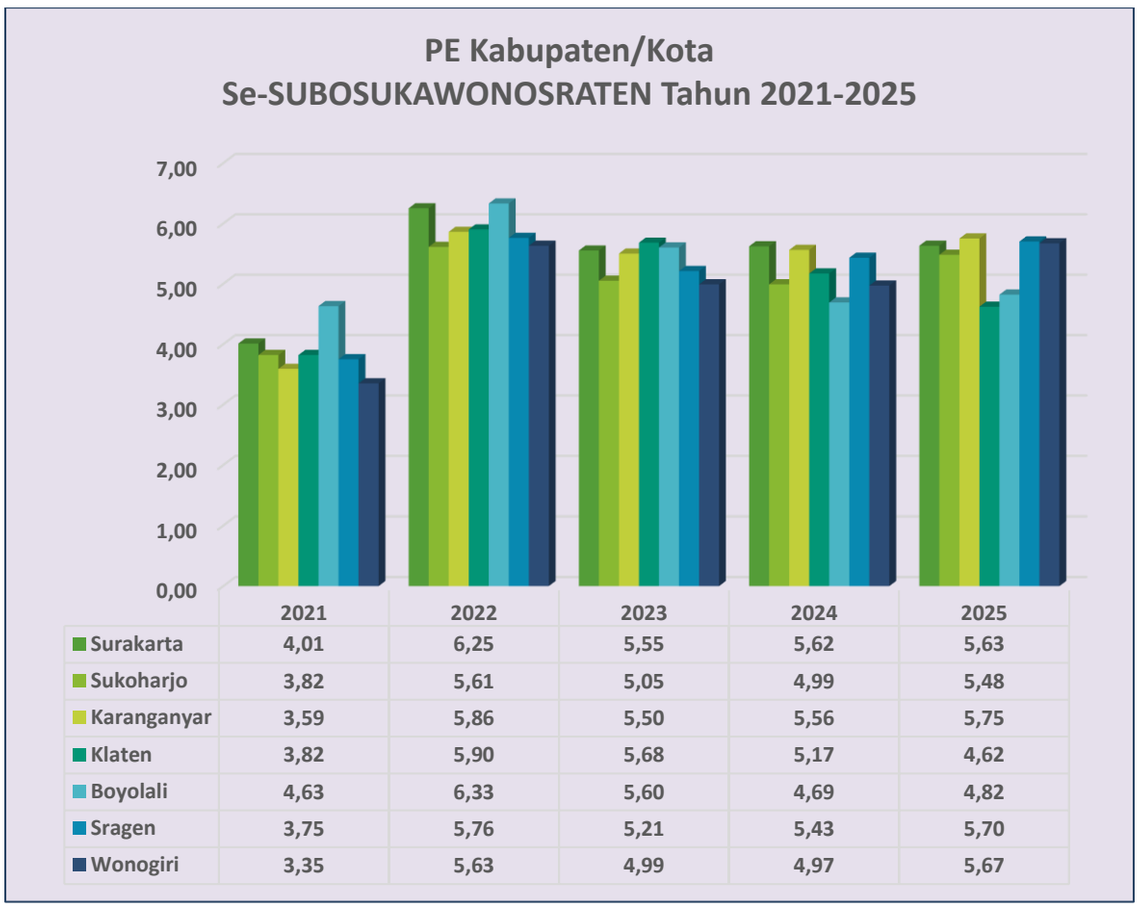

	2021	2022	2023	2024	2025
Surakarta	4,01	6,25	5,55	5,62	5,63
Sukoharjo	3,82	5,61	5,05	4,99	5,48
Karanganyar	3,59	5,86	5,50	5,56	5,75
Klaten	3,82	5,90	5,68	5,17	4,62
Boyolali	4,63	6,33	5,60	4,69	4,82
Sragen	3,75	5,76	5,21	5,43	5,70
Wonogiri	3,35	5,63	4,99	4,97	5,67

Gambar 2.10.
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2021-2025

Pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penerapan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dan Ekonomi Biru (*Blue Economy*) yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Secara umum, Indeks Ekonomi Hijau dan Biru merupakan indeks komposit yang menggambarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta kesejahteraan masyarakat. Pada Kabupaten Karanganyar, substansi penyusun indeks tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
   Kabupaten Karanganyar terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui penguatan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan UMKM dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Pengembangan investasi diarahkan pada kegiatan usaha yang ramah lingkungan, efisien energi, serta mampu menciptakan lapangan kerja tanpa meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam.
2) Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
   Pemanfaatan sumber daya air, lahan, energi, dan bahan baku didorong agar semakin efisien melalui penerapan teknologi tepat guna, pengembangan pertanian ramah lingkungan, konservasi lahan pertanian, serta peningkatan produktivitas tanpa membuka lahan baru secara berlebihan. Upaya ini mendukung peningkatan

nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

3) Kualitas Lingkungan Hidup
Perbaikan kualitas lingkungan menjadi salah satu indikator utama ekonomi hijau. Kabupaten Karanganyar terus berupaya meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, rehabilitasi kawasan lindung, konservasi daerah tangkapan air, penghijauan, serta pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3). Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

4) Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular
Pengembangan ekonomi hijau didukung melalui peningkatan pengelolaan sampah berbasis prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), penguatan bank sampah, pengurangan sampah dari sumbernya, serta pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Pendekatan ekonomi sirkular diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.

5) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
Pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung target penurunan emisi melalui peningkatan ruang terbuka hijau, penggunaan energi terbarukan, pengembangan transportasi ramah lingkungan, efisiensi energi pada bangunan pemerintah, serta pelestarian kawasan hutan dan daerah resapan air. Upaya ini sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.

6) Pertanian Berkelanjutan
Sebagai daerah yang memiliki sektor pertanian yang kuat, Karanganyar mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu, efisiensi penggunaan air irigasi, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta pengembangan pertanian organik dan pertanian cerdas iklim (climate smart agriculture). Pendekatan ini mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kualitas lingkungan.

7) Pengelolaan Sumber Daya Air (Ekonomi Biru)
Walaupun bukan daerah pesisir, konsep ekonomi biru di Kabupaten Karanganyar diterapkan melalui pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Hal ini meliputi konservasi mata air, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), peningkatan kualitas sungai, efisiensi pemanfaatan air irigasi, pengendalian pencemaran badan air, serta pengembangan budidaya perikanan air tawar yang berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya air tetap mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

8) Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Potensi wisata alam seperti kawasan lereng Gunung Lawu, hutan, air terjun, dan agrowisata dikembangkan dengan memperhatikan prinsip konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pembatasan daya dukung kawasan. Dengan demikian, sektor pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengurangi kualitas lingkungan.

9) Inovasi, Tata Kelola, dan Investasi Hijau

Keberhasilan ekonomi hijau dan biru juga ditentukan oleh tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyusunan kebijakan pembangunan rendah karbon, peningkatan investasi hijau, digitalisasi pelayanan publik, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan inovasi daerah yang mendukung efisiensi penggunaan sumber daya alam.

Melalui penguatan indikator-indikator tersebut, pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar diarahkan pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam, mampu menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi biru menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Karanganyar sebagai daerah yang berdaya saing, tangguh terhadap perubahan iklim, serta mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

b. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025 sebesar Rp. 55.089,00 miliar lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang bernilai sebesar Rp. 51.123,06 miliar. Kenaikan nilai PDRB juga menggambarkan adanya kenaikan harga yang mendorong peningkatannya lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Begitu juga untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2025 Kabupaten Karanganyar memiliki nilai PDRB sebesar Rp. 33.709,11 miliar.

Tabel 2.13.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar (miliar rupiah)
Tahun 2021–2025

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.101,03	5.452,25	5.700,76	5.891,54	6.435,24
2. Pertambangan dan Penggalian	437,90	424,12	453,98	485,60	499,26
3. Industri Pengolahan	18.350,44	19.947,96	21.975,71	23.986,20	25.800,95
4. Pengadaan Listrik dan Gas	57,04	59,79	65,20	75,80	81,20
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,43	28,23	28,88	30,28	29,06
6. Konstruksi	2.735,34	2.974,62	3.436,81	3.662,60	3.829,03
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.404,58	4.837,54	5.425,11	5.656,65	6.017,01
8. Transportasi dan Pergudangan	761,85	1.374,86	1.599,07	1.871,23	2.095,21
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.225,23	1.520,12	1.728,65	2.111,47	2.406,73
10. Informasi dan Komunikasi	563,49	577,40	611,67	645,75	712,21
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.406,23	1.550,42	1.636,91	1.679,53	1.770,66
12. Real Estate	648,56	687,89	739,46	803,18	859,97
13. Jasa Perusahaan	149,86	163,18	182,87	207,16	229,73
14. Administrasi	676,21	704,08	736,29	803,67	832,41

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib					
15. Jasa Pendidikan	1.719,24	1.763,20	1.821,55	1.897,33	2.057,36
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	347,77	359,98	389,57	416,45	443,22
17. Jasa Lainnya	544,92	662,12	798,16	898,62	989,75
PDRB ADHB	**39.157,21**	**43.087,76**	**47.150,65**	**51.123,06**	**55.089,00**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Tabel 2.14.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar (miliar rupiah)
Tahun 2021–2025

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.368,36	3.464,22	3.458,92	3.444,54	3.652,96
2. Pertambangan dan Penggalian	268,61	250,58	261,29	276,77	285,58
3. Industri Pengolahan	12.425,19	12.940,60	13.702,82	14.442,04	15.236,44
4. Pengadaan Listrik dan Gas	47,20	49,26	52,27	56,74	59,71
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,68	23,05	23,31	23,95	22,35
6. Konstruksi	1.825,51	1.887,03	2.080,26	2.209,15	2.286,68
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.321,31	3.475,11	3.637,03	3.833,35	3.997,49
8. Transportasi dan Pergudangan	599,12	1.021,76	1.105,81	1.239,26	1.361,16
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	899,19	1.095,89	1.229,23	1.474,24	1.657,79
10. Informasi dan Komunikasi	598,62	631,36	631,36	663,17	728,66
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	916,42	929,59	963,32	983,23	1.013,19
12. Real Estate	511,26	534,67	565,15	610,87	647,59
13. Jasa Perusahaan	101,77	107,17	116,22	128,67	139,94
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	468,86	473,74	481,93	508,46	417,29
15. Jasa Pendidikan	1.031,00	1.054,20	1.074,97	1.099,37	1166,48
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	237,27	242,30	256,02	269,34	281,59
17. Jasa Lainnya	409,85	477,19	558,33	613,34	654,21
PDRB ADHB	**27.039,61**	**28.624,99**	**30.198,21**	**31.876,51**	**33.709,11**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRBB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Pertumbuhan PDRB ADHK biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kenaikan produksi di Kabupaten Karanganyar.

Selama lima tahun terakhir ini laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 3,59 persen pada tahun 2021, 5,86 persen pada tahun 2022, menurun di tahun 2023 menjadi 5,5 persen, tahun 2024 meningkat kembali menjadi 5,56 persen dan 5,75 persen pada tahun 2025. Nilai dan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.15.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (miliar Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (miliar Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2021	39.157,21	5,76%	27.039,61	3,59%
2022	43.087,76	10,04%	28.624,99	5,86%
2023	47.150,76	9,43%	30.198,24	5,50%
2024	51.123,06	8,42%	31.876,51	5,56%
2025	55.089,00	7,76%	33.709,11	5,75%

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

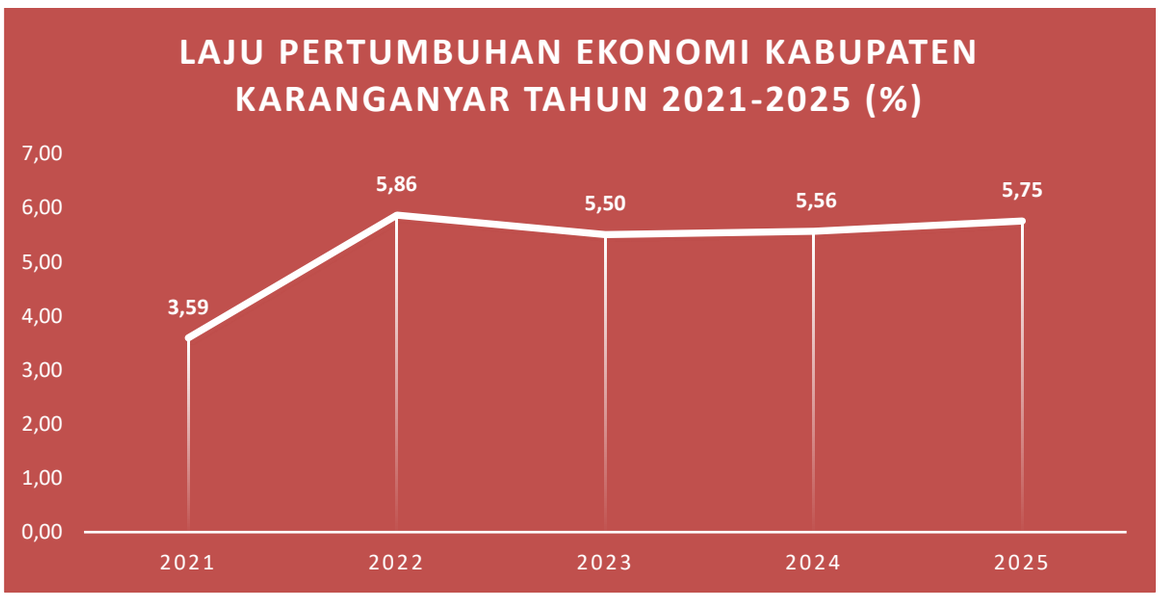

Gambar 2.11.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025(%)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode Tahun 2021-2025 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHB Tahun 2021-2025.

Tabel 2.16.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025 (%)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,03	12,65	12,09	11,52	11,68
2. Pertambangan dan Penggalian	1,12	0,98	0,96	0,95	0,91
3. Industri Pengolahan	46,86	46,30	46,61	46,92	46,84
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
6. Konstruksi	6,99	6,90	7,29	7,16	6,95
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,25	11,23	11,12	11,06	10,92

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
8. Transportasi dan Pergudangan	1,95	3,19	3,39	3,66	3,8
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,13	3,53	3,67	4,13	4,37
10. Informasi dan Komunikasi	1,44	1,34	1,30	1,26	1,29
11. Jasa Keuangan	3,59	3,60	3,47	3,29	3,21
12. Real Estate	1,66	1,60	1,57	1,57	1,56
13. Jasa Perusahaan	0,38	0,38	0,39	0,41	0,42
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,73	1,63	1,56	1,57	1,51
15. Jasa Pendidikan	4,39	4,09	3,86	3,71	3,73
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	0,84	0,83	0,81	0,80
17. Jasa Lainnya	1,39	1,54	1,69	1,76	1,80

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2021-2025, dapat diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI : Industri, Pertanian dan Pariwisata.

c. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2025) menunjukan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2021 sebesar 2,58% dan mengalami kenaikan menjadi 7,03% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan tahun 2024, nilai inflasi kembali mengalami penurunan hingga ke angka 3,20 di tahun 2023 dan 1,50 di tahun 2024. Nilai Inflasi kembali naik di tahun 2025, yaitu menjadi 2,79%. Nilai inflasi ini menggunakan data inflasi dari Kota Surakarta. Dimana nilai inflasi di Tahun 2025 sebesar 2,79 lebih tinggi dari nilai inflasi Jawa Tengah (2,72) dan lebih rendah dari inflasi nasional (2,92).

Tabel 2.17.
Inflasi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Inflasi	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Karanganyar	2,58	7,03	3,20	1,50	2,79
Provinsi Jawa Tengah	1,56	5,63	2,83	1,67	2,72
Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2026, BPS

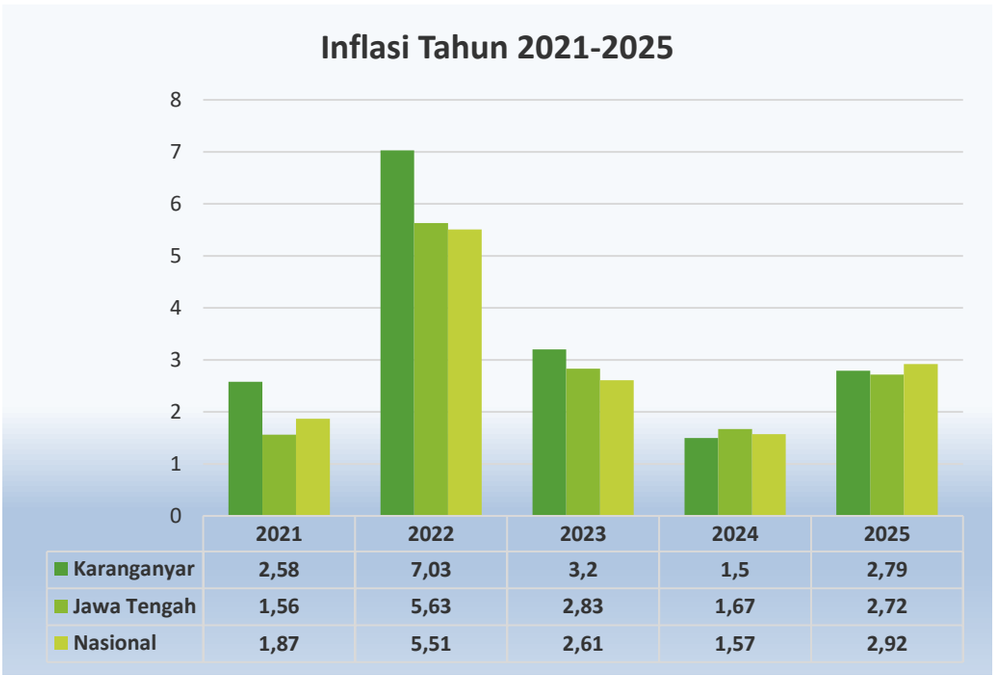

Gambar 2.12.
Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

d. PDRB Perkapita

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK mengalami perkembangan positif dari Tahun 2021 hingga Tahun 2025, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.18.
PDRB Per Kapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita			
				ADHB	Tumbuh (%)	ADHK	Tumbuh (%)
2021	39.157.210	27.039.610	938.808	41.709.497,58	4,99	28.802.066,02	2,68
2022	43.087.760	28.624.990	947.642	45.468.394,18	9,01	30.206.544,24	4,88
2023	47.150.650	30.198.240	968.484	48.685.006,67	7,07	31.180.938,46	3,23
2024	51.123.060	31.876.510	961.909	53.147.501,48	9,17	33.138.800,03	6,28
2025	55.089.000	33.709.110	968.484	56.881.683,13	7,03	34.806.057,71	5,03

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, diolah

e. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan artinya tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memenuhi standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.19.
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	**Kab. Karanganyar**		**Jawa Tengah**	**Nasional**
	(Ribu Jiwa)	**(%)**	**(%)**	**(%)**
2021	95,41	10,68	11,79	10,14
2022	88,56	9,85	10,93	9,54
2023	88,64	9,79	10,77	9,36
2024	87,37	9,59	9,58	8,57

Tahun	Kab. Karanganyar		Jawa Tengah	Nasional
	(Ribu Jiwa)	(%)	(%)	(%)
2025	77,66	8,48	9,48	8,47

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 09/09/3313/Th. IV, 17 September 2025, BPS

Secara umum, pada periode Maret 2015-Maret 2025 tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar sebanyak 77,66 ribu orang atau sebesar 8,48 persen terhadap total penduduk. Secara absolut, terjadi penurunan sekitar 9,71 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 yang sebesar 87,37 ribu orang. Demikian juga secara persentase, kemiskinan mengalami penurunan 1,11 persen poin dari 9,59 persen menjadi 8,48 persen.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar di tahun 2025 berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional, sebagaimana Gambar berikut.



Gambar 2.13.
Persentase Kemiskinan Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Wilayah Pengembangan SUBOSUKAWONOSRATEN, Angka Kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 menempati posisi ke 5 (lima) setelah Kabupaten Sragen (11,22), Kabupaten Klaten (11,00), Kabupaten Wonogiri (9,59) dan Kabupaten Boyolali (8,71), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.20.
Angka Kemiskinan di Kawasan Subosukawonosraten
Tahun 2021-2025

No	Kabupaten	Angka Kemiskinan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Surakarta	9,4	8,84	8,44	8,31	7,69
2	Sukoharjo	8,23	7,61	7,58	7,47	6,83

No	Kabupaten	Angka Kemiskinan				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	**Karanganyar**	**10,68**	**9,85**	**9,79**	**9,59**	**8,48**
4	Klaten	13,49	12,33	12,28	12,04	11,00
5	Boyolali	10,18	9,82	9,81	9,63	8,71
6	Sragen	13,83	12,94	12,87	12,41	11,22
7	Wonogiri	11,55	10,99	10,94	10,71	9,59

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 09/09/3313/Th. IV, 17 September 2025, BPS

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan tersebut.

Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Karanganyar dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 cenderung mengalami kenaikan. Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar tahun 2021-2025 tersaji dalam tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.21.
Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (rupiah/kapita/bulan)	PERTUMBUHAN GARIS KEMISKINAN
2021	401.542	4,14%
2022	424.677	5,76%
2023	465.703	9,66%
2024	491.551	5,55%
2025	523.407	6,48%

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 09/09/3313/Th. IV, 17 September 2025, BPS

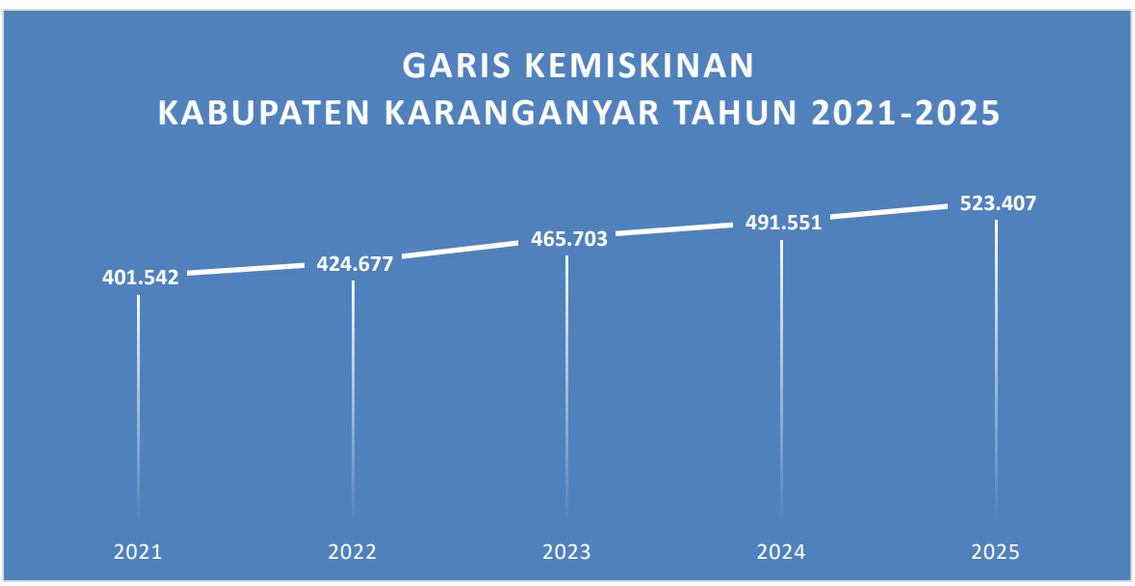

Gambar 2.14.
Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025

Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karanganyar menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kemiskinan ekstrem yang tercatat sebesar 1,57% pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,95% pada tahun 2022, namun kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai 0,31% pada tahun 2023. Selanjutnya, mulai tahun 2024 penyajian data menggunakan indikator Persentase Penduduk Miskin Ekstrem, yang tercatat sebesar 0,62% dan kembali menurun menjadi 0,25% pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan melalui penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sinergi program lintas sektor yang diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karanganyar.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Selain dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sejak tahun 2015 sampai dengan Maret 2025 cenderung berfluktuasi. Pada Maret 2025 Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024 yaitu 1,63 menjadi 0,91. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,41 menjadi 0,17 di Maret 2025. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil.

Tabel 2.22.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2021	1,61	0,37
2022	1,64	0,37
2023	1,22	0,24
2024	1,63	0,41
2025	0,91	0,17

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 09/09/3313/Th. IV, 17 September 2025, BPS

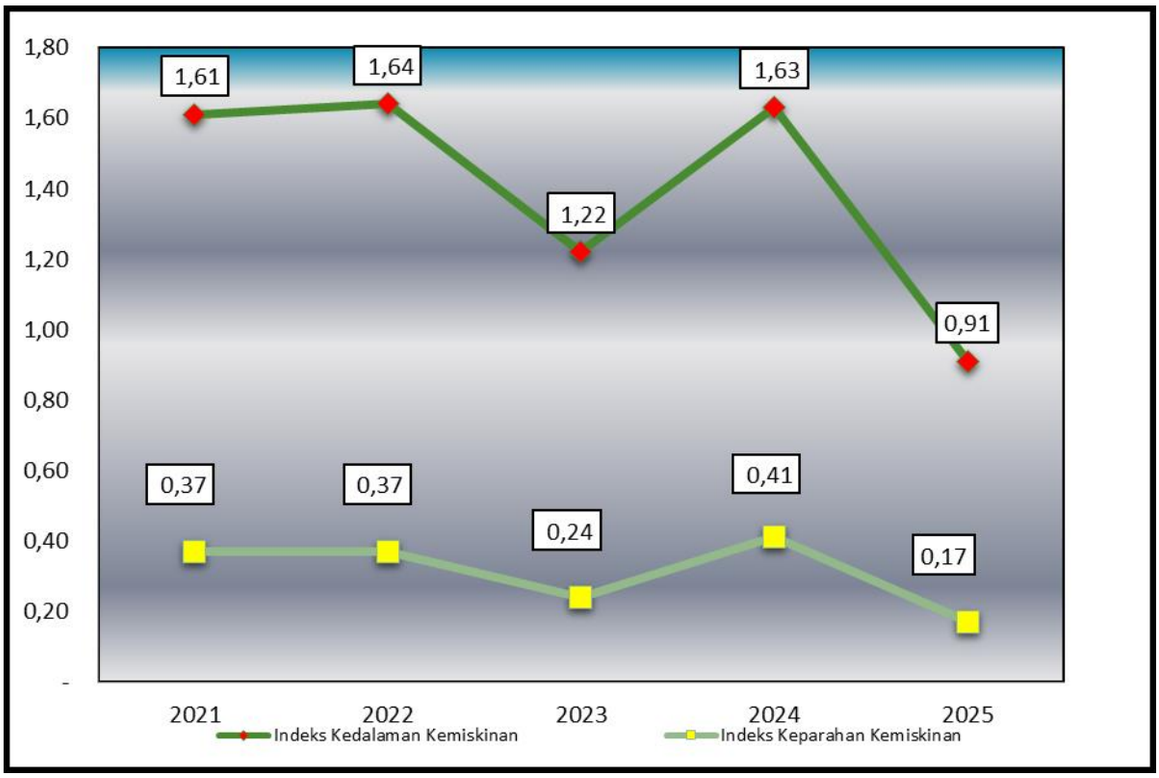

Gambar 2.15.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar menurut metode baru dari Tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sebesar 75,99 menjadi 78,67 di tahun 2025.

Tabel 2.23.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar
beserta Kompositnya Tahun 2021-2025

Komponen	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,55	77,64	77,72	77,91	78,21
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,69	13,70	13,71	13,73	13,74
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,57	8,79	9,02	9,26	9,27
Pengeluaran per kapita	Rp 000	11.509,00	11.798,00	12.260,00	12.732,00	13.244,00
IPM	Angka	75,99	76,58	77,31	78,11	78,67

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 69/11/33/Th. XIX, 5 November 2025, BPS

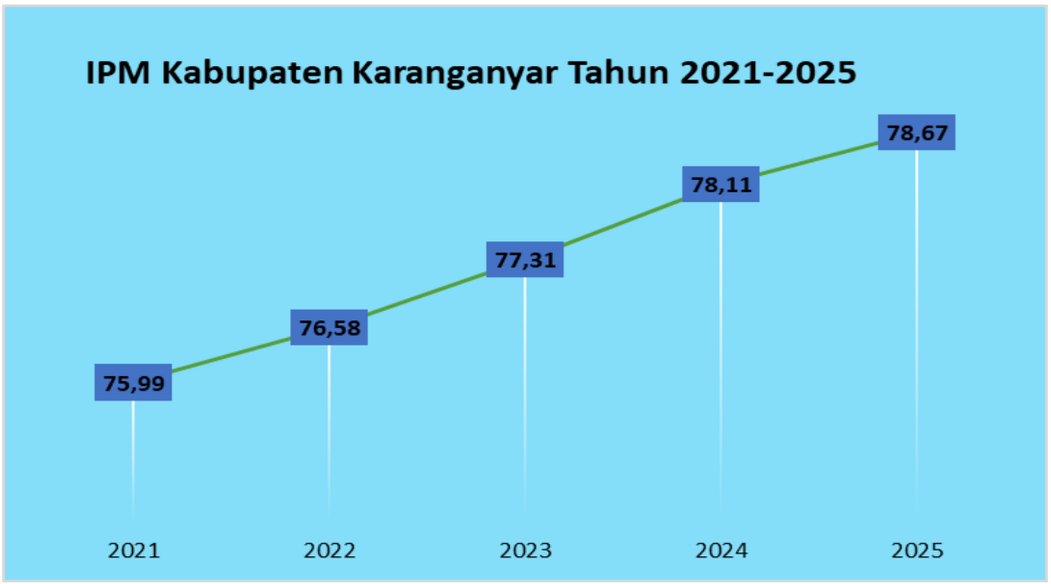

Gambar 2.16.
Nilai IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Se-Subosukawonosraten, IPM Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar menempati urutan ke 4 (empat) setelah Kota Surakarta (84,92), Kabupaten Sukoharjo (79,90) dan Kota Klaten (78,67). Adapun IPM Kabupaten/Kota Wilayah Subosukawonosraten tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.24.
IPM Kabupaten/Kota Wilayah Soloraya Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Surakarta	82,62	83,08	83,54	84,41	84,92
2.	Sukoharjo	77,13	77,94	78,65	79,30	79,90
3.	**Karanganyar**	**75,99**	**76,58**	**77,31**	**78,11**	**78,67**
4.	Klaten	76,12	76,95	77,59	78,16	78,68
5.	Boyolali	74,40	74,97	75,41	75,96	76,95
6.	Sragen	74,08	74,65	75,1	75,53	76,38
7.	Wonogiri	70,49	71,04	71,97	72,54	73,42

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 69/11/33/Th. XIX, 5 November 2025, BPS

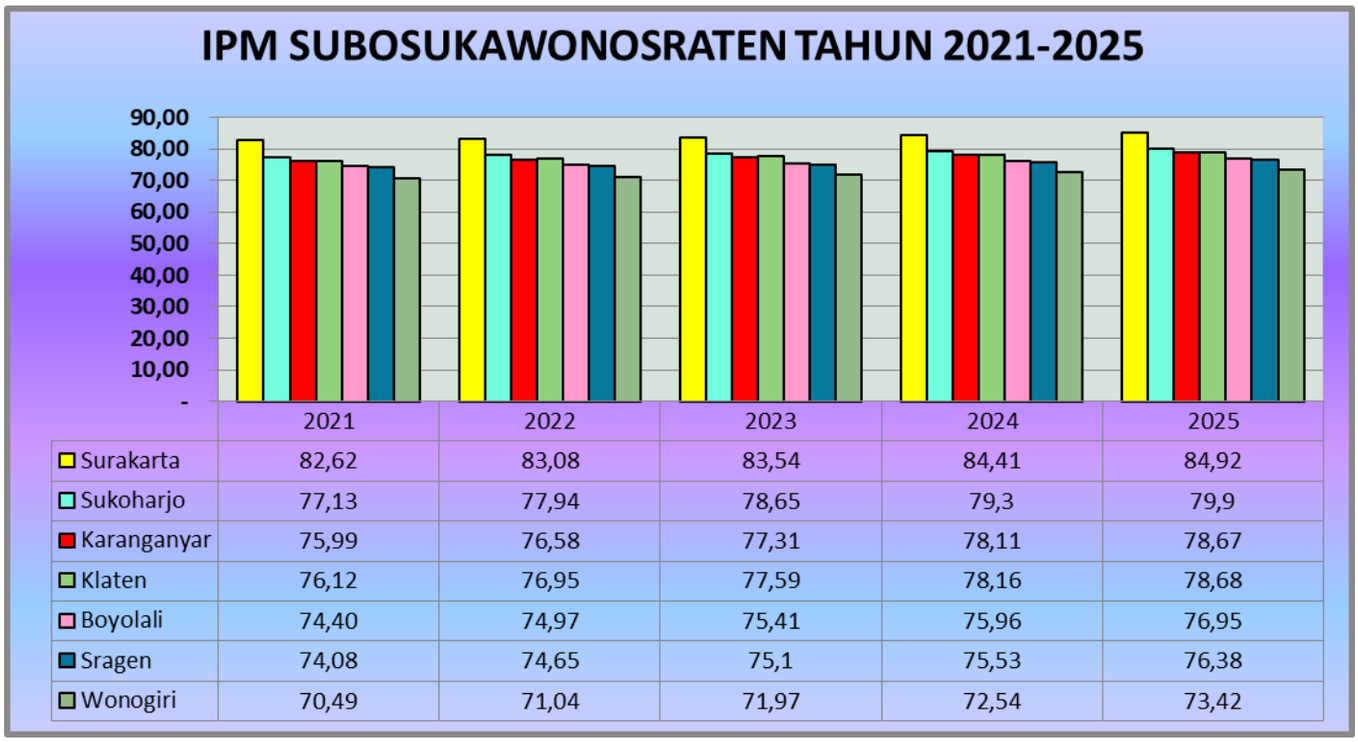

	2021	2022	2023	2024	2025
Surakarta	82,62	83,08	83,54	84,41	84,92
Sukoharjo	77,13	77,94	78,65	79,3	79,9
Karanganyar	75,99	76,58	77,31	78,11	78,67
Klaten	76,12	76,95	77,59	78,16	78,68
Boyolali	74,40	74,97	75,41	75,96	76,95
Sragen	74,08	74,65	75,1	75,53	76,38
Wonogiri	70,49	71,04	71,97	72,54	73,42

Gambar 2.17.
Nilai IPM Kabupaten/Kota Se-Subosukawonosraten
Tahun 2021-2025

Tabel 2.25.
IPM Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2021-2025

TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025
KARANGANYAR	75,99	76,58	77,31	78,11	78,67
JAWA TENGAH	72,16	72,79	73,39	73,87	74,77
NASIONAL	73,61	73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 69/11/33/Th. XIX, 5 November 2025, BPS

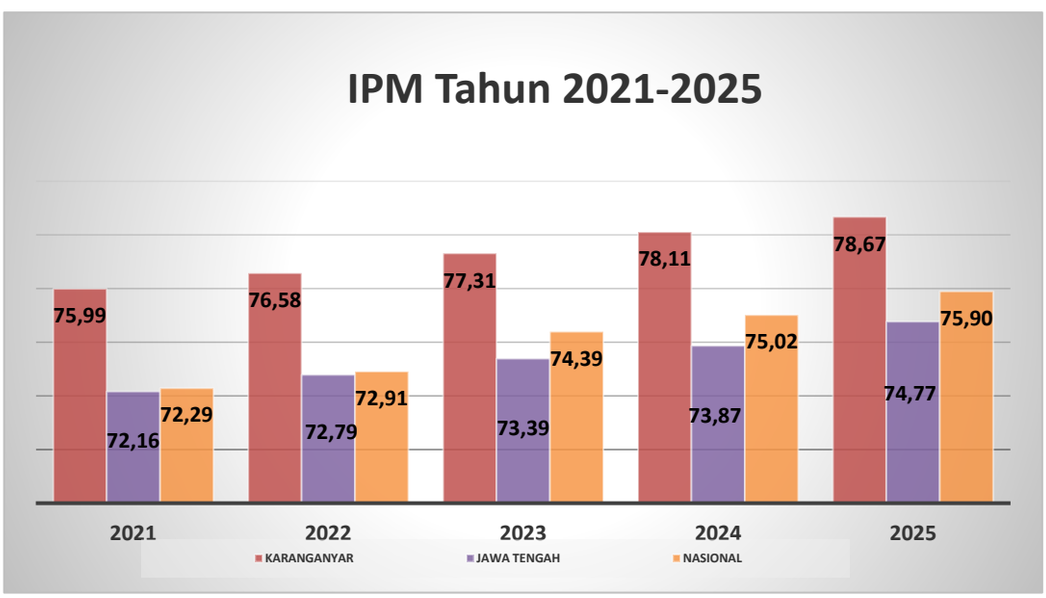

Gambar 2.18.
Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2021-2025

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ditentukan 6 jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan 6) sosial, yang mulai berlaku pada Tahun 2019, maka terdapat beberapa SPM yang harus dilaksanakan oleh daerah.

1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Persentase Realisasi Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 hingga 2025 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.26.

Persentase Realisasi Pencapaian Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 s.d 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Persentase Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	98,90	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Pendidikan Keseteraan	83,90	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2026

2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak dieroleh setiap warga negara secara minimal. Persentase Realisasi Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 hingga 2025 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021) sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.27.

Persentase Realisasi Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 s.d 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Persentase Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	84,50	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Jenis Layanan Dasar	Persentase Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2026

3) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Persentase Realisasi Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 hingga 2025 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021) sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.28.

Persentase Realisasi Pencapaian Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 s.d 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Persentase Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2026

4) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Persentase Realisasi Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 hingga 2025 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021) sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.29.

Persentase Realisasi Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 s.d 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Persentase Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Layanan Dasar	Persentase Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
	relokasi program pemerintah kabupaten/kota					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2026

5) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Merupakan suatu keadaan dinamis bagi Pemerintah Darah dan masyarakatagardapat melaksanakan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Persentase Realisasi Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 hingga 2025 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021) sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.30.

Persentase Realisasi Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 s.d 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Persentase Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPBD dan SATPOLPP Kabupaten Karanganyar, 2026

6) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal. Persentase Realisasi Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 hingga 2025 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021) sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.31.

Persentase Realisasi Pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 s.d 2025

No	Indikator SPM	Persentase Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator SPM	Persentase Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencaana bagi Korban Bencana Daerah.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, 2026

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. European Commission memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam Regional Competitiveness Index (RCI) didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Institusi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi. Memperhatikan 11 Pilar tersebut, sebagian besar telah diuraikan dalam berbagai urusan pelayanan umum pemerintah.

Lebih lanjut dalam pasal 258 dan 392 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan aspek informasi pembangunan dilihat dari (i) aspek kesejahteraan masyarakat; (ii) aspek pelayanan umum; (iii) aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan akan baik jika pelayanan publik terpenuhi secara baik. Pelayanan publik yang baik akan menjadi daya dukung untuk meningkatkan daya saing daerah, yang mana pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan daerah menyediakan layanan publik yang lebih baik lagi. Daya saing daerah juga memerlukan dukungan sumber daya yang berkualitas tinggi. Sumberdaya manusia berkualitas tinggi dapat muncul jika kondisi kesejahteraan masyarakat baik. Jika digambarkan permasalahan pembangunan sebagaimana gambar berikut.

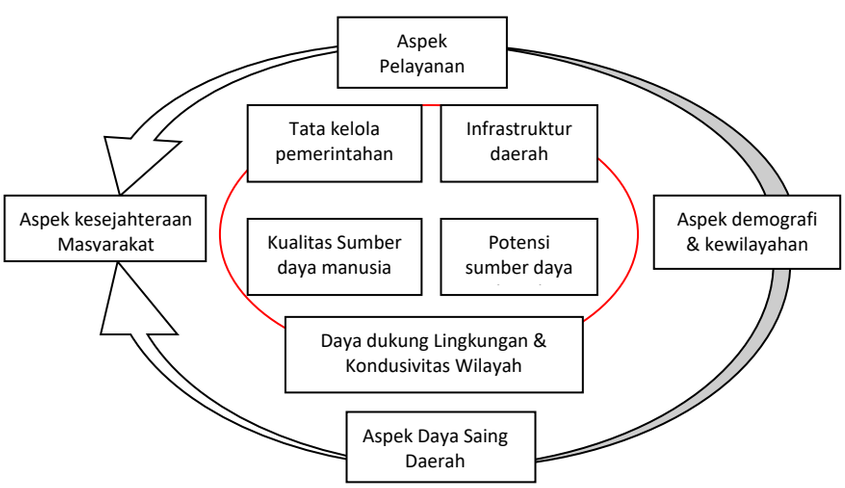

Gambar 2.19.
Aspek Permasalahan Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Daya saing merupakan isu besar bagi eksistensi suatu daerah. Era teknologi informasi menghadirkan tantangan tersendiri bagi kemampuan daerah memenangkan kompetisi di lingkup nasional dan internasional. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten menghadapi tantangan (i) bagaimana membuat kabupaten berdaya saing tinggi, dan (ii) bagaimana prestasi daya saing tersebut menghasilkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat untuk pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang memiliki tolok ukur dalam mengurangi masalah dalam perekonomian, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas mampu mencerminkan adanya peningkatan aktivitas dunia usaha dan ekonomi yang akan memberikan peluang besar kepada angkatan kerja di pasar. Kondisi tersebut dapat dicapai jika disertai dengan peningkatan kesempatan kerja dan penurunan pengangguran di masyarakat. Pemerintah harus mampu mendorong sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja agar pengangguran dapat ditekan seminimal mungkin.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, identifikasi terhadap sektor yang memberi kontribusi besar bagi PDRB Kabupaten Karanganyar menjadi proksi dari sektor yang memberi peluang kerja bagi penduduk kabupaten Karanganyar. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Karanganyar akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap pengurangan pengangguran. Apabila pengangguran berkurang maka ketimpangan ekonomi dan kemiskinan penduduk dapat dikurangi.

Penguatan kontribusi bagi sektor-sektor unggulan Kabupaten Karanganyar harus diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi kreatif. Dengan ekonomi kreatif diharapkan dapat memperkuat sektor-sektor unggulan tetapi juga memperkuat brand image kabupaten Karanganyar menuju kabupaten yang smart economy. Smart economy mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif memiliki ciri, yaitu apabila perekonomian berkembang maka tingkat kesenjangan dan tingkat kemiskinan akan semakin berkurang.

a. Identifikasi Peluang/Kendala dan Inventarisasi Urgensi Tahun 2025

Identifikasi peluang/potensi daerah salah satunya dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun terakhir berfluktuasi pada saat tahun 2020 pertumbuhan ekonomi turun drastis bahkan mengalami resesi, dimana pertumbuhan ekonomi adalah -1,87% yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Akan tetapi pada tahun 2021 sudah mulai naik lagi mencapai 3,59% dan tahun 2022 menjadi 5,86%, menunjukkan sudah adanya pemulihan kondisi ekonomi di Kabupaten Karanganyar, meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,53%. Namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan tipis menjadi 5,54% (BPS: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2025).

Ditinjau dari sisi kontribusi sektoral menurut harga berlaku selama 5 tahun menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karanganyar, yakni sebesar 24.109.930.000.000,-. Selain sektor industri, sektor pertanian kehutanan dan perikanan juga merupakan kontributor

terbesar kedua dalam pembentukan PDRB yakni sebesar 6.034.660.000.000,-. Kedua sektor ini dari tahun ke tahun konsisten mengalami pertumbuhan dan menjadi dua sektor penyumbang terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Karanganyar.

Guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerapkan konsep pengembangan Kabupaten Karanganyar dengan bertumpu pada kebijakan pengembangan ekonomi lokal dengan memberdayakan masyarakat lokal dimana sektor industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) menjadi fokus pengembangan.

Memperhatikan beberapa aspek berdasarkan hasil pemetaan dan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), rincian analisis per pilar dan komponen sebagai berikut:

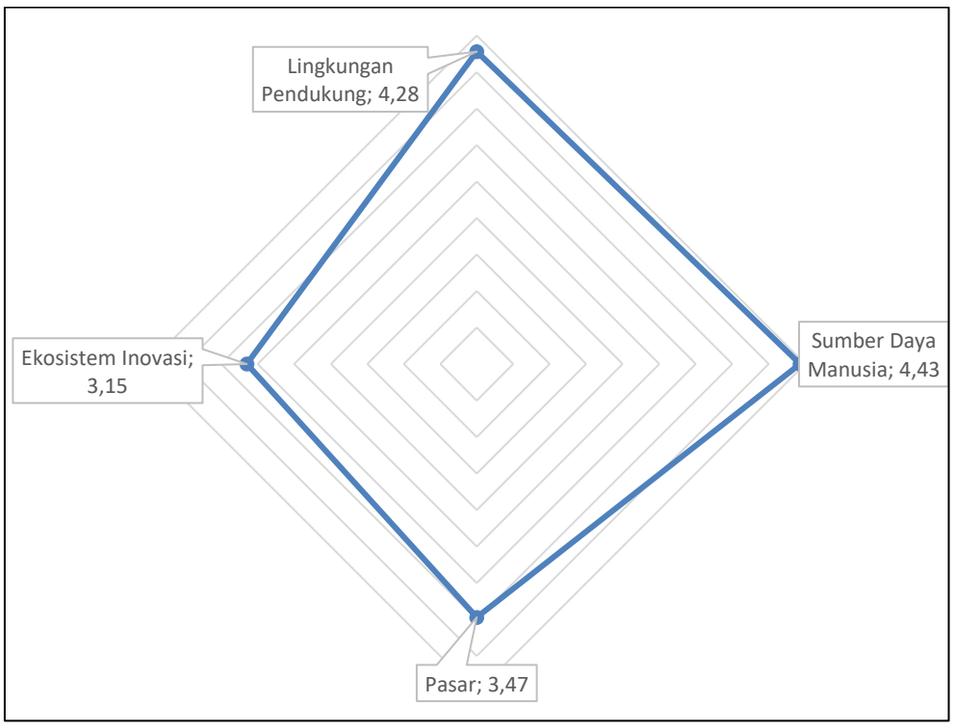

Gambar 2.20.
Daya Saing Daerah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Komponen

Pada jaring Daya Saing Daerah Berdasarkan Komponen di atas, terlihat bahwa Kabupaten Karanganyar unggul pada aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital dan Lingkungan Pendukung. Keunggulan daya saing Kabupaten Karanganyar dari faktor Sumber Daya Manusia/Human Capital dan Lingkungan Pendukung berimplikasi pada beberapa agenda kebijakan dan pengembangan terkait penguatan daya saing Kota/Kabupaten. Agenda kebijakan dan pengembangan tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki kelemahan daya saing dari aspek faktor Ekosistem Inovasi dan Faktor Pasar.

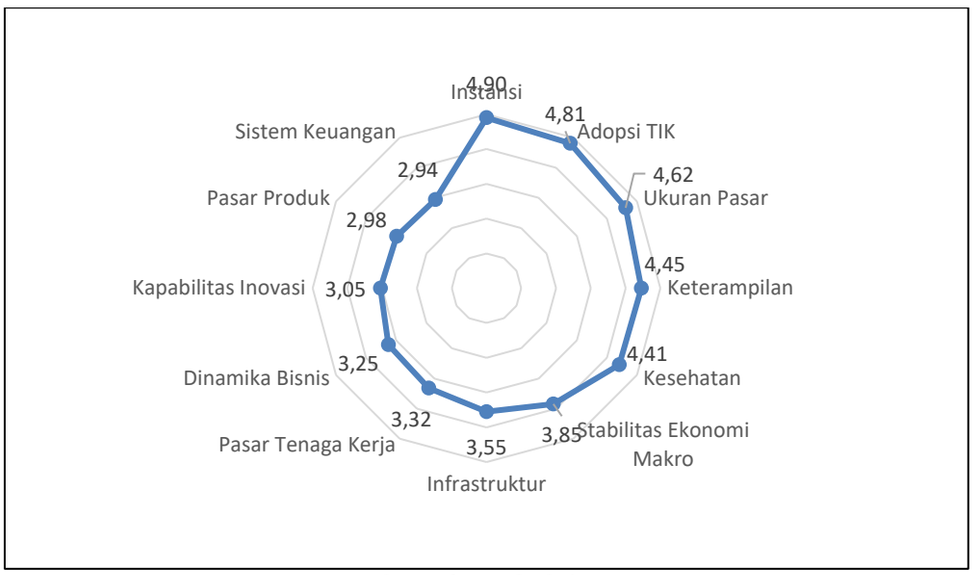

Gambar 2.21.
Daya Saing Daerah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Pilar

Pada jaring Daya Saing Daerah Berdasarkan Pilar di atas, terlihat bahwa Kabupaten Karanganyar unggul pada pilar instansi, adopsi TIK, ukuran pasar, keterampilan, kesehatan, stabilitas ekonomi makro dan infrastruktur. Namun lemah pada pilar pasar tenaga kerja, dinamika bisnis, kapabilitas inovasi , pasar produk, dan sistem keuangan.

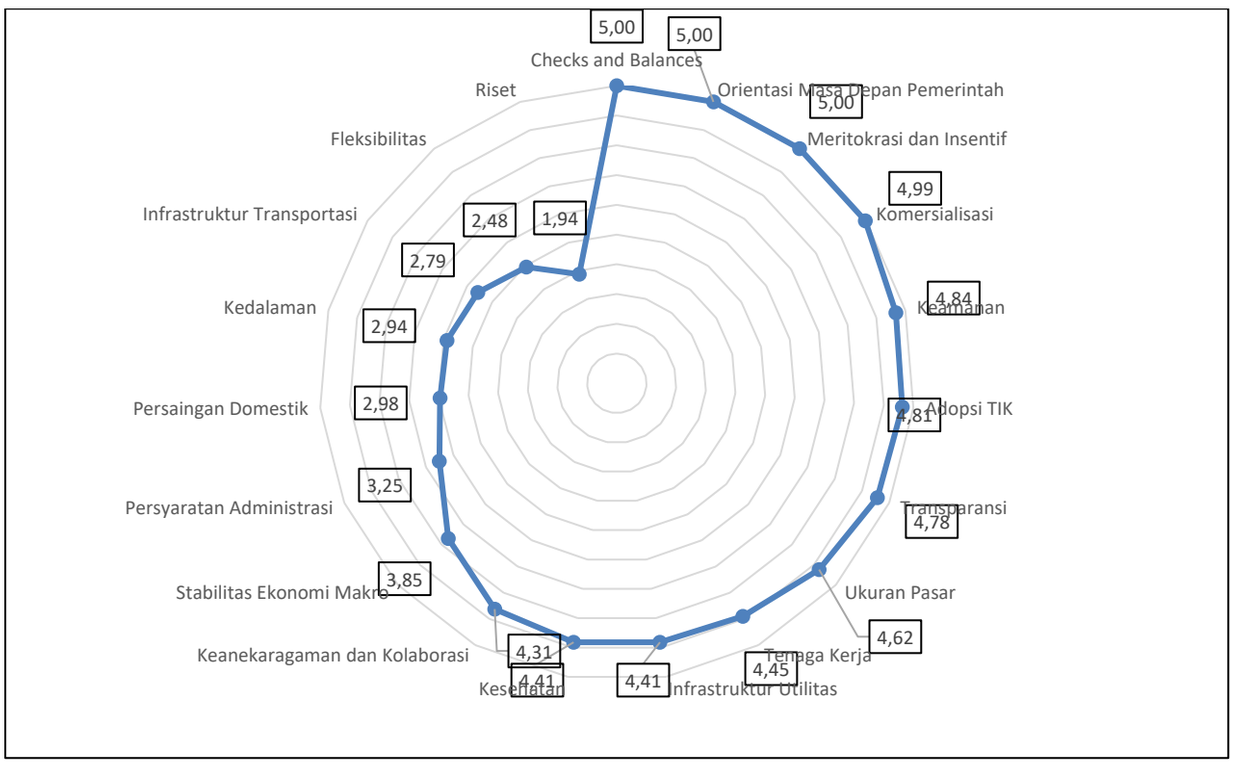

Gambar 2.22.
Daya Saing Daerah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Dimensi

Dari jaring Daya Saing Daerah berdasarkan Dimensi di atas, terlihat bahwa Kabupaten Karanganyar unggul pada dimensi checks and balances, orientasi masa depan pemerintah, meritokrasi dan insentif, komersialisasi, keamanan, adopsi TIK, transparansi, ukuran pasar, tenaga kerja, infrastruktur utilitas (kelistrikan dan air), kesehatan, keanekaragaman dan kolaborasi, serta stabilitas ekonomi makro. Namun Kabupaten Karanganyar lemah pada dimensi persyaratan administrasi, persaingan domestic,

kedalaman, infrastruktur transportasi (darat, jalur kereta api, udara, Pelabuhan), fleksibilitas, dan riset.

Keunggulan daya saing Kabupaten Karanganyar dari dimensi checks and balances, orientasi masa depan pemerintah, meritokrasi dan insentif, komersialisasi, keamanan, adopsi TIK, transparansi, ukuran pasar, tenaga kerja, infrastruktur utilitas (kelistrikan dan air), kesehatan, keanekaragaman dan kolaborasi, serta stabilitas ekonomi makro berimplikasi pada beberapa agenda kebijakan dan pengembangan terkait penguatan daya saing Kota/Kabupaten. Agenda kebijakan dan pengembangan tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki kelemahan daya saing dari dimensi persyaratan administrasi, persaingan domestic, kedalaman, infrastruktur transportasi (darat, jalur kereta api, udara, Pelabuhan), fleksibilitas, dan riset saat ini.

Daya saing pada masa ini tidak bisa mengesampingkan peran dari riset dan inovasi sebagai dasar dari sebuah kebijakan. Regulasi tentang inovasi di Kabupaten Karanganyar telah dibuat Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dan rencana aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah, meskipun sudah terdapat Perkada yang mendukung hal tersebut. Agenda yang mendorong percepatan inovasi untuk kepentingan sektor industri, sosial dan pemerintahan masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Penguatan yang perlu dilakukan adalah realisasi hasil kerjasama dengan lembaga riset baik yang ada di perguruan tinggi, maupun di dalam industri untuk memperbanyak hasil riset yang bisa dipergunakan oleh industri maupun kelompok masyarakat lain.

b. Pemetaan Sektor/Komponen Pembentuk Andalan Tahun 2025

Dalam upaya untuk membangun suatu daerah yang berimbas pada peningkatan daya saing daerah, setiap daerah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat.

Dari hasil analisis jaring dari berbagai aspek diatas, dapat dipetakan komponen pembentuk sektor andalan yang menjadi kekuatan dan nilai tambah daya saing Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Lingkungan Pendukung

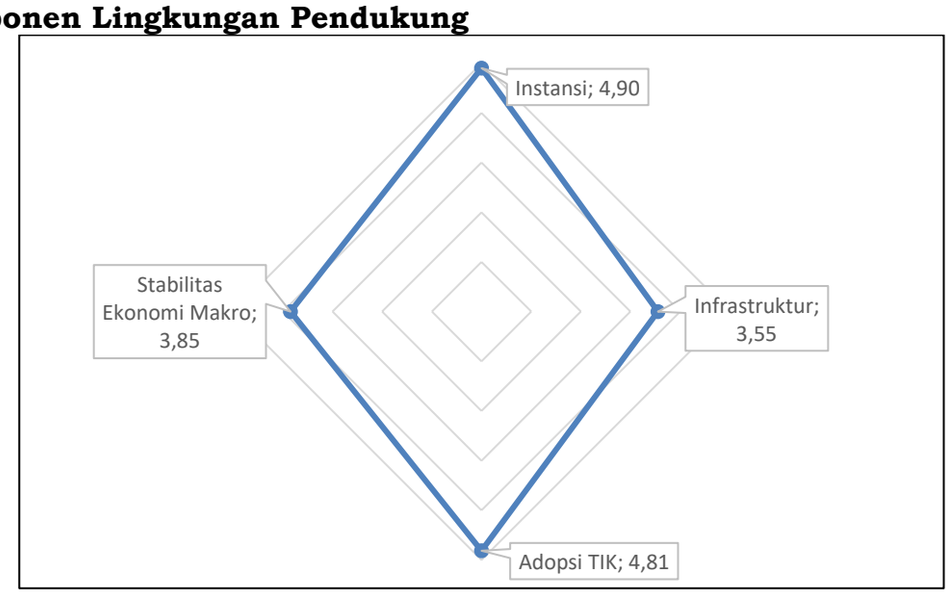

Gambar 2.23.
Perbandingan Pilar pada Aspek Eksosistem Inovasi

Dari hasil analisis jaring diketahui bahwa yang menjadi kekuatan atau keunggulan adalah pilar instansi dengan dimensi check and balances, orientasi masa depan pemerintah, serta meritokrasi dan insentif yang menjadi faktor pendukungnya. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah pilar infrastruktur masih perlu peningkatan dan perhatian pada dimensi infrastruktur transportasi (skor rata-rata 2,79).

Komponen Sumber Daya Manusia

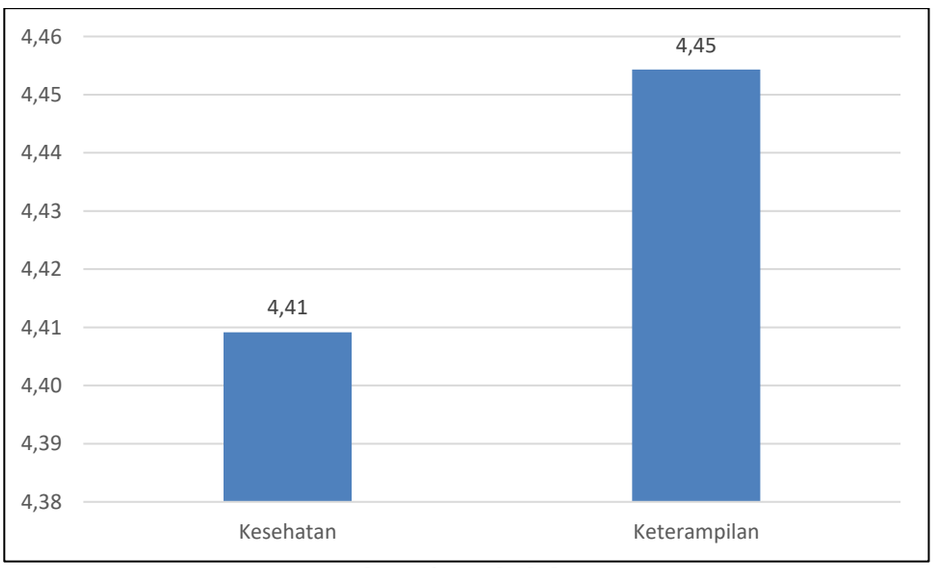

Gambar 2.24.
Perbandingan Pilar pada Komponen Sumber Daya Manusia

Dari hasil analisis batang diketahui bahwa aspek sumber daya manusia adalah aspek terkuat dalam analisis indeks daya saing daerah di Kabupaten Karanganyar dengan skor rata-rata 4,43. Aspek sumber daya manusia dengan pilar kesehatan dan pilar keterampilan yang mempunyai indeks tinggi, sehingga berpengaruh terhadap nilai rata-rata indeks aspek sumber daya manusia.

Komponen Faktor Pasar

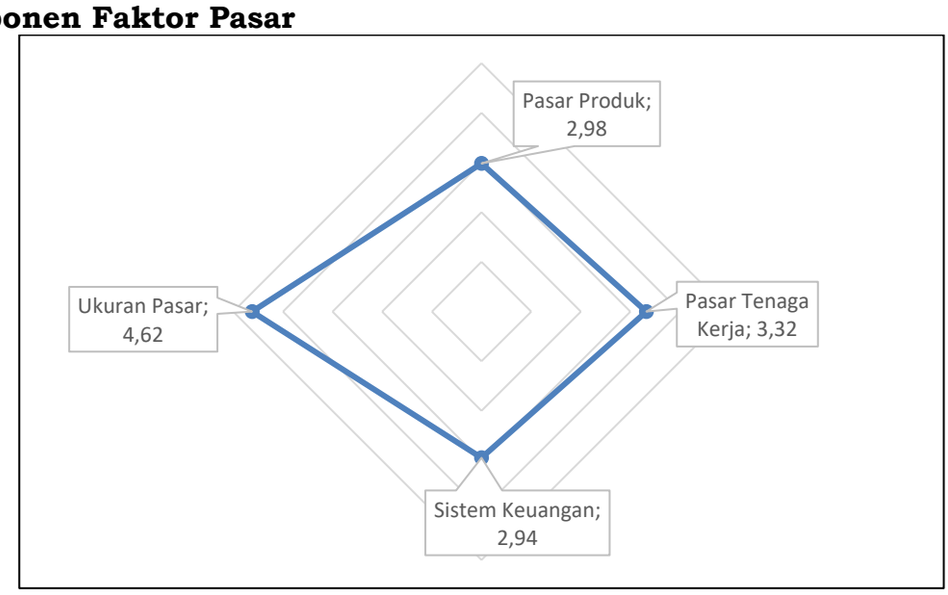

Gambar 2.25.
Perbandingan Pilar Pada Aspek Faktor Pasar *(Market)*

Dari hasil analisis jaring diketahui bahwa yang menjadi kekuatan atau keunggulan adalah pilar ukuran pasar dan pilar pasar tenaga kerja dengan dimensi meritokrasi dan insentif serta ukuran pasar yang menjadi faktor pendukungnya. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah pilar pasar produk dan sistem keuangan dengan faktor pelemah pada persaingan domestic (skor rata-rata 2,98) dan pilar sistem keuangan dengan faktor pelemah pada kedalaman (skor rata-rata 1,94).

Komponen Ekosistem Inovasi

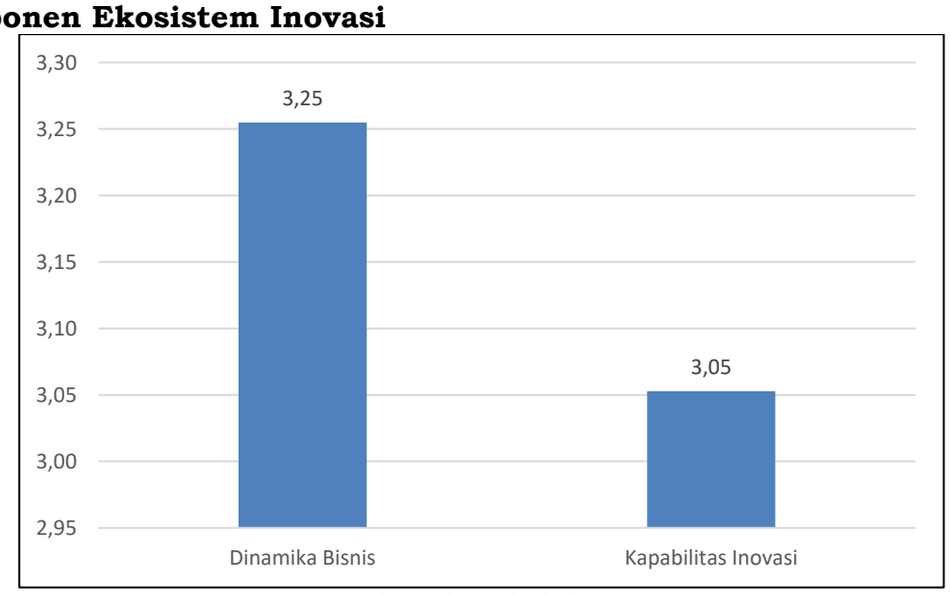

Gambar 2.26.
Perbandingan Pilar pada Komponen Ekosistem Inovasi

Dari hasil analisis batang diketahui bahwa yang menjadi kekuatan atau keunggulan adalah pilar dinamika bisnis yang menjadi faktor pendukungnya. Yang masih perlu peningkatan dan perhatian adalah pilar kapabilitas inovasi dengan dimensi riset (skor rata-rata 1,94) pada belanja riset dan indeks keunggulan Lembaga riset yang masih rendah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni

i. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.
ii. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.
iii. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Urusan Konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 2.32.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91%<X	Sangat tinggi
2	76%<X ≤ 90%	Tinggi
3	66%<X≤ 75%	Sedang
4	51%<X ≤ 65%	Rendah
5	X≤ 50%	Sangat Rendah

Pencapaian target urusan dan program yang dilaksanakan Kabupaten Karanganyar di tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari enam urusan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Urusan Pendidikan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II Tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartiisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart	%	83	83,6	100,72	Sangat Tinggi	84	99,52	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2026

Di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Karanganyar pembangunan sektor pendidikan semakin penting dengan ditetapkannya titik berat pembangunan pada bidang ekonomi yang diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia.

Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya.

Berikut data jumlah desa/kelurahan di setiap Kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan sesuai tingat pendidikan pada Tahun 2025.

Tabel 2.34.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Pendidikan				
		SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
1.	Jatipuro	10	2	-	2	-
2.	Jatiyoso	9	5	1	-	-
3.	Jumapolo	12	3	1	-	-
4.	Jumantono	11	4	1	1	-
5.	Matesih	9	5	1	1	-
6.	Tawangmangu	10	4	1	-	2
7.	Ngargoyoso	9	4	-	1	-
8.	Karangpandan	11	8	4	1	1
9.	Karanganyar	12	6	4	3	2
10.	Tasikmadu	10	4	1	1	1
11.	Jaten	8	3	1	2	1
12.	Colomadu	11	4	2	4	2
13.	Gondangrejo	13	9	2	1	1
14.	Kebakkramat	10	5	1	1	-
15.	Mojogedang	13	7	2	-	-
16.	Kerjo	10	3	1	-	-
17.	Jenawi	9	5	-	1	-
Karanganyar		**177**	**81**	**23**	**19**	**10**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa di semua kecamatan di Kabupaten Karanganyar telah memiliki fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas.

Tabel 2.35.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025

Tahun	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
2021	13,69	8,57
2022	13,70	8,79
2023	13,71	9,02
2024	13,73	9,26
2025	13,74	9,27

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada tahun 2025 harapan lama sekolah Kabupaten Karanganyar sebesar 13,74 tahun, yang berarti anak di Kabupaten Karanganyar tahun 2025 diperkirakan akan menempuh pendidikan selama 13,74 tahun atau setara Diploma 1.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 sebesar 9,27 tahun, yang artinya penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata baru sekolah hingga kelas 9 (SMP). Berdasarkan data RLS tersebut juga berarti penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Karanganyar sudah menempuh jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Kualitas pendidik menjadi isu permasalahan berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Kekurangan tenaga guru, baik di tingkat SD maupun SMP diantaranya disebabkan oleh banyaknya guru yang memasuki masa usia pensiun, sedangkan penambahan guru, baik berstatus PNS maupun PPPK belum sepenuhnya mampu menutupi kebutuhan tenaga guru di lapangan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas layanan pendidikan dan memastikan tidak ada sekolah yang mengalami kendala dalam proses belajar mengajar diakibatkan kekurangan guru, salah satunya dengan merekrut guru pengganti.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan dalam rangka terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupannya mulai dari dalam kandungan bahkan jauh sebelumnya yaitu dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu, kemudian sebagai bayi, balita, usia sekolah, remaja, pemuda, usia produktif, sampai kepada usia lanjut.

Dengan demikian pembangunan kesehatan juga mempunyai peranan yang amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Di Kabupaten Karanganyar, pembangunan di bidang kesehatan juga tak luput dari perhatian dan peran dari pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Urusan Kesehatan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 24 (dua puluh empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II Tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.36.

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama	%	25	100	400,00	Sangat Tinggi	25	400,00	Sangat Tinggi
		Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama	%	50	100	200,00	Sangat Tinggi	50	200,00	Sangat Tinggi
		Persentase Desa STBM	%	48	60,45	125,94	Sangat Tinggi	50	120,90	Sangat Tinggi
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan	%	55	100	181,82	Sangat Tinggi	60	166,67	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga medis sesuai kompetensi	%	47	90	191,49	Sangat Tinggi	50	180,00	Sangat Tinggi
		Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi	%	47	90	191,49	Sangat Tinggi	50	180,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian	%	47	100	212,77	Sangat Tinggi	50	200,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat	%	47	47	100,00	Sangat Tinggi	50	94,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Desa Siaga Aktif Mandiri	Desa	31	86	277,42	Sangat Tinggi	33	260,61	Sangat Tinggi
		Persentase rumah tangga sehat	%	91	94,73	104,10	Sangat Tinggi	91	104,10	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2026

Kinerja pembangunan kesehatan secara umum menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan kesehatan. Penilaian kinerja tersebut dilakukan menggunakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) sektor kesehatan yang mencerminkan capaian program prioritas nasional maupun daerah.

Beberapa indikator utama yang umumnya digunakan meliputi angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi stunting, cakupan imunisasi dasar lengkap, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), cakupan pelayanan kesehatan dasar, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Secara umum, capaian IUP sektor kesehatan menunjukkan adanya peningkatan pada berbagai aspek pelayanan kesehatan, seperti semakin luasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, meningkatnya cakupan pelayanan ibu dan anak, serta bertambahnya kepesertaan JKN. Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi stunting, pengendalian penyakit tidak menular, serta pemerataan tenaga kesehatan dan kualitas layanan di seluruh wilayah.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh sinergi lintas sektor, penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan promosi dan pencegahan penyakit, pemanfaatan teknologi informasi kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian IUP menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan agar target pembangunan nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, kinerja pembangunan kesehatan diharapkan terus mengalami peningkatan melalui penguatan sistem kesehatan yang tangguh, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2025, data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah tenaga medis di Kabupaten Karanganyar adalah sebanyak 155 (7,24%) dokter spesialis, 189 (8,83%) dokter umum, 53 (2,48%) dokter gigi, 598 (27,94%) bidan, 952 (44,49%) perawat, 143 (6,68%) farmasi, dan 50 (2,34%) ahli gizi. Bila dilihat dari sarana kesehatan maka kondisi sarana kesehatan di Karanganyar secara umum sudah cukup memadai. Tahun 2025 jumlah rumah sakit 8 (5,03%) unit, puskesmas 21 (13,21%) unit, puskesmas pembantu 54 (33,96%) unit, klinik pratama 62 (38,99%) unit, dan klinik utama 14 (8,81%) unit.

Tabel 2.37.

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Fasilitas Kesehatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Farmasi	Ahli Gizi
Puskesmas Jatipuro	-	3	1	20	17	1	1
Puskesmas Jatiyoso	-	4	1	20	15	1	2
Puskesmas Jumapolo	-	3	1	27	13	1	1
Puskesmas Jumantono	-	3	2	20	12	1	1
Puskesmas Matesih	-	3	2	18	9	-	1
Puskesmas Tawangmangu	-	3	1	18	10	1	2
Puskesmas Ngargoyoso	-	3	1	22	12	1	3
Puskesmas Karangpandan	-	3	1	23	11	1	2
Puskesmas Karanganyar	-	3	1	22	6	-	1
Puskesmas Tasikmadu	-	4	1	21	9	1	2
Puskesmas Jaten 1	-	3	1	16	11	1	1
Puskesmas Jaten 2	-	2	1	16	6	1	-
Puskesmas Colomadu 1	-	3	1	20	7	2	1
Puskesmas Colomadu 2	-	3	2	12	12	1	1
Puskesmas Gondangrejo	-	3	1	27	19	1	1
Puskesmas Kebakkramat 1	-	3	1	21	12	1	1
Puskesmas Kebakkramat 2	-	3	2	17	6	2	1
Puskesmas Mojogedang 1	-	3	1	22	13	1	1
Puskesmas Mojogedang 2	-	3	1	15	5	1	-
Puskesmas Kerjo	-	3	1	19	9	1	2
Puskesmas Jenawi	-	3	1	18	13	1	2
Rumah Sakit Umum Daerah	31	31	15	101	285	55	10
PKU	40	34	2	17	180	29	3
RS Adisumarmo	20	23	2	20	86	12	2
RS Jati Husada	22	12	5	15	56	8	4
RS Jafar Medika	12	10	1	8	49	4	1
RS Indo Sehat	10	6	-	6	25	5	-
RSIA Dian Pertiwi	3	2	1	6	9	3	1
RS Mangesti Rahayu	17	7	2	11	35	6	2
Jumlah	**155**	**189**	**53**	**598**	**952**	**143**	**50**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Berdasarkan data tenaga kesehatan di atas, terlihat bahwa tenaga kesehatan didominasi oleh tenaga perawat yaitu sebanyak 952 orang atau 44,49% dari total tenaga kesehatan di Kabupaten Karanganyar. Mematuhi Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.7/0004246 Tahun 2025 tentang Dukungan terhadap Program Gubernur Jawa Tengah “layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling)”, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar juga telah melaksanakan program Speling tersebut, dengan mengunjungi daerah-daerah di wilayah kerja

Kabupaten Karanganyar sesuai dengan surat tugas dari Bupati Karanganyar.

Tabel 2.38.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik Pratama	Klinik Utama
1.	Jatipuro	-	1	4	1	-
2.	Jatiyoso	-	1	1	-	-
3.	Jumapolo	-	1	4	1	-
4.	Jumantono	-	1	4	2	-
5.	Matesih	-	1	3	5	-
6.	Tawangmangu	-	1	2	4	1
7.	Ngargoyoso	-	1	3	2	-
8.	Karangpandan	-	1	4	2	-
9.	Karanganyar	1	1	2	8	3
10.	Tasikmadu	2	1	3	4	-
11.	Jaten	1	2	5	4	2
12.	Colomadu	2	2	2	11	5
13.	Gondangrejo	-	1	3	8	2
14.	Kebakkramat	1	2	2	3	-
15.	Mojogedang	1	2	5	4	1
16.	Kerjo	-	1	4	3	-
17.	Jenawi	-	1	3	-	-
Karanganyar		**8**	**21**	**54**	**62**	**14**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Dari lima jenis fasilitas kesehatan didominasi oleh Klinik Pratama sebanyak 62 unit atau 38,99% dari total fasilitas kesehatan yang ada. Klinik Pratama merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, baik umum maupun khusus, yang dipimpin dan dilayani oleh dokter umum. Klinik ini melayani rawat jalan dan rawat inap, tindakan medis dasar (bedah kecil/minor), serta imunisasi, sering kali beroperasi sebagai layanan swasta yang terjangkau bagi masyarakat. Keberadaan Klinik Pratama ini dapat memudahkan masyarakat untuk menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tanpa harus langsung ke rumah sakit.

Terkait dengan stunting, guna pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Karanganyar, Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai upaya, diantaranya pemberian makanna tambahan bagi bayi dan balita penderita stunting secara langsung dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami kurang gizi.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 8 (delapan) program yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II Tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	76	76	100,00	Sangat Tinggi	77	98,70	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak	%	96,5	99,4	103,01	Sangat Tinggi	96,5	103,01	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL	%	98	99,89	101,93	Sangat Tinggi	98,5	101,41	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran dalam kondisi baik	%	73	75	102,74	Sangat Tinggi	74	101,35	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan	%	57	57	100,00	Sangat Tinggi	58	98,28	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	53	58,73	110,81	Sangat Tinggi	50	107,41	Sangat Tinggi
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik	%	85	85	100,00	Sangat Tinggi	86	98,84	Sangat Tinggi
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	85	90	105,88	Sangat Tinggi	85	105,88	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2026

Infrastruktur jalan di setiap daerah merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketersediaan jalan yang baik akan membuat suatu wilayah cepat berkembang karena memiliki akses yang baik dan terhubung. Manfaat langsung dari pembangunan jalan dan Jembatan adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya untuk menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya.Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya.

Pada tahun 2025, di Kabupaten Karanganyar terbentang jalan sepanjang 987,33 km yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 9,9 km (1,00%), jalan provinsi sepanjang 106,1 km (10,75%) dan 871,33 km (88,25%) jalan kabupaten. Adapun jalan kabupaten di tahun 2025 memiliki kondisi jalan baik sepanjang 511,76 km (58,73%), kondisi jalan sedang sepanjang 215,81 km (24,77%), kondisi jalan rusak sepanjang 106,60 km (12,23%) dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 37,16 km (4,26%). Sehingga jalan kondisi mantap di Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sebesar 727,57 Km atau 83,50%.

Tabel 2.40.

Panjang Jalan di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kewenangannya Tahun 2021 s.d 2025

Kewenangan	2021		2022		2023		2024		2025	
	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
Negara	9,9	0,85	9,9	0,85	9,9	1,00	9,9	1,00	9,9	1,00
Provinsi	106,1	9,13	106,1	9,13	106,1	10,75	106,1	10,75	106,1	10,75
Kabupaten	1.046,51	90,02	1.046,51	90,02	871,33	88,25	871,33	88,25	871,33	88,25
Total	**1.162,51**	**100,00**	**1.162,51**	**100,00**	**987,33**	**100,00**	**987,33**	**100,00**	**987,33**	**100,00**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2026

Tabel 2.41.
Panjang Jalan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kondisi Jalan
Tahun 2021 s.d 2025

Kondisi Jalan	2021		2022		2023		2024		2025	
	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
Baik	516,14	49,32	437,54	41,81	357,425	41,02	602,27	69,12	511,76	58,73
Sedang	365,87	34,96	420,58	40,19	366,201	42,03	138,61	15,91	215,81	24,77
Rusak	147,55	14,10	145,71	13,92	82,154	9,43	71,40	8,19	106,60	12,23
Rusak Berat	16,95	1,62	42,68	4,08	65,55	7,52	59,05	6,78	37,16	4,26
Total	**1.046,51**	**100,00**	**1.046,51**	**100,00**	**871,33**	**100,00**	**871,33**	**100,00**	**871,33**	**100,00**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2026

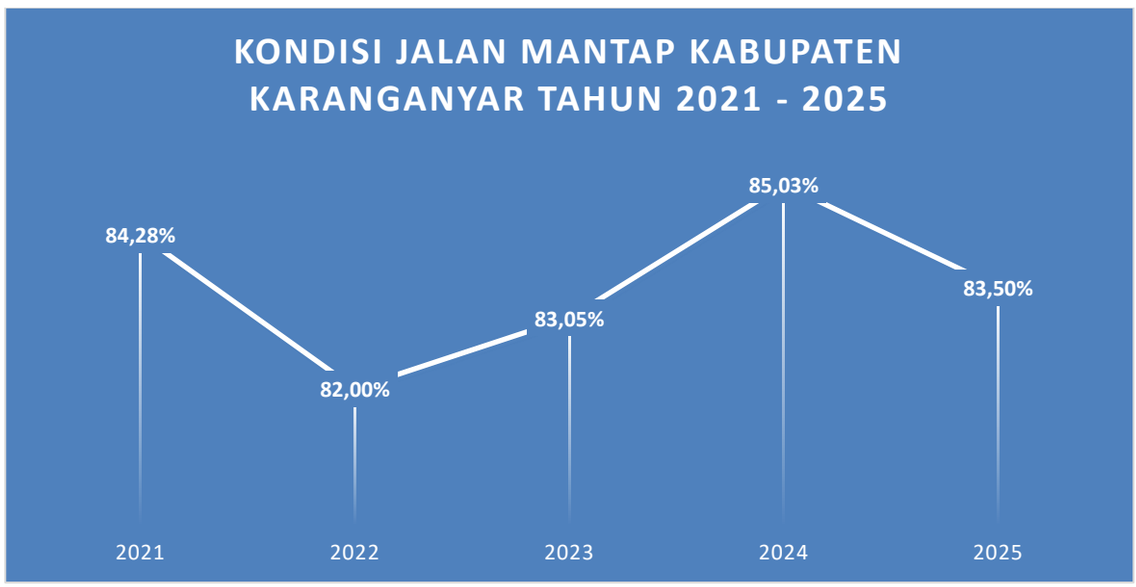

Gambar 2.27.
Perkembangan Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) program, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II Tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	KK	10	12	120,00	Sangat Tinggi	15	80,00	Tinggi
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 ha	%	34,13	58,73	172,08	Sangat Tinggi	43,08	136,33	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penanganan RTLH	%	6,22	6,40	102,89	Sangat Tinggi	6,74	94,96	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan	Peruma han	401	401	100,00	Sangat Tinggi	426	94,13	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi	Pengembang	37	37	100,00	Sangat Tinggi	40	92,50	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2026

Secara umum, pelaksanaan program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Seluruh indikator program telah mencapai bahkan melampaui target tahunan dengan kategori kinerja Sangat Tinggi. Selain itu, sebagian besar capaian telah memenuhi atau melampaui target akhir RPD, menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dalam mendukung penyediaan perumahan layak huni, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Meskipun demikian, beberapa program masih memerlukan optimalisasi agar target akhir RPD dapat tercapai secara penuh.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: SATPOLPP dan BPBD Kabupaten Karanganyar, 2026

Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang

disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non materi. Berikut adalah data jumlah kejadian bencana alam di tahun 2025.

Tabel 2.44.
Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puting Beliung
1.	Jatipuro	5	-	1	10
2.	Jatiyoso	15	-	2	4
3.	Jumapolo	11	-	4	6
4.	Jumantono	5	-	8	7
5.	Matesih	8	-	4	8
6.	Tawangmangu	16	-	3	3
7.	Ngargoyoso	12	-	1	6
8.	Karangpandan	9	-	2	5
9.	Karanganyar	1	-	4	6
10.	Tasikmadu	-	1	3	5
11.	Jaten	-	1	3	3
12.	Colomadu	-	-	2	3
13.	Gondangrejo	3	1	4	5
14.	Kebakkramat	2	-	1	-
15.	Mojogedang	1	-	3	6
16.	Kerjo	5	-	0	7
17.	Jenawi	10	-	2	2
Kabupaten Karanganyar		**103**	**3**	**47**	**86**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Berdasarkan data kejadian bencana alam Kabupaten Karanganyar, jenis bencana tanah longsor mendominasi kejadian bencana di tahun 2025. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh curah hujan intensitas tinggi/ekstrem yang memicu struktur tanah labil, terutama di wilayah lereng curam seperti Tawangmangu dan Ngargoyoso. Kondisi ini diperparah oleh faktor geografis lereng Gunung Lawu dan perubahan fungsi lahan di kawasan rawan bencana.

Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang menggambarkan tingkat risiko bencana pada suatu wilayah. Indeks risiko bencana diformulasikan dengan memperhitungkan komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) daerah dalam menghadapi bencana. Kapasitas menjadi komponen utama yang mempengaruhi perubahan nilai IRB dan dihitung berkala setiap tahun oleh pemerintah kabupaten/kota. IRB kabupaten/kota dihitung berdasarkan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) kabupaten/kota. Indeks Ketahanan Daerah adalah indeks yang mengukur tingkat kemampuan suatu daerah dalam mencegah, menghadapi, merespons dan pulih dari bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan berkelanjutan. IKD mengukur tingkat ketangguhan atau kapasitas daerah dalam mengelola risiko tersebut. Capaian IRB dan IKD dari tahun 2020 sampai dengan 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.45.
Capaian Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah
Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indek Risiko Bencana	Angka	108,03	91,51	102,77	87,71	82,14

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
2.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	Angka	0,75	0,79	0,78	0,80	0,86

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

Desa tangguh bencana (destana) atau kelurahan tangguh bencana (keltana) merupakan desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Desa atau kelurahan tersebut telah diberikan pelatihan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya sehingga mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Destana atau keltana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan risiko bencana di wilayah masing-masing. Masyarakat mendapat pelatihan dan sosialisasi, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pembangunan, hingga keberlanjutan untuk pengelolaan risiko bencana. Hingga Tahun 2025, sudah ada 48 Destana dan 1 Keltana yang telah dibentuk di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.46.

Desa Tangguh Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana Di Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Tahun	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Ancaman Bencana
1.	2008	Tengklik	Tawangmangu	Tanah Longsor
2.	2008	Girimulyo	Ngargoyoso	Tanah Longsor
3.	2009	Plosorejo	Kerjo	Tanah Longsor
4.	2014	Balong	Jenawi	Tanah Longsor
5.	2014	Berjo	Ngargoyoso	Tanah Longsor
6.	2015	Tawangmangu	Tawangmangu	Tanah Longsor
7.	2019	Gerdu	Karangpandan	Tanah Longsor
8.	2019	Karangpandan	Karangpandan	Tanah Longsor
9.	2019	Gempolan	Kerjo	Tanah Longsor
10.	2020	Menjing	Jenawi	Tanah Longsor
11.	2020	Nglegok	Ngargoyoso	Tanah Longsor
12.	2020	Karangsari	Jatiyoso	Tanah Longsor
13.	2021	Kemuning	Ngargoyoso	Tanah Longsor
14.	2021	Ngargoyoso	Ngargoyoso	Tanah Longsor
15.	2022	Wonorejo	Jatiyoso	Tanah Longsor
16.	2022	Dayu	Gondangrejo	Banjir
17.	2023	Beruk	Jatiyoso	Tanah Longsor
18.	2023	Jatipurwo	Jatipuro	Tanah Longsor
19.	2023	Waru	Kebakkramat	Banjir
20.	2023	Karangbangun	Matesih	Tanah Longsor
21.	2023	Kedawung	Jumapolo	Tanah Longsor
22.	2023	Gumeng	Jenawi	Tanah Longsor
23.	2023	Girilayu	Matesih	Tanah Longsor
24.	2023	Lempong	Jenawi	Tanah Longsor
25.	2023	Paulan	Colomadu	Gempa Bumi
26.	2023	Seloromo	Jenawi	Tanah Longsor
27.	2023	Kwangsan	Jumapolo	Tanah Longsor
28.	2023	Doplang	Karangpandan	Tanah Longsor
29.	2023	Matesih	Matesih	Tanah Longsor

No	Tahun	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Ancaman Bencana
30.	2024	Koripan	Matesih	Tanah Longsor
31.	2024	Sidomukti	Jenawi	Tanah Longsor
32.	2024	Dayu	Karangpandan	Tanah Longsor
33.	2024	Pablengan	Matesih	Tanah Longsor
34.	2024	Plumbon	Tawangmangu	Tanah Longsor
35.	2024	Gondosuli	Tawangmangu	Tanah Longsor
36.	2024	Segorogunung	Ngargoyoso	Tanah Longsor
37.	2024	Tlobo	Jatiyoso	Tanah Longsor
38.	2024	Wonokeling	Jatiyoso	Tanah Longsor
39.	2024	Tugu	Jumantono	Tanah Longsor
40.	2024	Salam	Karangpandan	Tanah Longsor
41.	2024	Petung	Jatiyoso	Tanah Longsor
42.	2024	Ngunut	Jumantono	Cuaca Ekstrem
43.	2024	Karang	Karangpandan	Tanah Longsor
44.	2025	Jatisawit	Jatiyoso	Tanah Longsor
45.	2025	Wukirsawit	Jatiyoso	Tanah Longsor
46.	2025	Jenawi	Jenawi	Tanah Longsor
47.	2025	Trengguli	Jenawi	Tanah Longsor
48.	2025	Sepanjang	Tawangmangu	Tanah Longsor
49.	2025	Sroyo	Jaten	Banjir Luapan, Cuaca Ekstrem

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya. Namun demikian menyembunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat.

Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini. Semakin dini informasi yang disampaikan, semakin longgar waktu bagi penduduk untuk meresponnya.

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) merupakan bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, aparat dan akademisi dari kegiatan pengurangan resiko bencana. Fungsi dari Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) ini antara lain : (a) memberitahukan secara cepat potensi/ancaman, hingga terjadinya bencana, (b) merespon secara cepat dan tepat potensi/ancaman terjadinya bencana, (c) membantu evakuasi penyelamatan penduduk lebih cepat dan (d) mencegah serta mengurangi dampak bencana. Berikut data Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Tabel 2.47.
Data Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Kecamatan	Jenis Ancaman	Desa	Dusun	Sumber	Tahun
1.	Karangpandan	Tanah Longsor	Gerdu	Buntung	BPBD Prov	2017

No	Kecamatan	Jenis Ancaman	Desa	Dusun	Sumber	Tahun
2.	Karangpandan	Tanah Longsor	Gerdu	Buntung	BPBD Prov	2017
3.	Karangpandan	Tanah Longsor	Gondanggentong	Bulurejo	LPPM UNS	2021
4.	Matesih	Tanah Longsor	Koripan	Dukuh	BPBD Prov	2017
5.	Matesih	Tanah Longsor	Koripan	Dukuh	BPBD Prov	2017
6.	Matesih	Tanah Longsor	Koripan	Dukuh	LPPM UNS	2021
7.	Jenawi	Tanah Longsor	Balong	Karangrejo	BNPB	2015
8.	Jenawi	Tanah Longsor	Balong	Karangrejo	BNPB	2015
9.	Jenawi	Tanah Longsor	Balong	Karangrejo	BNPB	2015
10.	Jenawi	Tanah Longsor	Balong	Karangrejo	BNPB	2015
11.	Jenawi	Tanah Longsor	Menjing	Jambon	BPBD Prov	2020
12.	Jenawi	Tanah Longsor	Menjing	Guntur	BPBD Kra	2020
13.	Tawangmangu	Tanah Longsor	Ngledoksari	Mogol	LPPM UNS	2020
14.	Tawangmangu	Tanah Longsor	Ngledoksari	Mogol	LPPM UNS	2020
15.	Tawangmangu	Tanah Longsor	Tengklik	Sedayu	LPPM UNS	2020
16.	Tawangmangu	Tanah Longsor	Tengklik	Guyon	LPPM UNS	2020
17.	Tawangmangu	Tanah Longsor	Tengklik	Guyon	Badan Geologi	2020
18.	Ngargoyoso	Tanah Longsor	Ngargoyoso	Melikan	BPBD Prov	2015
19.	Ngargoyoso	Tanah Longsor	Nglegok	Dederan	BPBD Kra	2020
20.	Ngargoyoso	Tanah Longsor	Jatirejo	Sabrang Semut	LPPM UNS	2021
21.	Kerjo	Tanah Longsor	Gempolan	Kesongo	BPBD Prov	2019
22.	Kerjo	Tanah Longsor	Gempolan	Kesongo	BPBD Prov	2019
23.	Kerjo	Tanah Longsor	Gempolan	Kesongo	BPBD Prov	2019
24.	Kerjo	Tanah Longsor	Plosorejo	Banaran	BPBD Prov	2019
25.	Jatiyoso	Tanah Longsor	Wonorejo	Puntuksari	LPPM UNS	2021
26.	Jatiyoso	Tanah Longsor	Wonokeling	Gandri	LPPM UNS	2021
27.	Jatiyoso	Tanah Longsor	Wonorejo	Blanten	LPPM UNS	2021
28.	Tasikmadu	Banjir	Papahan	Perum Papahan	PJT 1	2022
29.	Jaten	Banjir	Ngringo	Daleman	PJT 1	2022
30.	Kebakkramat	Banjir	Waru	Ngentak	PJT 1	2022
31.	Gondangrejo	Banjir	Dayu	Tanjung	BBWS BS	2022
32.	Tawangmangu	Tawangmangu	Ngledoksari	Mogol	KKN UNS 2025	2025
33.	Jatiyoso	Tanah Longsor	Beruk	Ngantirejo	KKN UNS 2025	2025
34.	Jatiyoso	Tanah Longsor	Beruk	Gunung Lading	KKN UNS 2025	2025
35.	Jatiyoso	Tanah Longsor	Wukirsawit	Swadine	BPBD Prov	2025

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Jumlah tindak pidana menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Persentase penyelesaian tindak pidana menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian apabila:

a. berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;
b. dalam hal delik aduan pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
c. telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *plichmatigheid* (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum);
d. kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian;
e. tersangka meninggal dunia; dan
f. kasus kadaluwarsa.

Tabel 2.48.

Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya yang Ditangani
Oleh Kejaksaan Negeri di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025

Jenis	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan					Sisa Akhir Tahun
				Dimerdekakan	Dilimpahkan	Dikirim ke Kejaksaan	Diputus Bebas	Jumlah	
Keterlibatan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kejahatan yang Membahayakan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	-	49	49	-	49	-	-	49	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penipuan	-	12	12	-	12	-	-	12	-
Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Narkotika	-	77	77	-	75	-	2	77	-
Penggelapan	-	1	1	-	1	-	-	1	-
Uang Palsu	-	3	3	-	3	-	-	3	-
Pelanggaran Pengairan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelanggaran Lalu Lintas (Kecelakaan Lalu Lintas)	-	3	3	-	2	-	1	3	-
Kesusilaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	**-**	**145**	**145**	**-**	**142**	**-**	**3**	**145**	**-**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Tindak pidana di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 didominasi oleh kasus narkotika yaitu sebesar 77 kasus atau sebesar 53,10% dari tindak pidana yang dilaporkan di tahun 2025. Beberapa kecamatan dipetakan memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi, seperti Mojogedang, Kebakkramat, Jaten, dan Karanganyar Kota, yang menjadi titik fokus pengungkapan kasus. Pihak kepolisian di Karanganyar mengamankan berbagai jenis barang bukti, mulai dari sabu-sabu hingga obat terlarang daftar G, yang menunjukkan peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di wilayah tersebut.

Tabel 2.49.

Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Jenisnya
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Bulan	Gangguan Keamanan dan Ketertiban				Jumlah
	Kejahatan	Pelanggaran	Gangguan Ketentraman/ Ketertiban Umum	Bencana	
Januari	18	4	12	-	34
Februari	14	9	11	1	35
Maret	20	114	10	1	145
April	7	-	15	-	22
Mei	17	18	13	1	49
Juni	15	2	10	-	27
Juli	16	13	12	-	41
Agustus	19	18	8	-	45
September	16	2	13	1	32
Oktober	16	3	21	6	46
November	19	65	10	1	95
Desember	13	30	26	1	70
2025	**190**	**278**	**161**	**12**	**641**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa dari 4 (empat) jenis gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 di dominasi oleh pelanggaran, yaitu sebanyak 278 kasus atau sebesar 43,37%.

Tabel 2.50.

Banyaknya Peristiwa Kebakaran di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Bulan	Banyak Kejadian
Januari	12
Februari	5
Maret	3
April	11
Mei	8
Juni	5
Juli	10
Agustus	15
September	19
Oktober	9
November	5
Desember	4
2025	**106**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

6. Sosial

Urusan Sosial pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) program, terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.51.

Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, 2026

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja, seluruh indikator dari lima program urusan sosial pada tahun 2025 berhasil mencapai target 100 persen dengan status "Sangat Tinggi". Hal ini mencerminkan keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan, keluarga miskin, serta korban bencana. Program pemberdayaan sosial mampu mengoptimalkan peran aktif PSKS, sementara program rehabilitasi sosial menjangkau penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis. Program perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan respons tanggap darurat.

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil sempurna, evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan bahwa keberhasilan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas layanan yang berkelanjutan. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga konsistensi kualitas pelayanan, memperluas cakupan intervensi, serta meningkatkan efektivitas program pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mandiri secara sosial dan ekonomi.

Sebagai bagian dari capaian urusan sosial, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pemberian bantuan sosial pangan. Bantuan ini menjadi instrumen utama dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin di seluruh kecamatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi penerima bantuan dan alokasi anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52.

Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penerima (KK)	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	Jatipuro	2.339	613.600.000
2.	Jatiyoso	2.544	467.800.000
3.	Jumapolo	3.368	673.600.000
4.	Jumantono	4.248	849.600.000
5.	Matesih	3.715	743.000.000
6.	Tawangmangu	2.788	557.600.000
7.	Ngargoyoso	3.581	716.200.000
8.	Karangpandan	4.505	901.000.000
9.	Karanganyar	4.413	882.600.000
10.	Tasikmadu	3.923	784.600.000
11.	Jaten	2.588	517.600.000
12.	Colomadu	2.305	461.000.000
13.	Gondangrejo	5.275	1.055.000.000
14.	Kebakkramat	3.023	604.600.000
15.	Mojogedang	6.010	1.202.000.000
16.	Kerjo	3.205	641.000.000
17.	Jenawi	3.027	605.400.000
Kabupaten Karanganyar		**60.857**	**17.276.200.000**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Tabel distribusi penerima bantuan sosial pangan menunjukkan bahwa jumlah penerima di Kabupaten Karanganyar mencapai 60.857 kepala keluarga dengan total anggaran sebesar Rp17,27 miliar. Kecamatan Mojogedang tercatat sebagai penerima terbesar dengan 6.010 KK atau 9,88 persen dari total penerima, diikuti oleh Gondangrejo dan

Karangpandan. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penerima relatif kecil seperti Colomadu (2.305 KK) menunjukkan adanya variasi kebutuhan antar wilayah.

Distribusi penerima bantuan yang bervariasi ini menegaskan adanya kantong-kantong kemiskinan yang perlu mendapat perhatian lebih intensif. Kecamatan dengan jumlah penerima tinggi menyerap anggaran lebih besar, yang dapat menjadi dasar analisis pemerataan apakah distribusi anggaran sudah proporsional dengan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan sosial tidak hanya berfokus pada bantuan pangan, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan yang lebih komprehensif untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

2.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.53.

Capaian Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Dokumen	0	1	100,00	Sangat Tinggi	1	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih	%	71	71	100,00	Sangat Tinggi	73	97,26	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	55	80,5	146,36	Sangat Tinggi	55	146,36	Sangat Tinggi
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: DISDAGPERINNAKER Kabupaten Karanganyar, 2026

Tabel 2.54.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	**321.627**	**251.822**	**573.449**
Bekerja	308.128	246.613	554.741
Pengangguran Terbuka	13.499	5.209	18.708
Bukan Angkatan Kerja	**57.810**	**135.261**	**193.071**
Sekolah	25.676	31.233	56.909
Mengurus Rumah Tangga	15.984	93.360	109.344
Lainnya	16.150	10.668	26.818
Jumlah	**379.437**	**387.083**	**766.520**
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	**95,80**	**97,93**	**96,74**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**84,76**	**65,06**	**74,81**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**4,20**	**2,07**	**3,26**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2025 sebanyak 766.520 jiwa. Dari total PUK, sebanyak 573.449 jiwa adalah angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan ang bukan

angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebanyak 193.071 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, ada sebanyak 554.741 jiwa yang telah bekerja, sedangkan sisanya 18.708 adalah pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sebesar 3,26 artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 3 orang diantaranya pencari kerja. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sebesar 74,81 persen artinya sebesar 74,81 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 6 (enam) program yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55.
Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender	Lembaga	42	42	100,00	Sangat Tinggi	42	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan perempuan	%	0,0041	0,0041	100,00	Sangat Tinggi	0,004	102,50	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan anak yang dilayani secara komprehensif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki Data Gender	%	12	47,62	396,83	Sangat Tinggi	14	340,14	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah desa layak anak	Desa	6	6	100,00	Sangat Tinggi	8	75,00	Sedang
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase kasus kekerasan anak	%	0,0065	0,0073	112,31	Sangat Tinggi	0,006	82,19	Tinggi

Sumber: DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, 2026

Guna mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah dan penelantaran anak, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan perlindungan anak, beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain:

a. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
b. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
c. Berperan aktif dengan menghilangkan perlakuan negatif terhadap anak.

Terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Karanganyar, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang meliputi calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan anak bawah dua tahun (usia 0-23 bulan) yang dilakukan oleh TPK yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko

stunting. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, pemantauan, pelayanan kesehatan serta pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan.

Selain itu, terdapat kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data KRS, serta kegiatan peningkatan kapasitas pencegahan stunting bagi tenaga lini lapangan berupa pembinaan bagi tenaga lini lapangan dan pengelolaan data.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025, terdiri dari 6 (enam) fraksi), yaitu fraksi PDI-P, fraksi GOLKAR, fraksi PKS, fraksi GERINDRA, fraksi Demokrat-PAN dan fraksi PKB. Tahun 2023, jumlah anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sebanyak 45 orang yang terdiri dari 37 orang laki-laki (82,22%) dan 8 orang perempuan (17,78%).

Tabel 2.56.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Fraksi PDI-P	12	3	15
2.	Fraksi Partai Golkar	7	2	9
3.	Fraksi PKS	5	-	5
4.	Fraksi Gerindra	3	1	4
5.	Fraksi Demokrat-PAN	7	-	7
6.	Fraksi PKB	3	2	5
Jumlah		**37**	**8**	**45**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sangat dipengaruh oleh jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pada Tahun 2025, jumlah ASN Kabupaten Karanganyar sebanyak 8.815 orang yang terbagi menjadi, 6.079 orang dengan status PNS dan 2.736 orang dengan status PPPK. Dari total ASN di Kabupaten Karanganyar tersebut, terdiri dari 3.228 orang (36,62%) ASN laki-laki dan 5.587 orang (63,38%) ASN perempuan. ASN Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 menurut status kepegawaian, jabatan, tingkat kepangkatan dan tingkat pendidikan tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.57.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jabatan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin (orang) Tahun 2025

No	Jabatan	Pegawai Negeri Sipil			PPPK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-	-	-	-
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-	-	-	-
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	17	4	21	-	-	-
4.	Administrator	75	31	106	-	-	-
5.	Pengawas	144	103	247	-	-	-
6.	Eselon V	-	-	-	-	-	-
7.	Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-	-	-	-
8.	Jabatan Fungsional Guru	916	1.984	2.900	618	1.422	2.040
9.	Jabatan Fungsional Medis	203	909	1.112	71	348	419
10.	Jabatan Fungsional Teknis	236	283	519	64	37	101
11.	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	763	411	1.174	121	55	174
Jumlah		**2.354**	**3.725**	**6.079**	**874**	**1.862**	**2.736**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Tabel 2.58.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin (orang) Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil			PPPK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	15	-	15	-	-	-
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	44	4	48	2	-	2
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	485	109	594	28	8	36
4.	Diploma I/Akta I	2	4	6	-	-	-
5.	Diploma II/Akta II	21	10	31	-	-	-
6.	Diploma III/Akta III	151	677	828	61	307	368
7.	Diploma IV/Akta IV	-	-	-	-	-	-
8.	S1/Sarjana	1.270	2.510	3.780	775	1.539	2.314
9.	S2/Pasca Sarjana	363	408	771	8	8	16
10.	S3/Doktor/Ph.D	3	3	6	-	-	-
Jumlah		**2.354**	**3.725**	**6.079**	**874**	**1.862**	**2.736**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan S1/Sarjana yaitu sebanyak 6.094 orang atau sebesar 69,13% dari total Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

3. Pangan

Urusan Pangan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.59.

Capaian Kinerja Program Urusan Pangan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Konsumsi Energi (AKE);	kalori / kapita / tahun;	1945	2348	120,72	Sangat Tinggi	1950	120,41	Sangat Tinggi
		Angka Konsumsi Protein (AKP);	gram / kapita / tahun;	56	66,70	119,11	Sangat Tinggi	56,5	118,05	Sangat Tinggi
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,5	75,45	85,25	Sangat Tinggi	90	83,83	Tinggi
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan pangan	%	13,56	9,04	150,00	Sangat Tinggi	12,99	143,69	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat	%	45,28	45,28	100,00	Sangat Tinggi	52,83	85,71	Tinggi

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2026

Sebagai upaya untuk mewujudkan pola ketahanan pangan maka ditetapkan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 126 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari. Pemanfatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Kawasan rumah pangan lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahan pekarangannya secara intensif untuk di manfaatkan

menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

Tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengembangan Pangan Lokal Di Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal pemerintah daerah perlu menetapkan dan mengembangan jenis pangan lokal.

Tabel 2.60.

Perkembangan Capaian Kinerja Program Urusan Pangan Tahun 2021-2025

No	Indikator Program	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Konsumsi Energi (AKE)	kalori / kapita / tahun;	1.802	1.921,5	1.873	2.201,43	2.348
2.	Angka Konsumsi Protein (AKP)	gram / kapita / tahun;	54,1	54,4	52,5	69,93	66,70
3.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87,63	87,39	88,48	89,67	75,45
4.	Persentase desa rentan pangan	%	14,69	14,69	11,30	2,82	9,04
5.	Persentase pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat	%	NA	22,64	32,79	36,92	45,28

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2026

Berdasarkan capaian 5 (lima) tahun terakhir, Angka Konsumsi Energi (AKE) menunjukkan tren meningkat dari 1.802 kalori/kapita/tahun pada Tahun 2021 menjadi 2.348 pada Tahun 2025. Angka Konsumsi Protein (AKP) juga meningkat dibandingkan awal periode, dari 54,1 gram/kapita/tahun pada Tahun 2021 menjadi 66,70 pada Tahun 2025, meskipun mengalami penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 69,93. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan konsumsi energi dan protein masyarakat, namun tetap perlu diarahkan pada pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 berada pada kisaran 87–89, namun pada Tahun 2025 tercatat sebesar 75,45. Penurunan ini perlu dicermati dan tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan capaian tahun sebelumnya, karena sebagian dipengaruhi oleh perubahan metode, indikator, dan pembobotan yang digunakan. Dengan demikian, pemaknaan terhadap tren capaian ketahanan pangan perlu dilakukan secara hati-hati, serta diarahkan untuk melihat aspek-aspek baru yang perlu diperkuat, terutama penguatan cadangan pangan daerah, stabilisasi harga pangan, penurunan risiko ketidakcukupan konsumsi pangan, peningkatan keamanan pangan, dan pemantapan pola konsumsi pangan masyarakat. Sementara itu, persentase desa rentan pangan sempat menurun dari 14,69% pada Tahun 2021 menjadi 2,82% pada Tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 9,04% pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut perlu dicermati karena penentuan desa rentan pangan berkaitan dengan metode perhitungan IKP/FSVA, sehingga perubahan metodologi dapat memengaruhi capaian. Meski demikian, intervensi pada wilayah rentan pangan tetap perlu diperkuat.

Pada FSVA Tahun 2024, perhitungan IKP untuk wilayah kabupaten menggunakan 9 indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sementara itu, pada FSVA Tahun 2025 dilakukan penyempurnaan metodologi dengan menggunakan 12 indikator. Beberapa indikator baru yang masuk dalam

perhitungan antara lain rasio ketersediaan energi, rasio ketersediaan protein hewani, rasio cadangan beras pemerintah daerah, koefisien variasi harga pangan, Prevalence of Undernourishment (PoU), persentase keamanan pangan, dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Selain itu, FSVA Tahun 2025 tidak lagi membedakan pembobotan antara wilayah kabupaten dan kota, sehingga struktur pembobotan indikator menjadi berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Persentase pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat menunjukkan tren meningkat dari 22,64% pada Tahun 2022 menjadi 45,28% pada Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan fasilitasi sertifikasi, namun percepatan sertifikasi tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan pangan, akses pasar, dan daya saing produk pangan lokal.

Berdasarkan capaian indikator ketahanan pangan Tahun 2025, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Karanganyar sebesar 75,45 menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan daerah masih perlu terus diperkuat. Capaian IKP Tahun 2025 juga perlu dicermati dengan mempertimbangkan adanya perubahan metodologi perhitungan pada FSVA Tahun 2025, yang menggunakan 12 indikator dan tidak lagi membedakan pembobotan antara wilayah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, pembacaan capaian IKP perlu dilakukan secara hati-hati, sekaligus diarahkan untuk memperkuat aspek-aspek penyusun ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Capaian *Prevalence of Undernourishment* (PoU) sebesar 6,09%, atau sebanyak 55.759 jiwa penduduk undernourished dari 916.299 jiwa penduduk dalam perhitungan PoU Tahun 2025, menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang berisiko mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perumusan intervensi ketahanan pangan, khususnya pada wilayah dan kelompok rentan pangan. Sementara itu, Persentase Cadangan Pangan sebesar 19,58% menunjukkan bahwa penguatan cadangan pangan daerah masih perlu dioptimalkan sebagai instrumen antisipasi terhadap kerawanan pangan, gejolak harga, gangguan distribusi, maupun kondisi darurat.

Adapun Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 99,40 menggambarkan bahwa kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat sudah mendekati kondisi ideal. Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), penguatan pemanfaatan pangan lokal, serta diversifikasi konsumsi pangan masyarakat.

4. Pertanahan

Urusan Pertanahan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.61.

Capaian Kinerja Program Urusan Pertanahan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya sosialisasi dan verifikasi pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah	Kegiatan	1	1	100,00	Sangat Tinggi	1	100,00	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
2	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Reforma Agraria	Dokumen	1	1	100,00	Sangat Tinggi	1	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat	%	85	85	100,00	Sangat Tinggi	90	94,44	Tinggi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2026

Urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan yaitu 1) izin lokasi; 2) sengketa tanah garapan; 3) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 5) Izin membuka tanah dan 6) penggunaan tanah.

5. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja program Capaian indikator kinerja tersebut di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.62.

Capaian Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	77	62,5	81,17	Tinggi	78	80,13	Tinggi
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah pengelolaan kehati	%	82	82	100,00	Sangat Tinggi	85	96,47	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3	%	85	85	100,00	Sangat Tinggi	100	85,00	Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	82	82	100,00	Sangat Tinggi	83	98,80	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi	85	117,65	Sangat Tinggi
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional	%	77	100	129,87	Sangat Tinggi	79	126,58	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang terkelola	%	82	82	100,00	Sangat Tinggi	86	95,35	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2026

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perijinan pengelolaan limbah B3 berupa rekomendasi ijin, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ijin dihapus dan di ganti dengan pemenuhan persyaratan dalam ketentuan dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan/dimuat ke dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Pasal 285 PP 22/2021).

Di Kabupaten Karanganyar tercatat terdapat 303 usaha dan/atau kegiatan penghasil Limbah B3, dimana sebanyak 228 atau 75,25% usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Karanganyar, sudah melakukan pengelolaan limbah B3 nya dan melaporkan secara *online* simpel.kemenlh.go.id. Sebagian besar usaha/kegiatan di kabupaten karanganyar adalah penghasil limbah B3 yang terkelola dari sektor industri antara lain jenis:

a. Kemasan bekas B3
b. Minyak pelumas bekas
c. Kain majun bekas
d. Aki/batrey bekas
e. Limbah elektronik
f. Sludge IPAL industri
g. *Fly ash*
h. *Bottom Ash*

Sedangkan dari sektor fasyankes yang terkelola antara lain:

a. Limbah klinis karakteristik infeksius
b. Produk farmasi kadaluarsa
c. Bahan kimia kadaluarsa
d. Peralatan laboratorium terkontaminasi B3
e. Peralatan medis mengandung logam berat
f. Kemasan bekas produk farmasi
g. *Sludge* IPAL fasyankes

Sebagian besar melakukan pengelolaan limbah B3 berupa penyimpanan sementara pada gudang TP LB3 untuk kemudian diserahkan pengolahannya kepada perusahaan jasa pemanfaat, pengolah limbah B3 yang sudah berijin dari KLH/BPLH RI.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup karena berpotensi mencemari media lingkungan, yaitu air, udara, dan lahan. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan dapat menyebabkan penurunan kualitas badan air akibat pencemaran bahan kimia berbahaya, pencemaran udara melalui emisi atau penguapan senyawa beracun, serta pencemaran tanah yang dapat mengurangi daya dukung lahan dan mengganggu ekosistem. Dampak tersebut pada akhirnya akan memengaruhi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan indeks komposit yang disusun berdasarkan indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan/tutupan lahan.

Oleh karena itu, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan nilai IKLH. Program ini diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan B3 dan limbah B3, mulai dari pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan akhir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, program ini juga mencakup kegiatan pembinaan, pengawasan, pemantauan, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan limbah B3.

Dengan pelaksanaan Program Pengendalian B3 yang efektif, potensi pencemaran lingkungan dapat diminimalkan sehingga kualitas air, udara, dan lahan tetap terjaga. Kondisi tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai IKLH, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 melaksanakan 4 (empat) program terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.63.
Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	91,90	90,91	98,92	Sangat Tinggi	92,5	98,28	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)	%	95,90	99,84	104,11	Sangat Tinggi	98,95	100,90	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder	Kerja sama	45	45	100,00	Sangat Tinggi	50	90,00	Tinggi
		Inovasi pelayanan adminduk	Inovasi	2	2	100,00	Sangat Tinggi	6	33,33	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENGELOLAAN	Tersusunnya buku profil data kependudukan	Buku	1	1	100,00	Sangat Tinggi	3	33,33	Sangat Rendah

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
	PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersusunnya buku data kependudukan	Buku	2	2	100,00	Sangat Tinggi	6	33,33	Sangat Rendah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, 2026

Pemerintah daerah dalam pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten terbagi dalam 4 sub urusan, yaitu:

a. Pendaftaran Penduduk, dengan kewenangan pelayanan pendaftaran penduduk.
b. Pencatatan Sipil, dengan kewenangan pelayanan pencatatan sipil.
c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan sebagai berikut:
    1) Pengumpulan data kependudukan.
    2) Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.
d. Profil Kependudukan, dengan kewenangan Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.

Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu tugas Negara guna memenuhi hal asasi penduduk mendapatkan tanda identitas yang sah secara hukum. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, dinyatakan bahwa bagi Penduduk wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Substansi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Pencatatan sipil meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelaporan penduduk yang tidak bisa melapor sendiri. Sedangkan pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk per keluarga berikut sidik jari (biometric), pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan kependudukan, pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri. Manfaat yang diperoleh pemerintah adalah dalam hal perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, kebutuhan sektor pembangunan lain, pemilu dan pilkada, penyusunan perkembangan kependudukan, penyusunan proyeksi pembangunan, verifikasi jati diri penduduk dan dokumen kependudukan.

Strategi pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Karanganyar adalah dengan pemutakhiran dan peningkatan kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan kualitas informasi kependudukan. Strategi tersebut diharapkan dapat

mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, serta dapat mewujudkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain : ketersediaan data penduduk yang akurat dan selalu diperbaharui, data persebaran penduduk, inovasi pelayanan, penggunaan teknologi informasi, SDM dan sarana pendukung pelayanan adminduk termasuk diantaranya ruang pelayanannya.

Dalam rangka ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu segera mungkin untuk melakukan pencatatan setiap kelahiran anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran sangat penting agar anak memperoleh pelayanan publik dari pemerintah maupun non-pemerintah ke depannya. Pencatatan Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu program nasional di dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur terkait tata cara yang dapat dilakukan untuk mendukung percepatan terkait jumlah cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten/Kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.64.

Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana prasarana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	%	96	96	100,00	Sangat Tinggi	97	98,97	Sangat Tinggi
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	%	85	90	105,88	Sangat Tinggi	86	104,65	90
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	%	82	82	100,00	Sangat Tinggi	85	96,47	Sangat Tinggi
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, 2026

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Indeks Desa sebagai indikator tunggal untuk mengukur capaian pembangunan desa di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian DalamNegeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Scoring Indeks Desa (ID) 2025 merupakan indikator tunggal baru hasil kolaborasi lintas kementerian, menggantikan IDM/IPD sebelumnya. Status desa ditentukan oleh enam dimensi (layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, tata kelola pemerintahan) dengan total skor maksimal 635. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

a. Desa Sangat Tertinggal : nilai $\leq$ 49,48%
b. Desa Tertinggal : 49,49% - 57,38%
c. Desa Berkembang : 57,39% - 69,34%
d. Desa Maju : 69,35% - 79,62%
e. Desa Mandiri : skor > 79,63%

Enam dimensi utama penilaian Indes Desa tahun 2025, adalah :

a. Layanan dasar, terdiri dari pendidikan, kesehatan dan utilitas dasar.
b. Sosial, terdiri dari aktivitas dan fasilitas masyarakat.
c. Ekonomi, terdiri dari produksi desa dan fasilitas pendukung.
d. Lingkungan, terdiri dari pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana.
e. Aksesibilitas, terdiri dari kondisi jalan dan transportasi.
f. Tata kelola pemerintahan, terdiri dari kelembagaan, pelayanan dan keuangan desa.

Berdasarkan skor tersebut, setidaknya ada tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan, yaitu mulai dari Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika salah satu skor indikator bergeser turun, maka bisa berakibat menurunnya status desa, misalkan dari Desa Berkembang menjadi Desa Tertinggal. Adapun faktor kerentanan itu misalnya terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam dan konflik sosial berkepanjangan.

Secara terinci klasifikasi status 162 desa di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65.
Jumlah Desa Berdasarkan Status Indeks Desa per Kecamatan
Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa			
		Berkembang	Maju	Mandiri	Jumlah
1.	JATIPURO	7	3	0	10
2.	JATIYOSO	0	5	4	9
3.	JUMAPOLO	9	3	0	12
4.	JUMANTONO	2	7	2	11
5.	MATESIH	5	3	1	9
6.	TAWANGMANGU	0	1	6	9
7.	NGARGOYOSO	6	0	3	9
8.	KARANGPANDAN	3	6	2	11
9.	TASIKMADU	2	5	3	10

No	Kecamatan	Jumlah Desa			
		Berkembang	Maju	Mandiri	Jumlah
10.	JATEN	0	2	6	8
11.	COLOMADU	0	5	6	11
12.	GONDANGREJO	0	9	4	13
13.	KEBAKKRAMAT	0	9	1	10
14.	MOJOGEDANG	0	10	3	13
15.	KERJO	4	3	3	13
16.	JENAWI	6	2	1	9
Jumlah		**44**	**73**	**45**	**162**
Persentase		**27,16%**	**45,06%**	**27,78%**	**100,00%**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, 2026

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 sejumlah 73 desa atau 45,06% desa di kabupaten Karanganyar berstatus Desa Maju. Desa Maju merupakan Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Desa ini berfokus pada produk unggulan dan pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2025 sejumlah 45 desa atau 27,78% desa di Kabupaten Karanganyar berstatus Desa Mandiri. Desa Mandiri merupakan Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.

Adapun sisanya sebesar 27,16% atau sejumlah 44 desa berada dalam status Berkembang. Desa Berkembang adalah Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Status Desa Berkembang adalah nilai tengah dan kategori rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tetapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa serta kewirausahaan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.66.

Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ASFR	Indeks	3,7	3,69	99,73	Sangat Tinggi	3,5	105,43	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR)	%	71,9	66,34	92,27	Sangat Tinggi	72	92,14	Sangat Tinggi
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB	%	41,8	100	239,23	Sangat Tinggi	44,63	224,06	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase tribina aktif	%	95,38	95,4	100,02	Sangat Tinggi	95,4	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, 2026

Tabel 2.67.
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur	Peserta KB Aktif							
			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	Total
1.	Jatipuro	5.074	401	154	4	263	604	1.877	369	3.672
2.	Jatiyoso	7.279	517	143	6	83	1.152	2.718	247	4.866
3.	Jumapolo	6.133	552	177	20	428	671	2.032	234	4.114
4.	Jumantono	8.115	861	283	19	294	692	3.006	339	5.494
5.	Matesih	6.666	1.043	300	14	481	384	1.752	209	4.183
6.	Tawangmangu	8.184	1.122	357	12	288	1.175	2.516	259	5.729
7.	Ngargoyoso	6.081	1.034	200	19	172	384	2.436	194	4.439
8.	Karangpandan	6.823	1.485	363	61	339	366	1.647	237	4.498
9.	Karanganyar	13.079	2.105	668	19	1.117	485	3.978	528	8.900
10.	Tasikmadu	10.591	1.829	563	90	1.360	350	2.778	297	7.267
11.	Jaten	13.737	1.900	663	20	1.619	527	3.405	504	8.638
12.	Colomadu	10.822	1.394	748	28	1.429	377	2.695	423	7.094
13.	Gondangrejo	14.325	601	512	20	504	1.038	4.800	680	8.155
14.	Kebakkramat	10.199	1.204	493	4	697	287	3.894	453	7.032
15.	Mojogedang	10.311	1.213	266	14	327	955	3.558	459	6.792
16.	Kerjo	5.733	509	209	15	140	737	2.107	156	3.873
17.	Jenawi	4.034	264	140	62	114	282	1.728	235	2.825
Karanganyar		**147.186**	**18.034**	**6.239**	**427**	**9.655**	**10.466**	**46.927**	**5.823**	**97.571**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Pada tahun 2025, peserta KB aktif didominasi oleh jenis KB suntik, yaitu sebanyak 46.927 peserta atau sebesar 48,10% dari peserta KB aktif tahun 2025. Dan yang paling sedikit adalah KB jenis MOP (metode operasi pria) atau vasektomi, yaitu hanya sebesar 0,44% dari total peserta KB aktif atau sebanyak 427 peserta.

9. Perhubungan

Urusan Perhubungan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.68.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik	%	65	70	107,69	Sangat Tinggi	70	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase terminal kondisi baik	%	50	65,63	131,26	Sangat Tinggi	60	109,38	Sangat Tinggi
		Persentase kendaraan yang lulus uji KIR	%	96	95	98,96	Sangat Tinggi	97	97,94	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, 2026

Jumlah potensi kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 2025 berdasarkan data jumlah objek pajak kendaraan bermotor dari SAMSAT Karanganyar adalah kendaraan roda dua dan tiga mencapai 331.871 unit sedangkan untuk kendaraan roda empat berjumlah 67.653 unit.

Fasilitas penunjang keselamatan jalan adalah perlengkapan jalan yang dirancang untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berikut data perlengkapan jalan menurut jenisnya di Kabupaten Karanganyar tahun 2024 dan tahun 2025.

Tabel 2.69.
Jumlah Perlengkapan Jalan Menurut Jenisnya di Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2025

Nama Perlengkapan Jalan	2024	2025
Traffic Light	21	21
Flashing Light	64	64
Guardrail	62	62
Eater Barrier/Road Barrier	93	40
Jumlah	**240**	**187**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Di wilayah Kabupaten Karanganyar terdapat 33 perlintasan Kereta Api, yang terdiri dari:

a. Perlintasan Kereta Api Palur sampai dengan Grompol (Wilayah Jaten dan Kebakkramat), terdapat 19 perlintasan yang terdiri dari : 9 perlintasan berpalang dan 10 perlintasan tidak berpalang
b. Perlintasan Kereta Api Wilayah Gondangrejo, terdapat 14 perlintasan yang terdiri dari : 1 perlintasan berpalang dan 13 perlintasan tidak berpalang.

Kabupaten Karanganyar untuk saat ini memiliki 10 buah terminal dan keseluruhan mempunyai tipe C. Terminal tipe C adalah simpul transportasi darat yang melayani angkutan pedesaan, angkutan kota (angkot), dan travel jarak pendek. Dikelola oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota dan berfungsi sebagai penghubung jaringan transportasi lokal. Berikut data terminal di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.70.
Jumlah Terminal dan Petugas Menurut Lokasi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2025

Nama Terminal	2024			2025		
	Type	Jumlah Terminal	Jumlah Petugas	Type	Jumlah Terminal	Jumlah Petugas
Terminal Palur	C	1	4	C	1	4
Terminal Ngargoyoso	C	1	4	C	1	4
Terminal Jungke	C	1	2	C	1	2
Terminal Jumapolo	C	1	3	C	1	3
Terminal Gondangrejo	C	1	2	C	1	2
Terminal Jatipuro	C	1	3	C	1	3
Terminal Karangpandan	C	1	6	C	1	6
Terminal Matesih	C	1	3	C	1	3
Terminal Jenawi	C	1	3	C	1	2
Terminal Jambangan	C	1	3	C	1	3
Jumlah		**10**	**33**		**10**	**32**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Tabel 2.71.
Jumlah Kendaraan Angkutan Darat yang Diuji/KIR Ulang dan Baru Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Jenis Kendaraan	Ulang	Baru	Total
1. Mobil Penumpang Umum	*933*	*73*	*1.006*

Jenis Kendaraan	Ulang	Baru	Total
Bus mini	211	20	231
Bus sedang	197	3	200
Bus besar	394	29	423
Bus maxi	131	21	152
2. Mobil Barang	*6.208*	*281*	*6.489*
Pick up	3.467	197	3.664
Light truck	885	32	917
Truck	1.856	52	1.908
Jumlah	**7.141**	**354**	**7.495**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Berdasarkan data uji KIR tahun 2025 tersebut di atas, didominasi oleh mobil barang yaitu sebanyak 6.489 unit atau sebesar 86,58% dari total uji KIR angkutan darat di Kabupaten Karanganyar tahun 2025.

10. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.72.

Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah KIM aktif	jumlah	28	26	92,86	Sangat Tinggi	31	83,87	Tinggi
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	%	40	100	250,00	Sangat Tinggi	41	243,90	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2026

Terkait website dan media sosial yang di kelola oleh masing- masing perangkat daerah sudah mulai berjalan optimal. Hal ini dibuktikan perangkat daerah sudah cukup update dalam menyajikan data atau berita untuk ditayangkan. Beberapa kanal aduan yang bisa diakses diantaranya:

a. SAPAMas, merupakan kanal aduan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 0811 262 9999
b. LaporGub, melalui website laporgub.jatengprov.go.id atau melalui SMS dengan nomor 0811 2920 200
c. SP4N LAPOR, merupakan kanal layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui website www.lapor.go.id.
d. Website resmi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, melalui alamat www.karanganyarkab.go.id Menu Layanan, Sub menu Suara Masyarakat
e. Media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, melalui twitter, instagram dan Facebook

Dalam rangka mendukung keamanan dan kenyamanan di area publik, memantau arus lalu lintas serta mengawasi fasilitas umum secara real time, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Karanganyar sudah menyebar “mata digital” berupa *Closed-Circuit Television* (CCTV) di berbagai titik strategis, diantaranya berlokasi di:

a. Depan KODIM Karanganyar
b. Plasa Alun-alun Karanganyar
c. Taman Pancasila
d. Simpang DPRD Kabupaten Karanganyar
e. Simpang Papahan Timur
f. Simpang Bejen
g. Simpang Kebakkramat
h. *Flyover* Palur Atas
i. *Flyover* Palur Bawah
j. Terminal Tawangmangu
k. Bundaran HI Tawangmangu
l. Tugu Mojogedang
m. Colomadu Utara
n. Karangpandan Barat

CCTV tersebut secara umum, bisa diakses melalui:

a. Youtube : CCTV Kab. Karanganyar
b. https://gishub.karanganyarkab.go.id
c. https://cctv.karanganyarkab.go.id

Transformasi digital pemerintahan memasuki fase baru yang tidak lagi berorientasi semata pada pemenuhan tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tetapi diarahkan pada pencapaian kinerja pemerintahan digital yang terintegrasi, berdampak, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan paradigma tersebut merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menetapkan transformasi digital sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional, sekaligus mengamanatkan perubahan instrumen evaluasi SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi).

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 memberikan penegasan kepada seluruh instansi pemerintah mengenai pelaksanaan pembinaan penerapan kebijakan Pemerintah Digital pada Tahun 2025 sebagai penguatan implementasi SPBE sekaligus masa transisi menuju pengukuran kinerja melalui Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi). Surat edaran tersebut menandai perubahan fokus evaluasi dari penilaian aspek kematangan proses menuju pengukuran capaian transformasi digital yang menghasilkan nilai nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan tata kelola pemerintahan.

Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) diharapkan menjadi instrumen yang lebih komprehensif dalam mengukur keberhasilan transformasi digital nasional karena tidak hanya menilai kesiapan tata kelola, manajemen, dan teknologi, tetapi juga tingkat integrasi layanan, interoperabilitas data, pemanfaatan platform digital bersama, keamanan informasi, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, serta dampak digitalisasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah perlu melakukan penyesuaian strategi transformasi digital secara bertahap melalui penguatan tata kelola pemerintahan digital, percepatan integrasi layanan dan data, optimalisasi arsitektur SPBE, pengembangan talenta digital, serta peningkatan kolaborasi lintas instansi. Upaya tersebut tidak hanya

ditujukan untuk meningkatkan capaian indeks, tetapi juga untuk mewujudkan pemerintahan digital yang adaptif, terintegrasi, berpusat pada pengguna (*user-centric*), serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Oleh karena itu, transformasi dari Evaluasi SPBE menuju Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) harus dipandang sebagai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan digital di Indonesia, yaitu dari orientasi kepatuhan (*compliance*) menuju orientasi hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), sehingga digitalisasi benar-benar menjadi pengungkit peningkatan kinerja pemerintahan, daya saing bangsa, dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program, yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.73.
Capaian Kinerja Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah unit usaha simpan pinjam yang baru	unit	5	177	3540	Sangat Tinggi	5	3540	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	54	50	92,59	Sangat Tinggi	57	87,72	Tinggi
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	%	26	23,5	90,38	Sangat Tinggi	27	87,04	Tinggi
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti Diklat	%	11,3	83	734,51	Sangat Tinggi	11,4	728,07	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan	%	80	89	111,25	Sangat Tinggi	82	108,54	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina	%	0.006	0,011	183,33	Sangat Tinggi	0,007	157,14	Sangat Tinggi
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan)	%	1.1	1	90,91	Sangat Tinggi	1,2	83,33	Tinggi

Sumber: DISKUKTRANESDM Kabupaten Karanganyar, 2026

Perkembangan UMKM di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku usaha yang bergerak pada berbagai sektor ekonomi, antara lain industri pengolahan, perdagangan, kuliner, pertanian olahan, kerajinan, fesyen, jasa, serta ekonomi kreatif. Potensi sumber daya alam, budaya lokal, dan sektor pariwisata yang dimiliki Kabupaten Karanganyar menjadi faktor pendukung berkembangnya berbagai produk unggulan UMKM yang memiliki daya saing baik di tingkat lokal maupun regional.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah melakukan pendataan langsung terhadap UMKM pada tahun 2024 sebagai upaya memperoleh basis data yang lebih akurat, terstandar, dan terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi, pelaku UMKM di Kabupaten Karanganyar mulai menunjukkan peningkatan kapasitas dalam memanfaatkan pemasaran digital, transaksi non-tunai, marketplace, media sosial, hingga pengembangan kemasan dan *branding* produk. Berbagai program pemerintah daerah berupa pelatihan kewirausahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi produk, akses pembiayaan, promosi, kemitraan usaha, serta pengembangan jejaring pemasaran terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang semakin kompetitif.

Pengembangan sektor ekonomi kreatif juga menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai tambah produk lokal Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar memiliki potensi UMKM yang cukup besar dan tersebar pada seluruh kecamatan. Aktivitas usaha didominasi oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, kuliner, kerajinan, fesyen, jasa, pertanian, peternakan, serta berbagai subsektor ekonomi kreatif. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan kawasan pertanian, sentra industri kecil, objek wisata, serta letak Kabupaten Karanganyar yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta sehingga memberikan peluang pasar yang luas bagi produk-produk lokal. Pada tahun 2025 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten mencapai sekitar 61.603 unit usaha sesuai klasifikasi lapangan usaha. Jumlah UMKM ber-NIB per Desember 2025 sebanyak 46.943 unit usaha. Jumlah UMKM ber-NIB per Mei 2026 sebanyak 51.646 unit. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sudah ada 14.606 UMKM di Kabupaten Karanganyar yang sudah tersertifikasi halal.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi merupakan soko guru ekonomi Indonesia.

Di Kabupaten Karanganyar secara kuantitatif jumlah koperasi aktif tahun 2025 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Karanganyar sebanyak 270 unit, naik menjadi 479 unit di tahun 2025. Pada tahun 2025 jumlah koperasi (aktif dan non aktif) di Kabupaten Karanganyar meliputi: 3 koperasi sekunder, 1.315 koperasi primer, 1.301 unit koperasi non KUD, dan 17 unit KUD.

Tabel 2.74.
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	2024	2025
1.	Jatipuro	3	13
2.	Jatiyoso	4	31
3.	Jumapolo	9	21
4.	Jumantono	5	16
5.	Matesih	11	19
6.	Tawangmangu	17	27
7.	Ngargoyoso	7	17
8.	Karangpandan	16	30
9.	Karanganyar	71	88

No	Kecamatan	2024	2025
10.	Tasikmadu	21	34
11.	Jaten	29	38
12.	Colomadu	29	40
13.	Gondangrejo	8	22
14.	Kebakkramat	19	30
15.	Mojogedang	10	23
16.	Kerjo	6	15
17.	Jenawi	5	15
Karanganyar		**270**	**479**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Tabel 2.75.
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Kecamatan	Induk Koperasi	Koperasi Sekunder	Koperasi Primer	KUD	Non KUD
1.	Jatipuro	-	-	31	1	30
2.	Jatiyoso	-	-	33	1	32
3.	Jumapolo	-	-	54	1	53
4.	Jumantono	-	-	43	1	42
5.	Matesih	-	-	68	1	67
6.	Tawangmangu	-	-	83	1	82
7.	Ngargoyoso	-	-	45	1	44
8.	Karangpandan	-	-	68	1	67
9.	Karanganyar	-	3	272	1	274
10.	Tasikmadu	-	-	82	1	81
11.	Jaten	-	-	125	1	124
12.	Colomadu	-	-	91	1	90
13.	Gondangrejo	-	-	73	1	72
14.	Kebakkramat	-	-	68	1	67
15.	Mojogedang	-	-	81	1	80
16.	Kerjo	-	-	57	1	56
17.	Jenawi	-	-	41	1	40
Karanganyar		**-**	**3**	**1.315**	**17**	**1.301**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan. Program ini diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan melalui penguatan koperasi sebagai wadah usaha bersama masyarakat. Di Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan program tersebut dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Perkembangan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Karanganyar. Di Kabupaten Karanganyar ada 17 Kecamatan dan 177 Desa/Kelurahan. Untuk Koperasi Desa Merah Putih, semua sudah memiliki Badan Hukum Koperasi. Ada 162 Koperasi Desa Merah Putih dan 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (12 KKMP di Kecamatan Karanganyar dan 3 KKMP di Kecamatan Tawangmangu).

Untuk faktor penghambat, sampai saat ini masih ada koperasi yang belum menjalankan usahanya karena terbentur permodalan. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat menjadi anggota koperasi dan

belum adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjadi anggota koperasi,sehingga modal koperasi belum terkumpul.

Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pelaksanaan program yaitu Tingginya komitmen pemerintah desa dan kelurahan dalam mendukung pembentukan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, Sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, notaris pembuat akta koperasi, tenaga pendamping, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan pembentukan 177 KDKMP menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional. Selain memastikan seluruh desa dan kelurahan memiliki kelembagaan koperasi yang sah, pemerintah daerah juga terus mendorong agar koperasi yang telah terbentuk dapat segera menjalankan kegiatan usaha secara produktif dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

12. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) program, yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.76.

Capaian Kinerja Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan	Buah	3	3	100,00	Sangat Tinggi	3	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	100,00	Sangat Tinggi	3	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi	%	30	51	170,00	Sangat Tinggi	29	175,86	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi	Unit	800	10000	1250	Sangat Tinggi	850	1176,47	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, 2026

Jika dibandingkan dengan capaian investasi tahun 2024 sebesar Rp. 5.205.239.041.574 capaian investasi tahun 2025 sebesar Rp. 5.218.271.085.687,- mengalami kenaikan sebesar 0,25%. Lima besar (top five) sektor investasi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 diantaranya adalah:

a. Industri kimia dan farmasi sebesar 25,34% dengan nilai investasi sebanyak Rp. 1.322.225.435.351,-
b. Industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 20,52% dengan nilai investasi sebanyak Rp. 1.070.513.652.527,-
c. Perumahan dan kawasan industri sebesar 13,11% dengan nilai investasi sebanyak Rp. 684.110.152.864,-
d. Perdagangan dan reparasi sebesar 10,53% dengan nilai investasi sebanyak Rp. 549.220.016.492,-

e. Jasa lainnya sebesar 7,11% dengan nilai investasi sebanyak Rp. 370.924.106.120,-

f. Kumulatif investasi sebesar 23,39% diperoleh dari industri karet dan plastik, industri kendaraan bermotor, industri pangan dan perkebunan, konstruksi, transportasi dan telekomunikasi, industri kayu, listrik, gas dan air, industri mineral non logam, industri kertas dan percetakan serta industri lainnya. Nilai investasi dari sektor-sektor tersebut sebesar Rp. 1.221.277.722.333,-

Berdasarkan data laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terdapat 9.925 orang tenaga kerja yang terserap sebagai dampak dari investasi tahun 2025 di Kabupaten Karanganyar.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.77.

Capaian Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	5	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang dibina	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2026

14. Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Karanganyar memiliki peran yang sangat fundamental, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Tersedianya data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan prasyarat utama dalam siklus perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).

Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar pada urusan statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat satu sub urusan yakni sub urusan Statistik Sektoral dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

Urusan Statistik pada tahun 2025 dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral. Capaian indikator kinerja tersebut di semester II tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk indikator tersebut. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.78.
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Komunikasi da Informatika Kabupaten Karanganyar, 2026

Kualitas penyelenggaraan urusan statistik sektoral di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren yang semakin membaik secara signifikan. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem data dan informasi daerah. Indikator keberhasilan tersebut terpotret dengan jelas melalui hasil evaluasi nasional:

a. Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS): Penyelenggaraan statistik sektoral oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan tingkat kematangan yang sangat positif. Pada tahun 2023, nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) atau IPS Kabupaten Karanganyar tercatat sebesar 2,04. Melalui upaya perbaikan tata kelola yang sistematis, nilai IPS melonjak tajam menjadi 2,90 pada tahun 2024. Peningkatan ini membuktikan bahwa proses bisnis statistik, kelembagaan, dan pemanfaatan data oleh produsen data di Karanganyar semakin memenuhi Standar Data dan Metadata Statistik.
b. Kematangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI): Seiring dengan peningkatan IPS, komitmen terhadap integrasi dan bagi pakai data juga terekam melalui evaluasi portal dan tata kelola SDI. Pada tahun 2024, nilai evaluasi SDI Kabupaten Karanganyar berhasil mencapai angka 40,57. Capaian ini menunjukkan mulai terbangunnya ekosistem interoperabilitas data antar instansi yang mendukung keterpaduan perencanaan pembangunan.

15. Persandian

Urusan Persandian pada tahun 2025 dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah. Capaian indikator kinerja tersebut di semester II tahun 2025 adalah sangat tinggi indikator tersebut. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Program Urusan Persandian Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2024				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah dikembangkan	%	64	65,27	101,98	Sangat Tinggi	65	100,42	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2026

16. Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam

pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Selain itu kebudayaan juga bisa diartikan sebagai segala hal yang kompleks, yang didalamnya berisikan kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat serta keahlian ataupun ciri khas lainnya yang diperoleh individu sebagai anggota dalam suatu masyarakat.

Urusan Kebudayaan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.80.

Capaian Kinerja Program Urusan Kebudayaan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang	%	82	83	101,22	Sangat Tinggi	82,5	98,18	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	%	91	92	101,10	Sangat Tinggi	92	97,83	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2026

Berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), cagar budaya berarti warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Di Kabupaten Karanganyar sendiri terdapat 78 cagar budaya yang tersebar di 13 Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.81.

Cagar Budaya di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Kecamatan	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Tahun Ditetapkan
1	Tasikmadu	1) Astana Randu Sanga	Desa Gaum	Struktur Cagar Budaya	2021
		2) Gapura Papahan	Jalan Solo Karanganyar	Struktur Cagar Budaya	2020
2	Tawangmangu	3) Batu Tulis	Pemakaman Dukuh Karanglo	Benda Cagar Budaya	2021
		4) Batu Dakon	Pemakaman Dukuh Karanglo	Benda Cagar Budaya	2021
		5) Komplek Makam dan Mushola Jabal Kanil	Bandardawung	Struktur dan Bangunan Cagar Budaya	2020
		6) Situs Candi Menggung	Desa Nglurah	Situs Cagar Budaya	2018
		7) Situs Plumbon	Pakem Desa Plumbon	Situs Cagar Budaya	2018
3	Jenawi	8) Candi Cetho	Cetho, Gumeng	Situs Cagar Budaya	2018
		9) Candi Kethek	Cetho, Gumeng	Situs Cagar Budaya	2018
4	Ngargoyoso	10) Candi Sukuh	Tambak, Berjo	Situs Cagar Budaya	2018
5	Kebakkramat	11) Yoni Macanan	Dalungan, Macanan	Benda Cagar Budaya	2021
		12) Jembatan Narum	Antara Dusun Narum Desa Malanggaten dan Kaliwuluh	Struktur Cagar Budaya	2021

No	Kecamatan	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Tahun Ditetapkan
		13) Yoni 1	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		14) Yoni 2	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		15) Penampil	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		16) Batu Ukir Bertakik 1	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		17) Batu Ukir Bertakik 2	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		18) Antefik Kala 1	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		19) Antefik Kala 2	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		20) Antefik Flora 1	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		21) Antefik Flora 2	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		22) Antefik Flora 3	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		23) Antefik Flora 4	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		24) Kemuncak Candi 1	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		25) Kemuncak Candi 2	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		26) Kemuncak Pagar Langkan 1	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		27) Kemuncak Pagar Langkan 2	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		28) Hiasan Pagar Langkan 1	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		29) Hiasan Pagar Langkan 2	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		30) Hiasan Pagar Langkan 3	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
		31) Hiasan pagar Langkan 4	Dusun Dadakan Desa Pulosari	Benda Cagar Budaya	2021
6	Karanganyar	32) Joglo Waduk Tirto Marto Delingan	Kelurahan Gedong	Bangunan Cagar Budaya	2020
		33) Makam Nyai Ageng Karang	Kelurahan Karanganyar	Struktur Cagar Budaya	2021
		34) Lokasi Perjanjian Giyanti	Kerten Kelurahan Jantiharjo	Situs Cagar Budaya	2021
		35) Prasasti Waduk Tirto Marto	Delingan, Gedong	Benda Cagar Budaya	2020
		36) Komplek Masjid dan Makam Patih Mangkunegaran	Kelurahan Popongan	Bangunan Cagar Budaya	2020
		37) Yoni	Bawah Pohon Asem Kelurahan Lalung	Benda Cagar Budaya	2021
		38) Yoni	Kelurahan Jantiharjo	Benda Cagar Budaya	2021
7	Gondangrejo	39) Komplek Makam dan Masjid Al Yahya	Tuban, Sambirejo	Bangunan Cagar Budaya	2021
8	Colomadu	40) Monumen Mangkunegoro IV	Depan Pabrik Gula Colomadu	Struktur Cagar Budaya	2021
		41) Bekas Pabrik Gula Colomadu	Desa Malangjiwan	Bangunan Cagar Budaya	2020
9	Kerjo	42) Monumen Perjuangan Gerilya Surakarta	SD Kwadungan I Kerjo	Struktur Cagar Budaya	2020
		43) Menara Kostin	Dusun Sentono Desa Tawangsari	Struktur Cagar Budaya	2021
10	Matesih	44) Sapta Tirta Pablengan	Argotiloso Pablengan	Situs Cagar Budaya	2020
		45) Kawasan Sapta Tirta Pablengan	Pablengan	Situs Cagar Budaya	2020
		46) Umpak/Batu Bulat 1	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021

No	Kecamatan	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Tahun Ditetapkan
		47) Umpak/Batu Bulat 2	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		48) Umpak/Batu Bulat 3	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		49) Umpak Batu Bulat 4	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		50) Umpak/Batu Bulat 5	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		51) Umpak/Batu Bulat 6	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		52) Umpak/Batu Bulat 7	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		53) Umpak/Batu Bulat 8	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		54) Umpak/Batu Bulat 9	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		55) Umpak/Batu Bulat 10	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		56) Umpak/Batu Kotak Limasan Berornamen 1	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		57) Umpak/Batu Kotak Limasan Berornamen 2	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		58) Umpak/Batu Kotak Limasan Berornamen 3	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		59) Umpak/Batu Kotak Limasan Tidak Berornamen	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		60) Batu Bulat Luar 1	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		61) Batu Bulat Luar 2	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		62) Batu Bulat Luar 3	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		63) Batu Bulat Luar 4	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		64) Batu Bulat Luar 5	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		65) Batu Bulat Luar 6	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		66) Batu Kotak/Limasan Luar 1	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		67) Batu Kotak/Limasan Luar 2	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
		68) Batu Kotak/Limasan Luar 3	Dusun Gugur Desa Koripan	Benda Cagar Budaya	2021
11	Karangpandan	69) Tugu Ngipik	Ngepos Karangpandan	Struktur Cagar Budaya	2020
12	Mojogedang	70) Masjid Darul Mutaqim	Desa Kaliboto	Bangunan Cagar Budaya	2020
		71) Batu Sapi	Dusun Kembangan Desa Ngadirejo	Benda Cagar Budaya	2021
		72) Yoni	Dusun Kembangan Desa Ngadirejo	Benda Cagar Budaya	2021
		73) Lingga	Dusun Kembangan Desa Ngadirejo	Benda Cagar Budaya	2021
		74) Arca Nandi	Dusun Kembangan Desa Ngadirejo	Benda Cagar Budaya	2021
13	Jumapolo	75) Batu Besar Bergambar Wayang dan keris	Plosokulon	Benda Cagar Budaya	2021
		76) Batu Lumpang 1	Persawahan Jumapolo	Benda Cagar Budaya	2021
		77) Batu Lumpang 2	Persawahan Jumapolo	Benda Cagar Budaya	2021
		78) Batu Lumpang 3	Persawahan Jumapolo	Benda Cagar Budaya	2021

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2026

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Berdasarkan Undang-Undang 43 Tahun 2007 perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Urusan Perpustakaan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.82.

Capaian Kinerja Program Urusan Perpustakaan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan	%	12,9	75,87	588,14	Sangat Tinggi	13	583,62	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terindentifikasinya naskah kuno di Kabupaten Karanganyar	naskah	5	5	100,00	Sangat Tinggi	6	83,33	Tinggi

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2026

Pada Tahun 2025, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 11,43 dari target 79,50, sedangkan capaian Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) sebesar 57,45 dari target 70,00. Capaian kedua indikator tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yang dipengaruhi oleh perubahan instrumen dan metodologi pengukuran sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang IPLM dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang TKM.

Pada metode terbaru, pengukuran IPLM lebih menitikberatkan pada dimensi kinerja dengan bobot 70 persen dan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen. Sementara itu, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca sebesar 35 persen. Perubahan metodologi tersebut menyebabkan target yang disusun berdasarkan metode sebelumnya tidak lagi memiliki kesesuaian dengan hasil pengukuran Tahun 2025.

Dengan demikian, capaian IPLM dan TKM Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian maupun target pada tahun sebelumnya. Hasil pengukuran Tahun 2025 merupakan nilai dasar (*baseline*) berdasarkan metodologi baru yang lebih menekankan aspek substantif terhadap kinerja pembangunan literasi dan

penyelenggaraan layanan perpustakaan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta penyusunan target dan strategi peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Persentase ketersediaan bahan bacaan, diperoleh dari formulasi jumlah judul bahan bacaan yang tersedia dibagi jumlah judul bahan bacaan yang dibutuhkan dikali 100%. Sehingga untuk tahun 2025, persentase ketersediaan bahan bacaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 377,57% (diperoleh dari 26.430 judul bahan bacaan yang tersedia dibagi 7.000 judul bahan bacaan yang dibutuhkan dikali 100%). (Sumber : Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota).

Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kabupaten Karanganyar sebanyak 50 TBM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.83.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

NO	Kecamatan	JUMLAH TBM
1.	Kecamatan Jatiyoso	1
2.	Kecamatan Jatipuro	-
3.	Kecamatan Jumantono	2
4.	Kecamatan Jumapolo	2
5.	Kecamatan Kerjo	3
6.	Kecamatan Matesih	6
7.	Kecamatan Karangpandan	2
8.	Kecamatan Karanganyar	6
9.	Kecamatan Gondangrejo	7
10.	Kecamatan Colomadu	2
11.	Kecamatan Kebakkramat	2
12.	Kecamatan Jenawi	1
13.	Kecamatan Mojogedang	4
14.	Kecamatan Jaten	3
15.	Kecamatan Tasikmadu	3
16.	Kecamatan Ngargoyoso	2
17.	Kecamatan Tawangmangu	4
JUMLAH		**50**

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2026

18. Kearsipan

Urusan Kearsipan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu Progrm Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip. Kedua program tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.84.

Capaian Kinerja Program Urusan Kearsipan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip	%	57	100	175,44	Sangat Tinggi	58	80,50	Tinggi
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	13	13	100,00	Sangat Tinggi	14	619,23	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2026

a. Jumlah Arsip yang Diselamatkan
Pelaksanaan penyelamatan arsip oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 menghasilkan 368 berkas arsip statis yang berhasil diakuisisi, 4.169 arsip yang telah didigitalisasi, serta penyerahan 368 berkas arsip statis dari 10 Perangkat Daerah. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian arsip sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola kearsipan yang lebih baik.

b. Pengelolaan Arsip secara Baku
Penerapan pengelolaan arsip sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pada tahun 2025 telah dilaksanakan oleh 25 Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025, 14 Perangkat Daerah memperoleh nilai minimal B berdasarkan hasil penilaian penyelenggaraan kearsipan pada Perangkat Daerah, yang menunjukkan tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memperoleh nilai hasil Pengawasan Kearsipan sebesar 79,00 dengan kategori "BB (Sangat Baik)", berdasarkan Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor B/000.5.15.2/1595/2025 tanggal 29 Agustus 2025. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal sebesar 81,80 (bobot 60%) dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal sebesar 74,79 (bobot 40%).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah terlaksana dengan baik dan memenuhi sebagian besar indikator sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang kearsipan.

2.2.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.85.
Capaian Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	kg	1.945.102	1.949.278	100,21	Sangat Tinggi	1.954.828	99,72	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produk perikanan yang dipromosikan	%	65	70,59	108,60	Sangat Tinggi	75	94,12	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase perairan umum daratan yang diawasi	%	30	47,06	156,87	Sangat Tinggi	35	134,46	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2026

Sektor perikanan di Kabupaten Karanganyar diarahkan pada pengembangan perikanan daratan, khususnya perikanan budidaya air tawar, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengawasan pemanfaatan sumber daya perairan umum daratan. Meskipun tidak memiliki wilayah laut, sektor perikanan tetap berperan dalam mendukung penyediaan pangan hewani, peningkatan pendapatan pelaku usaha, nilai tambah produk perikanan, dan konsumsi ikan masyarakat.

Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 3 (tiga) indikator kinerja program. Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik pada seluruh indikator program. Pada Pengelolaan Perikanan Budidaya, indikator produksi perikanan budidaya ditargetkan sebesar 1.945.102 kg dan terealisasi sebesar 1.949.278 kg, atau mencapai 100,21% dengan status Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya telah melampaui target tahun 2025, meskipun penguatan usaha budidaya ikan tetap perlu dilakukan agar produktivitas, skala usaha, dan keberlanjutan usaha pembudidaya dapat terus meningkat.

Pada Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, indikator persentase produk perikanan yang dipromosikan ditargetkan sebesar 65% dan terealisasi sebesar 70,59%, atau mencapai 108,60% dengan status Sangat Tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa promosi produk perikanan telah berjalan baik, namun masih perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak produk dan pelaku usaha perikanan secara merata, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, akses pasar, dan daya saing produk perikanan daerah.

Sementara itu, pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, indikator persentase perairan umum daratan yang diawasi ditargetkan sebesar 30% dan terealisasi sebesar 47,06%, atau mencapai 156,87% dengan status Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perairan umum daratan telah melampaui target. Namun demikian, pengawasan tetap perlu diperkuat untuk mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan/atau tidak sesuai ketentuan, menjaga kualitas ekosistem perairan, serta mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.86.
Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenis dan Kecamatan
di Kabupaten Karanganyar (kg) Tahun 2025

No	Kecamatan	Karper	Nila Merah	Gurame	Lele	Lainnya	Jumlah
1.	Jatipuro	-	6,645	1,980	85,202	1,587	95,414
2.	Jatiyoso	-	7,619	2,270	99,52	-	109,409
3.	Jumapolo	0,200	8,011	2,387	102,519	1,913	115,030
4.	Jumantono	-	8,323	2,481	106,33	2,387	119,521
5.	Matesih	-	9,524	2,838	122,132	2,274	136,768
6.	Tawangmangu	-	5,870	-	48,365	-	54,235
7.	Ngargoyoso	0,680	7,820	2,017	86,687	-	97,204
8.	Karangpandan	0,300	9,380	2,910	125,037	2,57	140,197
9.	Karanganyar	-	9,944	2,964	127,518	2,374	142,800
10.	Tasikmadu	-	7,558	2,952	96,214	1,805	108,529
11.	Jaten	-	7,050	2,155	92,615	2,027	103,847
12.	Colomadu	0,200	10,175	2,735	116,449	2,191	131,750
13.	Gondangrejo	-	7,830	2,626	112,841	3,23	126,527

No	Kecamatan	Karper	Nila Merah	Gurame	Lele	Lainnya	Jumlah
14.	Kebakkramat	0,500	7,567	2,860	102,111	4,221	117,259
15.	Mojogedang	0,200	9,110	3,013	130,441	2,414	145,178
16.	Kerjo	0,100	9,190	3,037	131,564	2,433	146,324
17.	Jenawi	0,025	4,129	1,230	52,916	0,986	59,286
Karanganyar		**2,205**	**135,745**	**40,455**	**1.738,461**	**32,412**	**1.949,278**

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026, BPS

2. Pariwisata

Urusan Pariwisata pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.87.

Capaian Kinerja Program Urusan Pariwisata Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar	%	6	5,8	96,67	Sangat Tinggi	6	96,67	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dipromosikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	%	17	17,6	103,53	Sangat Tinggi	23	76,52	Tinggi
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan	%	25	33,5	134,00	Sangat Tinggi	30	111,67	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2026

Pariwisata merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan atau motif tanpa bermaksud mencari nafkah tetap.

Kabupaten Karanganyar terkenal akan potensi pariwisatanya. Terdapat objek wisata mulai dari agrowisata, pegunungan, wisata situs sejarah, dan lain-lain. Beberapa objek wisata yang ada antara lain: Grojogan Sewu, Candi Cetho, Air Terjun Jumog, Parang Ijo, Candi Sukuh, Taman Balekambang, Sapta Tirta Pablengan, dan masih banyak lagi.

Selama tahun 2025 jumlah pengunjung wisata tercatat sebanyak 647.546 orang. Pada tahun 2025, tercatat jumlah pengunjung terbanyak terdapat di Air Terjun Jumog yaitu sebanyak 351.235 orang dengan nilai retribusi mencapai Rp. 20 miliar rupiah. Total retribusi objek wisata yang diperoleh selama tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13,188 miliar rupiah.

Jumlah hotel di Karanganyar sebanyak 245 hotel dan paling banyak terdapat di Kecamatan Tawangmangu karena daerah tersebut merupakan kawasan wisata. Jumlah restoran pada tahun 2025 adalah 564 restoran, naik 17,5 persen dari tahun 2024 yang sebanyak 480 restoran (Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS).

3. Pertanian

Urusan Pertanian pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) program, dengan 16 (enam belas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.88.

Capaian Kinerja Program Urusan Pertanian Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi tanaman pangan utama (padi)	ton	342.110	351.075	102,62	Sangat Tinggi	42130	102,61	Sangat Tinggi
		Produksi tanaman pangan utama (jagung)	ton	20.920	21.867	104,53	Sangat Tinggi	21.080	103,73	Sangat Tinggi
		Produksi hortikultura unggulan (jahe)	ton	4.390	4.948	112,71	Sangat Tinggi	4.409	112,22	Sangat Tinggi
		Produksi hortikultura unggulan (durian)	ton	13.500	12.060	89,33	Tinggi	13.560	88,94	Tinggi
		Produksi perkebunan unggulan (kopi)	ton	27,50	29,7	108,00	Sangat Tinggi	28,1	105,69	Sangat Tinggi
		Produksi perkebunan unggulan (tembakau)	ton	62,20	66,55	106,99	Sangat Tinggi	63,5	104,80	Sangat Tinggi
		Sapi	ekor	68.909	55.453	80,47	Tinggi	69.254	80,07	Tinggi
		Kambing/Domba	ekor	154.929	154.448	99,69	Sangat Tinggi	156478	98,70	Sangat Tinggi
		Ayam	ekor	11.690.960	12.644.232	108,15	Sangat Tinggi	12041689	105,00	Sangat Tinggi
		Kelinci	ekor	13.505	10.593	78,44	Tinggi	13.573	78,04	Tinggi
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	31,34	30,48	97,26	Sangat Tinggi	31,68	96,21	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka kesakitan ternak besar (%)	%	7,7	7,5	97,40	Sangat Tinggi	7,6	98,68	Sangat Tinggi
		Angka kesakitan ternak kecil (%)	%	16,1	15,8	98,14	Sangat Tinggi	16	98,75	Sangat Tinggi
		Angka kesakitan unggas (%)	%	14,7	14,4	97,96	Sangat Tinggi	14,5	99,31	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertangani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan kelompok tani yang aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2026

Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang kaya akan hasil pertanian, diantaranya tanaman pangan, sayur, biofarmaka, tanaman hias dan buah. Tahun 2025 komoditi sayur terbanyak yang dihasilkan adalah komoditi wortel yakni sebesar 264.814 kuintal. Selain itu, produksi bawang daun dan bawang merah juga merupakan komoditas terbanyak kedua dan ketiga yang dihasilkan di Kabupaten Karanganyar yakni sebesar 161.178 kuintal dan 94.442 kuintal.

Produksi tanaman biofarmaka terbanyak yang dihasilkan di Kabupaten Karanganyar adalah komoditi jahe yakni sebesar 4.948 ton kemudian disusul komoditi lengkuas/laos sebanyak 1.121 ton dan kunyit sebanyak 468 ton.

Tanaman hias yang paling banyak dibudidayakan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025, yaitu bunga krisan dan anggrek pot yang produksinya mencapai 297.600 tangkai dan 259.517 pohon. Selain itu, terdapat anthurium bunga dan mawar yang produksinya menduduki peringkat ketiga dan keempat terbanyak di Karanganyar yaitu sebanyak 242.161 dan 109.625 pohon (Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS).

Tabel 2.89.
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Karanganyar (kwintal) Tahun 2025

No	Jenis Tanaman	Produksi (kw)
1.	Bawang Daun	161.178,00
2.	Bawang Merah	94.442,40
3.	Bawang Putih	29.546,00
4.	Bayam	-
5.	Wortel	264.814,00
6.	Buncis	9.989,00
7.	Cabai Besar	16.972,00
8.	Cabai Rawit	9.567,56
9.	Jamur	6.791,70
10.	Kacang Panjang	889,06
11.	Kangkung	-
12.	Kembang Kol	47.170,00
13.	Kentang	455,00
14.	Ketimun	7.120,00
15.	Kubis	24,792,00
16.	Labu Siam	9.600,00
17.	Terung	9.131,77
18.	Tomat	20.752,00
19.	Petsai/Sawi	95.740,00
20.	Melon	1.090,00
21.	Semangka	935,00
22.	Stroberi	841,00

Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Tabel 2.90.
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karanganyar (kg) Tahun 2025

No	Kecamatan	Jahe	Laos/ Lengkuas	Kencur	Kunyit
1.	Jatipuro	180.000	10.800	17.000	75.000
2.	Jatiyoso	154	64	43	45
3.	Jumapolo	23.046	78.838	-	29.184
4.	Jumantono	121.000	51.000	18.500	21.600
5.	Matesih	9.675	2.095	2.076	3.675
6.	Tawangmangu	45.150	51.615	-	34.500
7.	Ngargoyoso	17.460	16.250	-	23.000
8.	Karangpandan	5.430	2.345	595	2.278
9.	Karanganyar	-	25	-	50
10.	Tasikmadu	1.370	625	685	1.040
11.	Jaten	-	-	-	-
12.	Colomadu	-	-	-	-
13.	Gondangrejo	-	-	-	-
14.	Kebakkramat	150	160	160	462
15.	Mojogedang	2.325	3.000	1.550	2.700
16.	Kerjo	32.960	31.912	730	25.850
17.	Jenawi	4.510.000	872.500	41.810	249.375
Karanganyar		**4.948.720**	**1.121.229**	**83.149**	**468.759**

Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

4. Kehutanan

Urusan Kehutanan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 1 (satu) program, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk indikator tersebut. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.91.

Capaian Kinerja Program Urusan Kehutanan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase luas lahan yang dilindungi	%	70	70	100,00	Sangat Tinggi	70	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2026

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 1 (satu) program, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk indikator tersebut. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.92.

Capaian Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Kawasan	2	2,00	100,00	Sangat Tinggi	2	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: DISKUKTRANSESDM Kabupaten Karanganyar, 2026

6. Perdagangan

Urusan Perdagangan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 6 (enam) program, dengan 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.93.

Capaian Kinerja Program Urusan Perdagangan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (pusat perbelanjaan dan toko swalayan)	%	88	100	113,64	Sangat Tinggi	90	111,11	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan persyaratan SNI pasar rakyat	%	25	25	100,00	Sangat Tinggi	27	92,59	Sangat Tinggi
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase publikasi harga barang pokok penting harian	%	80	100	125,00	Sangat Tinggi	85	117,65	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk ekspor	produk	55	50	90,91	Sangat Tinggi	55	90,91	Sangat Tinggi
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal	%	70	85	121,43	Sangat Tinggi	75	113,33	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang dipromosikan	Produk	110	120	109,09	Sangat Tinggi	120	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: DISDAGPERINNAKER Kabupaten Karanganyar, 2026

Perdagangan sebagai sektor strategis berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar.

Pembangunan perdagangan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan dan dalam perluasan kesempatan kerja. Selain itu, pembangunan perdagangan memberikan konstribusi pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengamankan neraca pembayaran.

Jumlah pasar tradisional di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 adalah 18 pasar. Sedangkan, jumlah pasar modern pada tahun 2025 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 92 pasar swalayan dan 1 pasar grosir. Kecamatan yang memiliki jumlah pasar swalayan terbanyak di Kabupaten Karanganyar tahun 2025 adalah Kecamatan Colomadu (Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS).

Tabel 2.94.
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Kecamatan	Pasar Tradisional	Pasar Lokal	Pasar Swalayan/ Super market	Hiper market	Pasar Grosir	Mal/ Plaza
1.	Jatipuro	1	1	-	-	-	-
2.	Jatiyoso	1	-	6	-	-	-
3.	Jumapolo	1	-	-	-	-	-
4.	Jumantono	-	3	-	-	-	-
5.	Matesih	2	1	2	-	-	-
6.	Tawangmangu	1	-	1	-	-	-
7.	Ngargoyoso	1	-	-	-	-	-
8.	Karangpandan	1	1	1	-	-	-
9.	Karanganyar	2	-	20	-	-	-
10.	Tasikmadu	1	-	2	-	-	-
11.	Jaten	1	1	23	-	1	1
12.	Colomadu	1	-	33	-	-	-
13.	Gondangrejo	1	-	1	-	-	-
14.	Kebakkramat	1	1	2	-	-	-
15.	Mojogedang	2	-	-	-	-	-
16.	Kerjo	1	1	1	-	-	-
17.	Jenawi	-	1	-	-	-	-
Karanganyar		**18**	**10**	**92**	**-**	**1**	**1**

Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

7. Perindustrian

Urusan Perindustrian pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.95.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah dokumen perencanaan industri yang disusun	Dokumen	0	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1	100,00	Sangat Tinggi
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	%	34	37	108,82	Sangat Tinggi	35	105,71	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah hasil pemanatauan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah	%	11	11	100,00	Sangat Tinggi	11	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan tekini pada SIINas	%	75	75	100,00	Sangat Tinggi	75	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: DISDAGPERINNAKER Kabupaten Karanganyar, 2026

8. Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 adalah sangat rendah untuk indikatornya karena tidak ada transmigran yang diberangkatkan selama tahun 2025. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.96.

Capaian Kinerja Program Urusan Transmigrasi Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	2	0	0,00	Sangat Rendah	2	0,00	Sangat Rendah

Sumber: DISKUKTRANSESDM Kabupaten Karanganyar, 2026

2.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.97.

Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	EKPPD	score	sangat tinggi	sangat tinggi	100,00	Sangat Tinggi	sangat tinggi	100,00	Sangat Tinggi
		Cakupan Penataan Peraturan Prundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase kegiatan pembangunan yang dievaluasi dalam tahun berjalan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai dan mengukur pelaksanaan reformasi hukum khususnya pada Pemerintah Daerah. IRH berfokus pada aspek penataan regulasi dan dukungannya terhadap reformasi birokrasi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum selain itu IRH hadir sebagai alat ukur yang sistematis untuk memastikan bahwa proses pembentukan, evaluasi, dan pengelolaan regulasi dilaksanakan secara tertib, transparan, dan selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional. Melalui pendekatan yang terstruktur, IRH mendorong setiap instansi untuk memperkuat kualitas regulasi, menghindari tumpang tindih aturan, serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Karanganyar selama periode 2022–2026 menunjukkan tren yang terus meningkat. Nilai IRH naik dari 49,66 pada tahun 2022 menjadi 66,55 pada tahun 2023, kemudian meningkat signifikan menjadi 99,50 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 dan 2026, Kabupaten Karanganyar berhasil mencapai dan mempertahankan nilai maksimal, yaitu 100. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memperkuat pelaksanaan reformasi hukum serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kepastian hukum.

2. Sekretariat DPRD

Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD pada tahun 2025 dilaksanakan melalui satu program, yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator kinerja program berupa Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun. Capaian kinerja program di semester II tahun 2025 adalah sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.98.

Capaian Kinerja Program Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun	*%*	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, 2026

2.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Perencanaan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.99.

Capaian Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	%	94	95	101,06	Sangat Tinggi	95	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar, 2026

Adapun sumber daya manusia fungsional perencana di Kabupaten Karanganyar, tersaji dalam daftar tabel berikut:

Tabel 2.100.

Daftar Fungsional Perencana di Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Nama	Jenjang	Perangkat Daerah
1.	Ir. Endro Dwimiharjo, S.T., M.M.	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Sekretariat)
2.	Didik Ari Prahasta, S.E.	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya)
3.	Dodik Setyo Wiarto, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya)
4.	Eko Waluyo Jati Hidayat Rahayu, S.T.	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)
5.	M.Nevi Tri Andriyanto, S.P.,M.M.	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)
6.	Nugroho Dwi Saputro, S.E., M.P.A.	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)
7.	Sri Sudarwati, S.P., M.M.	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)
8.	Suswan Christiono, SE	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)
9.	Sri Antiningsih, S.P., M.Eng	Perencana Ahli Muda	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja)
10.	Ita Sari Ratnawati, S.Si., M.M.	Perencana Ahli Muda	Dinas Perhubungan (Sekretariat)
11.	Magdalena Kristantri, S.T., M.M.	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup (Sub Bagian Perencanaan)
12.	Nurul Badriyah, S.E.	Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah (Sub Bagian Perencanaan)
13.	Puspita Retno Guntari, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)

No	Nama	Jenjang	Perangkat Daerah
14.	Rani Widya Lestari, S.E.	Perencana Ahli Muda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)
15.	Wahyono, S.H.	Perencana Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)
16.	Darul Amal Sholihah, S.P.W.K.	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)
17.	Sufiyana Eka Pratiwi, S.Si.	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)
18.	Nurhaliza Dewi Ramadhanti, S.P.W.K.	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)
19.	Ginna Cintya Handayani, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya)
20.	Eka Marlita, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)
21.	Ar Rozi Abdullah, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Sekretariat)
22.	Nida Hayu Prabowoningsih, S.P.W.K.	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Sekretariat)
23.	Insan Abda'u Hatta, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekretariat)
24.	Tantri Cahyaning Amalia, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sekretariat)
25.	Tri Junianto, S.M.	Perencana Ahli Pertama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sekretariat)

Sumber : Satu Data Kabupaten Karanganyar, 2026

Berdasarkan data aparatur fungsional perencana tersebut, terlihat bahwa dari 42 Perangkat Daerah, hanya 13 Perangkat Daerah (30,95%) yang memiliki fungsional Perencana, yaitu :

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
d. Dinas Perhubungan
e. Dinas Lingkungan Hidup
f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
g. Inspektorat Daerah
h. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
i. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
j. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

k. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sekretariat)
m. Dinas Komunikasi dan Informatika

sedangkan 29 Perangkat Daerah sisanya tidak memiliki fungsional Perencana. Untuk selanjutnya, tugas perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat atau staf atau pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas penyusunan perencanaan Perangkat Daerah.

Dari 25 fungsional Perencana tersebut, 15 orang (60,00%) diantaranya adalah Perencana Ahli Muda yang merupakan penyetaraan dari eselon IV, dan dari 25 fungsional Perencana tersebut pula, 13 orang (52,00%) bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

2. Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Keuangan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.101.
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio pajak daerah terhadap PAD	%	51	62	121,57	Sangat Tinggi	52	119,23	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

3. Kepegawaian

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Kepegawaian pada tahun 2025 dilaksanakan melalui Program Kepegawaian Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 aecara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.102.
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	%	98	100	102,04	Sangat Tinggi	98	102,04	Sangat Tinggi
		Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat	%	80	100	125,00	Sangat Tinggi	85	117,65	Sangat Tinggi
		Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	%	98	100	102,04	Sangat Tinggi	98	102,04	Sangat Tinggi
		Presentase evaluasi kinerja yang terselesaikan	%	95	100	105,26	Sangat Tinggi	95	105,26	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karanganyar, 2026

4. Pendidikan dan Pelatihan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 adalah tinggi untuk indikatornya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.103.

Capaian Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2024				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	26	68,5	263,46	Sangat Tinggi	27	253,70	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karanganyar, 2026

5. Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.104.

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah	%	54	62	114,81	Sangat Tinggi	56	110,71	Sangat Tinggi
		Persentase inovasi yang diimplementasi kan	%	51	67	131,37	Sangat Tinggi	52	128,85	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar, 2026

2.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Pengawasan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.105.

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	9	7	77,78	Tinggi	8	87,50	Tinggi
		Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	95	100,00	Sangat Tinggi
		Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		LHR LKPD	LHR	1	1	100,00	Sangat Tinggi	1	100,00	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	100	90	90,00	Tinggi	100	90,00	Tinggi
		Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	90	90,00	Tinggi	100	90,00	Tinggi

Sumber: Inspektorat Kabupaten Karanganyar, 2026

2.2.7. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 17 kecamatan pada tahun 2025 melalui 5 (lima) program, yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kelima program tersebut terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di semester II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.106.

Capaian Kinerja Program Unsur Kewilayahan Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
7.1	**Kec. JATIPURO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	82	87,48	106,68	Sangat Tinggi	84	104,14	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	96	98,96	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.2	**Kec. JATIYOSO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	81,2	80	98,52	Sangat Tinggi	81,5	98,16	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.3	**Kec. JUMANTONO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	100	86	86,30	Tinggi	100	86,30	Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	99,65	99,65	Sangat Tinggi	100	99,65	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	99,85	99,85	Sangat Tinggi	100	99,85	Sangat Tinggi
7.4	**Kec. JUMAPOLO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,5	83,57	100,08	Sangat Tinggi	84,5	98,90	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	98,11	98,11	Sangat Tinggi	100	98,11	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.5	**Kec. MATESIH**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	95	90,13	94,87	Sangat Tinggi	100	90,13	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.6	**Kec. TAWANGMANGU**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	83,4	98,47	118,07	Sangat Tinggi	83,5	117,93	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	99,81	99,81	Sangat Tinggi	100	99,81	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	98,39	98,39	Sangat Tinggi	100	98,39	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.7	**Kec. NGARGOYOSO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	85,3	86,15	101,00	Sangat Tinggi	85,51	100,75	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.8	**Kec. KARANGANYAR**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	100	84,05	84,05	Tinggi	100	84,05	Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
		Presentase sarpas desa/kelurahan dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	96	96	100,00	Sangat Tinggi	96	100,00	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
7.9	**Kec. KARANGPANDAN**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	100	89,15	89,15	Tinggi	100	89,15	Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.10	**Kec.TASIKMADU**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	86,47	85,35	98,70	Sangat Tinggi	86,48	98,69	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.11	**Kec.JATEN**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	81,05	85,77	105,82	Sangat Tinggi	81,1	105,76	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	92	100	108,70	Sangat Tinggi	93	107,53	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	92	100	108,70	Sangat Tinggi	93	107,53	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.12	**Kec. COLOMADU**									

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	81,2	80	98,52	Sangat Tinggi	81,5	98,16	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	90	90	100,00	Sangat Tinggi	90	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	90	90	100,00	Sangat Tinggi	100	90,00	Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	90	90	100,00	Sangat Tinggi	90	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.13	**Kec. GONDANGREJO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	84,6	85,35	100,89	Sangat Tinggi	87,5	97,54	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.14	**Kec. MOJOGEDANG**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,5	86,65	102,54	Sangat Tinggi	85	101,94	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	93	93	100,00	Sangat Tinggi	94	98,94	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa dalam keadaan kondusif	%	94	94	100,00	Sangat Tinggi	95	98,95	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	90	90	100,00	Sangat Tinggi	90	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.15	**Kec. KEBAKKRAMAT**									

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	89	103,49	Sangat Tinggi	87	102,30	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.16	**Kec. KERJO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,2	89,65	110,41	Sangat Tinggi	81,5	110,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa dalam keadaan kondusif	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
7.17	**Kec. JENAWI**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,30	86,32	101,20	Sangat Tinggi	85,35	101,14	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Kecamatan, 2026

2.2.8. Unsur Urusan Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum, Bidang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) program, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada semester II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.107.

Capaian Kinerja Program Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2025				Target Akhir RPD		
				Target	Capaian Smt II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Indeks	72	75	104,17	Sangat Tinggi	74	101,35	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil (IKS)	Indeks	72	67	93,06	Sangat Tinggi	74	90,54	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANI SASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	Indeks	53	55	103,77	Sangat Tinggi	56	98,21	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	62	70	112,90	Sangat Tinggi	64	109,38	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun	%	82	90	109,76	Sangat Tinggi	84	107,14	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2026

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur dengan pencapaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Capaian Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan pemerintahan di Tahun 2025 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.108.

Capaian Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025				Urusan
					Target	Capaian Smt II	%	Status	
Meningkatkan Daya Saing Daerah									
	Indeks Daya Saing Daerah			**%**	**3,800**	**3,850**	**101,32**	**Sangat Tinggi**	***Semua Urusan Pembangunan Daerah***
		Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	Urusan Pemerintahan Bidang : - Sosial, - Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, - Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Kewilayahan
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,19	78,67	100,61	Sangat Tinggi	Urusan Pemerintahan Bidang : - Pendidikan, - Kesehatan, - Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, - Perpustakaan, - Kepemudaan dan Olahraga, - Tenaga Kerja
		Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,15	5,75	93,50	Sangat Tinggi	Urusan Pemerintahan Bidang : - Penanaman Modal, - Pariwisata, - Kebudayaan, - Pangan, - Pertanian, - Perikanan dan Kelautan, - Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, - Perhubungan, - Perdagangan, - Perindustrian, - Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Meningkatnya tata pemerintahan yang	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	- Semua Urusan Pembangunan Daerah,

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025				Urusan
					Target	Capaian Smt II	%	Status	
		berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi							- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	Indeks	87,42	82,14	106,43	Sangat Tinggi	Urusan Pemerintahan Bidang : - Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, - Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, - Lingkungan Hidup

Sumber: Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja Tahun 2026, diolah

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perbaikan tata kelola pemerintahan. IRB mencerminkan pencapaian birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel serta mampu memberikan pelayanan publik berkualitas. Adapun Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Indeks ini diperoleh melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB. IPP untuk tahapan RPJMD Tahun 2025-2029, menjadi salah satu indikator sasaran daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
1.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**										
a	***Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan***										
	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	78,19	78,67	100,61	Sangat Tinggi	79,26	78,67	99,26	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95	13,74	98,49	Sangat Tinggi	13,70	13,74	100,29	Sangat Tinggi
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,50	9,27	109,06	Sangat Tinggi	8,55	9,27	108,42	Sangat Tinggi
b	***Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan***										
			%	6,15	5,75	93,50	Sangat Tinggi	6,20	5,75	92,74	Sangat Tinggi

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	73	78	106,85	Sangat Tinggi	74	78	105,41	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	78	75,50	96,79	Sangat Tinggi	78,5	75,50	96,18	Sangat Tinggi
2.	**Dinas Kesehatan**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan										
	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	78,19	78,67	100,61	Sangat Tinggi	79,26	78,67	99,26	Sangat Tinggi
		Usia Harapan Hidup	Tahun	78,00	78,21	100,27	Sangat Tinggi	77,73	78,21	100,62	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	72,00	64,45	111,71	Sangat Tinggi	70	64,45	108,61	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 kelahiran hidup	9,30	8,37	111,11	Sangat Tinggi	9,1	8,37	108,72	Sangat Tinggi
		Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,05	0,05	100,00	Sangat Tinggi	0,05	0,05	100,00	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	81	77,60	95,80	Sangat Tinggi	81	77,60	95,80	Sangat Tinggi
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Cakupan layanan air minum aman	%	34,62	33,70	114,56	Sangat Tinggi	35,11	33,70	95,98	Sangat Tinggi
		Cakupan layanan air bersih layak	%	100,00	99,40	99,40	Sangat Tinggi	100	99,40	99,40	Sangat Tinggi
		Cakupan layanan sanitasi	%	98,00	99,89	101,41	Sangat Tinggi	98,5	99,89	101,41	Sangat Tinggi
	Pertumbuhan Ekonomi		%	6,15	5,75	93,50	Sangat Tinggi	6,2	5,75	92,74	Sangat Tinggi
		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	83	83,4	100,48	Sangat Tinggi	84	83,4	99,29	Sangat Tinggi
	Indeks Resiko Bencana		Indeks	87,42	82,14	106,43	Sangat Tinggi	80	82,14	97,39	Sangat Tinggi
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74	74	100,00	Sangat Tinggi	75	74	98,67	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman										

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	34,13	58,73	172,08	Sangat Tinggi	43,08	58,73	136,33	Sangat Tinggi
		Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	6,22	6,5	104,50	Sangat Tinggi	6,74	6,5	96,44	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,60	71	96,47	Sangat Tinggi	74	71	95,95	Sangat Tinggi
4	**Satuan Polisi Pamong Praja**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Persentase peraturan daerah yang ditegakkan	%	38,00	38,00	100,00	Sangat Tinggi	38,5	38,00	98,70	Sangat Tinggi
		Respontime Penanganan Kebakaran	%	48,90	49,05	100,31	Sangat Tinggi	48,9	49,05	100,31	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	89,00	74,20	83,37	Tinggi	90	74,20	82,44	TInggi
5	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**										
	Indeks Resiko Bencana		Indeks	87,42	82,14	106,43	Sangat Tinggi	80,00	82,14	97,39	Sangat Tinggi
		% Desa/ Kelurahan tangguh bencana	%	25,98	27,68	106,54	Sangat Tinggi	31,07	27,68	89,09	Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,50	73,00	100,69	Sangat Tinggi	73,00	73,00	100,00	Sangat Tinggi
6	**Dinas Sosial**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesjahteraan Sosial (PPKS)	%	71,00	70,19	98,86	Sangat Tinggi	72	70,19	97,49	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	82,00	71,20	86,83	Tinggi	83	71,20	85,78	Tinggi
7	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak										
	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	78,19	78,67	100,61	Sangat Tinggi	79,26	78,67	99,26	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,45	97,16	99,70	Sangat Tinggi	97,5	97,16	99,65	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
		TFR	%	2,13	1,90	112,11	Sangat Tinggi	2,1	1,90	110,53	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,25	72,6	99,11	Sangat Tinggi	73,5	72,6	98,78	Sangat Tinggi
8	**Dinas Lingkungan Hidup**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
	Indeks Resiko Bencana		Indeks	87,42	82,14	106,43	Sangat Tinggi	80,00	82,14	97,39	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,40	70,69	97,64	Sangat Tinggi	72,57	70,69	97,41	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan										
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	39,31	54,66	139,05	Sangat Tinggi	41,04	54,66	133,19	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	70,40	75,50	107,24	Sangat Tinggi	70,8	75,50	106,64	Sangat Tinggi
9	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata-rata Capaian Kepemilikan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran & Akte Kematian)	%	96,80	94,43	97,55	Sangat Tinggi	99,9	94,43	94,52	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	75,50	70,80	93,77	Sangat Tinggi	76	70,80	93,16	Sangat Tinggi
10	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**										

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7098	0,7447	104,92	Sangat Tinggi	0,7108	0,7447	104,77	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,00	71,40	96,49	Sangat Tinggi	75	71,40	95,20	Sangat Tinggi
11	**Dinas Perhubungan**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
	Pertumbuhan Ekonomi		%	6,15	5,75	93,50	Sangat Tinggi	6,2	5,75	92,74	Sangat Tinggi
		Kinerja lalu lintas kabupaten	Rasio	0,70	0,68	97,14	Sangat Tinggi	0,66	0,68	95,45	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,00	72,15	100,21	Sangat Tinggi	73	72,15	98,84	Sangat Tinggi
12	**Dinas Komunikasi dan Informatika**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Indeks SPBE	Indeks	3,60	4,03	111,94	Sangat Tinggi	3,7	4,03	108,92	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
		Tingkat keamanan Informasi pemerintah	%	64	100,00	156,25	Sangat Tinggi	65	100,00	153,85	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
		Persentase Ketersediaan data Statistik sektoral	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,00	70,95	97,19	Sangat Tinggi	73,5	70,95	96,53	Sangat Tinggi
13	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal										
	Pertumbuhan Ekonomi		%	6,15	5,75	93,50	Sangat Tinggi	6,2	5,75	92,74	Sangat Tinggi
		Realisasi Investasi	Rp (Triliyun)	2,024	5.218	257,81	Sangat Tinggi	2.024	5.218	257,81	Sangat Tinggi

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	80,00	72,00	90,00	Tinggi	83,00	72,00	86,75	Tinggi
14	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan										
	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	78,19	78,67	100,61	Sangat Tinggi	79,26	78,67	99,26	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	79,5	11,43	14,37	Sangat Rendah	80	11,43	14,28	Sangat Rendah
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Indeks Arsip	Indeks	66,00	79,00	119,70	Sangat Tinggi	67	79,00	117,91	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	75	72,05	96,07	Sangat Tinggi	76	72,05	94,80	Sangat Tinggi
15	**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	78,19	78,67	100,61	Sangat Tinggi	79,26	78,67	99,26	Sangat Tinggi
		Prestasi Pemuda dan Olahraga	Medali	25	44	176,00	Sangat Tinggi	30	44	146,67	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,6	0,6	100,00	Sangat Tinggi	0,62	0,6	96,77	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										
	Pertumbuhan Ekonomi		%	6,15	5,75	93,50	Sangat Tinggi	6,2	5,75	92,74	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Rp (Milyar)	1,35	2,3	170,37	Sangat Tinggi	1,5	2,3	153,33	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	78	74,40	95,38	Sangat Tinggi	80	74,40	93,00	Sangat Tinggi
16	**Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
	Pertumbuhan Ekonomi		%	6,15	5,75	93,50	Sangat Tinggi	6,2	5,75	92,74	Sangat Tinggi
		Skor Pola Pangan Harapan	Score	90,50	99,35	109,78	Sangat Tinggi	91	99,35	109,18	Sangat Tinggi

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian										
		Produktivitas Pertanian Utama Per hektar Per tahun (Padi)	ton/Ha	6,23	6,20	99,52	Sangat Tinggi	6,24	6,20	99,36	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan										
		Produktivitas Perikanan	Kg/m2	7,00	7,52	107,43	Sangat Tinggi	8,00	7,52	94,00	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	76,98	72,65	94,38	Sangat Tinggi	77,23	72,65	94,07	Sangat Tinggi
17	**Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										
	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	78,19	78,67	100,61	Sangat Tinggi	79,26	78,67	99,26	Sangat Tinggi
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,30	74,6	104,63	Sangat Tinggi	71,6	74,6	104,19	Sangat Tinggi
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,07	3,26	124,85	Sangat Tinggi	4	3,26	122,70	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										
	Pertumbuhan Ekonomi		%	6,15	5,75	93,50	Sangat Tinggi	6,2	5,75	92,74	Sangat Tinggi
		Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	Unit	7	7	100,00	Sangat Tinggi	7	7	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
		Jumlah sentra industri mikro yang dibentuk	Sentra	7	11	157,14	Sangat Tinggi	10	11	110,00	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	71,30	72,95	102,31	Sangat Tinggi	71,4	72,95	102,17	Sangat Tinggi
18	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral**										
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah										
	Pertumbuhan Ekonomi		%	6,15	5,75	93,50	Sangat Tinggi	6,2	5,75	92,74	Sangat Tinggi
		Persentase koperasi sehat	%	26	22,50	86,54	Sedang	27	22,50	83,30	Sedang
		Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	1,33	1,10	82,71	Sedang	1,34	1,10	82,09	Sedang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
			Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP OPD	Nilai	70,00	70,15	100,21	Sangat TInggi	70	70,15	100,21	Sangat TInggi
19	**Sekretariat Daerah**										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	77	n/a	n/a	n/a	80	n/a	n/a	n/a
		Pertumbuhan pendapatan BUMD dan BLUD	persen	100	99,00	99,00	Sangat Tinggi	100	99,00	99,00	Sangat Tinggi
		Indeks Tatalaksana pengadaan barang dan jasa	Nilai	70	73,95	105,64	Sangat Tinggi	80	73,95	92,47	Sangat Tinggi
		Realisasi APBD	persen	100	90,00	90,00	Tinggi	100	90,00	90,00	Tinggi
		Realisasi SPM	persen	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Raperda yang diusulkan ke Propemperda	persen	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Koordinasi bidang Kesra	persen	100	99,00	99,00	Sangat Tinggi	100	99,00	99,00	Sangat Tinggi
		Persentase terpenuhinya fasiitasi keprotokolan pimpinan daerah	persen	100	99,91	99,91	Sangat Tinggi	100	99,91	99,91	Sangat Tinggi
20	**Sekretariat DPRD**										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	persen	82,81	78,42	94,70	Sangat Tinggi	82,91	78,42	94,58	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	81,25	71,40	87,88	Tinggi	81,75	71,40	87,34	Tinggi
21	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**										
	Urusan Perencanaan										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	Baik	Baik	100,00	Sangat Tinggi	Baik	Baik	100,00	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	74	73,95	99,93	Sangat Tinggi	75	73,95	98,60	Sangat Tinggi
	Urusan Penelitian dan Pengembangan										
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif	Inovatif	100,00	Sangat Tinggi	Inovatif	Inovatif	100,00	Sangat Tinggi

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
22	**Badan Keuangan Daerah**										
	Urusan Keuangan										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	75	74,90	99,87	Sangat Tinggi	77	74,90	97,27	Sangat Tinggi
23	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**										
	Urusan Urusan Kepegawaian										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Merit Sistem	Indeks	260	257	98,85	Sangat Tinggi	275	257	93,45	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	78	73,60	94,36	Sangat Tinggi	80	73,60	92,00	Sangat Tinggi
24	**Inspektorat Daerah**										
	Urusan Pengawasan										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Maturitas SPIP	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi	3	3	100,00	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	80,00	72,75	90,94	Sangat Tinggi	80	72,75	90,94	Sangat Tinggi
	Unsur Kewilayahan										
25	**Kecamatan Jatipuro**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70	0,69	98,57	Sangat Tinggi	0,71	0,69	97,18	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,75	70,40	95,46	Sangat Tinggi	74	70,40	95,14	Sangat Tinggi
26	**Kecamatan Jatiyoso**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8	0,78	97,50	Sangat Tinggi	0,8	0,78	97,50	Sangat Tinggi

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,20	71,70	97,95	Sangat Tinggi	73,5	71,70	97,55	Sangat Tinggi
27	**Kecamatan Jumantono**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,9	0,74	82,22	Tinggi	0,9	0,74	82,22	Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	75,60	68,65	90,81	Sangat Tinggi	75,8	68,65	90,57	Sangat Tinggi
28	**Kecamatan Jumapolo**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,68	90,67	Sangat Tinggi	0,75	0,68	90,67	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	73	72,60	99,45	Sangat Tinggi	74	72,60	98,11	Sangat Tinggi
29	**Kecamatan Matesih**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7201	0,69	95,82	Sangat Tinggi	0,7313	0,69	94,35	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,50	70,30	96,97	Sangat Tinggi	73	70,30	96,30	Sangat Tinggi
30	**Kecamatan Tawangmangu**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72	0,80	111,11	Sangat Tunggu	0,74	0,80	108,11	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,30	69,90	95,36	Sangat Tinggi	73,5	69,90	95,10	Sangat Tinggi
31	**Kecamatan Ngargoyoso**										

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,78	0,73	93,59	Sangat Tinggi	0,8	0,73	91,25	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	71,88	71,15	98,98	Sangat Tinggi	72,66	71,15	97,92	Sangat Tinggi
32	**Kecamatan Karangpandan**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72955	0,73	100,06	Sangat Tinggi	0,7388	0,73	98,81	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	71,90	71,90	100,00	Sangat Tinggi	72,70	71,90	98,90	Sangat Tinggi
33	**Kecamatan Karanganyar**										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,50	70,65	97,45	Sangat Tinggi	72,75	70,65	97,11	Sangat Tinggi
34	**Kecamatan Tasikmadu**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,76	101,33	Sangat Tinggi	0,76	0,76	100,00	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,70	71,55	95,78	Sangat Tinggi	75	70,15	93,53	Sangat Tinggi
35	**Kecamatan Jaten**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7935	0,76	95,78	Sangat Tinggi	0,7937	0,76	95,75	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	75,35	71,40	94,76	Sangat Tinggi	75,37	71,40	94,73	Sangat Tinggi
36	**Kecamatan Colomadu**										

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,79	105,33	Sangat Tinggi	0,75	0,79	105,33	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,00	71,50	97,95	Sangat Tinggi	73,1	71,50	97,81	Sangat Tinggi
37	**Kecamatan Gondangrejo**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,76	0,77	101,32	Sangat Tinggi	0,76	0,77	101,32	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	75	71,40	95,20	Sangat Tinggi	75	71,40	95,20	Sangat Tinggi
38	**Kecamatan Mojogedang**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,79	0,746	94,43	Sangat Tinggi	0,8	0,746	93,25	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,00	72,30	97,70	Sangat Tinggi	74	72,30	97,70	Sangat Tinggi
39	**Kecamatan Kebakkramat**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,704	0,746	105,97	Sangat Tinggi	0,707	0,746	93,25	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,00	70,45	96,51	Sangat Tinggi	74	70,45	95,20	Sangat Tinggi
40	**Kecamatan Kerjo**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,81	108,00	Sangat Tinggi	0,75	0,81	108,00	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	TAHUN 2025				KONDISI AKHIR RPD (TAHUN 2026)			
				TARGET	CAPAIAN	%	STATUS	TARGET	CAPAIAN	%	STATUS
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,00	68,80	94,25	Sangat Tinggi	74	68,80	92,97	Sangat Tinggi
41	**Kecamatan Jenawi**										
	Angka Kemiskinan		%	8,96	8,48	105,66	Sangat Tinggi	8,00	8,48	94,34	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72	0,67	93,06	Sangat Tinggi	0,82	0,67	81,71	Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,25	73,05	101,11	Sangat Tinggi	72,5	73,05	100,76	Sangat Tinggi
42	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**										
	Unsur Pemerintahan Umum Bidang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik										
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	86	87,21	101,41	Sangat Tinggi	87,50	87,21	99,67	Sangat Tinggi
		Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)	%	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi	0	0	100,00	Sangat Tinggi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,5	73,35	98,46	Sangat Tinggi	75	73,35	97,80	Sangat Tinggi

Sumber : Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja Tahun 2025, diolah

Tabel 2.110.

Capaian Kinerja Kunci Kabupaten Karanganyar (Permendagri 18 Tahun 2020)

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2025				Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)			Urusan
			Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									Pendidikan
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									Kesehatan

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2025				Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)			Urusan
			Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status	
1	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
6	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
7	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
10	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74	74	100,00	Sangat Tinggi	75	98,67	Sangat Tinggi	
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	96,50	99,00	103,01	Sangat Tinggi	97	102,47	Sangat Tinggi	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	96	100,00	104,05	Sangat Tinggi	97	102,98	Sangat Tinggi	
4	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83	83,40	100,48	Sangat Tinggi	84	99,29	Sangat Tinggi	

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2025				Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)			Urusan
			Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100	100,000	Sangat Tinggi	
3	Persentase kawasan kumuh kurang dari 10 ha	%	20,61	41,00	200,15	Sangat Tinggi	13,07	315,61	Sangat Tinggi	
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	43	50,00	116,28	Sangat Tinggi	45	111,11	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	38,00	38,00	100,00	Sangat Tinggi	38,5	98,70	Sangat Tinggi	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
4	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									Sosial
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									Tenaga Kerja
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	55	100	181,82	Sangat Tinggi	55	181,82	Sangat Tinggi	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	27	30	111,11	Sangat Tinggi	30	100,00	Sangat Tinggi	

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2025				Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)			Urusan
			Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status	
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	65	61	93,85	Sangat Tinggi	65,9	92,56	Sangat Tinggi	
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	55	81	146,42	Sangat Tinggi	55	146,42	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									PPPA
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7	11,51	164,43	Sangat Tinggi	7,5	153,47	Sangat Tinggi	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4,19	4,17	100,48	Sangat Tinggi	0,004	95,92	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									Pangan
1	Skor PPH	nilai	90,50	99,35	109,78	Sangat Tinggi	91	109,18	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									Lingkungan Hidup
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	72,40	70,69	97,64	Sangat Tinggi	72,57	97,41	Sangat Tinggi	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	82	82	100,00	Sangat Tinggi	86	95,35	Sangat Tinggi	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	82	82	100,00	Sangat Tinggi	83	98,80	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1	Perekaman KTP elektronik	%	98,5	99,16	100,67	Sangat Tinggi	99,37	99,79	Sangat Tinggi	
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	22,75	73,84	324,57	Sangat Tinggi	23	321,04	Sangat Tinggi	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,33	99,39	101,08	Sangat Tinggi	98,05	101,37	Sangat Tinggi	
4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,86	0,1	1.162,79	Sangat Tinggi	2,58	387,60	Sangat Tinggi	

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2025				Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)			Urusan
			Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									Pengendalian Penduduk dan KB
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Indeks	2,13	1,90	112.11	Sangat Tinggi	2,1	110,53	Sangat Tinggi	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	71,9	66.34	92.27	Sangat Tinggi	72	92,14	Sangat Tinggi	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,7	7.9	148,20	Sangat Tinggi	11,4	144.30	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									Perhubungan
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	67	68	101,49	Sangat Tinggi	67	101,49	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									Komunikasi dan Informatika
1	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
2	Jumlah KIM aktif	%	28	24	85,71	Tinggi	31	77,42	Tinggi	
3	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	%	40	100	250,00	Sangat Tinggi	41	243,90	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									Koperasi UKM
1	Persentase koperasi sehat	%	26	23	86,54	Tinggi	27	83,33	Tinggi	
2	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru	%	5	18	360,00	Sangat Tinggi	5	360,00	Sangat Tinggi	
3	Persentase koperasi yang berkualitas	%	54	60	111,11	Sangat Tinggi	57	105,26	Sangat Tinggi	
4	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	13	16	123,08	Sangat Tinggi	17	94,12	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									Penanaman Modal
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	0,25	0,25	100,00	Sangat Tinggi	0,25	100,00	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									Pemuda & olahraga
1	Peningkatan prestasi olahraga	medali	25	44	176,00	Sangat Tinggi	30	146,67	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									Statistik
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2025				Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)			Urusan
			Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									Persandian
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	64	65,27	101,98	Sangat Tinggi	65	100,42	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									Kebudayaan
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	91	93	102,20	Sangat Tinggi	92	101,09	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									Perikanan
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	1000 ton	2,41	2	91,70	Sangat Tinggi	2,45	90,20	Sangat Tinggi	
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ kap/ thn	23,5	22	93,62	Sangat Tinggi	24	91,67	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									Pariwisata
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	1	1	100,00	Sangat Tinggi	1	100,00	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									Pertanian
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6,23	6,20	99,52	Sangat Tinggi	6,24	99,36	Sangat Tinggi	
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	9	9	100,00	Sangat Tinggi	8	88,89	Tinggi	
3	Produksi peternakan utama (daging sapi, daging ayam dan telur ayam)	kg	23.031.517	27.277.136	118,43	Sangat Tinggi	24.183.092	112,79	Sangat Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									Perdagangan
1	Persentase pemenuhan komitmen perusahaan berizin	%	35	100	285,71	Sangat Tinggi	40	250,00	Sangat Tinggi	
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70	85	121,43	Sangat Tinggi	75,00	113,33	Sangat Tinggi	
3	Persentase pemenuhan persyaratan SNI pasar rakyat	%	25	25	100,00	Sangat Tinggi	27	92,59	Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									Perindustrian
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	32	37	115,63	Sangat Tinggi	33	112,12	Sangat Tinggi	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)									Sekretariat Daerah
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	100	100	Sangat Tinggi	100	100	Sangat Tinggi	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)									Keuangan

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2025				Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)			Urusan
			Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status	
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	10	7,90	79,00	Tinggi	10	79,00	Tinggi	
2	Rasio PAD	%	23	25	108,70	Sangat Tinggi	23	108,70	Sangat Tinggi	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	69	75,46	109,36	Sangat Tinggi	69	109,36	Sangat Tinggi	
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	93	935,38	102,56	Sangat Tinggi	93	102,56	Sangat Tinggi	
5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
6	Manajemen Aset	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi	
7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	%	8	6,15	130,08	Sangat Tinggi	8	130,08	Sangat Tinggi	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)									Kepegawaian
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	130	66,32	51,02	Rendah	135	49,13	Sangat Rendah	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23	25,42	110,52	Sangat Tinggi	24	105,92	Sangat Tinggi	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	79,50	76,20	95,85	Sangat Tinggi	79,5	95,85	Sangat Tinggi	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)									Pengawasan
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi	3	100,00	Sangat Tinggi	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi	3	100,00	Sangat Tinggi	

Sumber : Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja Tahun 2025, diolah

Terkait data konsumsi ikan pada Tahun 2025 telah disesuaikan dengan reformulasi baru perhitungan konsumsi ikan, yaitu dari semula Angka Konsumsi Ikan (AKI) menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM). Perubahan ini didasarkan pada penyesuaian metode perhitungan konsumsi ikan, dimana AKI sebelumnya memperhitungkan konsumsi ikan dalam rumah tangga, luar rumah tangga, dan konsumsi ikan tidak tercatat, sedangkan KIM dihitung berdasarkan konsumsi ikan dalam rumah tangga secara tertimbang setara ikan utuh segar. Dengan adanya perubahan formulasi tersebut, capaian KIM tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian AKI pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan formulasi baru, capaian Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebesar 14,10 kg/kapita/tahun. Capaian tersebut menjadi dasar baru dalam membaca tingkat konsumsi ikan masyarakat, sehingga upaya peningkatan konsumsi ikan perlu terus didorong melalui edukasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), peningkatan akses masyarakat terhadap produk perikanan yang aman dan terjangkau, serta penguatan promosi dan pemasaran produk perikanan lokal.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Disamping berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2027, juga memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun berjalan (2026). Dari dua hal tersebut diharapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027, menjadi lebih tepat sasaran, lebih realistik sesuai kondisi perkembangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a) Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Karanganyar belum semuanya memenuhi standard.
b) Masih adanya *blank spot* PPDB, sehingga menyulitkan calon siswa untuk bisa masuk ke sekolah negeri melalui jalur zonasi.
c) Adanya kesenjangan antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang berarti adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya pendidikan ke depan sudah tinggi (13,74 tahun atau setara Diploma 1), sedangkan capaian pendidikan masyarakat saat ini masih relatif rendah (9,27 tahun atau setara kelas 9).

2. Kesehatan

a) Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) masih belum optimal, pada tahun 2025 masih sekitar 60,45% desa STBM di Kabupaten Karanganyar.
b) Desa Siaga Aktif Mandiri jumlahnya masih sangat terbatas.
c) Masih banyak Tempat Pengolahan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Hal ini *related* dengan Hasil Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 untuk Kabupaten Karanganyar mendapat skor 59,76 atau kategori rendah.
d) Sebaran sumberdaya manusia kesehatan yang belum merata

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Masih ada kurang lebih 22% jaringan irigasi di Kabupaten Karanganyar dalam kondisi rusak ringan, rusak berat atau tidak berfungsi secara optimal.
b) Dengan persentase saluran drainase dalam kondisi baik sebesar 75% pada tahun 2025, berarti masih ada 25% jaringan drainase yang tidak berfungsi optimal di Kabupaten Karanganyar.
c) Masih ada kurang lebih 43% bangunan yang belum sesuai ketentuan (IMB/PBG, tata ruang, keselamatan, dan standar teknis).

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Persentase penanganan kawasan kumuh (<10 ha) sebesar 58,73% pada tahun 2025, berarti di Kabupaten Karanganyar masih ada 41,27% kawasan kumuh skala kecil yang belum tertangani.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a) Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kabupaten Karanganyar masih sangat terbatas, yaitu baru 27,68% desa/kelurahan di Kabupaten Karanganyar.

6. Sosial

a) Angka kemiskinan dan kerentanan sosial yang masih perlu ditangani secara komprehensif.
b) Basis data kesejahteraan sosial yang perlu terus diperbarui.
c) Keterbatasan jangkauan program perlindungan sosial.
d) Permasalahan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a) Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih sebesar 71% pada tahun 2025, berarti masih ada 29% tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan memadai atau belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri.
b) Berdasarkan nilai TPAK gender laki-laki sebesar 84,76% dengan TPT sebesar 4,20%. Sedangkan TPAK gender perempuan sebesar 65,06% dengan TPT 2,07%, berarti pasar kerja didominasi laki-laki dengan partisipasi tinggi, sementara perempuan masih menghadapi keterbatasan akses, meskipun tingkat penganggurannya tampak rendah.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi.
b) Partisipasi perempuan dalam pembangunan yang belum optimal.
c) Perlindungan hak anak yang perlu diperkuat.
d) Jumlah desa layak anak yang jumlahnya masih sangat terbatas di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

3. Pangan

a) Ketahanan pangan daerah masih perlu diperkuat, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian Indeks Ketahanan

Pangan (IKP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebesar 75,45. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan pada aspek-aspek penyusun IKP, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

b) Pada aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah masih belum optimal. Persentase Cadangan Pangan Tahun 2025 sebesar 19,58% menunjukkan perlunya penguatan cadangan pangan sebagai antisipasi terhadap kerawanan pangan, gejolak pasokan, kenaikan harga, maupun kondisi darurat.

c) Pada aspek keterjangkauan pangan, masih terdapat penduduk yang berisiko mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Tahun 2025 sebesar 6,09% atau sebanyak 55.759 jiwa penduduk *undernourished*, sehingga intervensi bagi kelompok rentan pangan masih perlu diperkuat.

d) Pada aspek pemanfaatan pangan, meskipun Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 sebesar 99,40 menunjukkan konsumsi pangan masyarakat sudah mendekati ideal, masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan kualitas konsumsi pangan agar tetap beragam, bergizi seimbang, aman, serta berbasis pada pemanfaatan pangan lokal.

4. Pertanahan

a) Dengan persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat sebesar 85% pada tahun 2025, berarti masih ada kurang lebih 15% aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat. Meskipun capaian ini tergolong baik, sisa yang belum tersertifikasi tetap menyimpan beberapa proyeksi masalah ke depan, diantaranya potensi sengketa/konflik lahan, lemahnya kepastian hukum aset daerah, hambatan pemanfaatan dan pembangunan, potensi kehilangan nilai ekonomi aset, resiko penyerobotan dan pemanfaatan ilegal.

5. Lingkungan Hidup

a) Persentase jumlah sampah yang terkelola sebesar 82% pada tahun 2025, berarti masih ada 18% sampah yang belum terkelola dengan baik.

b) Degradasi kualitas lingkungan akibat aktivitas ekonomi.

c) Ancaman perubahan iklim dan perubahan fungsi lahan yang berpotensi menimbulkan bencana alam.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang belum maksimal.

b) Pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan yang belum optimal.

c) Pelayanan administrasi yang perlu terus ditingkatkan kualitasnya.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Masih ada 18% lembaga kemasyarakatan yang belum melakukan kegiatan ekonomi produktif yang berarti kemandirian desa belum merata.

b) Kapasitas kelembagaan desa yang masih perlu diperkuat.

c) Sejumlah 44 desa di Kabupaten Karanganyar masih berstatus Berkembang, yang berarti 44 belum kuat secara ekonomi,

sosial, dan lingkungan. Pemanfaatan potensi desa belum optimal.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) tahun 2025 sebesar 66,34% mengindikasikan masih terdapat resiko kehamilan dan kelahiran yang tidak direncanakan.
b) Program KB masih didominasi metode jangka pendek dan perempuan, sehingga berisiko terhadap keberlanjutan penggunaan kontrasepsi, efektivitas pengendalian kelahiran, serta belum optimalnya peran laki-laki dalam keluarga berencana.

9. Perhubungan

a) Masih ada ±30% fasilitas yang tidak berfungsi optimal sehingga terdapat potensi kecelakaan lalu lintas, khususnya di titik-titik tertentu, serta risiko bagi pengguna jalan rentan apabila peningkatan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan tidak dilakukan secara berkelanjutan.
b) Masih ada ±34,37% terminal yang kondisinya kurang baik, sehingga memiliki potensi penurunan kualitas layanan transportasi, risiko keselamatan, serta berkurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum apabila perbaikan dan pengelolaan terminal tidak ditingkatkan.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Pada tahun 2025 sekitar 67,5% koperasi dalam kondisi tidak sehat dan 50 % tidak melaksanakan RAT, mengindikasikan terdapat kelemahan dalam pengelolaan kelembagaan koperasi dan rendahnya akuntabilitas koperasi.

11. Penanaman Modal

a) Pada tahun 2025 sebesar 51% jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi, hal ini berari sekitar 49% pelaku usaha belum terjangkau pengawasan.
b) Masih terdapat potensi pelanggaran usaha, rendahnya perlindungan konsumen, serta tidak optimalnya penerimaan daerah akibat terbatasnya cakupan pengawasan pelaku usaha

12. Kepemudaan dan Olahraga

a) Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 sebesar 5%, yang berarti partisipasi pemuda dalam pembangunan dan keterlibatan dalam organisasi belum optimal.

13. Statistik

a) Pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan yang perlu ditingkatkan

14. Persandian

a) Keamanan informasi pemerintah daerah yang perlu diperkuat.
b) Kapasitas SDM di bidang persandian yang masih terbatas.

15. Kebudayaan

a) Kurang lebih 17% objek pemajuan kebudayaan yang belum dikembangkan, menyebabkan resiko hilangnya warisan kebudayaan.
b) Pelestarian nilai dan warisan budaya yang perlu diperkuat.
c) Pemanfaatan budaya sebagai daya tarik ekonomi belum optimal.

d) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia kebudayaan.

16. Perpustakaan

a) Minat baca masyarakat masih relatif rendah, yang tercermin dari tingkat ketermanfaatan perpustakaan yang belum optimal. Pada tahun 2025, persentase jumlah pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar baru mencapai 53,91%.

b) Akses dan kualitas layanan perpustakaan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2025, layanan perpustakaan belum mampu menjangkau seluruh perpustakaan yang berada pada 177 desa/kelurahan, 981 TK/PAUD/RA/BA, 557 SD/MI, dan 112 SMP/MTs. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik geografis wilayah yang beragam, termasuk beberapa daerah dengan akses yang sulit, serta keterbatasan armada layanan perpustakaan keliling, sehingga pemerataan layanan perpustakaan belum optimal.

17. Kearsipan

a) Pengelolaan arsip di Perangkat Daerah belum tertib dan modern, yang ditandai dengan belum optimalnya penerapan tata kelola kearsipan sesuai standar, terbatasnya ketersediaan arsiparis atau pengelola arsip, serta tingginya pergantian personil pengelola arsip sehingga menghambat keberlanjutan penyelenggaraan pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah

b) Digitalisasi arsip masih terbatas, yang ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Srikandi dan aplikasi arsip digital dalam pengelolaan arsip elektronik, sehingga capaian digitalisasi arsip belum memenuhi target yang diharapkan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a) Minat masyarakat untuk menjadikan budidaya ikan sebagai mata pencaharian utama masih relatif rendah, karena usaha budidaya ikan dianggap belum memberikan pendapatan yang layak serta membutuhkan ketelatenan dan kesabaran yang tinggi.

b) Skala usaha budidaya ikan masih relatif kecil, sehingga efisiensi produksi, produktivitas, dan kemampuan pengembangan usaha belum optimal. Pembudidaya juga masih menghadapi keterbatasan akses permodalan, teknologi budidaya, benih bermutu, serta kenaikan harga pakan ikan.

c) Promosi produk perikanan belum menjangkau seluruh produk dan pelaku usaha secara merata, sehingga peningkatan nilai tambah, akses pasar, dan daya saing produk perikanan daerah belum optimal.

d) Pengawasan perairan umum daratan masih perlu diperkuat, terutama untuk mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan/atau tidak sesuai ketentuan, seperti setrum/listrik, racun, maupun alat tangkap yang tidak selektif. Kondisi tersebut berisiko merusak ekosistem perairan, menurunkan populasi ikan, dan mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan.

2. Pariwisata

a) Belum optimalnya daya saing destinasi yang berdampak pada penurunan tren kunjungan (periode 2024–2025).
b) Belum terintegrasinya ekosistem pariwisata lintas sektor (Pentahelix) dan belum optimalnya kontribusi PAD retribusi daerah.
c) Terbatasnya kompetensi dan sertifikasi pelaku wisata, lambatnya transformasi digital sektor pariwisata dan terbatasnya efektivitas promosi pariwisata daerah.
d) Belum kompetitifnya produk Ekonomi Kreatif (Ekraf) lokal dan rendahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
e) Belum memadainya ketersediaan data sektor pariwisata dan sistem monitoring wilayah.

3. Pertanian

a) Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik hanya sebesar 30,48% pada tahun 2025, berarti sekitar 69,52% prasarana pertanian belum memadai atau belum dalam kondisi baik.
b) Produktivitas pertanian yang dipengaruhi perubahan iklim.
c) Alih fungsi lahan pertanian.
d) Regenerasi petani yang belum optimal.

4. Perdagangan

a) Dengan persentase pemenuhan persyaratan SNI pasar rakyat hanya sebesar 25% pada tahun 2025, berarti sekitar 75% pasar rakyat belum memenuhi standar nasional (SNI).

5. Perindustrian

a) Masih terdapat risiko rendahnya kepatuhan perizinan, lemahnya pengendalian kualitas usaha, serta belum optimalnya pembinaan dan pengembangan IKM akibat terbatasnya cakupan pemantauan, pengawasan, dan verifikasi teknis perizinan berusaha.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat DPRD

a) Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dari 82,81 menjadi 78,42 menunjukkan adanya penurunan kualitas layanan atau meningkatnya ekspektasi pengguna layanan. Hal tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD apabila tidak segera dilakukan evaluasi dan perbaikan layanan.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a) Sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang belum optimal
b) Konsistensi antar dokumen perencanaan daerah masih perlu diperkuat.
c) Kualitas indikator kinerja program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan agar lebih terukur dan berorientasi hasil.
d) Kapasitas SDM Perencana Perangkat Daerah yang belum merata.

2. Keuangan

a) Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih relatif tinggi.

b) Kapasitas fiskal Kabupaten Karanganyar kategori rendah.

3. Pendidikan dan Pelatihan

a) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 68,5% pada tahun 2025, berarti masih ada sekitar 31,5% ASN yang belum mengikuti pengembangan kompetensi, mengakibatkan timbulnya risiko kesenjangan kompetensi ASN.

4. Penelitian dan pengembangan

a) Masih terdapat tantangan dalam penguatan kebijakan berbasis *evidence*, sinkronisasi hasil kajian dengan perencanaan pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah

2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seiring dengan dinamika ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Dengan mengusung tema "Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing", isu strategis pembangunan daerah difokuskan pada upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, pemantapan infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup, serta penciptaan kondisi wilayah yang aman dan kondusif.

Isu strategis utama yang dihadapi adalah **belum optimalnya daya saing ekonomi daerah**, yang tercermin dari masih terbatasnya produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor unggulan daerah. Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, dan pariwisata membutuhkan penguatan kapasitas SDM, inovasi, pemanfaatan teknologi, serta akses pasar dan permodalan yang lebih luas. Tanpa penguatan aspek tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah berpotensi tidak inklusif dan kurang berkelanjutan.

Pada saat yang sama, **kualitas sumber daya manusia** menjadi isu strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha, masih adanya pengangguran dan kemiskinan, serta ketimpangan kesejahteraan antarwilayah menuntut kebijakan pembangunan SDM yang lebih terarah dan terintegrasi. Pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat yang berdaya saing, berkarakter, dan berbudaya.

Isu strategis lainnya adalah **penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif**. Transformasi digital pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung iklim pembangunan dan investasi yang kondusif. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kepercayaan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dari aspek kewilayahan, **pemantapan dan percepatan pembangunan infrastruktur** masih menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara serius. Kesenjangan kualitas infrastruktur antarwilayah, keterbatasan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi, serta tantangan dalam pemeliharaan aset daerah berpengaruh langsung terhadap konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang

berkualitas dan merata menjadi kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.

Selain itu, **kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap perubahan iklim** menjadi isu strategis yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas pembangunan, pengelolaan sampah yang belum optimal, alih fungsi lahan, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi memerlukan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Integrasi prinsip pembangunan hijau menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan jangka panjang.

Terakhir, **kondusivitas wilayah dan stabilitas sosial** merupakan isu strategis yang harus terus dijaga. Dinamika sosial, potensi konflik, serta tantangan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dapat menghambat proses pembangunan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah Tahun 2027.

Secara keseluruhan, isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 menuntut penanganan yang terpadu, inovatif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan penguatan daya saing ekonomi sebagai fokus utama, didukung oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur yang andal, lingkungan hidup yang lestari, serta wilayah yang aman dan kondusif.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2026 dan perkiraan Tahun 2027, yang mencakup antara lain indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupalan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang ini, diharapkan layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok Nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan ekonomi daerah untuk mengimplementasikannya.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar.

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Bank Indonesia mengungkapkan prospek ekonomi global diperkirakan masih redup pada tahun 2026 dan 2027. Ketidakpastian

dunia tetap tinggi lantaran kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) membawa perubahan besar pada *landskap* perekonomian dunia, ditambah ketegangan politik yang masih berlanjut dan tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Untuk itu, Indonesia harus terus waspada dalam memitigasi dinamika global ke depannya.

Redupnya prospek ekonomi global akan terlihat dari lima karakteristik, yaitu:

1. Pertama, ditandai dengan berlanjutnya kebijakan tarif resiprokal AS. Kondisi ini menekan perdagangan global, memperlemah multilateralisme, dan mendorong negara-negara dunia beralih pada kerja sama bilateral serta regional.
2. Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, terutama di AS dan China, sedangkan Uni Eropa, India dan Indonesia diprediksi masih cukup baik ke depannya. Penurunan inflasi yang lebih lambat mempersulit kebijakan moneter Bank Sentral.
3. Ketiga, utang dan suku bunga tinggi di negara maju. Defisit fiskal yang besar mendorong utang pemerintah dan suku bunga tetap tinggi di negara-negara maju.
4. Keempat, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia karena transaksi produk derivatif yang berlipat, terutama *hedge fund* dengan mesin *trading*, berdampak pada pelarian modal dan tekanan nilai tukar di *emerging market*.
5. Kelima, maraknya aset kripto dan *stablecoin* swasta, sementara masih belum ada pengaturan yang memadai yang mengatur mekanismenya.

Bank Indonesia menegaskan perlunya penguatan regulasi dan kehadiran *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima gejolak global tersebut di atas berdampak negatif ke berbagai negara. Indonesia tidak terkecuali perlu respons kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, serta berdaya tahan, tangguh dan mandiri.

Tahun 2025, ekonomi nasional menunjukkan daya tahan yang cukup tinggi terhadap rentetan gejolak global. Stabilitas ekonomi juga terjaga, dengan pertumbuhan yang relatif tinggi. Hal itu bisa dicapai dengan sinergi antar para pemangku kepentingan. Dengan sinergi itu pula, kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 diperkirakan akan lebih baik. Pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat, ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia, inflasi terkendali dalam sasaran, serta konsistensi kebijakan moneter, fiskal, dan sinergi ketahanan pangan nasional.

(Sumber: https://money.kompas.com/read/2025/11/29/094914826/ungkap-prospek-ekonomi-global-masih-redup-hingga-2027-gubernur-bi-penting?lgn_method=google&google_btn=onetap).

Ekonomi global tahun 2025 tumbuh 3,4 persen dan diprakirakan melambat menjadi 3,1 persen pada 2026 (*Internasional Monetary Fund* (IMF), April 2026). Perlambatan tersebut dipengaruhi utamanya ketidakpastian kebijakan tarif dan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketidakpastian tarif dan investigasi *Section* 301 terhadap negara mitra oleh Amerika Serikat, termasuk Indonesia, berpotensi menekan kinerja perdagangan dan rantai pasok global.

Eskalasi konflik geopolitik tersebut memperbesar risiko kenaikan harga energi dan komoditas. Harga minyak mentah pada pertengahan April 2026 berada di kisaran US$100 per barel atau meningkat 76,43 persen secara *year to date* (YtD), sehingga meningkatkan risiko *imported inflation*, menahan ruang pelonggaran moneter, dan mendorong perpindahan modal ke aset aman. Volatilitas juga terjadi pada batubara

dan *crude palm oil* (CPO), dua komoditas ekspor utama Indonesia, yang masing-masing meningkat 23,95 persen dan 12,98 persen secara YtD. Namun, disisi lain aktivitas manufaktur global masih ekspansif, tercermin dari *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur Maret 2026 sebesar 51,30.

Pada tahun 2027, ekonomi global diproyeksikan tumbuh 3,2 persen, ditopang terutama oleh Tiongkok dan India, masing-masing 4,0 persen dan 6,5 persen (IMF, April 2026). Pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi teknologi, termasuk *artificial intelligence* (AI), namun tetap dibayangi ketidakpastian perdagangan dan geopolitik. Di sisi lain, tekanan perubahan iklim mendorong investasi rendah emisi dan produksi hijau, termasuk penerapan carbon border adjustment mechanism (CBAM) yang mempengaruhi pola perdagangan dan struktur industri global (Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2027, Kementerian PPN/Bappenas 2026).

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Bank Dunia memperkirakan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5 persen pada periode 2025-2026 dan meningkat ke level 5,2 persen pada tahun 2027. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan estimasi dalam laporan *Indonesia Economic Prospects* (IEP) edisi Juni 2025, yang sebelumnya mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Bank Dunia menilai pertumbuhan PDB riil Indonesia tetap solid, dengan capaian 5,0 persen secara tahunan selama tiga kuartal pertama 2025. Kinerja ini ditopang oleh investasi yang kuat serta kontribusi ekspor netto yang signifikan, meski bersifat sementara. Permintaan global yang meningkat terhadap komoditas utama Indonesia seperti minyak kelapa sawit, besi, baja, dan emas, serta percepatan pengiriman ekspor turut memperkuat laju pertumbuhan. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi berlangsung luas, dengan sektor jasa menjadi penyumbang terbesar aktivitas ekonomi nasional. Sektor pertanian juga menunjukkan pemulihan berkat kondisi iklim yang lebih kondusif dan dukungan program bantuan pemerintah.

Dari sisi stabilitas makro, Bank Dunia mencatat inflasi sempat terdorong oleh lonjakan harga pangan, namun masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Kerangka fiskal Indonesia juga dinilai tetap disiplin dengan kepatuhan terhadap batasan defisit anggaran, sehingga menjaga kepercayaan pasar dan ruang kebijakan pemerintah.

Meski prospek pertumbuhan ekonomi membaik, Bank Dunia menyoroti tantangan serius pada pasar tenaga kerja yang berpotensi menahan penguatan daya beli masyarakat. Dalam laporan tersebut disebutkan, walaupun stabilitas makroekonomi tetap terjaga, tantangan muncul dari pasar tenaga kerja yang berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Kontribusi konsumsi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi tercatat sedikit menurun, dari 2,8 poin persentase pada 2024 menjadi 2,7 poin persentase atau sekitar 53,3 persen dari total pertumbuhan PDB. Penurunan ini sejalan dengan kondisi pasar tenaga kerja, di mana meski penyerapan tenaga kerja meningkat 1,3 persen sepanjang Agustus 2024 hingga Agustus 2025, kenaikan tersebut masih didominasi sektor berupah rendah, seperti jasa bernilai tambah rendah dan pertanian.

Bank Dunia juga mencatat upah riil terus menurun sejak 2018, sementara struktur pasar tenaga kerja semakin terpolarisasi. Pekerjaan berketerampilan menengah kian menyusut dibandingkan pekerjaan

berketerampilan rendah dan tinggi. Tenaga kerja muda pun secara tidak proporsional masuk ke sektor informal dengan upah rendah.

Kondisi tersebut memunculkan kesenjangan antara perbaikan kesejahteraan secara objektif dan persepsi subjektif masyarakat. Walaupun angka kemiskinan terus menurun, jumlah rumah tangga yang merasa miskin justru meningkat. Rasa tidak aman secara ekonomi terutama dirasakan kelas menengah, dipicu oleh volatilitas pendapatan dan dinamika upah riil, sehingga mendorong kecenderungan menabung sebagai langkah berjaga-jaga.
(Sumber: https://kumparan.com/kumparanbisnis/bank-dunia-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-2026-jadi-5-naik-ke-5-2-pada-2027-26RjDCh1aIO).

Di sisi domestik, stabilitas makro tahun 2025 tetap terjaga, ditopang pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, inflasi terkendali, cadangan devisa kuat, dan surplus neraca perdagangan. Pertumbuhan ekonomi terutama didukung konsumsi rumah tangga, ekspor, investasi, serta sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

Pada triwulan I-2026, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,6 persen *year on year* (YoY) didorong oleh akselerasi konsumsi masyarakat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN); implementasi program prioritas pembangunan; serta peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Kinerja ini menjadi sinyal positif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2027.

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan utama ekonomi tahun 2026 akan didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari sisi lapangan usaha akan didorong utamanya oleh sektor industri pengolahan yang didukung oleh hilirisasi sektor-sektor prioritas serta program di sektor pertanian.

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan terjaga melalui keseimbangan antara akselerasi hilirisasi di timur dan penguatan sektor manufaktur serta jasa di wilayah barat. Pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) diproyeksikan mencapai enam persen, dipicu oleh masifnya aktivitas hilirisasi nikel di Wilayah Maluku dan Sulawesi, pemulihan pariwisata di Bali-Nusa Tenggara serta sektor peningkatan sektor pertambangan dan berlanjutnya konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Sementara itu, Kawasan Barat Indonesia (KBI) diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3 persen yang ditopang oleh kinerja wilayah Jawa melalui sektor industri dan jasa, serta wilayah Sumatera yang didorong oleh peningkatan permintaan komoditas unggulan dan pembangunan infrastruktur.

Sektor eksternal tetap terjaga pada tahun 2025, tercermin dari defisit transaksi berjalan yang rendah sebesar US$1,45 miliar atau 0,1 persen PDB serta cadangan devisa US$156,47 miliar atau setara 6,2 bulan impor. Pada tahun 2026, neraca perdagangan barang diprakirakan surplus US$47,23 miliar, utamanya didukung produk hilirisasi bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global, pemanfaatan free trade agreement (FTA), kerja sama internasional, dan reformasi kebijakan perdagangan dan iklim usaha. Neraca keseluruhan diprakirakan surplus US$1,75 miliar dengan cadangan devisa US$158,22 miliar pada tahun 2026.

Di sisi keuangan negara, kinerja APBN 2025 tetap solid, dengan pendapatan negara Rp2.756,2 triliun (11,61 persen dari PDB) dan belanja negara Rp3.434,7 triliun (14,42 persen dari PDB). APBN tetap berperan menjaga stabilitas, daya beli, kesinambungan fiskal, dan pelaksanaan

prioritas pembangunan. Defisit terjaga di bawah batas tiga persen yaitu sebesar 2,81 persen PDB, serta rasio utang berada jauh di bawah batas 60 persen PDB.

Di tahun 2026, APBN diarahkan untuk mendukung pertumbuhan tinggi dan pemerataan, dengan pendapatan negara diprakirakan 12,26 persen PDB, belanja negara 14,94 persen PDB, defisit 2,68 persen PDB, dan keseimbangan primer negatif 0,35 persen PDB.

Kebijakan moneter 2025 relatif lebih ekspansif, ditandai penurunan BI-Rate sebesar 125 bps menjadi 4,75 persen. Pada tahun 2026, inflasi diprakirakan tetap terkendali, namun penurunan suku bunga akan lebih terbatas dipengaruhi ketidakpastian global. Ketahanan sektor keuangan tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tercermin dari peningkatan likuiditas, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) dan terjaganya fungsi intermediasi.

Fungsi intermediasi tetap terjaga, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada pada level 85,35 persen pada tahun 2025. Kinerja intermediasi tersebut turut ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 9,63 persen dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 13,83 persen sepanjang tahun 2025. Selain itu, terjaganya fungsi intermediasi juga didukung oleh kondisi perbankan yang tetap solid, sebagaimana tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang kuat di level 25,87 persen serta penurunan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) menjadi 2,05 persen pada periode yang sama.

Namun demikian, ruang penyaluran kredit masih besar, tercermin dari tingginya *undisbursed loan* yang mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12 persen dari total plafon kredit yang tersedia pada Desember 2025, dan meningkat menjadi 22,86 persen pada Februari 2026. Untuk itu, perbaikan iklim investasi dan akses pembiayaan sektor prioritas perlu diperkuat. Di sisi lain, industri keuangan nonbank menunjukkan kinerja positif pada tahun 2025, dengan aset asuransi dan dana pensiun terhadap PDB tetap terjaga serta tumbuh positif pada awal 2026, memperkuat peran pembiayaan jangka panjang (Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2027, Kementerian PPN/Bappenas 2026).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan dengan Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025.

RKPD Tahun 2027 mendukung pula upaya pencapaian Asta Cita dan Program Hasil Terbaik. Penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Karanganyar. RPJMN tahun 2025-2029 sebagai tahap pertama implementasi RPJPN

Tahun 2025-2045 Presiden memiliki visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kkesamaan tekad berdasarkan fondasi yang tlah dibangun pemeriintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara neara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantabkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis denganlingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Penguatan ekonomi domestik dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap guncangan dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas melalui paket kebijakan terintegrasi, meliputi stabilitas makroekonomi, perlindungan daya beli, penguatan tabungan dan pembiayaan domestik, percepatan investasi dan belanja produktif, perbaikan iklim usaha, peningkatan produktivitas, serta penguatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia. Melalui strategi tersebut, perekonomian domestik diharapkan tidak hanya lebih resilien terhadap tekanan eksternal, tetapi juga mampu membangun kapasitas pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, investasi diarahkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan industrialisasi bernilai tambah, dengan target realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp2.361,6–Rp2.451,0 triliun. Investasi difokuskan pada sektor sekunder (Rp1.114,8–Rp1.180,4 triliun), hilirisasi (Rp637,0–Rp654,1 triliun), serta kawasan pusat pertumbuhan (Rp525,2–Rp546,2 triliun), dengan peningkatan porsi PMDN termasuk UMKM menjadi 48,9–49,0 persen. Selain itu, investasi berorientasi ekspor juga diperkuat melalui PMA dan PMDN, didukung kebijakan peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, serta pengembangan infrastruktur konektivitas dan logistik sebagai fondasi pertumbuhan.

Hilirisasi diarahkan sebagai strategi utama untuk mendukung pencapaian sasaran sektor industri pengolahan sebagai sumber

pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target kontribusi sebesar 21,5 persen terhadap PDB pada tahun 2027 dengan pertumbuhan 6,1–7,5 persen. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, implementasi hilirisasi dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir disertai penguatan ekosistem hilirisasi, mencakup peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pasokan bahan baku, penguatan konektivitas dan logistik, serta pendalaman produk turunan melalui:

1. akselerasi hilirisasi komoditas berbasis sumber daya unggulan, seperti nikel, bauksit, garam, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut, yang salah satunya akan diimplementasikan melalui berbagai PSN;
2. pengembangan industri bernilai tambah tinggi, yang mencakup industri kimia, industri alat angkutan (termasuk pengembangan industri mobil nasional dan industri dirgantara), dan industri elektronika, serta industri mesin dan perlengkapan;
3. peningkatan daya saing industri padat karya seperti industri tekstil salah satunya melalui pelaksanaan program Kredit Industri Padat Karya dan restrukturisasi mesin/peralatan;
4. percepatan transformasi industri hijau melalui implementasi peta jalan dekarbonisasi industri, penerapan ekonomi sirkular, serta pilot project pembiayaan industri hijau dengan skema Green Industry Service Company (GISCO);
5. perluasan dan pendalaman ekspor produk dan jasa industri, terutama melalui pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi;
6. peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui penguatan rantai pasok industri, keberlanjutan penerapan industri 4.0, penyiapan SDM industri terampil dan produktif, serta penerapan standardisasi, serta dukungan kebijakan fiskal dan insentif yang tepat sasaran.

Selanjutnya, sektor pertanian dan perikanan tahun 2027 ditargetkan tetap tumbuh di tengah tantangan perubahan iklim melalui (1) perbaikan pengelolaan air dan irigasi, lahan/kawasan konservasi dan rehabilitasi, serta Jalan Usaha Tani; (2) penyediaan benih dan bibit unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), sarana produksi perikanan, pupuk subsidi, cetak sawah, optimasi lahan, revitalisasi tambak dan kampung nelayan; (3) penyuluhan dan regenerasi petani, nelayan, dan pembudidaya ikan; (4) peningkatan produksi lada, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk komoditas pertanian dan perikanan; serta (5) hilirisasi pertanian dan perikanan. Sementara itu, sektor perdagangan dari sisi dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, transformasi digitalisasi perdagangan, dan peningkatan konektivitas ke pasar global.

Pada tahun 2027, peningkatan pertumbuhan dicapai melalui kontribusi pertumbuhan kapital sebesar 3,19–3,55 persen, kontribusi tenaga kerja sebesar 1,26–1,50 persen, dan kontribusi *Total Factor Productivity* (TFP) sebesar 1,85–2,45 persen. Pertumbuhan ekonomi ditingkatkan melalui: (1) peningkatan kapital dengan dampak pengganda perekonomian yang besar, (2) peningkatan jumlah tenaga kerja ahli berdasarkan sektor unggulan wilayah untuk meminimalisir tingkat *mismatch*, dan (3) penguasaan dan penerapan teknologi baru terutama pada sektor industri manufaktur dan pengembangan infrastruktur konektivitas seperti *transit-oriented development* (TOD).

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah antara KBI dan KTI. Pertumbuhan

ekonomi KTI ditargetkan tumbuh lebih tinggi dibandingkan KBI yaitu sebesar 6,5–8,3 ersen dengan menjaga momentum pertumbuhan KBI yang mencapai 5,8–7,3 persen. Akselerasi pertumbuhan KTI didorong oleh masih tingginya aktivitas hilirisasi sumber daya alam khususnya di Sulawesi dan Maluku, serta optimalisasi sektor pariwisata dan pertanian di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Di sisi lain, wilayah Kalimantan difokuskan pada aktivasi ekosistem ekonomi IKN yang mulai beroperasi dan memperkuat *spillover effect* bagi provinsi penyangganya. Sementara itu, pertumbuhan KBI tetap difokuskan pada penguatan rantai pasok industri khususnya di wilayah Jawa dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan di wilayah Sumatera melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis (Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2027, Kementerian PPN/Bappenas 2026).

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sukses tumbuh hingga 5,37% (c-to-c) pada tahun 2025 atau menjadi 5,84% (yoy) pada triwulan IV tahun 2025. Tumbuhnya ekonomi di Provinsi Jawa Tengah beriringan dengan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah hingga 5,37% itu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,11%. Capaian tersebut sekaligus menandai Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Jawa.

Adapun jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada September 2025 sebanyak 3,34 juta orang yang telah turun dibanding periode sebelumnya di angka 3,40 juta orang. Adapun penurunan itu terjadi sebanyak 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan kembali turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024.

Peningkatan ekonomi juga tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jateng yang kini mencapai Rp 50,82 juta, naik 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka berhasil dijaga pada angka 4,32% per November 2025.

Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60 – 7,40
2	PDRB per kapita	Juta Rp.	56,00 – 59,80
3	Tingkat Inflasi	%	1,50 – 3,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,65 – 4,08
5	Tingkat Kemiskinan	%	8,50 – 7,50
6	Otonomi Fiskal Daerah	%	66,80

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2026

RKPD Tahun 2027 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan**" yang akan dicapai dengan tiga sasaran pembangunan daerah meliputi:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 diarahkan pada tema "**Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi**", yang dijabarkan dalam prioritas daerah dan fokusnya tahun 2027.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tersebut antara lain: (1) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan; (2) penguatan promosi pariwisata berbasis digital; (3) peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata; (4) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital; (5) peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata; (6) penguatan integrasi antar destinasi wisata; (7) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata; (8) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata; (9) *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan; (10) pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang *holistic* dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada Kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta; (11) pengembangan pariwisata ramah muslim melalui fasilitasi peningkatan layanan dan ekosistem halal; (12) penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah dan penguatan ekonomi digital; (13) penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif; (14) peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa; (15) peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan; (16) peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi Syariah; (17) penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal; (18) revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan,layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri; (19) penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis project integratif dan lintas; (20) penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan *Memorandum of Agreement* (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal; (21) peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/internasional, serta penguatan SDM/lembaga/komunitas

kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya; (22) penguatan *event* olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan; (23) perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan; (24) mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan; (25) peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kedua "**Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah**" ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**, dengan fokus pada:
    a. peningkatan kinerja pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif;
    b. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
    c. pengembangan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
    d. peningkatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi;
    e. pengembangan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektorsektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
    f. peningkatan kualitas manajemen ASN dengan pengembangan manajemen kinerja dan talenta disertai *reward and punishment* yang berkeadilan;
    g. pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi disertai dengan penguatan nilai integritas;
    h. peningkatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
    i. peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi;
    j. penguatan kualitas analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, jaringan dokumentasi hukum, serta kapasitas penyusunan produk hukum;
    k. peningkatan layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
    l. peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
    m. penguatan kelembagaan agar lebih efektif;
    n. peningkatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
    o. penguatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan pembangunan daerah;
    p. peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemetaan daerah rawan, penegakan produk hukum daerah serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga trantibum;

q. peningkatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
r. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
s. peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
t. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
u. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila;
v. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan kriminalisme;
w. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
x. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
y. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
z. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2. **Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan**, dengan fokus pada:
   a. peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal;
   b. peningkatan kontribusi sektor perdagangan dengan efisiensi distribusi dan stabilitas harga;
   c. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis inovasi;
   d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
   e. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
   f. peningkatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;
   g. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
   h. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;
   i. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya konektivitas antar destinasi wisata unggulan) dan kewilayahan;
   j. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
   k. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
   l. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
   m. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM danpenguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta lembaga adat desa;
   n. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;

o. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
p. pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati;
q. peningkatan produktivitas komoditi sumberdaya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan;
r. peningkatan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
s. peningkatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
t. inisiasi penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup;
u. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku;
v. peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
w. peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung kawasan pariwisata);
x. akselerasi dan sinergi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
y. peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
z. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
aa. peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik;
bb. peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
cc. peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
dd. penguatan infrastruktur hijau dan penerapan *zero waste tourism* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan;
ee. peningkatan Integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral melalui penyusunan dokumen SPPR;
ff. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
gg. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
hh. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
ii. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
jj. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
kk. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
ll. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

3. **Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter**, dengan fokus pada:
   a. peningkatan kompetensi siswa SMK, keahlian guru SMK berbasis industri serta revitalisasi alat praktik kejuruan;
   b. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahan dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah blankspot, penguatan kerjasama pemerintah-swasta, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);

c. peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi dan digital, STEAM, kualitas pengajaran guru dan pembelajaran siswa, serta pengelolaan SMK Boarding dan Semi Boarding;
d. peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi;
e. penguatan tata kelola pendidikan berorientasi kepemimpinan instruksional dan berbasis telaah/analisis;
f. pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan lanjutan;
g. pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi;
h. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
i. peningkatan cakupan kepesertaan aktif;
j. pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
k. pemerataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan;
l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
m. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
n. peningkatan kualitas data dan informasi kebudayaan;
o. peningkatan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan;
p. peningkatan kualitas SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
q. pengembangan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan;
r. peningkatan kualitas prasarana sarana kebudayaan;
s. peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan;
t. perluasan literasi melalui pelibatan pemangku kepentingan;
u. mengoptimalkan akuisisi arsip secara tematis;
v. peningkatan partisipasi pemuda melalui wirausaha muda kreatif dan inovatif;
w. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
x. peningkatan pembangunan berbasis gender;
y. peningkatan ketahanan keluarga;
z. pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi dan perluasan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha.

(Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029).

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Karanganyar

Arah kebijakan Kabupaten Karanganyar tahun 2027 adalah **Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing**. Prioritas pada tahun 2027 adalah:

1. **Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif,** dengan fokus:

a. Peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro dalam mendorong perekonomian daerah dan mengembangan ekonomi syariah.
b. Pengembangan sentra dan klaster industri kecil dalam meningkatkan produksi yang mampu mendorong perekonomian yang semakin berdaya saing, membuka pasar baru untuk produk potensi daerah baik antar wilayah maupun internasional.
c. Peningkatan kualitas petani dalam mengimplementasikan hilirasasi pertanian dan moderinsasi pertanian, memperkuat petani milineal, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendorong keaneragaman pangan, keamanan pangan dalam menuju ketahanan pangan. Peningkatan kualitas sumberdaya alam yang mampu mendorong daya tampung air. Mendorong perwujudan fortifikasi pangan. Menjamin kelancaran pupuk bagi petani dan mendorong penggunaan pupuk organik dalam mendukung ekonomi hijau.
d. Peningkatkan kapasitas pengelola wisata untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, memperkuat jejaring dengan kabupaten sekitar dalam meningkatkan kunjungan.
e. Mengembangkan digitalisasi pelayanan investasi dalam Mall Pelayanan Publik dan mengembangkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Pengembangan keterampilan tenaga kerja dengan memperkuat pelatihan dan *link and match* dunia pendidikan dan usaha

2. **Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,** dengan fokus:
   a. Penguatan daya saing SDM dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan PAUD, SD, SMP melalui pemerataan, peningkatan kompetensi pendidik, dan wajib belajar 13 tahun.
   b. Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan, dalam pembangunan SDM.
   c. Penguatan budaya literasi dan inovasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan, akses buku digital, serta riset dan inovasi.
   d. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dengan memperkuat layanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan mendorong GERMAS.
   e. Penguatan daya saing yang inklusif melalui penguatan penanganan kemiskinan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial yang integratif dan kolaboratif.
   f. Memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak, serta mendorong perwujudan kabupaten layak anak.
   g. Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan sehingga mampu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dalam indek perencanaan daerah dan komponen dokumen perencanaan dalam SAKIP.
   h. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN, terpenuhinya sistem karir sesuai dengan sistem merit. Penguatan pelayanan ASN berbasis digital.
   i. Peningkatan persepsi anti korupsi, peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas APIP.

j. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan berbasis digital, penguatan pengelolaan asset dan penyelematan asset daerah yang mampu mendorong pendapatan daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan mendorong pendapatan asli daerah.
k. Peningkatan pemerintahan berbasis teknologi, penguatan satu data dan keamanan informasi.
l. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan dalam implementasi transformasi birokrasi.
m. Peningkatan SDM yang memiliki inovasi, riset dalam membangun tata kelola pemerintahan.
n. Peningkatan kualitas reformasi hukum dan sinergitas legeslatif dan eksekutif.

3. **Memperkuat kondusivitas wilayah,** dengan fokus:
   a. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, peningkatan penegakkan peraturan daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
   b. Penguatan harmonisasi, peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama serta demokratisasi.
   c. Peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana dengan memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana dan mendorong desa untuk berpartisipasi penanganan bencana.
4. **Mempercepat kualitas infrastruktur,** dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas jalan, peningkatan ruas pedestrian, penertiban penggunaan trotoar. Peningkatan kualitas jalan ibu kota Kabupaten.
   b. Meningkatkan keselamatan angkutan umum dalam rangka mengurangi kecelakaan. Mengembangkan rintisan angkutan massal yang nyaman dan aman.
   c. Pemenuhan layanan air minum layak, meningkatkan sambungan perpipaan pada perkotaan dan merintis air minum aman.
   d. Pemenuhan sanitasi layak, peningkatan kualitas IPLT menuju sanitasi aman.
   e. Peningkatkan penanganan kumuh, pemenuhan PSU dikawasan perumahan dan Kawasan permukinan, dan pemenuhan SPM perumahan.
   f. Peningkatan penataan Kota dan perbatasan menjadi kota yang indah, nyaman dan bersih
   g. Penataan dan pemberdayaan desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, pengembangan teknologi tepat guna serta merintis digitalisasi pembangunan desa.
5. **Memperkuat kualitas lingkungan hidup,** dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan meningkatkan pelayanan penanganan kasus pencemaran,
   b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup

Proyeksi perekonomian Kabupaten Karanganyar diperkirakan, sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027

No	Indikator	Target RPJMD Tahun 2025-2029	BA RAKORTEK RENBANG Prov Jateng T. 2026	Target RKPD 2027	Ket
1.	Angka Kemiskinan (%)	8,71	7,52-7,04	7,50	Realisasi 2025 : 8,48
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,27	5,87-7,72	6,15	Realisasi 2025 : 5,75
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,24	2,90-2,34	2,90	Realisasi 2025 : 3,26
4.	Indeks Gini (angka)	0,336	-	0,336	Realisasi 2025 : 0,332

Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dan BA RAKORTEKRENBANG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah agar mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta konstribusi pelaku usaha melalui *Coorporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2027 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2027 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

1. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar.
2. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.
3. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Kebijakan keuangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD Tahun 2027 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
    b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
    c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
    d. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

e. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
f. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pembe4rdayaan UMKM.
g. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
    1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    2) Menghambat mobilitas penduduk;
    3) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
    4) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    a. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
        1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
        2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
        3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
        4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
        5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
    b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah PD BPR Bank Karanganyar, PD BPR BKK Tasikmadu, PD BPR Bank Daerah Karanganyar, PD BKK Karanganyar, PUD Aneka Usaha dan PUDAM Tirta Lawu Karanganyar.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
        1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
        2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
        3) Hasil kerja sama daerah;
        4) Jasa giro;

5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
6) Pendapatan bunga;
7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11) Pendapatan denda pajak daerah;
12) Pendapatan denda retribusi daerah;
13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14) Pendapatan dari pengembalian;
15) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil Pajak
   a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21.
   b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2027.
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
   Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
   a. DBH-Kehutanan;
   b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batu bara;
   c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
   d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
   e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
   f. DBH-Perikanan
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
   DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

a. DAK Fisik
b. DAK Non Fisik

5. Dana Insentif Fiskal (DIF)
   Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Bagi Hasil
   a. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2027. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2027 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2027, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026.
   b. Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2026, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
2. Pendapatan Bantuan Keuangan
   a. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
      1) Bantuan keuangan umum dari daerah Provinsi;
      2) Bantuan keuangan khusus dari daerah Provinsi;
      3) Bantuan keuangan umum dari daerah Kabupaten/Kota; dan
      4) Bantuan keuangan khusus dari daerah Kabupaten/Kota.
   b. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus

dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2027 atau 7ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah
   Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
   Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum bagi penerimaan daerah melalui:

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui:
   a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayaan Pajak/Retribusi Daerah (sistem billing);
   b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi (pembaruan data wajib pajak, pemberian *reward and punishment* dan lain-lain);
   c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
   d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
   e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
   f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
   g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam lampiran Perda Retribusi;
   h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien dan efektif;
   i. peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah

Provinsi terkait penarikan opsen PKB dan BBNKB dengan melakukan identifikasi kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak, melakukan sosialisasi melalui media sosial, melakukan operasi gabungan dengan kepolisian dan Unit Pelaksana Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Karanganyar untuk menjaring kendaraan yang menunggak pajak.

2. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
3. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat BUMD / Perusda dengan penyertaan modal;
4. Menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada OPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dana dari transfer pemerintah pusat/provinsi (Bantuan keuangan, DAK, DID, Kegiatan Sektoral/KL : UIN, LP Klas I, Komplek Olah Raga dan lain-lain);
7. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif dalam meningkatan PAD yang lebih maksimal telah dilakuikan secara bertahab dengan melakukan pendataan aset yang pemanfaatannya menguntungkan serta dilakukan analisa skema kemitraan yang saling memguntungkang seperti Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG).

Secara rinci realisasi dan proyeksi pendapatan Kabupaten Karanganyar tahun 2024 sampai dengan tahun 2027, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2027

KODE REK	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI	
		2024	2025	2026	2027
4	**PENDAPATAN**	**2.519.423.342.414**	**2.345.884.352.234**	**1.931.019.677.319**	**1.930.332.851.804**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**453.872.526.415**	**563.054.038.337**	**534.470.723.729**	**550.448.966.804**
4 1.1	Pendapatan Pajak Daerah	245.820.209.492	344.155.093.130	325.487.473.000	333.987.473.000
4 1.2	Hasil Retribusi Daerah	174.381.216.034	177.327.007.208	184.191.227.636	183.604.468.850
4 1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.556.721.990	22.674.452.973	19.971.916.093	25.207.274.954
4 1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.114.378.899	18.897.485.026	4.820.107.000	7.649.750.000
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.064.062.815.999**	**1.782.830.313.897**	**1.396.548.953.590**	**1.379.883.885.000**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.812.604.755.890	1.632.089.306.696	1.285.007.503.000	1.293.383.885.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	251.458.060.109	150.741.007.201	111.541.450.590	86.500.000.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.488.000.000**	**-**	**-**	**-**
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.488.000.000	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

3.2.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendukung sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dituangkan dalam RKP Tahun 2027. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan perubahan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2027;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
4. Belanja daerah pada semua bidang dan upaya meningkatkan perekonomian daerah yang lebih baik, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas maupun non prioritas direncanakan untuk mendorong sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 diprioritaskan, sebagai berikut:

1. Belanja daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan memenuhi kebutuhan publik;

2. Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanakan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Belanja daerah untuk mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
4. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah, memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
5. Belanja daerah yang alokasikan kepada Perangkat Daerah (PD) didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
6. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah (desa dan kelurahan) melalui Bantuan keuangan kepada pemerintah desa atau dana kelurahan, diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Komposisi Struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
    a. **Belanja Operasi** merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
        1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
            a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
            b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
            c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

e) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau

pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

g) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;

c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.

f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
   - Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
   - Pimpinan dan Anggota DPRD
   - Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

   Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 Tahun 2023 dengan ketentuan:
   - Gradasi untuk eselon dan non eselon/JFU/JFK tidak dipotong pajak.
   - Biaya penginapan diberikan secara riil, sesuai bukti pembayaran yang sah dari hotel/penginapan/situs/aplikasi penyedia jasa, namun apabila tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan maka diberikan secara lumpsum

setinggi-tingginya sebesar 30% dari biaya hotel diwilayah bersangkutan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD di bertanggungjawabkan secara lumpsum sebagaimana diatur batasannya dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- Uang representasi hanya diberikan bagi pejabat negara, DPRD dan JPT;
- Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan biaya penginapan adalah pengatur perjalanan dinas yang bersangkutan, bukan pelaksana perjalanan dinas;
- Untuk biaya transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 liter per 7 KM. Untuk biaya transport pimpinan DPRD dan anggota DPRD bagi penggunaan kendaraan dinas/ pribadi ditetapkan secara lumpsum dengan perhitungan bbm 1 liter per 12 km;
- Pemakaian kendaraan dinas yang dengan menggunakan sopir, maka sopir dihitung sebagai pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya;
- Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia dalam perjalanan dinas, diberikan biaya pengganti sesuai dengan biaya riil;
- Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP dan masuk dalam biaya pejalanan dinas Perangkat Daerah pengirim;
- Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- Penghargaan atas suatu prestasi;
- Beasiswa kepada masyarakat;
- Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
4) Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
   a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
   b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
   c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
      - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
   d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
   e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

   Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5) Belanja Bantuan Sosial
   a) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
   b) Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2027 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c) Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49).

b. **Belanja Modal** merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
   1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
   3) batas minimal kapitalisasi aset.

Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
   a) Belanja Modal Tanah
      Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
      Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
   c) Belanja Modal Bangunan Dan Gedung
      Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
      Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   e) Belanja Aset Tetap Lainnya
      Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   f) Belanja Aset Lainnya
      Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan

terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Belanja Tidak Terduga** merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
   1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan
   2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
      a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
      b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
      c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
   3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
      a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4) Pengeluaran untuk mendanai:
a) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Keperluan mendesak; dan/atau
c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;

5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b) Memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2027 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d. **Belanja Transfer,** sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:
1) Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu

dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2) Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya

2. Perlu adanya penyesuaian Belanja Hibah dan Bansos, yang sebelumnya tercantum dalam DPA-PPKD/BPPKAD, menjadi diampu oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja yang membidangi, termasuk dalam hal ini beberapa hibah yang meliputi:
   a. Hibah Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) (yang semula di PPKD menjadi diampu oleh masing-masing kelurahan);
   b. Hibah BPMKS (swasta) dan Bansos BPMKS (dari PPKD ke Dinas Pendidikan);
   c. Hibah lainya yang semula di PPKD ke OPD yang membidangi.
3. Pemenuhan belanja yang dimandatkan (*mandatory spending*) dan menjadi prioritas anggaran, antara lain:
   a. Pendidikan (20%);
   b. Kesehatan (10%);
   c. Infrastruktur (25%); dan
   d. Pendanaan kelurahan dari APBD (5% pendapatan daerah dikurangi DAK) serta rasio belanja modal yang makin meningkat
4. Belanja prioritas RKPD Tahun 2027, meliputi :
   a. Keberlanjutan program BPMKS;
   b. JKN KIS APBD;
   c. Infrastruktur kota (termasuk penanganan kawasan kumuh); dan
   d. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
5. Pemenuhan belanja operasional OPD/ unit kerja harus diarahkan agar semakin terukur.

Proyeksi dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4.

Realisasi dan Proyeksi Belanja

Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2027

KODE REK	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI	
		2024	2025	2026	2027
5	**BELANJA**	**2.480.302.422.553**	**2.260.638.368.802**	**2.142.250.562.327**	**1.983.332.851.804**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.764.200.090.294**	**1.719.413.280.833**	**1.720.731.283.026**	**1.598.277.761.847**
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.018.333.415.110	1.050.300.686.674	1.034.187.761.485	978.028.341.737
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	598.273.319.534	569.527.625.119	592.242.048.541	545.421.301.110
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah	141.713.649.650	94.121.794.768	90.485.753.000	74.138.119.000
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	5.879.706.000	5.463.174.272	3.815.720.000	690.000.000
5.2.	**BELANJA MODAL**	**333.809.338.567**	**200.009.957.839**	**174.132.323.651**	**149.019.079.015**
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	2.175.000.000	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.859.635.455	55.653.076.435	26.425.816.530	21.112.824.965
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	40.255.091.301	26.104.344.565	21.201.548.000	4.322.004.000
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	204.332.803.067	107.112.501.180	118.045.218.849	115.628.500.000
5.2.5.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	9.281.970.095	8.681.698.200	8.176.728.850	7.900.750.050
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	79.838.649	283.337.459	283.011.422	55.000.000
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.187.166.092**	**1.480.450.000**	**4.718.500.000**	**5.000.000.000**
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	2.187.166.092	1.480.450.000	4.718.500.000	5.000.000.000
5.3.	**BELANJA TRANSFER**	**380.105.827.600**	**339.734.680.130**	**242.668.455.650**	**231.036.010.942**
5.3.1.	Belanja Bagi Hasil	22.785.826.900	22.369.105.600	23.565.264.750	25.118.715.142
5.3.2.	Belanja Bantuan Keuangan	357.320.000.700	317.365.574.530	219.103.190.900	205.917.295.800

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2027

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berikut realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2027, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5.

Proyeksi dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2027

KODE REK	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI	
		2024	2025	2026	2027
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**107.863.981.715**	**128.984.901.576**	**211.230.885.008**	**53.000.000.000**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**129.863.981.715**	**146.984.901.576**	**214.230.885.008**	**62.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.863.981.715	146.984.901.576	214.230.885.008	62.000.000.000
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**22.000.000.000**	**18.000.000.000**	**3.000.000.000**	**9.000.000.000**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	10.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	22.000.000.000	8.000.000.000	-	6.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**107.863.981.715**	**128.984.901.576**	**211.230.885.008**	**53.000.000.000**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui kemampuan pendanaan tahun 2027 direncanakan sebesar **Rp**. **1.992.332.851.804,-** berasal dari pendapatan **Rp. 1.930.332.851.804,-** ditambah dengan perkiraan Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp. 62.000.000.000,-.** Untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2027 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 besaran dana cadangan yang harus dicadangkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan untuk penyertaan modal dianggarkan sebedar Rp. 6.000.000.000,- sehingga total Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp. 9.000.000.000,-

Adapun postur anggaran untuk realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 tersaji dalam tabel berikut

Tabel 3.6.

Postur Anggaran Untuk Realisasi Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2024 Sampai Dengan Tahun 2027 Kabupaten Karanganyar

KODE REK	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI	
		2024	2025	2026	2027
4	**PENDAPATAN**	**2.519.423.342.414**	**2.345.884.352.234**	**1.931.019.677.319**	**1.930.332.851.804**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**453.872.526.415**	**563.054.038.337**	**534.470.723.729**	**550.448.966.804**
4 1.1	Pendapatan Pajak Daerah	245.820.209.492	344.155.093.130	325.487.473.000	333.987.473.000
4 1.2	Hasil Retribusi Daerah	174.381.216.034	177.327.007.208	184.191.227.636	183.604.468.850
4 1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.556.721.990	22.674.452.973	19.971.916.093	25.207.274.954
4 1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.114.378.899	18.897.485.026	4.820.107.000	7.649.750.000
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.064.062.815.999**	**1.782.830.313.897**	**1.396.548.953.590**	**1.379.883.885.000**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.812.604.755.890	1.632.089.306.696	1.285.007.503.000	1.293.383.885.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	251.458.060.109	150.741.007.201	111.541.450.590	86.500.000.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.488.000.000**	**-**	**-**	**-**
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.488.000.000	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
5	**BELANJA**	**2.480.302.422.553**	**2.260.638.368.802**	**2.142.250.562.327**	**1.983.332.851.804**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.764.200.090.294**	**1.719.413.280.833**	**1.720.731.283.026**	**1.598.277.761.847**
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.018.333.415.110	1.050.300.686.674	1.034.187.761.485	978.028.341.737
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	598.273.319.534	569.527.625.119	592.242.048.541	545.421.301.110
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah	141.713.649.650	94.121.794.768	90.485.753.000	74.138.119.000
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	5.879.706.000	5.463.174.272	3.815.720.000	690.000.000
5.2.	**BELANJA MODAL**	**333.809.338.567**	**200.009.957.839**	**174.132.323.651**	**149.019.079.015**
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	2.175.000.000	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.859.635.455	55.653.076.435	26.425.816.530	21.112.824.965
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	40.255.091.301	26.104.344.565	21.201.548.000	4.322.004.000
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	204.332.803.067	107.112.501.180	118.045.218.849	115.628.500.000
5.2.5.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	9.281.970.095	8.681.698.200	8.176.728.850	7.900.750.050
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	79.838.649	283.337.459	283.011.422	55.000.000
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.187.166.092**	**1.480.450.000**	**4.718.500.000**	**5.000.000.000**
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	2.187.166.092	1.480.450.000	4.718.500.000	5.000.000.000
5.3.	**BELANJA TRANSFER**	**380.105.827.600**	**339.734.680.130**	**242.668.455.650**	**231.036.010.942**
5.3.1.	Belanja Bagi Hasil	22.785.826.900	22.369.105.600	23.565.264.750	25.118.715.142
5.3.2.	Belanja Bantuan Keuangan	357.320.000.700	317.365.574.530	219.103.190.900	205.917.295.800
	DEFISIT/SURPLUS	**39.120.919.861**	**85.245.983.432**	**- 211.230.885.008**	**- 53.000.000.000**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**107.863.981.715**	**128.984.901.576**	**211.230.885.008**	**53.000.000.000**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**129.863.981.715**	**146.984.901.576**	**214.230.885.008**	**62.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.863.981.715	146.984.901.576	214.230.885.008	62.000.000.000
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**22.000.000.000**	**18.000.000.000**	**3.000.000.000**	**9.000.000.000**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	10.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	22.000.000.000	8.000.000.000	-	6.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**107.863.981.715**	**128.984.901.576**	**211.230.885.008**	**53.000.000.000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**146.984.901.576**	**214.230.885.008**	**-**	**-**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun melalui pendekatan proses secara teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS).

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode jabatan 2025-2030 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan Sejahtera.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2027 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target		Urusan yang Menangani
				RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	RKPD 2027	
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	87,00	88,00	
	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP	Nilai	71,50	71,50	- Perencanaan - Keuangan - Kepegawaian - Sekretariat Daerah (Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan)
		2. Maturitas SPIP	Level	3,310	3,310	- Pengawasan - Kepegawaian - Pendidikan dan Pelatihan - Komunikasi dan Informatika - Statistik - Persandian - Kearsipan
		3. Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,57	4,57	- Sekretariat DPRD (Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) - Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kewilayahan (Kecamatan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target		Urusan yang Menangani
				RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	RKPD 2027	
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Komulatif	Ton CO2eq	2.424.679,2	2.424.679,2	
		Kasus Konflik SARA	Kasus	0	0	
	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	72,49	72,49	- Lingkungan Hidup - Kehutanan - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)
	2. Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	Angka Kriminalitas	Angka per 10.000 penduduk	168	168	- Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) - Kesatuan Bangsa dan Politik (Unsur Urusan Pemerintahan Umum)
3. Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,88	3,88	
	1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang inklusif, berkarakter dan adil	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,42	79,95	- Pendidikan - Kebudayaan - Kesehatan - Pengendalian Penduduk dan KB - Pemberdayaan Perempuan dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target		Urusan yang Menangani
				RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	RKPD 2027	
						Perlindungan Anak - Kepemudaan dan Olahraga - Perpustakaan
	2. Meningkatnya riset dan inovasi	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,22	3,22	- Penelitian dan Pengembangan
	3. Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,27	6,15	- Tenaga Kerja - Perindustrian - Perdagangan - Pariwisata - Energi dan Sumber Daya Mineral - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Penanaman Modal
	4. Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,80	76,30	- Pangan - Kelautan dan Perikanan - Pertanian - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (terkait Irigasi)
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata		Tingkat Kemiskinan	%	8,71	7,50	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam	Indeks Gini	Angka	0,336	0,336	- Sosial - Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target		Urusan yang Menangani
				RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	RKPD 2027	
	mengurangi ketimpangan pendapatan					- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Pertanahan - Perhubungan

Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, 2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah membutuhkan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 menjadi ruang yang sangat strategis, karena di sinilah kita memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah benar-benar disusun secara partisipatif, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 juga harus diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, termasuk berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat yang menekankan transformasi ekonomi, penguatan daya saing daerah, efisiensi belanja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, prinsip optimalisasi anggaran dengan pendekatan *Spend Better* menjadi hal yang perlu kita kedepankan bersama.

Tema pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah "Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing". Tema ini sangat relevan dengan kondisi dan tantangan daerah yang dihadapi saat ini. Pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Penguatan ekonomi daerah perlu dibangun di atas fondasi infrastruktur yang memadai, kualitas sumber daya manusia yang unggul, tata kelola pemerintahan yang baik, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karangahyar Tahun 2027, antara lain :

1. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan.
2. Perbaikan drainase.
3. Bantuan permodalan bagi UMKM.
4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha.
5. Perbaikan jaringan irigasi pertanian.
6. Bantuan pupuk untuk petani.
7. Penanganan stunting dan gizi keluarga.
8. Pengelolaan sampah terpadu.
9. Penyediaan air bersih.
10. Penguatan mitigasi bencana dan cuaca ekstrem.

Pokok-pokok pikiran tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2027. Kebijakan pembangunan ekonomi agar diarahkan pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal.

DPRD Kabupaten Karanganyar selalu mendorong agar setiap kebijakan pembangunan disusun dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, dilaksanakan secara transparan, serta memiliki akuntabilitas kinerja yang jelas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat terus kita jaga dan ditingkatkan.

Sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi dan seluruh elemen masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kebutuhan daerah. Dengan perencanaan yang matang dan kolaboratif,

diharapkan Kabupaten karanganyar mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027

Pencapaian visi Indonesia Emas 2045 memerlukan kesinambungan arah kebijakan perencanaan pembangunan yang dirancang secara bertahap dan terintegrasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 menjadi landasan strategis yang menetapkan arah transformasi bangsa selama 20 tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional dijalankan secara terarah dengan berlandaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta Pembukaan UUD 1945 yang memuat visi dan misi bernegara. Nilai-nilai fundamental tersebut menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan pembangunan, memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial, persatuan nasional, serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 lahir sebagai pelaksanaan tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 sekaligus memuat delapan visi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Selanjutnya, Asta Cita diterjemahkan ke dalam delapan Prioritas Nasional sebagai acuan utama pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Trisula Pembangunan, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi berkualitas, (2) penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMN Tahun 2025–2029. Kedudukan RKP Tahun 2027 menjadi penting karena tidak hanya memastikan kesinambungan arah kebijakan yang telah dilaksanakan di dua tahun pertama, tetapi juga mengakselerasi etercapaian sasaran jangka menengah di dua tahun berikutnya, atau di akhir periode pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tahun 2027 menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis. Tantangan ini memerlukan stabilitas dan perkuatan fondasi pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9–7,5 persen. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan strategi peningkatan nilai tambah (*value added*) yang transformatif dan signifikan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah difokuskan pada tiga faktor penggerak utama, yaitu produktivitas, investasi, dan industri.

Dari faktor produktivitas, peningkatan *output* dan nilai tambah diarahkan melalui penguatan lima pilar pembentuk *Total Factor Productivity* (TFP), yaitu (1) inovasi melalui peningkatan kapasitas riset dan kolaborasi serta percepatan adopsi teknologi dalam proses produksi; (2) pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar; (3) infrastruktur fisik untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar konektivitas; (4) efisiensi melalui perbaikan iklim usaha dan pengurangan berbagai hambatan ekonomi; serta (5) institusi melalui penguatan kepastian hukum, efektivitas belanja pemerintah, dan kemudahan berusaha. Pertumbuhan ekonomi yang didorong produktivitas (TFP) menjadi basis akselerasi pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Kontribusi produktivitas (TFP) terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional masih terbatas 0,26 persen (periode 2015–

2025), namun berpotensi meningkat signifikan hingga mencapai dua persen. Selanjutnya, peningkatan produktivitas menjadi krusial dalam merespons inefisiensi investasi agar menjadi lebih berkualitas tecermin dari *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang berpotensi turun hingga mencapai 4,5 (dari 6,4 pada tahun 2025).

Investasi sebagai faktor pengungkit utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tercatat sebagai komponen terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 28,8 persen terhadap PDB sisi pengeluaran pada tahun 2025, mencerminkan perannya yang signifikan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, investasi mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas produksi nasional melalui perluasan basis industri serta penguatan sisi penawaran (*supply-side*) perekonomian. Di tengah kebutuhan transformasi ekonomi, peningkatan investasi berkualitas melalui *Foreign Direct Investment* (FDI) menjadi semakin krusial untuk mendorong alih teknologi dan pengetahuan, terutama mengingat rasio FDI Indonesia yang masih terbatas pada kisaran 1,2 persen terhadap PDB, namun berpotensi meningkat signifikan seperti Vietnam yang mencapai 6,0 persen terhadap PDB. Selain itu, berbagai komitmen investasi dari kesepakatan kerja sama internasional dengan mitra strategis menjadi modal kuat untuk direalisasikan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sementara itu, faktor industri merupakan salah satu penggerak utama transformasi ekonomi dan akselerasi pertumbuhan berkualitas dengan kontribusi PDB tertinggi. Selain itu industri pengolahan berperan menciptakan ekosistem keterkaitan antar sektor dengan *multiplier output* tinggi dan penyerapan tenaga kerja berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan industri perlu diarahkan pada transformasi struktural menuju industri bernilai tambah tinggi, berdaya saing global, dan berorientasi ekspor. Arah kebijakan ini menekankan pada *industrial upgrading*, baik melalui pergeseran dari industri berbasis komoditas dan teknologi rendah menuju industri berteknologi menengah-tinggi (*intra-industry upgrade*) maupun melalui pendalaman struktur industri ke tahapan yang lebih maju dalam rantai nilainya (*inter-industrial upgrade*).

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Faktor produktivitas, investasi, dan industri dipandang sebagai tiga pilar utama yang paling menentukan dalam mendorong akselerasi pertumbuhan berkualitas. Dengan demikian, Pemerintah menetapkan Tema RKP Tahun 2027 yaitu: "***Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri***." Untuk mewujudkan tema RKP tersebut berpedoman pada sasaran pembangunan nasional sebagaimana Rancangan RKP Tahun 2027, yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,9 – 7,5 persen.
2. GNI per Kapita 5.900 – 5.990 US$.
3. Penurunan Intensitas Emisi GRK 39,57 persen.
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,84.
5. Tingkat Kemiskinan 6,0 – 6,5 persen.
6. Kemiskinan Ekstrem 0 persen.

7. Rasio Gini 0,362 – 0,367.
8. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,30 – 4,87 persen.
9. Indeks Modal Manusia 0,575.

Tema ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga subtema RKP Tahun 2027 dilaksanakan melalui sebelas Fokus Pembangunan (FP) sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan ketajaman arah kebijakan dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Kesebelas FP tersebut yaitu (1) Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Inovasi; (2) Stimulus untuk Produktivitas Daya Beli Masyarakat; (3) Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola; (4) Regulasi dan Kelembagaan; (5) Efisiensi dan Efektivitas Investasi; (6) Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi; (7) Inovasi Pembiayaan Pembangunan; (8) Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor; (9) Industri Nasional; (10) Hilirisasi SDA Strategis; serta (11) Swasembada Pangan, Energi, dan Air, menjadi instrumen untuk menerjemahkan arah kebijakan makro ke dalam intervensi yang lebih konkret, terarah, dan terukur.

Dalam rangka memastikan sebelas FP dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang lebih konkret, RKP Tahun 2027 menjabarkannya lebih lanjut ke dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Melalui klaster PKPN, intervensi pembangunan lintas sektor diarahkan agar lebih terintegrasi, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan tahunan. Dalam RKP Tahun 2027, PKPN terhimpun dalam delapan klaster, yaitu (1) kedaulatan pangan; (2) kemandirian energi dan air; (3) pendidikan; (4) kesehatan; (5) penurunan kemiskinan; (6) hilirisasi dan industrialisasi; (7) infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; serta (8) ekonomi kerakyatan dan desa. Adapun delapan klaster tersebut didukung oleh penguatan aspek pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Kedelapan klaster beserta pendukungnya ini memberikan dukungan terhadap sebelas FP.

Dengan demikian, PKPN berperan sebagai simpul konsolidasi kebijakan lintas sektor yang menyinergikan berbagai intervensi untuk mendukung pencapaian subtema RKP Tahun 2027.

Sasaran pembangunan nasional tersebut diturunkan dari sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan dan memperhitungkan dinamika pembangunan yang terjadi. Sasaran pembangunan nasional menjadi panduan untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, dan memerlukan sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, sehingga prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 4.2.

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sumber : PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2026

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Tabel 4.3.
Kegiatan Prioritas Utama

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1.	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
Prioritas Nasional 2	2.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah
	4.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatera Selatan
	5.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan
	6.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya
	7.	Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)
	8.	Pembangunan pangan hewani
	9.	Pembangunan pangan lokal dan nabati
	10.	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
	11.	Peningkatan penyediaan energi
	12.	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi
	13.	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
	14.	Konservasi sumberdaya air
	15.	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
	16.	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
	17.	Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa
	18.	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
	19.	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya
	20.	Pengelolaan susut dan sisa pangan
	21.	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	22.	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
	23.	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
	24.	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
	25.	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	26.	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	27.	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
	28.	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
	29.	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta Prambanan
	30.	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena
	31.	Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba
	32.	Percepatan pembangunan destinasi prioritas labuhan Bajo
	33.	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim
	34.	Pengembangan koperasi sektor produksi
Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	35.	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
	36.	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
	37.	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
	38.	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	39.	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
	40.	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
	41.	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
	42.	Penurunan kematian ibu dan anak
	43.	Pencegahan dan penurunan stunting
	44.	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	45.	Penuntasan TBC
	46.	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	47.	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	48.	Eliminasi penyakit kusta & *Schistosomiasis*
	49.	Investasi pelayanan kesehatan primer
	50.	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
	51.	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
	52.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya
	53.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi
	54.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	55.	Pengembangan hilirisasi Nikel
	56.	Pengembangan hilirisasi Tembaga
	57.	Pengembangan hilirisasi Bauksit
	58.	Pengembangan hilirisasi Timah
	59.	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit
	60.	Pengembangan hilirisasi Kelapa
	61.	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut
	62.	Pengembangan hilirisasi Kimia
	63.	Pengembangan industri semikonduktor
	64.	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
	65.	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja
	66.	Pengembangan industri dirgantara
	67.	Pengembangan KEK Sei Mangkei
	68.	Pengembangan KIT Batang
	69.	Pengembangan KI Weda Bay
Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	70.	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
	71.	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
	72.	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
	73.	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahahan ke Ibu Kota Nusantara
	74.	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
	75.	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
Prioritas Nasional 7	76.	Pencegahan tindak pidana korupsi

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan	77.	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja ASN
	78.	Transformasi digital layanan publik prioritas
	79.	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
	80.	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak
Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	81.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	82.	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
	83.	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

Sumber : PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2026

Selain kegiatan prioritas utama, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 juga perlu memperhatikan proyek strategis nasional dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Proyek strategis nasional disusun dan ditetapkan sebagai langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. Proyek strategis nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak siginifikan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya program prioritas presiden Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan daya saing nasional, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Proyek strategis nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran pembangunan nasional ang memerlukan dukungan dari pemerintah. PSN merupakan proyek yang memiliki nilai strategis tinggi dalam meningkatkan daya saing nasional, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional merupakan klasifikasi atas program kerja prioritas nasional atau kumpulan program kerja pemerintah sebagai implementasi prioritas nasional yang dilaksanakan kementerian dan lembaga nonkementerian (K/L) dengan dukungan pemerintah daerah sesuai direktif presiden untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, dan sinkronisasi baik dalam pengambilan keputusan maupun operasionalisasinya. Pelaksanaan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional memerlukan dukungan dan sinergi pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk mengoptimalkan pencapaiannya. Program kerja prioritas nasional dalam 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional dimaksud, antara lain :

Tabel 4.4.
Daftar Program Kerja Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional
Prioritas Nasional 4	FP : Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Dan Inovasi	Makan Bergizi Gratis (MBG) Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
		Makan Bergizi Gratis (MBG) Anak Sekolah
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas
		Sekolah Garuda Baru, Sekolah Garuda Transformasi
		Sekolah Rakyat
		Rumah Sakit *Upgrade*
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		Penuntasan Tuberkolosis
		Digitalisasi Pendidikan (Papan Interaktif Digital)
		Studio Guru
		Bantuan Perlengkapan Sekolah
		Lulusan SMK *Go Global*
		Universitas Baru: *Medical University* berbasis STEMM
		Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional
		Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)
		Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan
Prioritas Nasional 6	FP: Stimulus Untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat	PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi
		PRO-KESRA Penduduk Berusaha dan Bekerja
		Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		Gerakan ASRI: Penggantian Atap Seng Menjadi Genteng
		Program 3 Juta Rumah
Prioritas Nasional 8		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera
Prioritas Nasional 3	FP: Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola	Pusat Data Nasional (*Enabler*)
Prioritas Nasional 7	FP: Regulasi dan Hukum	Pemberantasan Judi Online (*Enabler*)
		Pemberantasan Narkoba (*Enabler*)
		Pemberantasan Penyelundupan (*Enabler*)
Prioritas Nasional 4		Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui PP Tunas
Prioritas Nasional 3	FP: Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	Elektrifikasi Desa
Prioritas Nasional 6		Percepatan Pembangunan Daerah 3T
Prioritas Nasional 3		Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional
Prioritas Nasional 2	FP: Industri Nasional	Gerakan ASRI: Pengendalian Sampah Terpadu
		Pengelolaan Sampah menjadi PSEL
Prioritas Nasional 5		Konversi Unit Motor BBM ke Motor Listrik
		Mobil Nasional
		Motor NasionaL
		Pengembangan Industri Semikonduktor
		Ekosistem Industri Kedirgantaraan
Prioritas Nasional 2	FP: Hilirisasi SDA Strategis	Kawasan sentra industri garam nasional
Prioritas Nasional 5		Hilirisasi Industri Strategis
Prioritas Nasional 2	FP: Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Mandatori biodiesel 50 persen (B50)
		Mandatori bioetanol 20 persen (E20)
		Program PLTS 100 GW
		PLTA Skala Besar Terintegrasi
		Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)
		Pengembangan kawasan pangan terintegrasi
		Pengembangan Kawasan Perkebunan
		Giant Sea Wall
		Kampung Nelayan Merah Putih
		Revitalisasi Tambak Nila Salin
		Modeling dan Replikasi Tambak Udang Teritegrasi
		Budidaya Ikan Darat Tematik
		Kapal Ikan Modern
		Peningkatan produksi daging, susu, dan telur

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional
		Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi
		Eksplorasi Blok Migas Baru
		Optimalisasi Sumur Minyak Masyarakat
		Optimalisasi Lifting Sumur Minyak Tua
		Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas)
		Small Scale Green Modular Refinery and Storage (Deployable Mass Model)
		Kompor Listrik untuk Rumah Tangga
		Swasembada Air
		Gerakan ASRI: Penghijauan

Sumber : PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2026

Proyek Strategis Nasional di rancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak siginifikan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya program prioritas presiden Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan nasional dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah wajib memprioritaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Daftar Proyek Strategis Nasional dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional. PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional yang diakomodir dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional yang dilaksanakan tahun 2027, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib:

1. Mengintegrasikan pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional yang berlokasi di wilayahnya ke dalam dokumen RKPD Tahun 2027 sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.
2. Memastikan sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan daerah yang mendukung penyelesaian PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.
3. Memberikan dukungan fasilitasi, seperti penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan sosial, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder dalam rangka kelancaran pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah juga diharapkan mengoptimalkan peran PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional dalam mendorong penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal, sehingga memberikan dampak nyata

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus memuat strategi dan langkah-langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan 8 (Delapan) Kluster Program Kerja Prioritas Nasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan RKPD Tahun 2027, juga memperhatikan keselarasan kinerja pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Keselarasan dimaksud mencakup hal sebagai berikut :

1. Prioritas Kebijakan Mandatori

   Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027, perlu mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Prioritas kebijakan mandatori dimaksud menyangkut bidang pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik.

   Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027, untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai subkegiatannya.

   Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik, berkaitan dengan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, termasuk operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan nfrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

   Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Pelayanan Publik dijelaskan sebagaimana berikut.

   a. Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan

      1) Dasar Hukum

         a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
         b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
         c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
         d) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
         e) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

f) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
g) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda;
h) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
i) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Prasarana Satuan Pendidikan (PAUD hingga Menengah), Pembangunan SMA Unggul Garuda, serta Digitalisasi Pembelajaran.

2) Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

a) Mendukung pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan;
b) Mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di satuan pendidikan;
c) Mendukung pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan;
d) Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah;
e) Mendukung program sekolah nasional terintegratif;
f) Pengembangan anak usia dini holistik integratif;
g) Mendukung pelaksanaan program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
h) Penguatan kemampuan literasi, numerasi, sains, teknologi, pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial;
i) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
j) Penguatan pendidikan karakter, dengan penerapan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat dan budaya sekolah aman dan nyaman, didukung dengan penguatan Bimbingan Konseling;
k) Pemenuhan, distribusi dan redistribusi, serta profesionalisme, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
l) Mendukung pelaksanaan budaya antikorupsi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di satuan pendidikan.
m) Pembinaan terhadap perpustakaan umum, khusus dan perpustakaan sekolah, dalam bentuk layanan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) baik sarana prasarana, akses, pengadaan buku bacaan untuk pojok baca, taman bacaan masyarakat, perpustakaan kabupaten/kota dan perpustakaan desa, serta layanan peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia perpustakaan.

b. Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

1) Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
   (1) Pasal 141 Ayat (1) Pemda menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintah Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pembangunan.
   (2) Pasal 147 Ayat (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

2) Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Kebijakan Mandatori Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2027 antara lain sebagai berikut :

a) Penguatan tata kelola air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang berorientasi pada berkelanjutan.
b) Perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah, termasuk pemicuan, pemilahan dan pengurangan yang terintegrasi sistem serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna serta optimalisasi TPST dan memastikan offtaker hasil olahan sampah.
c) Peningkatan ketahanan air dan percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui konservasi, pengendalian daya rusak air, pengelolaan drainase untuk mengurangi risiko genangan maupun banjir, pendayagunaan sumber daya air berkelanjutan dan sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
d) Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemantapan jalan, penetapan fungsi jalan, kelas jalan dan penyusunan rencana umum jalan.
e) Mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
f) Meningkatkan kualitas konstruksi dengan standar efisiensi, keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur.
g) Peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan antara lain terminal, pelabuhan penyeberangan, fasilitas angkutan umum, prasarana keselamatan lalu lintas, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya.

2. Dukungan terhadap Pro-SN dan Tematik Pembangunan

Program Strategis Nasional (Pro-SN) adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ro-SN diarahkan untuk mendorong ercepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, Pro-SN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui programprogram yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien.

Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Pro-SN bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan Pro-SN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (Pro-SN):

Tabel 4.5.
Program Strategis Nasional (Pro-SN)

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
1.	Pengentasan Kemiskinan	1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksetrim 2. Sekolah Rakyat 3. Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan) 2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian 3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/*Food Estate*) 5. Pangan Akuatik 6. Kampung Nelayan Merah Putih
3.	Kesehatan untuk semua	1. Pencegahan dan Penurunan *Stunting* 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 3. Jaminan Kesehatan Nasional 4. Penuntasan TBC 5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota 6. Makan Bergizi Gratis

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi 2. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 3. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan) 5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Sumber : PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyatakan komitmen penuh dalam mendukung Program Strategis Nasional, diantaranya:

1. Program Pengentasan Kemiskinan, dengan kegiatan berupa Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Sekolah Rakyat dan Pembangunan 3 Juta Rumah, didukung oleh Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
2. Program Ketahanan Pangan, dengan kegiatan Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan), Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (sawah/lumbung pangan/*food estate*), pangan akuatik dan kampung nelayang merah putih, didukung oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, serta Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
3. Program Kesehatan untuk Semua, dengan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, jaminan kesehatan nasional, penuntasan TBC, pembangunan Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten/Kota dan Makan Bergizi Gratis, didukung Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
4. Program Perluasa Akses Pendidikan, dengan kegiatan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran, didukung oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
5. Program Pertumbuhan Ekonomi, dengan kegiatan pengendalian inflasi, optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, industrialisasi dan hilirisasi (investasi, lapangan pekerjaan) serta pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah, didukung oleh Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan Bidang Industri, Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah dan Urusan Keuangan.

Adapun progress pelaksanaan ProSN berupa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih da Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
   KDKMP di Kabupaten Karanganyar saat ini telah terbentuk sebanyak 177 KDKMP yang tersebar di 17 kecamatan, dengan rincian 88 gerai telah selesai dibangun, 61 gerai masih proses pembangunan dan 28 gerai belum dibangun.
2. Makanan Bergizi Gratis (MBG)
   Untuk pelaksanaan program MBG di Kabupaten Karanganyar telah terbentuk sebanyak 135 SPPG, dengan rincian statusnya 95 unit sudah beroperasional, 9 unit belum operasional dan 31 unit masih dalam proses pembangunan, dengan penerima total manfaat sebanyak 260.966 orang.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Pada Tahun 2027 di Provinsi Jawa Tengah merupakan tahap **"Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah"** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun kedua ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu **"Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi".** Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut antara lain:

1. peningkatan dan percepatan kinerja produktivitas sektor-sektor pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata;
4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
5. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata;
6. penguatan integrasi antar destinasi wisata;
7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata;
8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata;
9. city *beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan;
10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang- Yogyakarta-Surakarta;
11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan *halal value chain*, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital;
12. penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif;
13. peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa;

14. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
15. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
16. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
17. penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal;
18. revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri;
19. penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis project integratif dan lintas;
20. penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan *Memorandum of Agreement* (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal;
21. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/internasional, serta penguatan SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya;
22. penguatan *event* olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan;
23. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan;
24. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
25. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kedua **"Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah"** ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:
    a. peningkatan kinerja pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif;
    b. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
    c. pengembangan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
    d. peningkatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi;

e. pengembangan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
f. peningkatan kualitas manajemen ASN dengan pengembangan manajemen kinerja dan talenta disertai *reward and punishment* yang berkeadilan;
g. pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi disertai dengan penguatan nilai integritas;
h. peningkatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
i. peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi;
j. penguatan kualitas analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, jaringan dokumentasi hukum, serta kapasitas penyusunan produk hukum;
k. peningkatan layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
l. peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
m. penguatan kelembagaan agar lebih efektif;
n. peningkatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
o. penguatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan pembangunan daerah;
p. peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemetaan daerah rawan, penegakan produk hukum daerah serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga trantibum;
q. peningkatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
r. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
s. peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
t. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
u. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila;
v. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan kriminalisme;
w. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
x. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
y. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
z. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:
    a. peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal;
    b. peningkatan kontribusi sektor perdagangan dengan efisiensi distribusi dan stabilitas harga;
    c. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis inovasi;
    d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
    e. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
    f. peningkatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice;*
    g. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
    h. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;
    i. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya konektivitas antar destinasi wisata unggulan) dan kewilayahan;
    j. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
    k. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
    l. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
    m. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta lembaga adat desa;
    n. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
    o. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
    p. pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati;
    q. peningkatan produktivitas komoditi sumberdaya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan;
    r. peningkatan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
    s. peningkatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
    t. inisiasi penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup;
    u. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku;
    v. peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
    w. peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung kawasan pariwisata);
    x. akselerasi dan sinergi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;

y. peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
z. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
aa. peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik;
bb. peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
cc. peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
dd. penguatan infrastruktur hijau dan penerapan *zero waste tourism* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan;
ee. peningkatan Integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral melalui penyusunan dokumen SPPR;
ff. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
gg. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
hh. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
ii. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
jj. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
kk. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
ll. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter, dengan fokus pada:
   a. peningkatan kompetensi siswa SMK, keahlian guru SMK berbasis industri serta revitalisasi alat praktik kejuruan;
   b. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah blankspot, penguatan kerjasama pemerintah-swasta, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
   c. peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi dan digital, STEAM, kualitas pengajaran guru dan pembelajaran siswa, serta pengelolaan SMK Boarding dan Semi Boarding;
   d. peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi;
   e. penguatan tata kelola pendidikan berorientasi kepemimpinan instruksional dan berbasis telaah/analisis;
   f. pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan lanjutan;
   g. pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi;
   h. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
   i. peningkatan cakupan kepesertaan aktif;
   j. pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
   k. pemerataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan;
   l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;

m. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
n. peningkatan kualitas data dan informasi kebudayaan;
o. peningkatan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan;
p. peningkatan kualitas SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
q. pengembangan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan;
r. peningkatan kualitas prasarana sarana kebudayaan;
s. peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan;
t. perluasan literasi melalui pelibatan pemangku kepentingan;
u. mengoptimalkan akuisisi arsip secara tematis;
v. peningkatan partisipasi pemuda melalui wirausaha muda kreatif dan inovatif;
w. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
x. peningkatan pembangunan berbasis gender;
y. peningkatan ketahanan keluarga;
z. pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi dan perluasan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2027 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2027 yaitu sebagai berikut :
1. Tingkat Kemiskinan, sebesar 8,51 - 8,17%;
2. Indeks Reformasi Birokrasi, sebesar 92,50;
3. Indeks Integritas Nasional, sebesar 82,25;
4. Indeks Demokrasi Indonesia, sebesar 86,80 - 90,22;
5. Otonomi Fiskal Daerah, sebesar 66,80%;
6. Pertumbuhan Ekonomi, sebesar 5,30 - 7,00%;
7. Indeks Modal Manusia, sebesar 0,63;
8. Tingkat Pengangguran Terbuka, sebesar 4,65 - 4,08%;.

4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2027

Arah kebijakan tahun 2027 adalah ***Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing.*** Prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2027 sebagai berikut:

1. **Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif,** dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro dalam mendorong perekonomian daerah dan mengembangan ekonomi syariah
   b. Pengembangan sentra dan klaster industri kecil dalam meningkatkan produksi yang mampu mendorong perekonomian yang semakin berdaya saing, membuka pasar baru untuk produk potensi daerah baik antar wilayah maupun internasional,
   c. Peningkatan kualitas petani dalam mengimplementasikan

hilirasasi pertanian dan moderinsasi pertanian, memperkuat petani milineal, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendorong keaneragaman pangan, keamanan pangan dalam menuju ketahanan pangan. Peningkatan kualitas sumberdaya alam yang mampu mendorong daya tampung air. Mendorong perwujudan fortifikasi pangan. Menjamin kelancaran pupuk bagi petani dan mendorong penggunaan pupuk organik dalam mendukung ekonomi hijau

d. Peningkatkan kapasitas pengelola wisata untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, memperkuat jejaring dengan kabupaten sekitar dalam meningkatkan kunjungan.
e. Mengembangkan digitalisasi pelayanan investasi dalam Mall Pelayanan Publik dan mengembangkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Pengembangan keterampilan tenaga kerja dengan memperkuat pelatihan dan link and match dunia pendidikan dan usaha

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu (1) meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja, dengan indikator kinerjanya **Pertumbuhan Ekonomi** dan (2) meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan, dengan indikator kinerjanya **Indeks Ketahanan Pangan**. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

a. Program pelayanan izin usaha Simpan Pinjam
b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
f. Program Pemberdayaan UMKM
g. Program Pengembangan UMKM
h. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
i. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
j. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
k. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
l. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
m. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
n. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
o. Program Pengembangan Ekspor
p. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
q. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
r. Program Perencanaan Tenaga Kerja
s. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
t. Program Penempatan Tenaga Kerja
u. Program Hubungan Industrial
v. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
w. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
x. Program Penanganan Kerawanan Pangan
y. Program Pengawasan Keamanan Pangan
z. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

aa. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
bb. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
cc. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
dd. Program Penyuluhan Pertanian
ee. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
ff. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
gg. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
hh. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
ii. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
jj. Program Pemasaran Pariwisata
kk. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
ll. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
mm. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
nn. Program Promosi Penanaman Modal
oo. Program Pelayanan Penanaman Modal
pp. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal
qq. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2. **Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,** dengan fokus:
   a. Penguatan daya saing SDM dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan PAUD, SD, SMP melalui pemerataan, peningkatan kompetensi pendidik, dan wajib belajar 13 tahun
   b. Optimalisasi digitalisasi pembelajaran.
   c. Implementasi pendidikan inklusif.
   d. Penguatan pendidikan karakter.
   e. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ahli pengetahuan budaya tradisional.
   f. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam bidang pengetahuan kebudayaan tradisional.
   g. Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan, dalam pembangunan SDM.
   h. Penguatan budaya literasi dan inovasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan, akses buku digital, serta riset dan inovasi.
   i. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dengan memperkuat layanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan mendorong GERMAS.
   j. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan upaya promotif dan preventif berbasis keluarga, masyarakat, dan desa.
   k. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan melalui percepatan penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), peningkatan akses sanitasi layak, dan pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan.
   l. Memperkuat kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui pengembangan Desa Siaga Aktif Mandiri serta optimalisasi peran kader kesehatan dan lembaga kemasyarakatan.
   m. Meningkatkan keamanan pangan masyarakat melalui pengawasan, pembinaan, dan pemenuhan standar higiene

sanitasi pada tempat pengolahan makanan, industri rumah tangga pangan, dan sarana penyedia pangan.

n. Meningkatkan pemerataan, kompetensi, dan pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan primer maupun rujukan.
o. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan yang terintegrasi, merata, dan berorientasi pada mutu pelayanan kepada masyarakat.
p. Penguatan daya saing yang inklusif melalui penguatan penanganan kemiskinan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial yang integratif dan kolaboratif.
q. Memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak, serta mendorong perwujudan kabupaten layak anak.
r. Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan sehingga mampu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dalam indek perencanaan daerah dan komponen dokumen perencanaan dalam SAKIP
s. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN, terpenuhinya sistem karir sesuai dengan sistem merit. Penguatan pelayanan ASN berbasis digital
t. Peningkatan persepsi anti korupsi, peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas APIP
u. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan berbasis digital, penguatan pengelolaan asset dan penyelematan asset daerah yang mampu mendorong pendapatan daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan mendorong pendapatan asli daerah
v. Peningkatan pemerintahan berbasis teknologi, penguatan satu data dan keamanan informasi
w. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan dalam implementasi transformasi birokrasi.
x. Peningkatan SDM yang memiliki inovasi, riset dalam membangun tata kelola pemerintahan.
y. Peningkatan kualitas reformasi hukum dan sinergitas legeslatif dan eksekutif.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu (1) meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola, dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP, Maturitas SPIP dan Indeks Pelayanan Publik**; (2) meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil, dengan indikator kinerja **Indeks Pembangunan Manusia**, dan (3) meningkatnya riset dan inovasi, dengan indikator kinerja **Kapabilitas Inovasi.** Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan
b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
d. Program Pengembangan Kebudayaan
e. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
f. Program Pembinaan Sejarah
g. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
h. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

i. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
j. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
k. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
l. Program Pengendalian Penduduk
m. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
n. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
o. Program Pengaurusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
p. Program Perlindungan Perempuan
q. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
r. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
s. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
t. Program Perlindungan Khusus Anak
u. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
v. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
w. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
x. Program Pembinaan Perpustakaan
y. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
z. Program Riset Dan Inovasi Daerah
aa. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
bb. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
cc. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
dd. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
ee. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
ff. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
gg. Program Perekonomian dan Pembangunan
hh. Program Penyelenggaraan Pengawasan
ii. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
jj. Program Kepegawaian Daerah
kk. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
ll. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
mm. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
nn. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
oo. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
pp. Program Pengelolaan Arsip
qq. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
rr. Program Pendaftaran Penduduk
ss. Program Pencatatan Sipil
tt. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
uu. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
vv. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
ww. Program penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
xx. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
yy. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
zz. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
aaa. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. **Memperkuat kondusivitas wilayah,** dengan fokus:

a. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, peningkatan penegakkan peraturan daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran
b. Penguatan harmonisasi, peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama serta demokratisasi
c. Peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana dengan memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana dan mendorong desa untuk berpartisipasi penanganan bencana.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi, dengan indikator kinerjanya yaitu **Angka Kriminalitas.** Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
c. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
d. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
e. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
f. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
g. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

4. **Mempercepat kualitas infrastruktur,** dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas jalan, peningkatan ruas pedestrian, penertiban penggunaan trotoar. Peningkatan kualitas jalan ibu kota Kabupaten
   b. Meningkatkan keselamatan angkutan umum dalam rangka mengurangi kecelakaan. Mengembangkan rintisan angkutan massal yang nyaman dan aman.
   c. Pemenuhan layanan air minum layak, meningkatkan sambungan perpipaan pada perkotaan dan merintis air minum aman
   d. Pemenuhan sanitasi layak, peningkatan kualitas IPLT menuju sanitasi aman.
   e. Peningkatkan penanganan kumuh, pemenuhan PSU dikawasan perumahan dan Kawasan permukinan, dan pemenuhan SPM perumahan
   f. Peningkatan penataan Kota dan perbatasan menjadi kota yang indah, nyaman dan bersih
   g. Penataan dan pemberdayaan desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, pengembangan teknologi tepat guna serta merintis digitalisasi pembangunan desa

   Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, dengan indikator kinerjanya yaitu **Indeks Gini**. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Jalan
b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
f. Program Penataan Bangunan Gedung
g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
h. Program Pengembangan Perumahan
i. Program Kawasan Permukiman
j. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
k. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
l. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
m. Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
n. Program Penatagunaan Tanah
o. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
p. Program Pemberdayaan Sosial
q. Program Rehabilitasi Sosial
r. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
s. Program Penanganan Bencana
t. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
u. Program Penataan Desa
v. Program Peningkatan Kerjasama Desa
w. Program Administrasi Pemerintahan Desa
x. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
y. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

5. **Memperkuat kualitas lingkungan hidup,** dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan meningkatkan pelayanan penanganan kasus pencemaran,
   b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup.

   Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator kinerja **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:
   a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
   d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
   e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
i. Program Pengelolaan Persampahan
j. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
k. Program Penanggulangan Bencana

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 88,00;
2. Nilai SAKIP sebesar 71,50;
3. Maturitas SPIP sebesar 3,310;
4. Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,57;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 72,49;
6. Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,88;
7. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 79,95;
8. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,15%;
9. Indeks Ketahanan Pangan sebesar 76,30; dan
10. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50%.

Sebagai gambaran keselarasan konsistensi prioritas pembangunan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten, tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6.

Gambaran Keselarasan Konsistensi Prioritas Pembangunan Antara Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Untuk Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Tahun 2027		
Nasional	**Provinsi Jawa Tengah**	**Kabupaten Karanganyar**
Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).	*Prioritas Daerah 1* Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	*Prioritas Daerah 3* Memperkuat kondusivitas wilayah
Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	*Prioritas Daerah 1* Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah *Prioritas Daerah 2* Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	*Prioritas Daerah 1* Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif
Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	*Prioritas Daerah 2* Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	*Prioritas Daerah 1* Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif *Prioritas Daerah 4* Mempercepat kualitas infrastruktur

Prioritas Pembangunan Tahun 2027		
Nasional	**Provinsi Jawa Tengah**	**Kabupaten Karanganyar**
Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generai Z) dan penyandang disabilitas.	*Prioritas Daerah 3* Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	*Prioritas Daerah 2* Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	*Prioritas Daerah 2* Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	*Prioritas Daerah 1* Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif
Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	*Prioritas Daerah 2* Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	*Prioritas Daerah 4* Mempercepat kualitas infrastruktur
Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	*Prioritas Daerah 1* Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	*Prioritas Daerah 2* Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur	*Prioritas Daerah 1* Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah *Prioritas Daerah 2* Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	*Prioritas Daerah 5* Memperkuat kualitas lingkungan hidup

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar, 2026

Adapun gambaran keselarasan kebijakan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Nasional ditunjukkan dengan melalui dukungan pelaksanaan program sebagai berikut.

Tabel 4.7.

Dukungan Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional melalui Pelaksanaan Program Pembangunan di Tahun 2027

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
1	***Prioritas Nasional 1*** **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi**	***Prioritas Daerah 3*** **Memperkuat kondusivitas wilayah**	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (BAKESBANGPOL),**	**31.842.169.177,00**	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
	dan Hak Asasi Manusia (HAM)		**TRANTIBUMLINMAS (SATPOLPP)**		
			Urusan Pemerintahan Umum (BAKESBANGPOL)	*16.798.359.424,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Umum (BAKESBANGPOL)*
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.089.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.834.119.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.363.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	173.007.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.092.600.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.246.633.424,00	
			Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	*15.043.809.753,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (SATPOLPP)*
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.166.884.500,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	140.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.736.925.253,00	
2	***Prioritas Nasional 2*** **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru**	***Prioritas Daerah 1*** **Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif**	**URUSAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN, PUPR (PROGRAM PENGELOLAAN SDA)**	**28.858.625.278,00**	
			Urusan Pangan	*100.000.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan*
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	-	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	75.000.000,00	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	5.000.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.000.000,00	
			Urusan Kelautan Dan Perikanan	*218.000.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan*
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	181.000.000,00	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.000.000,00	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.000.000,00	
			Urusan Pertanian	*22.082.875.278,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian*
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.188.000.000,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.315.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	66.000.000,00	
			ROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	60.000.000,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	63.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.390.875.278,00	
			Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	*6.457.750.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang*
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.457.750.000,00	
3	***Prioritas Nasional 3*** **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi**	***Prioritas Daerah 1*** **Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif**	**URUSAN TENAGA KERJA, PARIWISATA, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PENANAMAN MODAL**	**28.655.269.177,00**	
			Urusan Tenaga Kerja	*1.998.237.950,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja*
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.355.329.450,00	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	394.908.500,00	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	248.000.000,00	
			Urusan Pariwisata	*9.089.389.813,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata*
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	613.000.000,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.375.150.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	14.850.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	560.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.526.389.813,00	
			Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	*9.702.128.259,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan*

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10.000.000,00	*Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah*
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	40.000.000,00	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	35.000.000,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	450.000.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	600.000.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	290.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.509.500.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.767.628.259,00	
			Urusan Penanaman Modal	*7.865.513.155,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal*
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	120.000.000,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	135.000.000,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	70.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	10.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.525.513.155,00	
		Prioritas Daerah 4 **Mempercepat kualitas infrastruktur**	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN, DAN PERHUBUNGAN**	**179.364.537.115,00**	
			Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	*138.052.472.102,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang*
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.765.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	750.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	263.000.000,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	950.000.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	110.204.127.950,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000,00	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	465.100.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.555.244.152,00	
			Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	*1.098.000.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman*
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	120.000.000,00	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	385.000.000,00	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	573.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.000.000,00	
			Urusan Pertanahan	*258.900.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan*
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	258.900.000,00	
			Urusan Perhubungan	*39.955.165.013,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan*
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	31.470.782.420,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.484.382.593,00	
4	***Prioritas Nasional 4*** **Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generai Z) dan penyandang disabilitas**	***Prioritas Daerah 2*** **Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**	**URUSAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, PERPUSTAKAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**1.145.041.694.731,00**	
			Urusan Pendidikan	*733.943.996.542,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan*
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	139.332.126.050,00	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	12.516.550,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	594.599.353.942,00	
			Urusan Kebudayaan	*2.030.000.000,00*	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	800.000.000,00	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan*
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.130.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.000.000,00	
			Urusan Kesehatan	*376.685.997.884,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan*
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	74.247.467.100,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	588.400.000,00	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	392.549.900,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	350.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	301.107.580.884,00	
			Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	*7.948.440.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana*
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	115.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.928.015.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.905.425.000,00	
			Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	*6.219.196.464,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	170.000.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	160.851.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	5.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10.000.000,00	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100.000.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	219.036.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.554.309.464,00	
			Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	*12.857.100.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga*
			PROGRAM PENGEMBANGAN	1.287.500.000,00	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
			KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.719.600.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	850.000.000,00	
			Urusan Perpustakaan	*4.956.963.841,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan*
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	671.375.000,00	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	23.625.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.261.963.841,00	
			Urusan Penelitian Dan Pengembangan	*400.000.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan*
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	400.000.000,00	
5	***Prioritas Nasional 5*** **Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**	***Prioritas Daerah 1*** **Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif**	**URUSAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**16.830.308.540,00**	
			Urusan Perindustrian	*505.000.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian*
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	442.750.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	8.250.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	54.000.000,00	
			Urusan Perdagangan	*16.320.308.540,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan*
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	14.450.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.569.197.500,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	76.351.500,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	129.000.000,00	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	250.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.281.309.540,00	
			Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral	*5.000.000*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral*
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	5.000.000	
6	***Prioritas Nasional 6*** **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,**	***Prioritas Daerah 4*** **Mempercepat kualitas infrastruktur**	**URUSAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, TRANSMIGRASI**	**24.732.153.729,00**	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan		*Urusan Sosial*	*6.007.703.813,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial*
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	54.000.000,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	434.000.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	984.705.000,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	93.345.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	24.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.417.653.813,00	
			Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	*18.714.449.916,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa*
			PROGRAM PENATAAN DESA	62.500.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	65.000.000,00	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.562.192.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.320.700.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.704.057.916,00	
			Urusan Transmigrasi	*10.000.000*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Transmigrasi*
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	10.000.000	
7	***Prioritas Nasional 7*** **Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan**	***Prioritas Daerah 2*** **Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**	**URUSAN PERENCANAAN, KEUANGAN, UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH), UNSUR PENGAWASAN (INSPEKTORAT DAERAH), KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN, KEARSIPAN, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD), KEWILAYAHAN**	**509.318.210.730,00**	
			Urusan Perencanaan	*7.024.778.846,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan*
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	500.000.000,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	700.000.000,00	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.824.778.846,00	
			Urusan Keuangan	*291.834.679.140,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan*
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	237.939.209.432,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	831.475.672,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.292.195.410,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.771.798.626,00	
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	*52.014.462.835,00*	*Sekretariat Daerah*
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.480.000.000,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	11.209.271.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.325.191.835,00	
			Unsur Pengawasan (Inspektorat Daerah)	*11.905.195.426,00*	*Inspektorat Daerah*
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.894.169.000,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.105.831.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.905.195.426,00	
			Urusan Kepegawaian	*7.161.423.287,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian*
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	571.050.900,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.590.372.387,00	
			Urusan Pendidikan Dan Pelatihan	*656.959.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan*
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	656.959.000,00	
			Urusan Komunikasi Dan Informatika	*7.451.264.453,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika*
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	659.086.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.180.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.612.178.453,00	
			Urusan Statistik	*10.000.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Statistik*
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	10.000.000,00	
			Urusan Persandian	*50.000.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Persandian*
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	50.000.000,00	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
			PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
			Urusan Kearsipan	*103.529.000,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan*
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	103.529.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	
			Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	*5.645.114.288,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	962.005.500,00	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	50.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	31.940.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.060.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.593.108.788,00	
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	*53.386.578.415,00*	*Sekretariat DPRD*
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.136.838.850,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.249.739.565,00	
			Urusan Kewilayahan	*72.074.226.040,00*	*Kecamatan*
			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	183.158.540,00	
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.830.006.070,00	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	236.955.700,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.309.236.950,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	421.025.700,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.093.843.080,00	
8	***Prioritas Nasional 8*** **Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur**	***Prioritas Daerah 5*** **Memperkuat kualitas lingkungan hidup**	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, TRANTIBUMLINMAS (BPBD)**	**18.689.883.327,00**	
			Urusan Lingkungan Hidup	*14.272.764.107,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup*
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	60.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	90.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	30.000.000,00	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)	Pelaksana
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	25.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.860.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.192.764.107,00	
			Urusan Kehutanan	-	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kehutanan*
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	
			Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)	*4.417.119.220,00*	*Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)*
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.124.204.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.292.915.220,00	
TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM TAHUN 2027					

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026 (diolah)

Rekapitulasi dukungan anggaran belanja program tahun 2027 untuk masing-masing prioritas nasional, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.8.

Dukungan Anggaran Belanja Program Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	ANGGARAN (Rp)
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	31.842.169.177,00
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	28.858.625.278,00
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	208.019.806.292,00
4.	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generai Z) dan penyandang disabilitas	1.145.041.694.731,00

NO	PRIORITAS NASIONAL	ANGGARAN (Rp)
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	16.830.308.540,00
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	24.732.153.729,00
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	509.318.210.730,00
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur	18.689.883.327,00
TOTAL ANGGARAN (Rp)		**1.983.332.851.804,00**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026 (diolah)

Adapun progress pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.9.

Progress Pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tahun 2025

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
1.	Jalan Halus Bebas Jeglongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Pada tahun 2025 pencapaian kinerja untuk kemantapan jalan sebesar 83,40% (727 km) dari total panjang jalan kabupaten (877,33km) • Jalan kondisi baik : 67,53% (588,40 km) • Jalan kondisi sedang : 15,91% (138,61 km) • Jalan kondisi rusak ringan : 8,20% (71,41 km) • Jalan kondisi rusak berat : 6,87% (59,05 km) • Jalan yang masih perlu dipelihara dan ditingkatkan = jalan kondisi sedang, jalan kondisi rusak ringan dan jalan kondisi rusak berat = 30,88% 9269,07 km) • Catatan realisasi kinerja : - Alokasi anggaran Alokasi anggaran Rp.2,8 M yang berada dari DAU untuk pembangunan 8 Ruas jalan lingkungan. - Anggaran dari DAU Rp.68 M untuk rehabililtasi 12 ruas jalan Kabupaten. - Alokasi dari anggaran bankeu Rp 32 M untuk 8 ruas jalan dan 1 pembangunan jembatan. - Alokasi anggaran Rp. 2 M untuk pemeliharaan berkala 7 Ruas jalan kabupaten - dan yang terakhir Rp. 9 M untuk pemeliharaan rutin yang tersebar di UPT Kecamatan	Total Pagu Rp.172.942.642.261 anggaran terserap Rp.159.979.191.287	Tahun 2026 DPUPR menetapkan target 83,5 % kemantapan jalan, dengan kondisi 269,07 km jalan yang perlu ditingkatkan dan dipelihara pada tahun 2025. Alokasi anggaran yang ada diharapkan dapat menurunkan kerusakan jalan sekitar 5% dari total jalan yang masih perlu ditingkatkan dan dipelihara.	- Alokasi anggaran Pembangunan Jalan (DAU) Rp. 16.155.000.000 - Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) Rp.48.846.000.000 - Rekonstruksi Jalan (Opsen kendaraan) Rp.10.402.747.300 - Pemeliharaan Rutin Jalan Rp. 4.141.522.300 - Pelebaran jalan menuju standar (bankeu prov) Rp.19.000.000.000 TOTAL = Rp 100.474.051.600,00	Target kemantapan jalan di akhir RPJMD adalah 85,5 %	Capaian s/d 2025 dari akhir RPJMD = 97,5%

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
2.	Serba gratis cukup dengan KTP (berobat, sekolah, PBB, paket sembako) dan internet gratis di setiap desa	Dinas Kesehatan	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3: 12 Dokumen	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3: Rp52.690.461.600	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3: 12 Dokumen	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3: Rp. 40.814.340.000 (kebutuhan sampai dengan Desember Tahun 2026 sebesar Rp. 58.707.180.000)		
			Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS (Pelayanan Puskesmas Gratis: 12 Dokumen	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS (Pelayanan Puskesmas Gratis: Rp700.000.000,00	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS (Pelayanan Puskesmas Gratis: 12 Dokumen	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS (Pelayanan Puskesmas Gratis: Rp400.000.000,00		
		Dinas Sosial	3.080 Paket	Rp. 616.000.000	3.600 Paket	Rp. 720.000.000		
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Sertifikasi ISO 27001:2022 tentang Sistem manajemen Keamanan Informasi sebagai syarat pemenuhan akses data NIK Karanganyar ke Ditjen Dukcapil	Rp. 100.000.000	Pemutakhiran data NIK, Integrasi layanan berbasis NIK, kolaborasi lintas layanan	Rp. 120.000.000		
			Fasilitasi internet gratis di 3 titik pos ronda di lokasi sbb: 1. DGS AO WMS Kecamatan Jaten Alamat : Kecamatan Jaten Jati RT. 01/ RW. 07, Jati Ordinat : -7.595766, 110.919876 BW : 20 Mbps SSID : Sesarengan_Mbangun_Karanganyar 2. DGS AO WMS Kecamatan Karanganyar	Rp. 4.500.000				Tahun 2026 pada DPA penetapan belum direncanakan untuk penambahan titik terfasilitasi internet gratis baru karena keterbatasan anggaran.

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
			Alamat : Kecamatan Karanganyar Bejen RT. 04/ RW. 11, Bejen Ordinat : -7.602387, 110.973343 BW : 20 Mbps 3. DGS AO WMS Kecamatan Tasikmadu Alamat : Kecamatan Tasikmadu Cakrukku RT. 02/ RW. 07, Karangmojo Ordinat : -7.5700003, 110.9193897 BW : 20 Mbps SSID : Sesarengan_Mbangun_Karanganyar					Diharapkan pada Anggaran Perubahan untuk bisa diberikan anggaran.
3.	Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dalam mendukung Program Unggulan Bupati pupuk murah dan mudah, Dispertan PP melaksanakan pengawasan/pendampingan pupuk bersubsidi melalui monitoring lapangan ke kios/penyalur (KPL dan PPTS) di berbagai kecamatan yang dilakukan bertahap pada Januari 2026 dan dilanjutkan pada september-november 2025. Monitoring dan pembinaan kepada PPTS guna memastikan bahwa di PPTS : 1. Stok pupuk bersubsidi semua jenis selalu tersedia, sehingga petani selalu dapat menebus sewaktu waktu 2. Harga jual nya benar-benar sesuai HET yg ditetapkan pemerintah/ tidak di atas nya. 3. Penguatan pelaksanaan dilakukan melalui rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi TA 2025 (12 Feb 2025) serta rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi 2025 sekaligus updating RDKK 2026 (29 Sept 2025).	Rp. 18.340.000	Fasilitasi dan Pelaksanaan Program Pupuk Direncanakan untuk penyaluran pupuk NPK sebanyak 1.300 kg kepada sasaran program sebagai bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan sarana produksi. Target Kinerja : Kelompok Tani dengan komoditas Ubi Manohara (Hibah Pupuk) Pengawasan Pupuk Bersubsidi direncanakan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi lebih tertib dan tepat sasaran	Rp. 50.000.000 Rp. 12.000.000		

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
			Realisasi Kinerja : 17 Kecamatan yang diawasi Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2025 : Urea Alokasi : 21.000.000 kg Penyaluran : 83,73% NPK Alokasi : 18.400.000 kg Penyaluran : 97,44% Organik Alokasi : 2.600.000 kg Penyaluran : 90,17% ZA Alokasi : 46.250 kg Penyaluran : 43,92%		melalui kegiatan koordinasi/rapat serta monitoring lapangan. Target Kinerja : 17 Kecamatan (Pengawasan di lakukan pada PPTS) Alokasi Pupuk untuk 2026 (awal) : Urea : 18.800.000 kg NPK : 18400.000 kg Organik : 2.500.000 kg ZA : 59.800 kg			
			Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (IATD) / Sumur Pertanian dan Irigasi Perpipaan Realisasi kinerja kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani dilaksanakan pada 19 kelompok tani, terdiri dari : - 18 kelompok tani untuk pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (IATD) - 1 kelompok tani untuk pembangunan irigasi perpipaan	Rp. 2.897.510.000	Pembangunan Sumur Irigasi Pertanian direncanakan untuk menghasilkan 14 unit prasarana pertanian melalui pembangunan sumur irigasi pada kelompok tani di beberapa kecamatan.	Rp. 2.213.000.000,00		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Capaian irigasi berfungsi dengan baik 76,5% atau 360.591 m, yang terdiri dari 74% irigasi kondisi baik dan 2,5% kondisi rusak ringan Realisasi Kinerja : Rehabilitasi jaringan irigasi yang berasal dari DAK 5 D.I dan dari DAU 8 D.I	Total pagu Rp 7.016.278.220 terserap Rp 6.165.998.000	TARGET 2026 : 77 % jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik , atau 362.947 m jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik	Tahun 2026 mendapatkan 1 paket pekerjaan yang berasal dari DAU, sedangkan dari bankeu terdapat 8 paket dengan total anggran Rp.3 M	79,00%	

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
4.	Lapangan kerja semakin luas dan UMKM mendapatkan fasilitas	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Fasilitasi Pelatihan Kerja : • Peserta Pelatihan dari APBD = 364 orang • Peserta Pelatihan dari APBN = 96 orang • Peserta Pelatihan Seleksi Magang Jepang = 150 orang TOTAL peserta pelatihan yang difasilitasi = 610 orang Rincian: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 1. Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sumber Dana DBHCHT dengan Output 184 Orang Yang meliputi Pelatihan : a. Pelatihan Menjahit (3 Paket) b. Pelatihan Pengelasan SMAW 1 G (2 Paket) c. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue (3 Paket) d. Pelatihan Fotografi (1 Paket) e. Pelatihan Tukang Bangunan Gedung (1 Paket) f. Pelatihan Barber (2 Paket) g. Pelatihan Barista (2 Paket h. Pelatihan Service Sepda Motor Injeksi (2 Paket) i. Pelatihan Sablon (2 Paket) 2. Pelatihan dan Penempatan Kerja Industri yang terdiri dari 4 perusahaan dengan output 100 orang	Rp. 1.862.445.000	1. Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sumber Dana DBHCHT dengan Output 100 Orang yang meliputi : a.Program Kejuruan Teknik las (10 Orang) b.Program Kejuruan Otomotif (10 Orang) c.Program Kejuruan Menjahit (10 Oang) d.Program Kejuruan Procesing (Barista) (10 Orang) e.Aneka Kejuruan (60 Orang) 2. Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Las pembuatan Tribun Knock Down Sumber Dana APBD 2026 dengan Otput 10 Orang 3. Pelatihan Daerah Magang Jepang Sember Dana APBD dengan Target Aouput 140 Peserta yang merupakan peserta lolos seleksi di tahun 2025 4. Pelaksanaan Seleksi Magang Jepang Tahun 2026 Sember Dana	Rp. 1.185.192.500		1 tahun kurang lebih 200-300 org yang difasilitasi pelatihan. Di tahun 2025 ada 346 orang

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
			3. Pelatihan Persiapan Seleksi Magang Jepang (pra-smart) dengan Output Peserta 10 Orang 4. Seleksi Magang Jepang dengan target output sebesar 140 Orang 5. Pelatihan Kerja Sama Baznas dengan Output 80 Orang dengan Program Pelatihan : a. Pelatihan Make Up Artis (60 Orang) b. Pelatihan Z-Cofee (10 Orang) c. Pelatihan Z-Auto (10 Orang) 6. Pelatihan *Tailor Made Training* Sumber Dana APBN BPVP Surakarta dengan Output 48 Orang dengan Program Pelatihan : a. Pelatihan Ms. Office Dasar Untuk Pengurus KDKMP (32 Orang) b. Pelatihan Comercial Cookery untuk Juru Masak SPPG 7. Pelatihan *Project Based Learning* dengan sumber Anggaran APBN BPVP Surakarta dengan Output 48 orang yang meliputi : a. Pelatihan Pembuatan Konten Visual Untuk Media Sosial (16 Orang) b. Pelatihan Modifikasi Sistem Kendali Jarak Jauh dan Penambahan Aksesoris Kendaraan Ringan (16 Orang) c. Pelatihan Automa*tic Irigation System* (16 Orang)		APB dengan target output 160 orang 5. Pelatihan Vokasi Nasional Sumber Dana APBN BPVP Surakarta dengan output 112 Orang yang meliputi : a. Pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi (16 Orang) b. Pelatihan Pengelasan GMAW 3G (16 Orang) c. Pelatihan Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Injeksi (16 Orang) d. Pelatihan Desain Grafis Muda (16 Orang) e. Pelatihan Operator Sewing (16 Orang) f. Pelatihan Barista (16 Orang) g. Pelatihan Barber (16 Orang)			
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (memfasilitasi pencari kerja)	Rp. 7.997.400	-	-	24 laporan	tahun 2026 tidak ada kegiatan ini karena tidak ada anggaran

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
			Job Fair/Bursa Kerja (memfasilitasi 1500 pencaker)	Rp. 34.800.000	*Job Fair*/Bursa Kerja (memfasilitasi pencaker CPMI, 10 Perusahaan CPMI)	30.000.000	50 orang	
			Pelatihan IKM (Industri Kecil Menengah) : 1. Sentra Kerajinan Bambu (20 peserta) 2. Bimbingan teknis persiapan kegiatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja program perluasan lapangan kerja industri dan sosialisasi kegiatan Solo Great Sale wilayah Karanganyar untuk IKM sejumlah 20 peserta. 3. Pelatihan Melinting Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan dana alokasi DBHCHT untuk 163 orang buruh pabrik rokok, pelaksanaan selama 5 hari dengan materi softskill dan produktivitas serta teknik dan 4. Workshop Srawung Budaya Kreatif IKM Sentra Batik sejumlah 30 peserta.	Rp. 477.027.050				
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil. Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Sosialisasi Kemudahan Perizinan Usaha dengan mensosialisasikan proses pembuatan NIB kepada pelaku usaha UMKM, dilaksanakan bulan Februari 2025 dengan peserta sebanyak 30 orang pelaku UMKM	Rp. 15.000.000	Sosialisasi Kemudahan Perizinan Usaha dengan mensosialisasikan proses pembuatan NIB kepada pelaku usaha UMKM, direncanakan peserta sebanyak 20 orang pelaku UMKM	Rp. 11.000.000		
			Sosialisasi Pemberdayaan Kemitraan Usaha dengan tujuan memberikan informasi kepada UMKM bagaimana caranya bisa akses dan masuk ke minimarket modern, dilaksanakan bulan Februari 2025 dengan peserta sebanyak 40 orang pelaku UMKM	Rp. 20.000.000	Sosialisasi Pemberdayaan Kemitraan Usaha, direncanakan peserta sebanyak 20 orang pelaku UMKM	Rp. 11.000.000		

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
			Pelatihan Penggunaan dan Pemanfaatan AI, dilaksanakan bulan Oktober 2025 selama 2 hari dengan peserta sebanyak 30 orang pelaku UMKM	Rp. 37.000.000	Pelatihan Manajemen Keuangan, direncanakan peserta sebanyak 20 orang pelaku UMKM	Rp. 54.000.000		
5.	Modal usaha 10-30 juta setiap Karang Taruna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	NIHIL					
6.	Bantuan keuangan 100 juta setiap desa per tahun	BKD	Difokuskan pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan yang merata ke seluruh pelosok Karanganyar, memastikan jalan halus bebas jeglongan	-	Sementara difokuskan pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan yang merata ke seluruh pelosok Karanganyar, memastikan jalan halus bebas jeglongan	-	162 Desa x Rp 100.000.000,00 = 16.200.000.000,00 per Tahun (2027 s.d. 2030)	
7.	Insentif untuk guru ngaji, linmas, penjaga tempat ibadah, kader Posyandu dan guru	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	400 Orang Guru Pengajar Keagamaan Non Formal dan Penjaga Rumah Ibadah. @ Rp. 600.000,00	Rp 240.000.000,00	1. Penjaga Rumah Ibadah sebanyak : 3.362 orang @ Rp. 600.000,00 2. Insentif Guru Keagamaan sebanyak : 1.706 orang @ Rp. 1.200.000,00	1. Rp. 2.017.200.000,00 2. Rp. 2.047.200.000,00 Jumlah kebutuhan anggaran Rp. 4.064.400,000,00		
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	* Tersalurnya Insentif Kader Posyandu utk 9022 orang, * Terlaksananya pembinaan Kader Posyandu di 177 Desa dan Kelurahan, * Terlaksananya Rakornas Posyandu di Jakarta	Posyandu : Rp. 5.493.600.000,-	* Penyaluran Insentif KaderPosyandu sejumlah 9386 orang Kader, * Pelaksanaan Lomba Kader Posyandu di 17 Kec, * Pelaksanaan Rakor dan Evaluasi Posyandu	Posyandu : Rp. 5.715.000.000,- Kekurangan anggaran Rp. 195.000.000,-	* Tersalurnya Insentif Kader Posyandu, * Terlaksananya pembinaan Kader Posyandu di Desa dan Kelurahan, * Terlaksananya Rakornas	

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
							Posyandu, *Terlaksananya Rakor dan Evaluasi Posyandu di Kab. Karanganyar, Terlaksananya Lomba Kader Posyandu di Kab Karanyanyar	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Insentif Guru Swasta Sekolah Dasar (SD)	-	722	Rp. 722.000.000		
			Insentif Guru Swasta Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	422	Rp. 422.000.000		
			Insentif Guru Swasta PAUD (/TK/KB/STS/TPA)	Pagu Rp 1.350.000 Volume 1.350 Realisasi Rp 788.000.000 Volume 788	1.440	Rp. 1.440.000.000		
			Insentif Guru Swasta Tutor PKBM	-	225	Rp. 225.000.000		

Sumber: Perangkat Daerah Pengampu Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

Progres Implementasi 35 Program Delegasi Gubernur Jawa Tengah ke Kabupaten/Kota, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.10.

Implementasi 35 Program Delegasi Gubernur Ke Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Karanganyar

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
1	PP	Melahirkan Pemerintahan *yang Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;	Peningkatan TPP ASN	TPP ASN telah diskemakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Rp. 384.412.901.059	Rp. 323.379.729.914	Rp. 350.861.037.440
			Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah *)	Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah telah diskemakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Rp. 15.703.036.094	Rp. 15.242.792.983	Rp. 15.185.029.710

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
			~~Peningkatan Gaji Perangkat Desa~~ Pemberian Penghargaan kepada Perangkat Desa Berprestasi	NIHIL			
			Pendidikan dan Pelatihan ASN	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintah umum	3.000 orang	2.600 orang	2.700 orang
			Retret penyelarasan visi misi dan program Kepala daerah	NIHIL			
			Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa	Rapat Sosialisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100 orang	150 orang	100 orang
			Beasiswa kepada ASN	NIHIL			
2	PP	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Mengembangkan wisata ramah muslim	Tahun 2025 pendataan, di 2026 sosialisasi dan monev	0 unit	2 unit	0 unit
			Penyusunan lembaga masyarakat ekonomi syariah	Konversi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Karanganyar (Perseroda)	0 BUMD	1 BUMD	0 BUMD
			Penyusunan Regulasi Daerah terkait ekosistem ekonomi syariah	Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Karanganyar (Perseroda)	0 SK	1 SK	0 SK
3	PP	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Pembangunan lumbung kesejahteraan				
			Produk unggulan go internasional bekerjasama dengan diaspora	Produk Unggulan berupa makanan (Permen Jahe) sudah ekspor ke Luar Negeri, namun belum bekerja sama dengan diaspora	0 Produk	1 Produk	0 Produk
			Sistem Informasi Desa (SID)				
			Penguatan tim tanggap bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	6 Desa	2 Desa	6 Desa
4	PP	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Verifikasi dan Validasi dalam rangka penyiapan Database Rumah Layak Huni	Pendataan BNBA Rumah Tidak Layak Huni, verifikasi BNBA Rumah Tidak Layak Huni, pembangunan PK Rumah Tidak Layak Huni	10 unit	10 unit	582 unit
			Penyiapan Data Intervensi Teknis *Backlog* Perumahan	Pendataan dan intervensi *Backlog*	17.000 BNBA	20.000 BNBA	17.811 BNBA
5	PP		Menyusun Regulasi Daerah terkait kerukunan umat beragama	Pembentukan Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian)	0 desa/kelurahan	5 desa/kelurahan	0 desa/kelurahan

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
		Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Peningakatan toleransi beragama kepada Masyarakat	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman tentang Gratifikasi	-	15 kelurahan 15 desa	-
7	PI	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)	Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas	NIHIL			
			Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan	NIHIL			
8	PI	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	Pemetaan sasaran desa wisata		20 unit	2 unit	30 unit
			Penambahan anggaran				
9	PI	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	Pembentukan Kelembagaan	NIHIL			
10	PA	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK	Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman tentang Gratifikasi, Mengoptimalkan Peran UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) dan anti korupsi; e-learning penyelenggaraan program pengendalian gratifikasi	0 OPD	46 OPD	0 OPD
			Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman tentang Gratifikasi	-	15 kelurahan 15 desa	-
			Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar SMA, SMK	NIHIL			
11	PA	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Spesialis keliling setiap desa	Speling terintegrasi dg CKG	45 desa	47 desa	23 desa
			Pelayanan kesehatan keliling	Pelayanan kesehatan keliling	177 desa/kelurahan	177 desa/kelurahan	177 desa/kelurahan
			Puskesmas pembantu setiap desa	Pembangunan Puskemsmas Pembantu	56 Pustu	56 Pustu	56 Pustu
			Pelayanan kesehatan setiap desa	Pelayanan kesehatan setiap desa	144 PKD	144 PKD	144 PKD
12	PA	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Penetapan SMA/SMK Unggulan di Jawa Tengah	NIHIL			
13	PA	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan	Sosialisasi Kecamatan Berdaya dan RPPA ke 35 Kabupaten/Kota	Melaksanakan sosialisasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	4 kecamatan	2 kecamatan	4 kecamatan
			Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan	Melaksanakan fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	4 kecamatan	2 kecamatan	4 kecamatan
			Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas	NIHIL			
14	PA	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penyediaan 1 Dokter di setiap puskesmas pembantu	Menyediakan Dokter di Puskesmas Pembantu	0	1 (dokter piket)	1 (dokter piket)

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
			Penyediaan 1 bidan di setiap puskesmas pembantu	Menyediakan Bidan di Puskesmas Pembantu	0	63 (bidan definitif), 6 (bidan piket)	63 (bidan definitif), 6 (bidan piket)
15	PA	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	3 orang	3 orang	2 orang
			Penyusunan Kebijakan Perlindungan Hukum Guru	NIHIL			
16	PA	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Melaksanakan sosialisasi kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal			
17	PA	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal	Memfasilitasi dan mengoordinasikan keikutsertaan juru sembelih halal dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi melalui kolaborasi lintas sektor	0 orang	0 orang	3 orang
			Standarisasi rumah pemotongan hewan	Mengusulkan dukungan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk rehabilitasi Rumah Potong Hewan guna mendukung pemenuhan persyaratan teknis dan standardisasi RPH	0 unit	3 unit	0 unit
18	PA	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan dan pendampingan untuk menciptakan 1.000 Konten kreator di Desa wisata				
19	PA	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM	Subsidi Modal kepada UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)	Belum tersedianya basis data UMKM yang valid, mutakhir, dan terintegrasi hingga tingkat RT, sehingga penetapan sasaran penerima subsidi belum dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel.			
			Pendampingan Usaha dan Promosi UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM yang bekerjasama dengan Diaspora				
20	PA	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	RTH Perkotaan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3.982,55 Ha	3.982,75 Ha	3.982,55 Ha
			RTH Perdesaan	belum ada program pembangunan RTH di perdesaan			
21	PA	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;	Penguatan koperasi desa	KDKMP ke depan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenkop RI selain itu jg memantau perkembangan pelaksanaan operasional di Koperasi masing2.	177 desa/kelurahan	177 desa/kelurahan	177 desa/kelurahan
22	PA	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;	Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih	Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih berprestasi	30 medali	30 medali	60 medali

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
23	PA	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Pemetaan dan Penetapan Sekolah Percontohan Inklusi	Pemetaan Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terdapat siswa berkebutuhan khusus	-	37 satuan pendidikan	-
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas	Jumlah Peningkatan SDM Pendidikan Inklusi Bagi Guru	-	1 kegiatan	-
24	PA	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;	Identifikasi wilayah rawan bencana di Jawa Tengah	Pemantauan setiap hari melalui jaringan relawan (grup WA)			
			Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi	Tidak ada pengadaan Early Warning System (EWS) hingga tahun 2030			
25	PT	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Penyediaan benih, pengembangan pakan mandiri, bantuan sarpras, polikultur nila-udang				
			Pengembangan pakan mandiri				
26	PT	BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah)	Lapak Bumdes	NIHIL			
			Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes dan Fasilitasi Pembentukan Badan Hukum untuk Bumdes	Sosialisasi ke seluruh BUMDes se Kabupaten Karanganyar	162 desa	162 desa	
27	PT	Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana - masyarakat	Pelatihan untuk relawan dan pegawai BPBD, tapi belum ada sertifikasi (per tahun 50 orang dengan pelatihan yang berbeda-beda)	50 orang	35 orang	50 orang
28	PT	Cek Kesehatan Gratis	Balita Baru Lahir	Pelaksanaan CKG di setiap desa	10.298 bayi	9.078 bayi	3.953 bayi
			Balita dan Pra Sekolah	Pelaksanaan CKG di setiap desa	77.106 anak	43.797 anak	36.994 anak
			Anak Sekolah (SD)	Pelaksanaan CKG di setiap desa	149.018 anak	106.619 anak	121.640 anak
			Dewasa	Pelaksanaan CKG di setiap desa	564.985 orang	263.531 orang	123.916 orang
			Lansia	Pelaksanaan CKG di setiap desa	144.381 orang	86.757 orang	34.595 orang
29	PT	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Balai Rehabilitasi Sosial	NIHIL			
			Penambahan identitas bagi kaum marginal	NIHIL			
30	PT	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;	Menyusun Regulasi Daerah terkait Energi Baru Terbarukan				
31	PT	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir	NIHIL			
32	PT	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	Pemetaan Potensi Produk Unggulan di Jawa Tengah				
			Promosi produk unggulan di Jawa Tengah				

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
33	PT	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	200 orang	300 orang
			Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
			Hibah FKUB	Hibah FKUB	Rp. 250.000.000	NA	Rp. 250.000.000
34	PT	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pemberian insentif diberikan kepada 2 orang kader di pustu (@Rp500000 per 3 bulan)	Tidak Ada (Honor Kader Posyandu tidak ada yang spesifik untuk Kader Pustu)			
			Dukungan kelembagaan Posyandu 6 Bidang SPM (Bimtek dan Rapat Koordinasi TP Posyandu)	Insentif Honor Kader Posyandu	9.022 orang	9.386 orang	9.022 orangg
35	PT	Peningkatan kualitas hidup lansia	Peningkatan fasilitasi Posyandu lansia	Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu, Orientasi Pembinaan Posyandu bidang Kesehatan bagi tenaga Kesehatan Puskesmas	-	204 orang	-
			Pemeriksaan kesehatan	Pelaksanaan CKG di setiap desa	144.381 orang	86.757 orang	34.595 orang
			Pemberian sumplemen dan pemenuhan gizi	Posyandu Lansia	144.381 orang	86.757 orang	34.595 orang

Sumber: Perangkat Daerah Pengampu 35 Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota, 2026

4.3. Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027, selain itu juga dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2027 dan pembangunan tingkat provinsi yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ditunjukkan dengan keselarasan tema pembangunan, prioritas, sasaran dan indikator sasaran, target pengembangan wilayah, dan dukungan program prioritas daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk melakukan intervensi terhadap pengembangan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, diharapkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat mendukung kinerja 4 (empat) capaian makro Provinsi Jawa Tengah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Persentase Penduduk Miskin, dengan target sebagai berikut

Tabel 4.11.

Keselarasan Indikator Makro Pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Karanganyar dengan Indikator Makro di RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2027

Indikator	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kab. Karanganyar	Target di RKPD Kab. Karanganyar
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,87-7,72	6,15
2. Tingkat Kemiskinan (%)	7,52-7,04	7,50
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,90-2,34	2,90
4. Indeks Pembangunan Manusia	79,95	79,95

Sumber : Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Dalam rangka mendukung tercapainya tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yaitu "**Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi**", maka titik berat pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 adalah Pariwisata Berkelanjutan dan Pengembangan Ekonomi Syariah.

Strategi mewujudkan Pariwisata yang Berkelanjutan, antara lain :

1. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan
2. Penguatan promosi pariwisata berbasis digital
3. Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata
4. Penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital
5. Peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata
6. Penguatan integrasi antar destinasi wisata
7. Penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata
8. Penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata
9. Penguatan kompetensi guru serta siswa, revitalisasi kurikulum SMK bidang pariwisata dan ekonomi syariah
10. Peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan budaya kesenian, penguatan event olahraga pariwisata

11. Peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah

Adapun Program Daerah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru
2. Pengembangan Destinasi Wisata alam, Budaya dan Religi berdasarkan potensi wilayah
3. Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening
4. Festival memancing terbesar di Asia
5. Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa
6. Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal
7. Pelatihan 1000 Konten Kreator Desa Wisata
8. Harmoni tradisi dan ekonomi lestari
9. Penghargaan kepada budayawan lokal
10. SMK *Digital Tourism Creators*

Strategi Mewujudkan Ekonomi Syariah, antara lain :

1. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan *halal value chain*, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan penguatan ekonomi digital
2. Penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif

Adapun Program Prioritas Daerah Pengembangan Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
2. Pengembangan pariwisata ramah muslim melalui fasilitas peningkatan layanan;
3. *Penguatan halal* value chain, melalui peningkatan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan, serta pendampingan sertifikasi halal;
4. Peningkatan peran perbankan syariah melalui pendekatan terintegrasi;
5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana Ziswaf;
6. Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan sekolah pelopor ekonomi syariah (SPES)
7. Pemberdayaan ekonomi pesantren melalui penguatan koperasi pondok pesantren dan *santri-preneur* (santri pengusaha)
8. *Vocational Digital Syariah Hub*
9. Kamp kreatif Vokasional Halal bidang kuliner dan fashion
10. Pusat keunggulan vokasi pariwisata halal

Keselarasan Indikator Tematik Pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Karanganyar dengan Indikator Tematik di RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2027, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.12.
Keselarasan Indikator Tematik Pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Karanganyar dengan Indikator Tematik di RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2027

Indikator	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kab. Karanganyar	Target di RKPD Kab. Karanganyar
PARIWISATA		
1. Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) Alam yang dikembangkan (unit)	5	5
2. Jumlah Desa/kampung Wisata Baru yang Dicanangkan (unit)	30	30
3. Jumlah Usaha Pariwisata Ramah Muslim yang Ditetapkan (unit)	5	5
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.554.822	1.554.822
5. Jumlah Konten Kreator yang Dilatih (orang)	15	15
EKONOMI SYARIAH		
6. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (produk)	20.210	20.210
7. Jumlah RPH/RPU yang Tersertifikasi halal (unit)	3	4
8. Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang Dihimpun (rupiah)	27.073.472.057	27.073.472.057
9. Jumlah Penyaluran Pembiayaan Syariah (rupiah)	193 M	193 M
10. Jumlah Tukang Jagal yang Tersertifikat Halal (orang)	2	2

Sumber : Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tabel 4.13.
Dukungan program/kegiatan/aktivitas riil yang mendukung capaian indikator kinerja tematik (indikator Pariwisata dan Ekonomi Syariah

No	Indikator Tematik	Program/Kegiatan	Aktivitas Riil
1.	Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) Alam yang dikembangkan (Unit)	• Sertifikasi • Pelatihan	• Melakukan sertifikasi / uji kopetensi bagi pelaku wisata alam (sertifikasi dari BNSP) • Pelatihan bagi pengelola daya tarik wisata alam
2.	Jumlah Desa / Kampung Wisata Baru yang dicanangkan (Unit)	• Sosialisasi Pencanangan	• Melakukan sosialisasi (bersurat) ke Kecamatan mengenai usulan pencanangan menjadi desa/kampung wisata
3.	Jumlah Usaha pariwisata Ramah Muslim yang ditetapkankan	• Pendataan	• Melakukan pendataan usaha pariwisata yang berpotensi sebagai usaha pariwisata ramah muslim
4.	Jumlah Kunjungan Wisata	• Rekap secara berkala • Sosialisasi • Apresiasi	• Melakukan perekapan secara berkala untuk usaha pariwisata yang telah melaporkan kunjungannya • Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata secara rutin melaporkan kunjungannya • Memberikan apresiasi kepada pelaku usaha pariwisata (berupa sertifikiat) yang rutin mengirimkan kunjungan wisatawannya

No	Indikator Tematik	Program/Kegiatan	Aktivitas Riil
5.	Jumlah Konten Kreator yang dilatih	• Pelatihan • Pembinaan	• Pelatihan Digital Marketing (2026) • Pelatihan penggunaan aplikasi AI • Pembinaan Duta Wisata (2025)

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2026

Tabel 4.14.
Keselarasan Sasaran Pembangunan antara Kabupaten Karanganyar dan Nasional Tahun 2027

Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Target Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027
Sasaran Daerah 1 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	- Nilai SAKIP - Maturitas SPIP - Indeks Pelayanan Publik	71,50 3,310 4,57	Sasaran Nasional 2 Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	- *Global Power Index* meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029)	NA
Sasaran Daerah 3 Meningkatnya kondisivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	- Angka Kriminalitas	168 per 10.000 penduduk			
Sasaran Daerah 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,49	Sasaran Nasional 5 Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	- Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029) - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029)	39,57 76,84

Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Target Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027
Sasaran Daerah 4 Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil Sasaran Daerah 5 Meningkatnya riset dan inovasi	- Indeks Pembangunan Manusia - Kapabilitas inovasi	79,95 3,22	Sasaran Nasional 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	- Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)	0.575
Sasaran Daerah 6 Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja Sasaran Daerah 7 Meningkatnya ketersediaan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	- Pertumbuhan Ekonomi - Indeks Ketahanan Pangan	6,15 76,30	Sasaran Nasional 1 Meningkatnya pendapatan per kapita menuju setara Negara Maju	- Pertumbuhan Ekonomi dari 5,05% (2024) menjadi 5,3% (2025) DAN MENUJU 8% (2029) - GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USDN (2029 - Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029) - Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)	5,90-7,50 5.900-5.990

Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Target Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027
Sasaran Daerah 8 Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan	- Indeks Gini	0,336	Sasaran Nasional 3 Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	- Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5% (2029), serta - Kemiskinan ekstrem (2,15PPP) hingga <0,5% (2026) - Rasio gini turun dari 0,379 (Maret 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029) - Kontribusi PRDB KTI (Kawasan Timur Indonesia) meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)	6,00-6,50 0 0,362-0,367 NA

Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal RKP Tahun 2027, 2026

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja Tahun 2027

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas PAUD, kualitas Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama melalui peningkatan kualitas ruang kelas, kualitas laboratorium, bantuan pembiayaan pendidikan SD dan SMP, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan, dam peningkatan sertifikasi kompetensi guru. Program ini diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan kepemilikan perizinan pendidikan swasta.

Tabel 5.1.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,90	594.599.353.942	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	89,97	139.332.126.050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah Dasar	%	99,46		
	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	%	98,82		
	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan	%	64,00		
3. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Swasta yang Disetujui	%	90,80	12.516.550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH				**731.067.988.542**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

b. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dalam SPM Kesehatan, peningkatan gizi masyarakat terutama pada balita stunting dan wasting, peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan kesehatan lansia dan usia produktif, peningkatan pemeriksaan kesehatan di semua usia penduduk, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular diprioritaskan pada TBC, HIV, Hipertensi, Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa, DBD, Cancer, dan Malaria. Peningkatan penanganan kegawatdaruratan, peningkatan keaktifan pemilik jaminan pemeliharaan kesehatan, Pada program ini difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan kompetensi sumberdaya, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan distribusi pemerataan tenaga kesehatan.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
   Program ini difokuskan pada peningkatan penyediaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas laik sehat pada tempat-tempat umum, serta pemilikan IPRT pada pengolahan makanan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas usaha kesehatan berbasis masyarakat, peningkatan kualitas layanan di Posyandu terintegrasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan advokasi dan KIE serta peningkatan rumah tangga berperilaku hidup sehat dan bersih.

Tabel 5.2.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesehatan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,40	301.107.580.884	Dinas Kesehatan
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan STBM	%	85,00	74.247.467.100	Dinas Kesehatan
	Rasio daya tampung fasilitas kesehatan Rujukan terhadap Jumlah Penduduk	ratio	1,00		
	Indek pencapaian SPM ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, anak sekolah	%	100,00		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	72,00		
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	%	5,00		
	Cakupan penerima pemeriksaan cek kesehatan gratis	%	55,00		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	98,00		
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	80,20		
	Cakupan Angka keberhasilan pengobatan TB	%	88,00		
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	88,00		
	Persentase puskesmas yang sudah melakukan kebijakan aktivitas fisik cukup	%	67,90		
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan teregistrasi	%	100,00	588.400.000	Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1.000 penduduk	2,63		
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.	%	62,00	392.549.900	Dinas Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	84,50		
	Persentase tempat pengelolaan pangan yang memiliki SLHS	%	100,00		
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	38,00	350.000.000	Dinas Kesehatan
JUMLAH				**376.685.997.884**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   Program ini difokuskan pada pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
   Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.
5. Program Penataan Bangunan Gedung
   Program ini difokuskan pada terciptanya tertib penyelenggaraan bangunan yang sesuai dengan fungsi, standar teknis, dan administratif.
6. Program Penyelenggaraan Jalan
   Program ini difokuskan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten.
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   Program ini difokuskan pada penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   Program ini difokuskan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Tabel 5.3.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	23.555.244.152	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	77,50	6.457.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,60	1.765.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,50	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Terbangun	%	35,63	263.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	24,00	950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Persentase Tingkat Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan	%	70,00		
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang perlu ditingkatkan dan dipelihara	%	21,89	110.204.127.950	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	%	85,30	465.100.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
JUMLAH				144.510.222.102	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
   Program ini difokuskan pemenuhan SPM perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar, penataan lingkungan, serta peningkatan aksesibilitas dan keterpaduan antarwilayah permukiman.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
   Program ini difokuskan pada perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh.
4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   Program ini difokuskan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelaku jasa di bidang perumahan dan permukiman. Selain itu program ini mencakup penyediaan layanan sertifikasi tenaga kerja, penetapan kualifikasi dan klasifikasi badan usaha, serta registrasi yang terintegrasi dan transparan.

Tabel 5.4.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	120.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00		
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	69,55	385.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	%	65,65	4573.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	%	28,00	20.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
JUMLAH				1.098.000.000	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Program ini difokuskan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban daerah dengan penegakan Perda.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini difokuskan untuk pencapaian SPM kebakaran.

3. Program Penanggulangan Bencana
   Program ini difokuskan untuk pencapaian SPM Penanggulangan bencana.

Tabel 5.5.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,50	10.736.925.253	Satuan Polisi Pamong Praja
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100,00	4.166.884.500	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00		
	Presentase Linmas yang dibina	%	0,12		
3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15,00	140.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,20	3.292.915.220	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	1.124.204.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
JUMLAH				**19.460.928.973**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

f. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
   Program ini difokuskan untuk meningkatkan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.
2. Program Rehabilitasi Sosial
   Program ini difokuskan untuk pemenuhan SPM Sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   Program ini diarahkan untuk penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin.
4. Program Penanganan Bencana
   Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
   Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan kabupaten.

Tabel 5.6.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Sosial Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,75	4.417.653.813	Dinas Sosial
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100,00	54.000.000	Dinas Sosial
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	434.000.000	Dinas Sosial
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial	%	100,00	984.705.000	Dinas Sosial
	Persentase PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)	%	4,08		
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	93.345.000	Dinas Sosial
6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100,00	24.000.000	Dinas Sosial
JUMLAH				**6.007.703.813**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

5.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel –tabel berikut.

a. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
   Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online, pelayanan antar kerja lintas daerah dan pelaksanaan job fair.
3. Program Hubungan Industrial
   Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak adanya PHK.

Tabel 5.7.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang dilatih	%	36,00	1.355.329.450	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	82,00	394.908.500	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan yang terselesaikan	%	100,00	248.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
JUMLAH				**1.998.237.950**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengaurusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten.
2. Program Perlindungan Perempuan
   Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; serta penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
   Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.
6. Program Perlindungan Khusus Anak
   Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten; serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan.

Tabel 5.8.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,85	5.554.309.464	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasional APBD	%	9,00	170.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	4,17	160.851.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	%	3,90	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak	%	47,61	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kasus kekerasan anak yang dilayani secara komprehensif	%	100,00	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
					Pengendalian Penduduk dan KB
7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 anak	Per 100.000 penduduk	7,27	219.036.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
JUMLAH				**6.219.196.464**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

c. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   Program ini diarahkan untuk pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
   Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rentan pangan.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
   Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pengujian keamanan mutu pangan.

Tabel 5.9.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pangan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi protein perkapita per hari	gram/ kapita/ hari	64,40	75.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Konsumsi energi per kapita per hari	kkal/ kapita/ hari	2202,00		
2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	7,91	5.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah sertifikat ijin edar PSAT yang sudah diterbitkan	sertifikat	198,00	20.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
JUMLAH				**100.000.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

d. Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penatagunaan Tanah
   Program ini difokuskan pada pemanfaatan dan peruntukan tanah secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Tabel 5.10.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanahan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemda yang meimiliki sertifikat	%	55,00	258.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
JUMLAH				**258.900.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

e. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   Program ini difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   Program ini difokuskan untuk pengukuran kualitas udara dan air sesuai baku mutu yang berlaku.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
   Program ini difokuskan untuk melakukan pengukuran dan perbaikan indeks tutupan vegetasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   Program ini difokuskan pada pencegahan pelanggaran izin lingkungan yang telah diterbitkan pemerintah kabupaten.
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
   Program ini difokuskan pada tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pencemaraan lingkungan hidup.
6. Program Pengelolaan Persampahan
   Program ini difokuskan pada pengelolaan sampah secara berkelanjutan mulai dari rumah sampai tempat pembuangan akhir.

Tabel 5.11.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,9	11.192.764.107	Dinas Lingkungan Hidup
2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	100,00	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu (air dan udara)	%	68,90	90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan ruang terbuka hijau	Ha	3.982,95	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	77,80	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
6. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
7. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan sampah	%	4,00	2.860.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
JUMLAH				**14.272.764.107**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk
   Program ini difokuskan pada pencatatan dan perekaman data kependudukan setiap individu untuk menjamin hak identitas dan kepastian hukum.
2. Program Pencatatan Sipil
   Program ini difokuskan pada pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian, untuk kepentingan administrasi negara.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini difokuskan pada pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data kependudukan secara digital untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan akurat.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
   Program ini difokuskan pada penyusunan dan analisis data profil penduduk sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Tabel 5.12.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,55	4.593.108.788	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	%	99,30	962.005.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	69,40		
	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	100,00		
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran	%	99,25	50.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100,00		
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase tertib pelaksanaan pelayanan adminduk di desa/kelurahan seKabupaten Karanganyar	%	40,00	31.940.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dokumen penyajian data kependudukan	Buku	2,00	8.060.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
JUMLAH				**5.645.114.288**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa
   Program ini difokuskan pada penataan wilayah administrasi desa, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
   Program ini difokuskan pada pengembangan dan penguatan kerja sama antardesa, desa dengan pihak ketiga, serta desa dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan, pengarsipan, pelaporan, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
   Program ini difokuskan pada penguatan peran serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal, serta perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa.

Tabel 5.13.
Program dan Perkiraan Pendanaan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,25	6.704.057.916	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	93,80	62.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan Sapras	%	100,00		
3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	%	92,50	65.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki dokumen RPJMDes, APBDes, dan RKPDes yang mendukung pencapaian prioritas daerah	%	100,00	3.562.192.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase desa tertib administrasi	%	100,00		
	Persentase desa memiliki BUMDes	%	98,77		
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina	%	100,00	8.320.700.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase desa dengan infrastuktur baik melalui TMMD	%	100,00		
JUMLAH				**18.714.449.916**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk
   Program ini difokuskan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui perencanaan keluarga dan penyebaran penduduk yang seimbang.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   Program ini difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB untuk mendukung keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan keluarga secara berkelanjutan.

Tabel 5.14.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	4,20	115.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	70,75	2.928.015.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	Persentase Kampung KB Mandiri	%	31,00		
	Kelahiran Tidak Diinginkan	%	9,30		
	Demand Satisfied	%	89,90		
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif	%	94,00	4.905.425.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	Indeks Lansia Berdaya	Angka	57,00		
	Indeks Pengasuhan Remaja	Angka	91,15		
JUMLAH				**7.948.440.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

i. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   Program ini difokuskan pada peningkatan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas serta penyediaan angkutan jalan yang andal dan terjangkau.

Tabel 5.15.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perhubungan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,2	8.484.382.593	Dinas Perhubungan
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	52,20	31.470.782.420	Dinas Perhubungan
	Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik	%	75,35		
	Persentase terminal kondisi baik	%	48,60		
	Persentase kendaraan yang lulus uji KIR	%	85,50		
JUMLAH				**39.955.165.013**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

j. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   Program ini difokuskan pada penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan komunikasi publik untuk membangun partisipasi dan kepercayaan masyarakat.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   Program ini difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan aplikasi digital untuk mendukung layanan pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi.

Tabel 5.16.

Program dan Perkiraan Pendanaan
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	5.612.178.453	Dinas Komunikasi dan Informatika
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Nilai	5,00	659.086.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan Keterpaduan layanan digital pemerintah	Nilai	5,00	1.180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH				**7.451.264.453**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
   Program ini difokuskan pada pemberian kemudahan perizinan usaha simpan pinjam koperasi secara tertib, cepat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini difokuskan pada pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan koperasi.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   Program ini difokuskan pada penilaian kondisi keuangan dan operasional Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perkoperasian.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   Program ini difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi serta perlindungan hukum dan usaha koperasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   Program ini difokuskan pada peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, dan pelatihan guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
7. Program Pengembangan UMKM
   Program ini difokuskan pada fasilitasi penguatan daya saing dan inovasi UMKM agar mampu berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

Tabel 5.17.
Program dan Perkiraan Pendanaan
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,00	3.767.628.259	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	15,00	10.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	35,00	40.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	%	28,85	35.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	%	40,00	450.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	64,90	600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	26,88	290.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	11,67	4.509.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
JUMLAH				**9.702.128.259**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

l. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   Program ini difokuskan pada penciptaan regulasi dan kondisi yang kondusif bagi investor agar tertarik menanamkan modal di daerah.
2. Program Promosi Penanaman Modal
   Program ini difokuskan pada peningkatan daya tarik daerah melalui kegiatan promosi peluang investasi yang difokuskan pada *ready-to-offer projects* di kawasan peruntukan industri kepada calon investor dalam dan luar negeri.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
   Program ini difokuskan pada penyediaan layanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi bagi para investor.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   Program ini difokuskan pada pemantauan dan evaluasi kegiatan investasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan komitmen dan peraturan yang berlaku.
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Program ini difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data investasi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan investasi.

Tabel 5.18.
Program dan Perkiraan Pendanaan
Urusan Penanaman Modal Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,5	7.525.513.155	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	Persentase kebijakan Penanaman Modal yang diterbitkan	%	100,00	120.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti	%	100,00	135.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	%	100,00	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan LKPM	%	54,00	10.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha	%	100,00	5.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
JUMLAH				**7.865.513.155**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

m. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas, kreativitas, dan peran pemuda dalam pembangunan melalui pelatihan, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
   Program ini difokuskan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kebangsaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Tabel 5.19.
Program dan Perkiraan Pendanaan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	45,00	1.287.500.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100,00	10.719.600.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi pramuka yang terlibat dalam pembangunan	%	100,00	850.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
JUMLAH				**12.857.100.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

n. Statistik

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   Program ini difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik sektoral yang akurat dan terpadu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Tabel 5.20.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Statistik Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat kematangan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi	Angka	2,93	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH				**10.000.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

o. Persandian

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
   Program ini difokuskan pada perlindungan dan pengamanan informasi strategis melalui sistem persandian guna menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi pemerintahan.

Tabel 5.21.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Persandian Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan siber	Nilai	3	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH				**50.000.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

p. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
   Program ini difokuskan pada penguatan nilai-nilai budaya lokal dan nasional melalui pelestarian, pemajuan, dan pemanfaatan budaya secara berkelanjutan.
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   Program ini difokuskan pada pelestarian dan pengembangan seni tradisional sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini difokuskan pada perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya agar tetap lestari dan bernilai bagi pendidikan serta pariwisata.

Tabel 5.22.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kebudayaan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	60,00	800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	87,00	1.130.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	60,00	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH				**2.030.000.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

Sebagaimana masalah umum, budaya daerah Kabupaten Karanganyar sebagai sub dari budaya nasional mengalami tekanan keras oleh arus modernisasi, industrialisasi dan globalisasi. Nilai-nilai budaya lokal berhadapan langsung dengan tuntutan pragmatisme, dimana dalam banyak hal praktek kebudayaan akan dilihat dari aspek praktis, efektif dan ekonomis.

Hampir semua objek kebudayaan yang ada di Kabupaten Karanganyar antara lain tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya mulai terkena imbasnya dan terpinggirkan. Ruang-ruang ekspresi untuk beberapa objek kebudayaan tersebut mulai berkurang secara signifikan, demikian juga para praktisinya. Semuanya dikarenakan praktek tradisi-tradisi tersebut mulai ditinggalkan, bahkan beberapa diantaranya langka dan punah. Upaya yang dilakukan guna pemajuan kebudayaan di Kabupaten Karanganyar antara lain:

1. Identifikasi kebutuhan untuk menyusun pedoman pembinaan.
2. Melakukan pemetaan komunitas yang membutuhkan pembinaan.
3. Menyusun pedoman pembinaan terhadap ritus.
4. Inventarisasi dan dokumentasi adat istiadat.
5. Memberikan dukungan bagi komunitas untuk menjaga adat istiadat.

q. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan untuk mendukung literasi, pendidikan, dan akses informasi masyarakat.
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
   Program ini difokuskan pada upaya perlindungan, perawatan, dan digitalisasi koleksi langka serta naskah kuno agar tetap lestari dan dapat diakses oleh generasi mendatang.

Tabel 5.23.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perpustakaan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,2	4.261.963.841	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan penduduk	%	91,00	671.375.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang teridentifikasi	Naskah	7,00	23.625.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
JUMLAH				**4.956.963.841**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

r. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip
   Program ini difokuskan pada pengaturan, penciptaan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip secara sistematis untuk mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 5.24.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kearsipan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	100,00	103.529.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang di kelola dan dilestarikan	%	100,00	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
JUMLAH				**103.529.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

5.1.3. Urusan Pilihan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel tabel berikut.

a. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   Program ini difokuskan pada pengembangan usaha budidaya perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing melalui peningkatan teknologi, sarana, dan kapasitas pelaku usaha.
2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
   Program ini difokuskan pada pengawasan dan monitoring pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan guna menjaga kelestarian serta keberlanjutannya.
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
   Program ini difokuskan pada peningkatan nilai tambah, mutu, dan daya saing hasil perikanan melalui pengolahan yang higienis serta penguatan akses pasar.

Tabel 5.25.

Program dan Perkiraan Pendanaan
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	kg	1.952.890	181.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
2. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan	%	37,50	12.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	%	35,00	25.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
JUMLAH				**218.000.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

b. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   Program ini difokuskan pada pengembangan dan promosi destinasi wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
2. Program Pemasaran Pariwisata
   Program ini difokuskan pada promosi dan pemasaran destinasi wisata secara efektif melalui berbagai media dan kegiatan untuk menarik minat wisatawan.
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
   Program ini difokuskan pada pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI untuk mendukung inovasi dan menciptakan nilai tambah produk kreatif.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong pengembangan berkelanjutan.

Tabel 5.26.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pariwisata Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,25	6.526.389.813	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Tamu wisatawan	Orang	5.900.000	613.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	%	32,08	1.375.150.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	jumlah usaha ekraf yang terdaftar HAKI	Unit	87,00	14.850.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	%	14,80	560.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
JUMLAH				**9.089.389.813**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

c. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   Program ini difokuskan pada penyediaan dan peningkatan kualitas sarana produksi pertanian dan peternakan, seperti benih, pupuk, alat mesin pertanian, serta kegiatan

peningkatan mutu genetik ternak melalui inseminasi buatan (kawin suntik) pada sapi dan kambing/domba, untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   Program ini difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, dan jalan produksi, untuk menunjang kelancaran usaha tani.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   Program ini difokuskan pada pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta jaminan keamanan produk asal hewan bagi kesehatan masyarakat.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   Program ini difokuskan pada mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan terhadap gangguan usaha tani akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, atau perubahan iklim.
5. Program Penyuluhan Pertanian
   Program ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani dan peternak melalui kegiatan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian dan peternakan yang tepat guna, guna mendorong inovasi dan produktivitas usaha.

Tabel 5.27.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanian Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,15	11.390.875.278	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)			9.188.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	1. Padi	Ton	344.039,00		
	2. Jagung	Ton	27.331,00		
	3. Kacang Tanah	Ton	3.220,00		
	4. Ubi Kayu	Ton	74.580,00		
	5. Ubi Jalar	Ton	38.867,00		
	Jumlah Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, Tanaman hias dan tanaman biofarmaka)				
	1. Cabai besar	Kuintal	28.455,00		
	2. Cabai rawit	Kuintal	8.260,00		
	3. Bawang Merah	Kuintal	50.575,00		
	4. Bawang Putih	Kuintal	24.477,00		
	5. Alpukat	Kuintal	96.517,00		
	6. Duku	Kuintal	4.205,00		
	7. Durian	Kuintal	117.200,00		
	8. Jambu Biji	Kuintal	4.240,00		
	9. Pisang	Kuintal	170.290,00		
	10. Tanaman Hias (Krisan)	Buah	1.247.470,00		
	11. Tanaman Biofarmaka (Jahe)	Kuintal	5.746,00		
	Angka produksi komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao)				
	Tembakau	Ton	268,13		
	Kopi	Ton	212,68		
	Teh	Ton	4,90		
	Cengkeh	Ton	45,05		
	Kelapa	Ton	508,47		
	Kakao	Ton	29,32		

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas)				
	1. Ternak Besar (Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau)	Ekor	55.847,00		
	2. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	Ekor	154.724,00		
	3. Ternak Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik)	Ekor	12.671.339,00		
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik	%	28,59	1.315.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-4,17	66.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Tanaman pangan dan hortikultura Pertanian yang Tertangani	%	100,00	60.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	Persentase Bencana perkebunan yang Tertangani	%	100,00		
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	19,00	63.000.000	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
JUMLAH				**22.082.875.278**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
   Program ini difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi daerah.

Tabel 5.28.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Kawasan	2,00	5.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
JUMLAH				**5.000.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

e. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   Program ini difokuskan pada penyederhanaan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pengusaha.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   Program ini difokuskan pada penguatan jaringan distribusi barang dan jasa untuk memastikan kelancaran pasokan dan pemerataan distribusi ke seluruh wilayah.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   Program ini difokuskan pada upaya pengendalian dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
4. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen
   Program ini difokuskan pada pengaturan standar produk dan

layanan serta perlindungan konsumen untuk memastikan kualitas dan keamanan barang/jasa yang beredar di pasar.

5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
   Program ini difokuskan pada peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri melalui promosi dan penguatan daya saing produk lokal.

Tabel 5.29.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perdagangan
Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,30	14.281.309.540	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase penerbitan ijin usaha pedagangan	%	77,00	14.450.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarpras perdagangan sesuai standar (SNI)	%	23,00	1.569.197.500	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100,00	76.351.500	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Ukur Takar Timbang (UTTP) ditera dan tera ulang	%	74,00	129.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasaran	%	79,00	250.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
JUMLAH				**16.320.308.540**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

f. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   Program ini difokuskan pada perencanaan dan pengembangan sektor industri untuk meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, dan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
   Program ini difokuskan pada pengaturan dan pengawasan izin usaha industri di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
   Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi industri untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan transparansi sektor industri.

Tabel 5.30.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perindustrian Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang dibina	Sentra	3	442.750.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	persentase penerbitan izin usaha industri	%	100	8.250.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar SIINAS	%	10,80	54.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
JUMLAH				**505.000.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

g. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
   Program ini difokuskan pada penyediaan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang terencana dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran melalui penyediaan sarana, prasarana, dan peluang ekonomi.

Tabel 5.31.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Transmigrasi Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang terdaftar	KK	2	10.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
JUMLAH				**10.000.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, sebagai berikut.

a. Unsur Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan adil.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
   Program ini difokuskan pada pengembangan sektor ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan daerah.

Tabel 5.32.

Program dan Perkiraan Pendanaan Unsur Sekretariat Daerah Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,10	31.325.191.835	Sekretariat Daerah
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	Angka	99,50	9.480.000.000	Sekretariat Daerah
	Nilai LPPD	nilai	3,63		
	Persentase kebijakan kesra yang diterbitkan	%	100,00		
3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penyerapan APBD	%	94,40	11.209.271.000	Sekretariat Daerah
	ROA (*Return Of Aset*) BUMD	%	1,93		
	Tingkat Kematangan UKPBJ	%	100		
JUMLAH				**52.014.462.835**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

b. Unsur Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
   Program ini difokuskan pada penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan peran legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara efektif.

Tabel 5.33.

Program dan Perkiraan Pendanaan Unsur Sekretariat DPRD Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,90	42.249.739.565	Sekretariat DPRD
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun	%	100	11.136.838.850	Sekretariat DPRD
JUMLAH				**53.386.578.415**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   Program ini difokuskan pada penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi hasil pembangunan untuk memastikan pencapaian sasaran dan efektivitas program.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   Program ini difokuskan pada koordinasi antar instansi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan agar berjalan secara harmonis dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.

Tabel 5.34.

Program dan Perkiraan Pendanaan Bidang Unsur Perencanaan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,50	5.824.778.846	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	%	90,80	500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD	%	100,00		
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang PPM	Angka	40,50	700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Ekonomi SDA	Angka	40,50		
	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Angka	40,50		
JUMLAH				**7.024.778.846**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

b. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   Program ini difokuskan pada pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta memastikan keberlanjutan fiskal daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Program ini difokuskan pada pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien, termasuk pencatatan, pemeliharaan,

dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
   Program ini difokuskan pada pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai sumber pendapatan, baik dari pajak, retribusi, maupun sumber lain, untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel 5.35.

Program dan Perkiraan Pendanaan Bidang Unsur Keuangan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,5	48.771.798.626	Badan Keuangan Daerah
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan APBD	%	100,00	237.939.209.432	Badan Keuangan Daerah
	Persentase realisasi anggaran	%	100,00		
	Persentase pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	100,00		
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	%	100,00	831.475.672	Badan Keuangan Daerah
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	%	52,00	4.292.195.410	Badan Keuangan Daerah
	Persentase piutang pajak yang tertagih	%	91,30		
JUMLAH				**291.834.679.140**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

c. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah
   Program ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karier, serta pemberian layanan kepegawaian yang efisien dan berkualitas.

Tabel 5.36.

Program dan Perkiraan Pendanaan Bidang Unsur Kepegawaian Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71	6.590.372.387	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	%	95	571.050.900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tingkat kinerja ASN	%	95		
JUMLAH				**7.161.423.287**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

d. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk mendukung kemajuan di berbagai sektor.

Tabel 5.37.
Program dan Perkiraan Pendanaan Bidang Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	28,00	656.959.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
JUMLAH				**656.959.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

e. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Riset dan Inovasi Daerah
   Program ini difokuskan pada pengembangan riset dan inovasi untuk mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan daya saing daerah, serta menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan daerah.

Tabel 5.38.
Program dan Perkiraan Pendanaan Bidang Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM RISET DAN INOVASI	Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan dan atau inovasi	%	36	400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
JUMLAH				**400.000.000**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
   Program ini difokuskan pada pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan peningkatan akuntabilitas.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
   Program ini difokuskan pada penyusunan kebijakan yang tepat dan penyediaan pendampingan serta asistensi untuk mendukung implementasi kebijakan di tingkat daerah secara efektif.

Tabel 5.39.
Program dan Perkiraan Pendanaan Bidang Unsur Pengawasan Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,25	8.905.195.426	Inspektorat Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	%	95,50	1.894.169.000	Inspektorat Daerah
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi	%	59,00	1.105.831.000	Inspektorat Daerah
	Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	8,00		

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
	Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis	Angka	36,00		
JUMLAH				**11.905.195.426**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

5.1.7. Unsur Kewilayahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Program ini difokuskan pada menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban di masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik yang optimal.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Program dan perkiraan pendanaan untuk urusan Kewilayahan tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.40.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kewilayahan Tahun 2027

NO	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH
		RKPD 2027	RKPD 2027	RKPD 2027	RKPD 2027	RKPD 2027	RKPD 2027	RKPD 2027
1	JATIPURO	2.337.429.793	18.749.050	29.126.400	10.777.000	95.623.500	30.183.200	**2.521.888.943**
2	JATIYOSO	1.969.617.365	5.600.000	22.160.000	11.500.250	86.650.000	17.840.000	**2.113.367.615**
3	JUMANTONO	2.067.736.556	14.756.400	22.311.100	7.130.550	91.146.700	21.780.600	**2.224.861.906**
4	JUMAPOLO	2.083.787.826	7.000.000	21.600.000	10.500.000	99.550.000	30.550.000	**2.252.987.826**
5	MATESIH	2.441.313.515	1.554.800	16.000.000	5.000.000	85.675.000	13.000.000	**2.562.543.315**
6	TAWANGMANGU	4.830.677.765	899.250	2.070.981.350	32.356.800	561.824.100	7.000.000	**7.503.739.265**
7	NGARGOYOSO	2.542.600.431	10.040.000	21.438.500	5.760.000	99.098.500	36.380.000	**2.715.317.431**
8	KARANGPANDAN	2.436.844.204	39.127.750	38.622.000	22.360.000	62.650.250	52.240.000	**2.651.844.204**
9	KARANGANYAR	14.251.118.193	3.180.050	10.396.143.300	81.337.700	2.264.189.500	-	**26.995.968.743**
10	TASIKMADU	2.349.017.615	8.230.000	28.361.370	10.100.000	107.266.000	25.000.000	**2.527.974.985**
11	JATEN	2.465.742.077	2.590.100	27.831.000	5.350.000	162.447.400	16.781.500	**2.680.742.077**
12	COLOMADU	2.802.266.139	7.421.000	18.888.000	9.712.200	84.145.000	28.944.400	**2.951.376.739**
13	GONDANGREJO	2.526.731.632	10.000.000	25.000.000	6.000.000	86.600.000	23.000.000	**2.677.331.632**
14	MOJOGEDANG	2.194.618.474	17.100.000	30.260.000	4.817.200	97.406.000	33.672.000	**2.377.873.674**
15	KEBAKKRAMAT	2.272.739.308	13.417.100	17.244.550	6.480.000	93.085.000	25.020.000	**2.427.985.958**
16	KERJO	2.336.189.360	6.135.040	25.538.500	1.024.000	122.857.000	30.035.000	**2.521.778.900**
17	JENAWI	2.185.412.827	17.358.000	18.500.000	6.750.000	109.023.000	29.599.000	**2.366.642.827**
JUMLAH		**54.093.843.080**	**183.158.540**	**12.830.006.070**	**236.955.700**	**4.309.236.950**	**421.025.700**	**72.074.226.040**

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   Program ini difokuskan pada penguatan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang mendidik, beretika, dan mengembangkan budaya politik yang sehat di masyarakat.
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   Program ini difokuskan pada pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial terhadap pembangunan serta pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
   Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan zaman dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
   Program ini difokuskan pada peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat merusak stabilitas nasional serta peningkatan kapasitas dalam penanganan dan penyelesaian konflik sosial di masyarakat.
5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   Program ini difokuskan pada memperkuat pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila serta pengembangan karakter kebangsaan untuk membentuk masyarakat yang bersatu, adil, dan sejahtera.

Tabel 5.41.

Program dan Perkiraan Pendanaan Unsur Pemerintahan Umum

Tahun 2027

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,75	4.246.633.424	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Kecamatan	17	1.089.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	37,75	1.834.119.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANI SASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	54,50	8.363.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kecamatan	17	173.007.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Persentase kecamatan yang dilakukan pemantauan wilayah	%	100	1.092.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
JUMLAH				**16.798.359.424**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, diolah

5.2. Rencana Pendanaan Tahun 2027

Memperhatikan hasil perhitungan kemampuan pendanaan tahun 2027 pada Bab III sebesar **Rp. 1.992.332.851.804,-.** Dana tersebut akan digunakan untuk melaksanaan program dan kegiatan, yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tahun 2027. Dana tersebut harus dikurangi untuk belanja wajib yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 (Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.42.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2027

No	URAIAN	Jumlah
1	PENDAPATAN	1.930.332.851.804
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran	62.000.000.000
	Total Kemampuan Pendanaan 2027	**1.992.332.851.804**
	Dikurangi	**987.028.341.737**
1.	Belanja Pegawai	978.028.341.737
2.	Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000
	Kapasitas Riil	**1.005.304.510.067**

Sumber: BKD dan Baperlitbang 2025, diolah

Dari total kapasitas riil sebesar **Rp. 1.005.304.510.067.-** wajib dibelanjakan untuk belanja lainnya seperti :

1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2027;
2) Kegiatan Bagi Hasil Pajak Retribusi Desa (10%);
3) Kegiatan Alokasi Dana Desa;
4) Kegiatan Dana Desa (10%) dana Perimbangan tidak termasuk DAK;
5) Kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas (JKN);
6) Kegiatan Dana Kelurahan (sebesar minimal sama dengan ADD terkecil kali 12 kelurahan), dll.

Tabel 5.43.

Rencana Program Prioritas Mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		**Indeks Reformasi Birokrasi**			
	Sasaran 1: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	**Nilai SAKIP**	**Prioritas 2 Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik"**		
				URUSAN PERENCANAAN	**7.024.778.846**
				1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	500.000.000
				2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	700.000.000
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.824.778.846
				URUSAN KEUANGAN	**291.834.679.140**
				1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	237.939.209.432
				2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	831.475.672
				3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.292.195.410
				4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.771.798.626
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)	**52.014.462.835**
				1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.480.000.000
				2. Program Perekonomian Dan Pembangunan	11.209.271.000

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.325.191.835
		Maturitas SPIP			
				UNSUR PENGAWASAN (INSPEKTORAT DAERAH)	**11.905.195.426**
				1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.894.169.000
				2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.105.831.000
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.905.195.426
				URUSAN KEPEGAWAIAN	**7.161.423.287**
				1. Program Kepegawaian Daerah	571.050.900
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.590.372.387
				URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**656.959.000**
				1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	656.959.000
				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**7.451.264.453**
				1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	659.086.000
				2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.180.000.000
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.612.178.453
				URUSAN STATISTIK	**10.000.000**
				1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	10.000.000
				URUSAN PERSANDIAN	**50.000.000**

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	50.000.000
				URUSAN KEARSIPAN	**103.529.000**
				1. Program Pengelolaan Arsip	103.529.000
		Indeks Pelayanan Publik			
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)	**53.386.578.415**
				1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	11.136.838.850
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.249.739.565
				URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**5.645.114.288**
				1. Program Pendaftaran Penduduk	962.005.500
				2. Program Pencatatan Sipil	50.000.000
				3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	31.940.000
				4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	8.060.000
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.593.108.788
				URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN)	**72.074.226.040**
				1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	183.158.540
				2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12.830.006.070
				3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	236.955.700

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.309.236.950
				5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	421.025.700
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.093.843.080
TJ 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kondusivitas wilayah		**Kontribusi Penurunan Emisi GRK Komulatif** **Kasus Konflik SARA**			
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup"	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	**Prioritas 5 Memperkuat kualitas lingkungan hidup**		**18.689.883.327**
				URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	**14.272.764.107**
				1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	60.000.000
				2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	90.000.000
				3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	30.000.000
				4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	25.000.000
				5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15.000.000
				6. Program Pengelolaan Persampahan	2.860.000.000
				7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.192.764.107
				URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**4.417.119.220**

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				1. Program Penanggulangan Bencana	1.124.204.000
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.292.915.220
	Sasaran 3: Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	**Angka Kriminalitas**	**Prioritas 3. Memperkuat kondusivitas wilayah**		**31.842.169.177**
				URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**15.043.809.753**
				1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.166.884.500
				2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	140.000.000
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.736.925.253
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (BAKESBANGPOL)	**16.798.359.424**
				1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.089.000.000
				2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.834.119.000
				3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.363.000.000
				4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	173.007.000

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.092.600.000
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.246.633.424
TJ 3) Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar		**Indeks Daya Saing Daerah**			
	Sasaran 4: Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Prioritas 2. Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**		**1.144.641.694.731**
				URUSAN PENDIDIKAN	**733.943.996.542**
				1. Program Pengelolaan Pendidikan	139.332.126.050
				2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	12.516.550
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	594.599.353.942
				URUSAN KEBUDAYAAN	**2.030.000.000**
				1. Program Pengembangan Kebudayaan	800.000.000
				2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.130.000.000
				3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100.000.000
				URUSAN KESEHATAN	**376.685.997.884**
				1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	74.247.467.100
				2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	588.400.000
				3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	392.549.900

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	350.000.000
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	301.107.580.884
				URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**7.948.440.000**
				1. Program Pengendalian Penduduk	115.000.000
				2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.928.015.000
				3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.905.425.000
				URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**6.219.196.464**
				1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	170.000.000
				2. Program Perlindungan Perempuan	160.851.000
				3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	5.000.000
				4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	10.000.000
				5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.000.000
				6. Program Perlindungan Khusus Anak	219.036.000
				7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.316.309.464
				URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**12.857.100.000**
				1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.287.500.000

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.719.600.000
				3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	850.000.000
				URUSAN PERPUSTAKAAN	**4.956.963.841**
				1. Program Pembinaan Perpustakaan	671.375.000
				2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	23.625.000
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.261.963.841
	Sasaran 5: **Meningkatnya riset dan inovasi**	**Kapabilitas inovasi**	**Prioritas 2.** **Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**		**400.000.000**
				URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**400.000.000**
				1. Program Riset Dan Inovasi Daerah	400.000.000
	Sasaran 6: **Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Prioritas 1.** **Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif**		
				URUSAN TENAGA KERJA	**1.998.237.950**
				1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.355.329.450
				2. Program Penempatan Tenaga Kerja	394.908.500
				3. Program Hubungan Industrial	248.000.000
				URUSAN PERINDUSTRIAN	**505.000.000**
				1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	442.750.000
				2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	8.250.000
				3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	54.000.000
				URUSAN PERDAGANGAN	**16.320.308.540**
				1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	14.450.000
				2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.569.197.500

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	76.351.500
				4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	129.000.000
				5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	250.000.000
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.281.309.540
				URUSAN PARIWISATA	**9.089.389.813**
				1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	613.000.000
				2. Program Pemasaran Pariwisata	1.375.150.000
				3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	14.850.000
				4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	560.000.000
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.526.389.813
				URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	**5.000.000**
				1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	5.000.000
				URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**9.702.128.259**
				1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	10.000.000
				2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	40.000.000

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	35.000.000
				4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	450.000.000
				5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	600.000.000
				6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	290.000.000
				7. Program Pengembangan UMKM	4.509.500.000
				8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.767.628.259
				URUSAN PENANAMAN MODAL	**7.865.513.155**
				1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	120.000.000
				2. Program Promosi Penanaman Modal	135.000.000
				3. Program Pelayanan Penanaman Modal	70.000.000
				4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	10.000.000
				5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5.000.000
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.525.513.155
	Sasaran 7: Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Prioritas 1. Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif**		**28.858.625.278**
				URUSAN PANGAN	**100.000.000**
				1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	75.000.000
				2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	5.000.000

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	20.000.000
				URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	**218.000.000**
				1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	181.000.000
				2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12.000.000
				3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	25.000.000
				URUSAN PERTANIAN	**22.082.875.278**
				1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.188.000.000
				2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.315.000.000
				3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	66.000.000
				4. Rogram Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	60.000.000
				5. Program Penyuluhan Pertanian	63.000.000
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.390.875.278
				URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**6.457.750.000**
				1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.457.750.000
TJ 4) Meningkatnya kesejahteraan		**Tingkat Kemiskinan**			**204.096.690.844**
	Sasaran 8: Meningkatnya pendapatan masyarakat	**Indeks gini**	**Prioritas 4. Mempercepat kualitas infrastruktur**		**204.096.690.844**
				URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**138.052.472.102**

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
masyarakat yang semakin merata	**dalam mengurangi ketimpangan pendapatan**			1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.765.000.000
				2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	750.000.000
				3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	263.000.000
				4. Program Penataan Bangunan Gedung	950.000.000
				5. Program Penyelenggaraan Jalan	110.204.127.950
				6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000
				7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	465.100.000
				8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.555.244.152
				URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**1.098.000.000**
				1. Program Pengembangan Perumahan	120.000.000
				2. Program Kawasan Permukiman	385.000.000
				3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	573.000.000
				4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	20.000.000
				URUSAN PERHUBUNGAN	**39.955.165.013**
				1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	31.470.782.420
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.484.382.593
				URUSAN PERTANAHAN	**258.900.000**

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				1. Program Penatagunaan Tanah	258.900.000
				URUSAN SOSIAL	**6.007.703.813**
				1. Program Pemberdayaan Sosial	54.000.000
				2. Program Rehabilitasi Sosial	434.000.000
				3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	984.705.000
				4. Program Penanganan Bencana	93.345.000
				5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	24.000.000
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.417.653.813
				URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**18.714.449.916**
				1. Program Penataan Desa	62.500.000
				2. Program Peningkatan Kerjasama Desa	65.000.000
				3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.562.192.000
				4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	8.320.700.000
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.704.057.916
				URUSAN TRANSMIGRASI	**10.000.000**
				1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10.000.000
JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2027					**1.983.332.851.804**

Rekapitulasi dukungan anggaran belanja program tahun 2027 untuk masing-masing prioritas daerah, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.44.

Dukungan Anggaran Belanja Program Tahun 2027
terhadap Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp)
1.	Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif	74.344.202.995
2.	Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.654.359.905.461
3.	Memperkuat kondusivitas wilayah	31.842.169.177
4.	Mempercepat kualitas infrastruktur	204.096.690.844
5.	Memperkuat kualitas lingkungan hidup	18.689.883.327
TOTAL ANGGARAN (Rp)		**1.983.332.851.804**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. **Indikator Kinerja** adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar disusun untuk memberikan pedoman atau panduan pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai oleh instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi yang baik didalam tubuh instansi tersebut sehingga Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dicapai.

Adapun matrik Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2027 sebagaimana Tabel 6.1. dan Tabel 6.2.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2027

Indikator		Satuan	Target RKPD 2027
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	88,00
2.	Nilai SAKIP	Nilai	71,50
3.	Maturitas SPIP	Level	3,310
4.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,57
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	72,49
6.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,88
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,95
8.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,15
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	76,30
10.	Tingkat Kemiskinan	%	7,50

Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, 2026

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

Tabel 6.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2027

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
A.	**TUJUAN DAN SASARAN DAERAH**				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	87,00	87,21	88,00
2.	Nilai SAKIP	Nilai	71,50	68,21	71,50
3.	Maturitas SPIP	Level	3,31	3,13	3,31
4.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,57	4,41	4,57
5.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	2.424.679,2	106.655,93	2.424.679,2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
6.	Kasus Konflik SARA	Kasus	0	0	0
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	72,49	70,69	72,49
8.	Angka Kriminalitas	Angka per 10.000 penduduk	168	NA	168
9.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,88	3,85	3,88
10.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,42	78,67	79,95
11.	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,22	NA	3,22
12.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,27	5,75	6,15
13.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,80	75,45	76,30
14.	Tingkat Kemiskinan	%	8,71	8,48	7,50
15.	Indeks Gini	Angka	0,336	0,332	0,336
B.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,80	75,45	76,30
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment)*	%	7,00	6,09	6,05
3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	45,69	43,70	45,69
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,49	70,69	72,49
5.	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,20	3,44	6,20
6.	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	%	3,50	3,40	3,50
7.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif	TonCO2eq	2.424.679,20	106.655,93	2.424.679,20
8.	Indeks Risiko Bencana	Angka	85,68	82,14	81,14
C.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1.	Tingkat Kemiskinan	%	8,71	8,48	7,50
2.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	66,63	56,88	66,63
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,24	3,26	2,90
4.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,34	14,44	19,34
5.	Usia Harapan Hidup	Tahun	78,79	78,00	78,79
6.	Total *Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total	Jiwa	1,99	1,83	1,99
7.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	77,69	64,00	77,69
8.	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	f9,40	9,00	9,40
9.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,82	5,1	12,82
10.	Persentase Penduduk Penerima PKG	%	55,00	NA	55,00
11.	Cakupan Imunisasi bayi lengkap	%	100,00	107,00	100,00
12.	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	30,00	100,00	30,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
13.	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	67,90	NA	67,90
14.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5,00	6,00	5,00
15.	Jumlah Kasus Kematian balita	Kasus	104,00	81,00	104,00
16.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage)*	%	91,31	62,69	91,31
17.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	93,02	90,00	93,02
18.	Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari ULD	Orang	35,00	70,00	35,00
19.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,28	9,27	10,28
20.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,09	13,75	14,09
21.	Angka Literasi/Numerasi				
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	72,70	61,51	72,70
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	82,00	80,24	82,00
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	65,90	51,86	65,90
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	72,13	68,89	72,13
22.	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	85,85	81,61	85,85
23.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11,35	NA	11,35
24.	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	8,27	53,22	53,30
25.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/ kota	%	33,08	NA	33,08
26.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,81	92,6	95,81
27.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	95,80	100,00	95,80
28.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	32,00	30,13	32,00
29.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	21,70	23,00	21,70
30.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	129.500,00	NA	129.500,00
31.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,259	0,215	0,259
32.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,69	75,40	75,50
33.	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,63	0,57	0,63
D.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,08	65,06	65,20
2.	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,22	NA	3,22
3.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	78,57	NA	78,57
4.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,9	4,37	4,47
5.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	47,67	46,84	47,67
6.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	5.700,00	9.497,00	9.507,00
7.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,06	NA	4,06
8.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	4,74	1,25	4,74
9.	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	1,82	NA	1,82
10.	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	1,8	NA	1,8
11.	*Return on Aset (ROA) BUMD*	%	1,93	1,29	1,93
12.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	23,97	NA	23,97
13.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	84	83,44	84
14.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	52,2	0,30	52,2
15.	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	75,5	74,00	75,5
16.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	93,5	93,64	93,64
17.	Persentase Status Desa Mandiri	%	22,22	27,78	22,22
18.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,52	NA	0,52
19.	Disparitas Harga	%	± 10	0,65	0,64
20.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,44	4,79	4,86
E.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	87,00	87,21	88,00
2.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	99,50	100,00	99,50
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,69	4,03	3,69
4.	Indeks Pemerintah Digital	Angka	2,25	NA	2,25
5.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,57	4,41	4,57
6.	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,30	68,71	82,30
7.	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0,00	0,00	0,00
F.	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
Urusan Pendidikan					
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	100,00	100,00
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	100,00
Urusan Kesehatan					
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1,00	1,00	1,00
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00
6.	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00
11.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	%	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota					
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	75,50	74,00	75,50
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,60	99,40	99,60
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,50	99,89	99,89
4.	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100,00	100,00	100,00
5.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	84,00	83,44	84,00
6.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	96,00	94,00	96,00
7.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	0	100,00
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	69,55	58,73	69,55
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,62	3,00	2,62
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100,00	100,00	100,00
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
7.	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	menit	15,00	9,13	15,00
Urusan Sosial					
1.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00
2.	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00
Urusan Tenaga Kerja					
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75,00	100,00	100,00
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	59,00	NA	59,00
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	59.500.000,00	60.765.000,00	60.805.000,00
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	63,00	30,87	63,00
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	82,00	80,53	82,00
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,00	11,51	11,55
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk	4,17	4,17	4,17
Urusan Pangan					
1.	Persentase Cadangan Pangan	%	22,38	19,58	22,38
Urusan Pertanahan					
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100,00	100,00	100,00
3.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	100,00	100,00
4.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00
Urusan Lingkungan Hidup					
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	72,49	70,69	72,49
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	99,30	99,16	99,30
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	67,50	73,84	73,85
3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,30	99,39	99,40
4.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	64,00	64,00	64,00
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.	Persentase Status Desa Mandiri	%	22,22	27,78	22,22
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,99	1,90	1,99
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,75	66,34	70,75
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,80	7,9	7,80
Urusan Perhubungan					
1.	Rasio konektivitas	indeks	68,00	0,1	0,1
2.	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	ratio	0,66	0,86	0,66
Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100,00	NA	100,00
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	NA	100,00
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	92,00	NA	92,00
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	64,90	64,70	64,90
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	25,00	20,58	25,00
Urusan Penanaman Modal					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	0,25	0,25	0,25
Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	45,00	35,00	45,00
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	12,00	10,00	12,00
3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Unit/Medali	45,00	92,00	45,00
Urusan Statistik					
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	78,00	NA	78,00
2.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	78,00	NA	78,00
Urusan Persandian					
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	66	NA	66
Urusan Perpustakaan					
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	70,8	57,45	57,50
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	75,6	11,43	11,45
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100,00	100,00	100,00
4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	72,00	83,33	83,40
Urusan Kelautan dan Perikanan					
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Kg	2.530.747,00	2.476.563,00	2.530.747,00
Urusan Pariwisata					
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	57,50	14,10	57,50
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	14,00	12,00	14,00
3.	Tingkat hunian akomodasi	%	32,00	31,58	32,00
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	4,00	3,45	4,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	6,00	5,00	6,00
Urusan Pertanian					
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, porang)	Ton/Ha	7,72	7,75	7,77
2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-4,17	-90,62	-4,17
Urusan Perdagangan					
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	77,00	100,00	100,00
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	Sudah bergeser ke DISPERTANPP		
3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	79,00	88,06	88,10
Urusan Perindustrian					
1.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	35,20	42,76	48,10
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	93,00	98,50	98,65
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Menengah Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	0,00	0,00
6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	75,00	73,00	75,00
Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)					
1.	Rasio PAD	%	15,56	25,00	15,56
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,30	3,10	3,30

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	RPJMD Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027	Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2027
3.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,10	1,90	3,10
4.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi *Transfer Expenditures*)	%	0,75	75,46	0,75
5.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	wtp	WTP
Urusan Pemerintahan (Pengadaan)					
1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	74,00	53,11	74,00
2.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	50,00	32,28	50,00
3.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	20,00	93,70	20,00
Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)					
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	182,80	66,32	182,80
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,70	25,42	27,70
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80,60	76,24	80,60
Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)106,95					
1.	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	91,21	95,38	91,21
2.	*Revenue mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	108,35	106,95	108,35
3.	*Assets Management*	%	100,00	100,00	100,00
4.	*Cash Management*: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,56	6,15	7,56

Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, 2026

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2027 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun 2027, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2027.

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan, termasuk warga masyarakat dan dunia usaha turut berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan atau APBN semua Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2027;
3. Masyarakat dan dunia usaha (swasta) dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat membantu dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD Tahun 2027, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Karanganyar melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergisitas, dan konsistensi RKPD Tahun 2027 ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2027 yang memuat prioritas dan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2027;
5. Untuk dapat mengakomodir/menyesuaikan perkembangan daerah yang muncul/baru, permasalahan yang muncul, perubahan kebijakan, kemampuan pendanaan dan lain-lain, RKPD ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO